



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2010-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 150 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung 2005-2025;
 - c. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun memiliki sinkronisasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di-maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbe-daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor: 28 Tahun 2010, Nomor: 0199/ M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 8 Tahun 2011;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 5), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 tahun 2011;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 6), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 9 Tahun 2012;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 Nomor 7);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2012 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dan

BUPATI SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2010–2015.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung.
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sijunjung.
7. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan dan berdaya saing.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten selanjutnya disingkat RTRWK adalah rencana struktur tata ruang Kabupaten Sijunjung yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, sesuai masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung yang terpilih.
14. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Sijunjung untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan terukur dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
23. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
24. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

BAB II KEDUDUKAN Pasal 2

RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 merupakan :

- a. Penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
- b. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

BAB III AZAS DAN TUJUAN Pasal 3

- (1) RPJMD disusun berdasarkan asas:
 - a. demokrasi;
 - b. berkeadilan;
 - c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - d. transparansi;
 - e. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - f. berkelanjutan; dan
 - g. berwawasan lingkungan.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031.

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Sijunjung bertujuan untuk menjadi pedoman dalam:

- a. Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program prioritas pembangunan lima tahunan agar mekanisme perencanaan pembangunan daerah berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah;
- b. Penyusunan Renstra SKPD dan RKPD; dan
- c. Menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup RPJMD meliputi :
 - a. visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih ;
 - b. arah kebijakan keuangan daerah;
 - c. strategi pembangunan daerah;
 - d. kebijakan umum;
 - e. program SKPD;
 - f. program lintas SKPD;
 - g. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
 - h. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih.
- (3) Arah kebijakan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- (4) Strategi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan dan berdaya saing.
- (5) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai tahapan dan jadwal pelaksanaan program prioritas beserta kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.
- (6) Program SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (7) Program Lintas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, tahun pelaksanaan dan sumber daya yang diperlukan.
- (8) Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, sebagai dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

- (9) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

BAB V
DOKUMEN RPJMD TAHUN 2010-2015
Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- Bab I : Pendahuluan
 - Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan
 - Bab IV : Analisis Isu-Isu Strategis
 - Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
 - Bab VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
 - Bab VIII : Indikasi Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
 - Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
 - Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
- (2) Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut terhadap RPJMD Tahun 2010-2015, dituangkan dalam rencana tahunan pada RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- (2) RPJMD Tahun 2010-2015 wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.

Pasal 9

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Bappeda.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.

- (4) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD.
- (5) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah, telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah, telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (6) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 10

- (1) Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.
- (4) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat dalam RKPD tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar yaitu suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan DPRD.

Pasal 11

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, DPRD melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah lainnya yang terkait dengan rencana pembangunan daerah.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2016 berpedoman pada sasaran pokok RPJPD Kabupaten Sijunjung tahun 2005-2025 dan sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2010-2015 serta memperhatikan sasaran dan arah kebijakan pembangunan RPJMN tahun 2015-2019.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (3) Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 melalui Peraturan Daerah, maka Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 42 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung

Ditetapkan di Muaro Sijunjung,
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung,
pada tanggal 17 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ADE TAUFIK ROHENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2014 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


ERMAWATI. B, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19660603 199803 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2010-2015

I. UMUM

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis posisi astronomis Kabupaten Sijunjung berada pada 0° 18' 43" Lintang Selatan (LS) sampai dengan 1° 41' 46" Lintang Selatan (LS) dan dari 100° 37' 40" Bujur Timur (BT) sampai dengan 101° 30' 52" Bujur Timur (BT). Posisi Kabupaten Sijunjung berada di bagian Timur Provinsi Sumatera Barat, pada jalur utama yang menghubungkan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Mengingat letaknya di persimpangan jalur tersebut, Kabupaten Sijunjung merupakan jalur ekonomi dan jalur pariwisata yang sangat strategis.

Secara wilayah administrasi luas wilayah Kabupaten Sijunjung telah mengalami tiga kali perubahan sejak terbentuk pada tanggal 18 Februari 1949 melalui Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatra Barat Nomor: SK/9/GN/IST dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956. Perubahan terakhir terjadi ketika dilakukannya pembentukan Kabupaten Dharmasraya melalui Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2003 dimana wilayahnya merupakan 49 persen dari wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, sehingga luas wilayahnya sekarang menjadi 313.080 ha. Luas tersebut setara dengan 7,40% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat dan merupakan kabupaten nomor dua terkecil di Provinsi Sumatra Barat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil- hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Berdasarkan pasal 11, ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati terpilih dan diuraikan kedalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan serta arah kebijakan keuangan yang menjadi landasan SKPD dalam mengimplementasikan program pembangunan sesuai dengan target indikator kinerja.

Sedangkan periodisasi RPJMD Kabupaten Sijunjung adalah 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2010-2015 atau sama dengan masa bakti Bupati/Wakil Bupati Sijunjung yang terpilih secara langsung pada Pemilu pada tahun 2010 dan dilantik pada tanggal 22 September 2010. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 secara operasional dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Sijunjung yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah Kabupaten Sijunjung.

RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 merupakan tahapan pembangunan yang kedua dari empat tahapan pembangunan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 yang merupakan penjabaran dari cita-cita masyarakat Kabupaten Sijunjung, yaitu; “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sijunjung yang Madani”. Oleh karena itu, periode 5 (lima) tahun mendatang tahapan pembangunan dititik beratkan kepada pemantapan akselerasi penataan pembangunan daerah dengan kemajuan kesejahteraan masyarakat dan penguatan basis perekonomian daerah.

RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun mendatang, yaitu : “Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata’. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

- 1) Mewujudkan penataan dan penguatan ekonomi masyarakat;
- 2) Meningkatkan Kecerdasan, Keterampilan dan Kesehatan serta IMTAQ SDM Anak Nagari;
- 3) Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur serta Prasarana Dasar Nagari;
- 4) Pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung;
- 5) Mengentaskan Kemiskinan dan Ketertinggalan;
- 6) Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Adil, Peduli dan Berwibawa;
- 7) Mewujudkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan;
- 8) Revitalisasi Adat dan Seni Budaya Anak Nagari.

Misi ini dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang diimplementasikan kedalam strategi dan arah kebijakan pembangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung ini terdiri dari 8 bab dan 14 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, kedudukan, asas dan tujuan, ruang lingkup dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini berimplikasi terhadap dicabutnya dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015 yang selama ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah. Penetapan RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 melalui Peraturan Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dikuatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 6 tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penetapan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 ini melalui Peraturan Daerah merupakan tindaklanjut dari salah satu rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap penilaian Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Sijunjung tahun 2011, dimana Pemerintah Kabupaten Sijunjung agar melakukan perbaikan RPJMD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Rekomendasi tersebut baru keluar pada bulan Oktober 2012, sehingga pelaksanaan kegiatan perbaikan RPJMD baru dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013 ini.

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung ini berikut lampirannya dan dilengkapi dengan Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "demokrasi" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah bahwa rencana pembangunan jangka menengah harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
- Pasal 6
Ayat (1)
Sistematika penyusunan dokumen RPJMD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang terdapat dalam pasal 40 ayat 2.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2010-2015

DAFTAR ISI

Daftar Isi	I	
Daftar Tabel	iii	
Daftar Gambar	vi	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3.	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	4
1.4.	Sistematika Penulisan	8
1.5.	Maksud dan Tujuan	9
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1.	Aspek Geografi dan Demografi	11
2.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	23
2.3.	Aspek Pelayanan Umum	35
2.4.	Aspek Daya Saing	75
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN	
3.1.	Kinerja Keuangan Tahun 2006-2010	80
3.2.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2006-2010	88
3.3.	Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015	90
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS	
4.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah	95
4.2.	Isu-isu Strategis	104
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
5.1.	Visi	112
5.2.	Misi	113
5.3.	Tujuan dan Sasaran	115
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
6.1.	Strategi	125
6.2.	Arah Kebijakan	127
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	
7.1.	Kebijakan Umum	141
7.2.	Program Pembangunan Daerah	151

BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PEDANAAN	
8.1.	Indikasi Rencana Program Prioritas	191
8.2.	Indikasi Kebutuhan Pendanaan	197
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH	
9.1.	Penentuan Indikator Kinerja	229
9.2.	Indikator dan Target Kinerja	229
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN	
10.1.	Pedoman Transisi	235
10.2.	Kaidah Pelaksanaan	235

Lampiran :

1. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD.
2. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor ; 533/XI/SPP/Bappeda-20013, tanggal 27 November 2013 perihal Saran Penyempurnaan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015.

DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel 1.1.	Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031	6
Tabel 2.1.	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan se-Kabupaten Sijunjung	12
Tabel 2.2.	Perkembangan Iklim di Kabupaten Sijunjung 2005, 2007 dan 2009	14
Tabel 2.3.	Luas Penggunaan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2009	16
Tabel 2.4.	Potensi Wisata Kabupaten Sijunjung Menurut Kecamatan	18
Tabel 2.5.	Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2010	20
Tabel 2.6.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2010	20
Tabel 2.7.	Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Miskin periode 2006 – 2009	21
Tabel 2.8.	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap Total PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	25
Tabel 2.9.	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	26
Tabel 2.10.	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 – 2010	28
Tabel 2.11.	Perkembangan Pendapatan Per kapita Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2010	28
Tabel 2.12.	Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar/Penduduk Usia Sekolah (7-12 Tahun) di Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	37
Tabel 2.13.	Rasio Guru Sekolah Dasar Terhadap Murid di Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	37
Tabel 2.14.	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia SLTP (13-15 Tahun) di Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	38
Tabel 2.15.	Rasio Guru SMP Terhadap Murid di Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	38
Tabel 2.16.	Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia SLTA (16-18 Tahun) di Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	38
Tabel 2.17.	Rasio Guru Sekolah Menengah Atas Terhadap Murid di Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	39
Tabel 2.18.	Rasio Fasilitas Kesehatan terhadap Per Satuan Penduduk di Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	44
Tabel 2.19.	Rasio Dokter dan Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk di Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	45
Tabel 2.20.	Kondisi Jembatan berdasarkan Jenis Kerusakan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	46
Tabel 2.21.	Kondisi Jaringan Irigasi berdasarkan Jenis Kerusakan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	47
Tabel 2.22.	Kondisi Jaringan Drainase berdasarkan Jenis Kerusakan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	47
Tabel 2.23.	Alat Angkut Penanganan Sampah yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010	47
Tabel 2.24.	Produksi dan Penanganan Sampah Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	48
Tabel 2.25.	Wlayah Yang Dialiri 8 Sungai Besar di Kabupaten Sijunjung	48
Tabel 2.26.	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	50
Tabel 2.27.	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	50
Tabel 2.28.	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	52
Tabel 2.29.	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	52
Tabel 2.30.	Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	53
Tabel 2.31.	Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 –	54

	2010	
Tabel 2.32.	Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	55
Tabel 2.33.	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	56
Tabel 2.34.	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	59
Tabel 2.35.	Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	59
Tabel 2.36.	Perkembangan Gangguan Kamtibmas Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	60
Tabel 2.37.	Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sijunjung 2006-2010	61
Tabel 2.38.	Capaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	61
Tabel 2.39.	Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung 2006-2010	64
Tabel 2.40.	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010	65
Tabel 2.41.	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sijunjung 2006-2010	66
Tabel 2.42.	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten Sijunjung 2006-2010	69
Tabel 2.43.	Luas Panen Produktif dan Jumlah Produksi Komoditi Pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2010	70
Tabel 2.44.	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Sijunjung 2007-2010	71
Tabel 2.45.	Perkembangan Luas Produksi Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2010	73
Tabel 2.46.	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Sijunjung 2006-2010	74
Tabel 2.47.	Capaian Kinerja Urusan industri Kabupaten Sijunjung 2006-2010	75
Tabel 2.48.	Aspek Kemampuan Ekonomi Kabupaten Sijunjung 2006-2010	76
Tabel 2.49.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Sijunjung 2006-2010	76
Tabel 3.1.	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2010	81
Tabel 3.2.	Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Sijunjung, 2006-2010	82
Tabel 3.3.	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010	83
Tabel 3.4.	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sijunjung, 2008-2010	84
Tabel 3.5.	Rasio Lancar Kabupaten Sijunjung Tahun 2008-2010	87
Tabel 3.6.	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Sijunjung Tahun 2008-2010	88
Tabel 3.7.	Opini BPK terhadap LKD Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2010	89
Tabel 3.8.	Perkembangan Persentase SILPA Kabupaten Sijunjung untuk Pendaanana APBD tahun 2006-2010	90
Tabel 3.9.	Estimasi Penerimaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015	91
Tabel 3.10.	Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai BTL Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010	90
Tabel 3.11.	Perkembangan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010	92
Tabel 3.12.	Perkiraan Belanja Pegawai Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015	93
Tabel 3.13.	Perkiraan Kapasitas Riil Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015	93
Tabel 3.14.	Pendanaan Prioritas Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015	94
Tabel 5.1.	Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015 dengan RPJMN 2009-2014 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2014	116
Tabel 5.2.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 1	117
Tabel 5.3.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 2	118
Tabel 5.4.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 3	119
Tabel 5.5.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 4	119
Tabel 5.6.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 5	120
Tabel 5.7.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 6	121
Tabel 5.8.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 7	122
Tabel 5.9.	Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 8	122
Tabel 5.10.	Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	123

Tabel 6.1.	Analisa SWOT	127
Tabel 6.2.	Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 1	128
Tabel 6.3.	Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 2	130
Tabel 6.4.	Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 3	132
Tabel 6.5.	Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 4	133
Tabel 6.6.	Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 5	134
Tabel 6.7.	Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 6	135
Tabel 6.8.	Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 7	136
Tabel 6.9.	Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 8	137
Tabel 7.1.	Hubungan antara Misi, Agenda dan Prioritas Pembangunan Daerah	150
Tabel 7.2.	Sinkronisasi antara Prioritas Nasional, Prov. Sumatera Barat dengan Prioritas Kabupaten Sijunjung	151
Tabel 7.3.	Kebijakan Umum, Prioritas dan Program Pembangunan Untuk Misi 1 : Mewujudkan Penataan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat	152
Tabel 7.4.	Kebijakan Umum, Prioritas dan Program Pembangunan Untuk Misi 2 : Meningkatkan Kecerdasan, Keterampilan dan Kesehatan serta IMTAQ SDM Anak Nagari	161
Tabel 7.5.	Kebijakan Umum, Prioritas dan Program Pembangunan Untuk Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur serta Prasarana Dasar Nagari	171
Tabel 7.6.	Kebijakan Umum, Prioritas dan Program Pembangunan Untuk Misi 4 : Pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung	175
Tabel 7.7.	Kebijakan Umum, Prioritas dan Program Pembangunan Untuk Misi 5 : Mengentaskan Kemiskinan dan Keteringgalan	178
Tabel 7.8.	Kebijakan Umum, Prioritas dan Program Pembangunan Untuk Misi 6 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Adil, Peduli dan Berwibawa	180
Tabel 7.9.	Kebijakan Umum, Prioritas dan Program Pembangunan Untuk Misi 7 : Mewujudkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	187
Tabel 7.10.	Kebijakan Umum, Prioritas dan Program Pembangunan Untuk Misi 8 : Revitalisasi Adat dan Seni Budaya Anak Nagari	189
Tabel 8.1.	Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015	198
Tabel 9.1.	Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015	230

DAFTAR GAMBAR

	Hal	
Gambar 1.1.	Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	7
Gambar 1.2.	Keterkaitan Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran Menurut UU No.25 Tahun 2004	8
Gambar 2.1.	Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung	12
Gambar 2.2.	Grafik Komposisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2009	16
Gambar 2.3.	Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional, Prov. Sumbar dan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2010	22
Gambar 2.4.	Grafik Perkembangan PDRB Kab. Sijunjung tahun 2006-2010	23
Gambar 2.5.	Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Prov. Sumbar dan Kab. Sijunjung tahun 2006-2010	27
Gambar 2.6.	Grafik Perbandingan IPM Kab. Sijunjung, Kab/Kota Tetangga dan Prov. Sumbar Tahun 2006-2010	30
Gambar 2.7.	Grafik Perkembangan Angka Umur Harapan Hidup Kab. Sijunjung Tahun 2007-2010	30
Gambar 2.8.	Grafik Perbandingan Angka Umur Harapan Hidup Kab. Sijunjung dengan Kabupaten/Kota Tetangga dan Prov. Sumbar tahun 2010	31
Gambar 2.9.	Grafik Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kab. Sijunjung Tahun 2007-2010	31
Gambar 2.10.	Grafik Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Prov. Sumbar, Kab. Sijunjung dan Kabupaten/Kota Tetangga tahun 2010	32
Gambar 2.11.	Grafik Angka Melek Huruf Kab. Sijunjung Tahun 2007-2010	32
Gambar 2.12.	Grafik Perbandingan Angka Melek Huruf Prov. Sumbar, Kab. Sijunjung dan Kabupaten/Kota Tetangga tahun 2010	33
Gambar 2.13.	Grafik Pengeluaran Riil Rumah Tangga Perkapita Kab. Sijunjung Tahun 2007-2010	33
Gambar 2.14.	Grafik Perbandingan Pengeluaran Riil Rumah Tangga Perkapita Prov. Sumbar, Kab. Sijunjung dan Kabupaten/Kota Tetangga tahun 2010	34
Gambar 2.15.	Grafik Perbandingan IPG Kab. Sijunjung, Kab/Kota Tetangga dan Prov. Sumbar Tahun 2006-2010	35
Gambar 2.16.	Grafik Perbandingan IDG Kab. Sijunjung, Kab/Kota Tetangga dan Prov. Sumbar Tahun 2006-2010	36
Gambar 2.17.	Grafik Kondisi Ruang Kelas Sesuai Tingkatan Pendidikan di Kabupaten Sijunjung tahun 2010	39
Gambar 2.18.	Grafik Perkembangan APK SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010	40
Gambar 2.19.	Grafik Perkembangan APM SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010	40
Gambar 2.20.	Grafik Perkembangan Nilai Rata-rata Ujian Nasional SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010	42
Gambar 2.21.	Grafik Perkembangan Angka Kematian Bayi Kab. Sijunjung tahun 2005-2009	42
Gambar 2.22.	Grafik Perkembangan Angka Kematian Balita Kab. Sijunjung tahun 2006-2010	42
Gambar 2.23.	Grafik Perkembangan Jumlah Kematian Ibu Kab. Sijunjung tahun 2006-2010	43
Gambar 2.24.	Grafik Perkembangan Angka Gizi Buruk Kab. Sijunjung tahun 2006-2010	43
Gambar 2.25.	Grafik Kondisi Jalan Kabupaten berdasarkan Jenis Kerusakan di Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010	45
Gambar 2.26.	Grafik Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010	46
Gambar 2.27.	Grafik Perbandingan Indeks Pelayanan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009	57
Gambar 2.28.	Grafik Peringkat Nilai Investasi PMDN dan PMA Kabupaten di Prov. Sumatra Barat Tahun 2008	58
Gambar 2.29.	Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010	63

Gambar 2.30.	Komposisi PNS Pemerintah Kabupaten Sijunjung Berdasarkan Jenjang Pendidikan tahun 2010	62
Gambar 2.31.	Grafik Perkembangan Produksi Batubara di Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010	70
Gambar 5.1.	Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Misi RPJMD	115
Gambar 6.1.	Tahapan Utama Pembangunan RPJPD Kab. Sijunjung 2005-2025	125
Gambar 6.2.	Tahapan Indikasi Tahunan RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggungjawab telah menjadi tuntutan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan dalam mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dalam rangka melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Otonomi Daerah yang paralel dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan suatu pedoman yang memberikan arah dan strategi kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu, diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah Terpilih.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten/Kota serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD/RTRW Kabupaten/Kota lainnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung 2010–2015 merupakan penjabaran visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih berdasarkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2010. Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010–2015 merupakan pelaksanaan tahap kedua dalam upaya mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sijunjung 2005–2025, yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sijunjung yang Madani”**. Untuk itu, dalam menyusun RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010–2015 perlu memperhatikan dan mempertimbangkan capaian kinerja hasil pelaksanaan tahap pertama tahun 2005-2010.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sijunjung 2005-2010, telah banyak permasalahan pembangunan di Kabupaten Sijunjung yang berhasil ditangani, juga telah terjadi perubahan yang cukup signifikan baik dalam segi pelayanan pemerintahan maupun pembangunan yang baik secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan tersebut merupakan buah sinergi tiga kekuatan utama yang ada di Kabupaten Sijunjung yaitu pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat/dunia usaha.

Walaupun harus diakui pula masih banyak permasalahan pembangunan dan kemasyarakatan yang masih harus ditangani dalam masa jabatan lima tahun kedepan. Hal mendasar dari keberhasilan pembangunan lima tahun pertama adalah telah bergesernya paradigma pembangunan dari ketergantungan sepenuhnya kepada pemerintah menjadi pembangunan yang terpadu antara semua *stakeholder* dan paradigma pembinaan menjadi pemberdayaan masyarakat dan berubahnya paradigma aparatur dari yang dilayani menjadi melayani masyarakat.

Menyadari hal tersebut, untuk menyusun rencana pembangunan periode 2010-2015 diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) dalam memperoleh akses sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya bentuk cara pandang/pendekatan yang akan dilakukan dengan menciptakan kawasan strategis melalui pendekatan wilayah yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2031, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012. Dalam menciptakan kawasan strategis tersebut, program pengembangan kawasan agropolitan bisa dijadikan sebuah program strategis, karena program tersebut digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Kawasan agropolitan yang dimaksud disini adalah sebuah kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis yang mampu melayani dan mendorong kegiatan pembangunan di wilayah sekitarnya dilakukan secara terpadu meliputi: a) pengembangan agribisnis hulu (penyediaan sarana dan prasarana pertanian), b) pengembangan agribisnis hilir (prosesing dan pemasaran hasil pertanian), c) jasa penunjang lainnya. Jika dilihat dari definisi kawasan agropolitan tersebut, terlihat jelas bahwa dalam menyusun rencana pembangunan perlu adanya sinkronisasi dan sinergitas program pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sedangkan pembangunan dibidang Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi : angka umur harapan hidup untuk mengukur peluang hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status pendidikan serta pengeluaran riil perkapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya dalam standar hidup layak. Untuk meningkatkan IPM tersebut sasaran program pembangunan di bidang SDM mengacu kepada Milinium Development Goals (MDG's) tahun 2015.

Selanjutnya, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu 2011-2015 akan mengacu kepada perencanaan pembangunan yang disusun dalam RPJMD tahun 2010-2015. Dalam pelaksanaannya RPJMD dijabarkan dan bentuk Rencana Strategis (Renstra) SKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung tahun 2010-2015 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025;
8. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, Nomor: 28 Tahun 2010, Nomor: 0199/ M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatra Barat;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatra Barat 2012-2032;
29. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011;
30. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008;
31. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010;
32. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 4 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031.

1.3. Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam sistem perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lain, secara skematis terlihat sebagai berikut :

1. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sijunjung

RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sijunjung 2005-2025. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2010-2015, harus berpedoman pada visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Sijunjung 2005 – 2025, adalah : **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sijunjung yang Madani”** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJP Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 dengan visi ; **“Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumber Daya Manusia yang Agamis pada Tahun 2025”**.

Pada tahap kedua RPJPD Kabupaten Sijunjung 2005 – 2025 yang dituangkan ke dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2010-2015, dengan fokus pembangunan pemantapan akselerasi penataan pembangunan daerah dengan kemajuan kesejahteraan masyarakat dan penguatan basis perekonomian. Untuk mewujudkan fokus pembangunan tersebut perlu di arahkan pada, 1) terwujudnya pertumbuhan

ekonomi yang tinggi berbasis ekonomi kerakyatan, 2) terwujudnya sumberdaya manusia berkualitas, 3) terwujudnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur, 4) terwujudnya pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan dan 5) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan supremasi hukum.

Kelima fokus pembangunan ini ditunjukkan dalam upaya memperkuat identitas pembangunan Kabupaten Sijunjung yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Kabupaten Sijunjung 2005-2025. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015 disamping menpedomani RPJPD kabupaten, juga memperhatikan sasaran pembangunan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMD kabupaten tetangga, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 54 ayat (2) Permendagri Nomor 54 tahun 2010 merupakan upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

2. RPJMD dan RTRW Kabupaten Sijunjung

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015 harus memperhatikan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sijunjung sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah dalam upaya menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyeraskan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumberdaya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

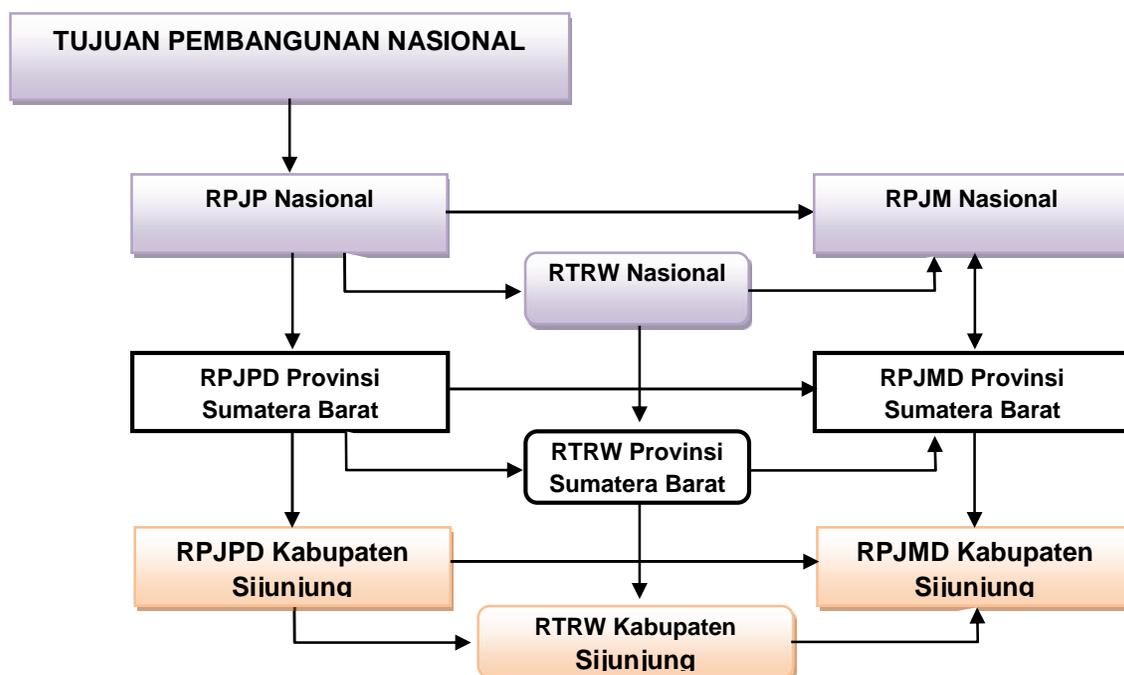
Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah menetapkan RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 5 tahun 2012. Visi penataan ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031 adalah ***“Terwujudnya Ruang Kabupaten Sijunjung berbasis Pertanian dengan didukung oleh Pertambangan, Agroindustri dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan dalam rangka Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat”***. Untuk mewujudkan visi tersebut perlu adanya kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031

No.	Kebijakan	Strategi
1.	Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam melalui pengelolaan dan pengolahan produk pertanian, perikanan, pariwisata dan pertambangan	<p>a. Meningkatkan pemanfaatan potensi pertanian dan perikanan, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • meningkatkan kegiatan pertanian melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan; • meningkatkan pengembangan kawasan agropoltan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan; • meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya; • meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perdesaan terutama di kawasan pusat pertumbuhan; • mengoptimalkan produksi Balai Benih Ikan (BBI) yang ada di Kabupaten Sijunjung; • menetapkan dan mengembangkan kawasan industri pakan ikan di daerah yang berpotensi untuk mendukung usaha perikanan; dan • meningkatkan pengembangan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan pemasaran produksi ikan oleh masyarakat; <p>b. Meningkatkan pemanfaatan potensi pariwisata, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, • pengelolaan objek wisata yang lebih profesional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif <p>c. Meningkatkan pemanfaatan potensi pertambangan, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peruntukan kawasan untuk sektor Pertambangan dan Energi. • Peningkatan kegiatan eksplorasi terhadap sumber daya mineral dan migas yang berwawasan lingkungan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. • Pembinaan usahan pertambangan rakyat yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan. • Mendorong sektor industri pengolahan hasil tambang melalui kemudahan berinvestasi di sektor pertambangan.
2.	Pemanfaatan kawasan hutan dan implementasi pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat	<p>a. Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kawasan perkotaan sesuai hirarki pelayanan dan tetap memperhatikan kaidah lingkungan, terutama kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30 %</p> <p>b. Penetapan zona mitigasi bencana atau kawasan rawan bencana di seluruh kecamatan dengan mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang.</p> <p>c. Pembatasan alihfungsi lahan pertanian dengan tetap mempertahankan lahan pertanian produktif.</p> <p>d. Meningkatkan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan, melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan fungsi kawasan lindung. • Prioritas penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat • Sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi dan kabupaten yang berbatasan
3.	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian wilayah dengan memperhatikan pemerataan pembangunan	<p>a. Meningkatkan akses wilayah-wilayah yang belum berkembang melalui pengembangan/ pembangunan jaringan jalan kabupaten yang dapat menghubungkan seluruh nagari-nagari di Kabupaten Sijunjung.</p> <p>b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat primer dan sekunder berupa pengembangan fasilitas di Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).</p> <p>c. Fasilitasi peningkatan fungsi Kota Muaro Sijunjung menjadi kawasan Pemerintahan, Pendidikan dan Pariwisata melalui kajian wilayah dan kecamatan sekitar sebagai pendukungnya.</p> <p>d. Menyusun sinkronisasi penataan ruang kawasan perkotaan Muaro Sijunjung dan Ibukota Kecamatan terutama sistim jaringan prasarana dan sarana fasilitas perkotaan.</p> <p>e. Mengembangkan fungsi pusat-pusat kegiatan sesuai dengan potensi kegiatan wilayah</p> <p>f. Mengembangkan kawasan andalan sesuai dengan potensi unggulan, yang meliputi beberapa kawasan strategis yang ditetapkan.</p>

Pada dasarnya kedudukan RTRW memiliki keselarasan dengan RPJP dan RPJM karena memiliki tujuan yang sama terhadap tujuan pembangunan nasional, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1
Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung dalam
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional



Berdasarkan gambar diatas, terlihat jelas adanya kaitan antara RPJMD dengan RTRW secara parsial, sehingga dalam menyusun arah dan kebijakan program pembangunan yang terdapat dalam RPJMD memiliki sinkronisasi terhadap arah dan kebijakan program pembangunan yang terdapat dalam RTRW.

3. RPJMD dan Renstra SKPD

RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) selama kurun waktu lima tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahun. Renstra SKPD disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan disetujui oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu oleh Bappeda Kabupaten Sijunjung.

Mekanisme tersebut dilakukan demi untuk menjaga sinkronisasi, kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan. Bila hal ini dapat dilakukan sejak awal penyusunan suatu rencana, maka kemungkinan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan sangat besar, dengan demikian RPJMD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan.

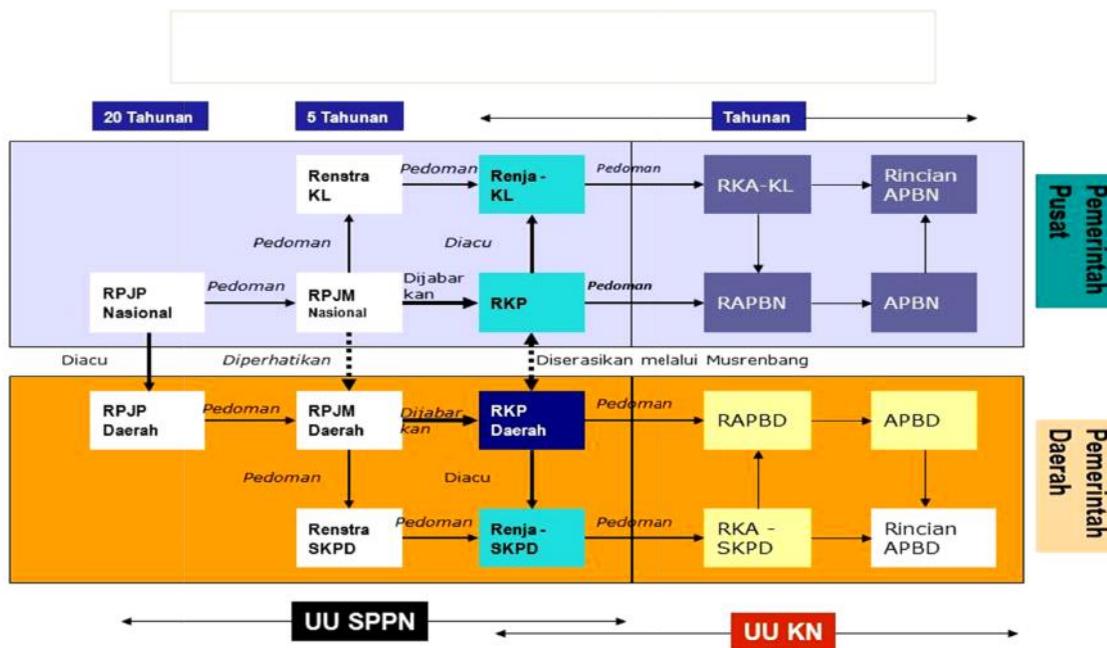
4. RPJMD dan RKPD

Secara operasional RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015 setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah, b) program prioritas pembangunan daerah, dan c) rencana kerja dan pendanaan. Sedangkan penyelenggaraan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Sijunjung yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat nagari/desa, kecamatan dan kabupaten merupakan input utama dalam proses penyusunan RKPD sebelum dijadikan pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kertekaitan dokumen perencanaan dengan penganggaran berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran Menurut UU No.25 Tahun 2004



8

1.4. Sistematika Penulisan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis gambaran umum kondisi daerah meliputi; aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan

Menyajikan gambaran hasil kinerja keuangan masa lalu periode 2005-2010, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu periode 2005-2010, dan kerangka pendanaan tahun 2011-2015.

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis

Menyajikan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum serta analisis lingkungan dalam rangka merumuskan isu-isu strategis sebagai landasan dalam menentukan rencana pembangunan lima tahun ke depan.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menguraikan visi dan misi kepala daerah terpilih, menjelaskan hubungan setiap tujuan dan sasaran dengan misi.

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan

Menjelaskan berbagai strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam upaya mengimplementasikan visi dan misi. Strategi disusun dalam konteks pengembangan spasial dan sektoral sebagai landasan program dan kegiatan pembangunan.

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja program pembangunan

Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan

Menguraikan indikator kinerja program pembangunan dan kebutuhan pendanaan indikatif yang menjadi tanggungjawab SKPD selama periode 2011-2015 berdasarkan pengelompokan urusan kewenangan.

Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Menguraikan tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015 berdasarkan tiga aspek yaitu; a) aspek kesejahteraan masyarakat, b) aspek pelayanan umum dan c) aspek daya saing daerah.

Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

Menjelaskan pedoman transisi untuk kurun waktu satu tahun yang disiapkan untuk menjembatani kekosongan RPJMD dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan kepala daerah. Selain itu, bab ini juga membahas kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD sebagai pedoman bagi tersusunnya dokumen perencanaan di setiap SKPD, seperti Renstra, RKPD dan Renja SKPD.

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang mampu memberikan rumusan strategi, arah kebijakan, program pembangunan yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu serta responsif terhadap perubahan yang bergerak secara dinamis, sehingga kebijakan dan program yang direncanakan dapat mendorong percepatan terwujudnya visi, misi dan program yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sijunjung 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 serta berbagai aspirasi seluruh *stakeholder* pembangunan di Kabupaten Sijunjung.

Dengan demikian RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015 merupakan acuan dan pedoman resmi bagi pemerintah kabupaten dalam menyusun Rentra SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Renja SKPD serta menjadi acuan utama dalam penentuan program daerah yang dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kabupaten secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dapat lebih terjamin dan mempermudah pencapaian indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan.

1.5.2 Tujuan

Tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015, adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam bentuk kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan.
2. Menjadikan RPJMD sebagai dokumen rujukan resmi bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kabupaten Sijunjung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya.
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar SKPD, antar Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi melalui Bappeda Kabupaten sebagai institusi yang terkait dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. RPJMD sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar *stakeholders* untuk menentukan strategi dan prioritas pembangunan daerah.
5. Sebagai instrumen untuk mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
6. Membangun kebersamaan melalui bentuk kerjasama dan kemitraan pembangunan, baik antar Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah maupun *stakeholders* lainnya.
7. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya daerah serta pengelolaannya, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Sijunjung memberikan gambaran tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Sijunjung periode yang lalu secara umum. Gambaran umum merupakan pijakan awal penyusunan rencana pembangunan lima tahun kedepan melalui pemetaan secara obyektif kondisi daerah dari aspek geografis dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Analisis gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini dan mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan pencapaian untuk lima tahun kedepan.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Pembangunan daerah bertumpu pada kondisi kewilayahan daerah, aspek geografi dan demografi merupakan salah satu aspek kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Dari uraian ini diharapkan dapat terpetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Sijunjung lima tahun kedepan.

2.1.1. Kondisi Geografis

A. Letak, Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Secara geografis posisi astronomis Kabupaten Sijunjung berada pada $0^{\circ} 18' 43''$ Lintang Selatan (LS) sampai dengan $1^{\circ} 41' 46''$ Lintang Selatan (LS) dan dari $100^{\circ} 37' 40''$ Bujur Timur (BT) sampai dengan $101^{\circ} 30' 52''$ Bujur Timur (BT). Posisi Kabupaten Sijunjung berada di bagian Timur Provinsi Sumatera Barat, pada jalur utama yang menghubungkan Provinsi Riau dan Provinsi Jambi. Mengingat letaknya di persimpangan jalur tersebut Kabupaten Sijunjung merupakan jalur ekonomi dan jalur pariwisata yang sangat strategis.

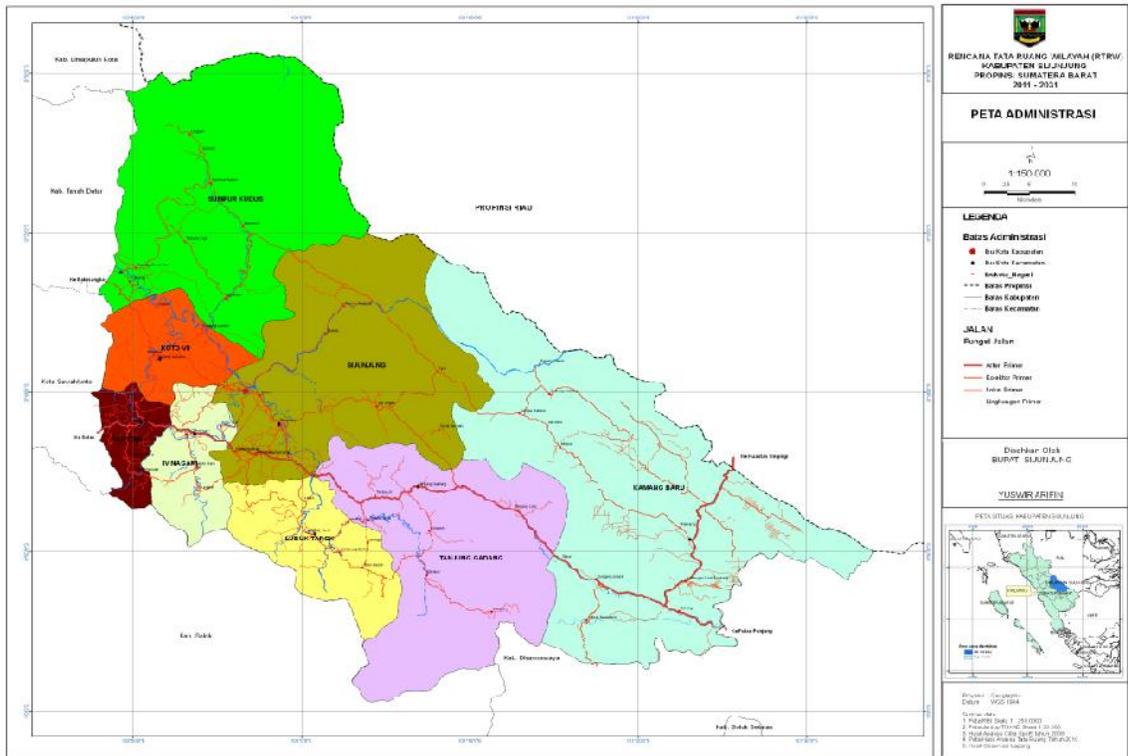
Secara wilayah administrasi luas wilayah Kabupaten Sijunjung telah mengalami tiga kali perubahan sejak terbentuk pada tanggal 18 Februari 1949 melalui Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatra Barat No.: SK/9/GN/IST dan diperkuat oleh UU No.12 Tahun 1956. Perubahan terakhir terjadi ketika dilakukannya pembentukan Kabupaten Dharmasraya melalui UU No. 38 Tahun 2003 dimana wilayahnya merupakan 49 persen dari wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, sehingga luas wilayahnya sekarang menjadi 313.080 ha. Luas tersebut setara dengan 7,40% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat dan merupakan kabupaten nomor dua terkecil di Provinsi Sumatra Barat.

Secara administratif Kabupaten Sijunjung terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 55 (lima puluh lima) nagari/desa, dengan batas-batas administrasi adalah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara dengan Kab. Tanah Datar, Kab. 50 Kota dan Kab. Kampar, Provinsi Riau .
- b) Sebelah timur dengan Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau.
- c) Sebelah selatan dengan Kab. Dharmasraya, dan
- d) sebelah barat dengan Kab. Solok dan Kota Sawahlunto.

Untuk melihat gambaran posisi Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung



Sumber :: RTRW Kab. Sijunjung 2011-2031

Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Kecamatan se-Kabupaten Sijunjung

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Thdp Luas Kabupaten (%)	Jumlah Nagari/Desa
1.	Kamang Baru	88.773	28,35	11
2.	Tanjung Gadang	50.628	16,17	7
3.	Sijunjung	56.252	17,97	9
4.	Lubuk Tarok	19.195	6,14	6
5.	IV Nagari	12.519	3,99	5
6.	Kupitan	6.971	2,23	4
7.	Koto VII	13.614	4,34	5
8.	Sumpur Kudus	65.168	20,81	8
	Jumlah	313.080	100,00	55

Sumber : RTRW Kab. Sijunjung 2011-2031

B. Kondisi Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sijunjung memiliki ciri yang berbukit-bukit, terletak pada ketinggian antara 100 sampai 1.250 m di atas permukaan laut. Secara umum, luasan terbesar Kabupaten Sijunjung berada pada :

- Ketinggian <100 mdpl hanya seluas 2.691 Ha (0,86%) terdapat di Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Koto VII, dan Kecamatan Sijunjung.

- b. Ketinggian 100-200 meter dari permukaan laut dengan perkiraan 79.257 Ha (25,32%) tersebar pada seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Kamang Baru dan yang terkecil berada di Kecamatan Tanjung Gadang.
- c. Ketinggian 200-300 mdpl seluas 65.163 Ha(20,9%) tersebar pada seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Kamang Baru dan yang terkecil berada di Kecamatan Koto VII
- d. Ketinggian 300-400 mdpl seluas 53.719 ha (17,15%) tersebar pada seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamatan Koto VII
- e. Ketinggian 400-500 mdpl seluas 43.553 (13,91%) tersebar pada seluruh Kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamatan Koto VII
- f. Ketinggian 500-600 mdpl seluas 27.482 Ha (8,78%) tersebar pada seluruh Kecamatan dengan luasan terbesar berada pada Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil berada pada Kecamatan Koto VII
- g. Ketinggian 600-700 mdpl seluas 18.016 Ha (5,76 %) tersebar pada seluruh wilayah kecamatan kecuali di Kecamatan Kupitan
- h. Ketinggian 700-800 mdpl seluas 10.285 Ha (3,29%) hanya tersebar di Kecamatan Kamang Baru, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang, Lubuk Tarok, dan Sijunjung.
- i. ketinggian >800 mdpl seluas 12.914 Ha (4,12%) hanya tersebar di Kecamatan Kamang Baru, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang, Lubuk Tarok, dan Sijunjung. Ketinggian 1.250 mdpl hanya berada pada Kecamatan Sumpur Kudus.

C. Kondisi Geologi dan Kerawanan Bencana

Sedangkan kondisi geologi Kabupaten Sijunjung merupakan daerah yang dipenuhi perbukitan dengan lembah yang masih curam. Secara geologi, Kabupaten Sijunjung didominasi oleh jenis bebatuan Batu Apung Tufa (76.549 Ha atau 24,45%), Batu Andesit Campur Tufa (61,833 Ha atau 19,75%), Batu Sabah campur Kwarsa (60.880 Ha atau 19,44%), Batu Napal dan Lempung(36.850 atau 11,77%), Batu Napal Gamping (34.640 atau 11,06%), Batu Sabah campur Batu Gamping (24,405 atau 7,8%), serta beberapa jenis batuan lainnya dalam jumlah yang relatif kecil. Keadaan yang demikian menyebabkan sering timbul bencana alam seperti tanah longsor (*land slide*), gerakan tanah runtuh atau gerakan tanah merayap.

D. Kondisi Klimatologi

Karakteristik iklim Kabupaten Sijunjung termasuk beriklim tropis. Daerah ini beriklim tipe B yaitu daerah bayangan hujan (penerima curah hujan lebih kecil) karena berada di lereng timur Bukit Barisan. Perubahan iklim global (*global climate change*) kelihatannya juga dirasakan oleh Kabupaten Sijunjung. Intensitas curah hujan dan rentang suhu cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan seringnya terjadi cuaca ekstrem di mana ketika musim hujan intensitas curah hujan cenderung tinggi dan ketika musim kemarau suhu udara juga semakin panas. Bulan yang mengalami curah hujan tertinggi juga mengalami pergeseran dimana pada tahun 2005 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret tetapi pada 2007 dan 2009 terjadi pergeseran ke bulan Januari dan Maret. Perkembangan iklim di Kabupaten Sijunjung Tahun 2005 - 2009, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Perkembangan Iklim di Kabupaten Sijunjung 2005, 2007 dan 2009

Indikator	2005	2007	2009
Curah hujan rata-rata/bulan (mm)	155,27	231,81	190,94
Jumlah hari hujan rata-rata (hari)	10,65	13,61	9,97
Curah hujan tertinggi (mm)	278,20 (Maret)	431,8 (Januari)	320,0 (Desember)
Daerah curah hujan tertinggi (mm/bulan)	Sungai Langsek (176,25 mm)	Sungai Langsek (320 mm)	Kupitan (320 mm)
Suhu	21 ^o - 23 ^o C	21 ^o - 33 ^o C	21 ^o - 33 ^o C

Sumber Sijunjung Dalam Angka 2005 dan 2009

E. Kondisi Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Sijunjung sangat bervariasi antara satu tempat dengan tempat yang lain. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah perbedaan iklim, topografi dan struktur geologi. Keadaan hidrologi tersebut dapat dibedakan menjadi :

1. Air permukaan menurut letaknya dapat dibedakan menjadi;
 - a. Air yang mengalir, yaitu yang mengalir di Batang Ombilin, Batang Sukam, Batang Sumpur, Batang Kuantan, Batang Palangki, dan lainnya.
 - b. Air yang menggenang di telaga/bendungan hampir terdapat di seluruh wilayah kecamatan.
2. Air tanah, yaitu jebakan air yang menurut letaknya dapat dibedakan menjadi:
 - a. Confined Aquifer, merupakan air tanah tertekan yang berada di antara dua lapisan kedap air, pada umumnya merupakan air tanah dalam bersifat lebih stabil.
 - b. Unconfined Aquifer, merupakan air tanah tidak tertekan yang berada pada zone jenuh air, merupakan air tanah dangkal dan sangat tergantung pada musim, sehingga air tanah jenis ini relatif stabil.

Air tanah tersebut, apabila keluar akan membentuk mata air. Untuk Kabupaten Sijunjung terdapat beberapa mata air yang tersebar di setiap kecamatan.

F. Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sijunjung memiliki 6 (enam) jenis tersebar di seluruh kecamatan. Jenis tanah tersebut adalah:

1. Jenis tanah alluvial disebut juga sebagai tanah tumbuh tanah endapan, kandungan bahan organiknya rendah, reaksi tanah asam sampai netral, struktur tanahnya pejal atau tanpa struktur dan konsistensinya keras waktu kering, teguh waktu lembab, kandungan unsur haranya relatif kaya dan banyak bergantung pada bahan induknya. Secara keseluruhan tanah alluvial mempunyai sifat fisik kurang baik sampai sedang, sifat kimia sedang sampai baik, sehingga produktivitas tanahnya sedang sampai tinggi. Luasan jenis tanah ini adalah ± 443 Ha (0,15%) hanya terdapat di Kecamatan Kamang Baru
2. Jenis tanah andosol yaitu jenis tanah yang berwarna hitam kelam, sangat sarang, mengandung bahan organik dan lempung tipe amorf, silika, alumina, atau hidroksida besi. Tanah jenis ini sangat gembur dan memiliki Ph antara 4,5-6. Luasan tanah jenis ini hanya terdapat di Kecamatan IV Nagari, Koto VII, Kupitan, Sijunjung dan Sumpur Kudus dengan jumlah luasan 21.352 Ha (6,82%) dari luas wilayah kabupaten
3. Jenis tanah Glei Humus yaitu jenis tanah yang pada umumnya mempunyai solum kurang dari satu meter dengan warna umum kelabu kelam sampai hitam, lekat jika basah dan keras jika kering serta mengandung bahan organik lebih dari 3% sehingga Ph nya sedikit asam sampai netral, tingkat kesuburannya sedang dengan derajat kejenuhan basa lebih dari 60%. Luasan tanah jenis ini lebih kurang 45.555 Ha(14,55%) dari luas wilayah yang ada. Jenis tanah ini

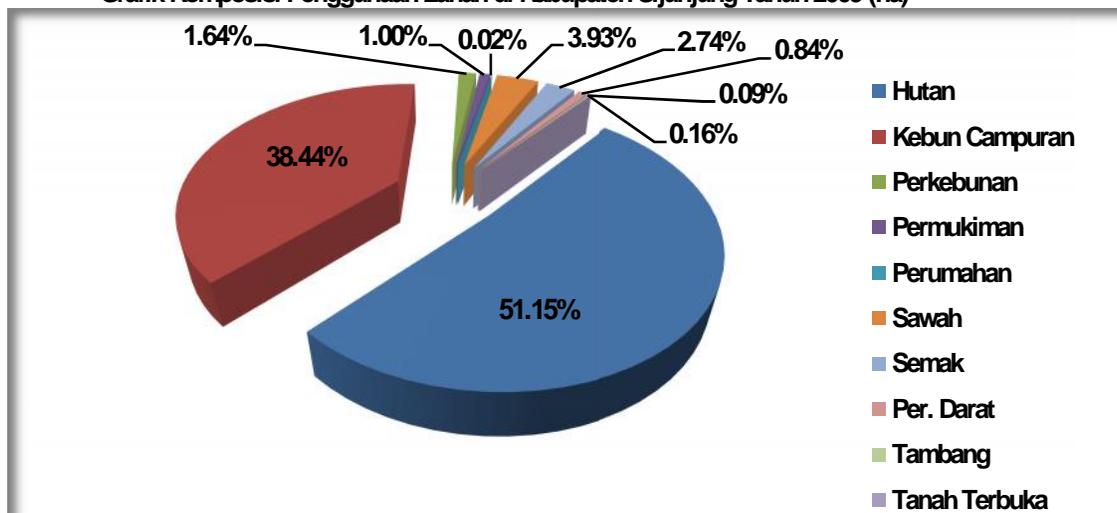
terdapat di Kecamatan Sijunjung, Sumpur Kudus, Tanjung Gadang dan yang terbesar luasannya di Kecamatan Kamang Baru

4. Jenis tanah Kambisol yaitu jenis tanah yang sedikit mengalami pelapukan dengan bahan induk bertekstur pasir sangat halus 145.481 (45,45%). Jenis tanah ini terdapat di seluruh wilayah kecamatan dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Tanjung Gadang.
5. Jenis tanah Latosol yaitu tanah yang telah mengalami pelapukan intensif dan perkembangan tanah lanjut sehingga terjadi pengurangan unsur basa, bahan organik dan silika, dan rata-rata berwarna merah. Jenis tanah ini terdapat di Kecamatan IV Nagari, Kamang Baru, Lubuk Tarok, Sijunjung, dan Tanjung Gadang dengan jumlah luasan keseluruhan 23.124 Ha (7,38%) dari luas wilayah kabupaten.
6. Jenis tanah podsolik memiliki solum tanah yang agak tebal, yaitu 90-180 cm,tektur tanahnya lempung berliat hingga liat, konsistensinya gembur dibagian atas dan teguh di lapisan bawah, kandungan bahan organiknya kurang dari 5%, kandungan unsur hara tanaman rendah, reaksi tanah (PH) sangat rendah sampai rendah yaitu antara 4 – 4,5. Secara keseluruhan tanah ini memiliki sifat kimia yang kurang baik, sifat kimia tidak mantap karena stabilitas agregatifnya kurang, sehingga mudah terjadi erosi. Produktifitas tanah ini rendah sampai sedang tumbuh dengan baik, tetapi harus dengan perlakuan khusus untuk mencegah erosi, karena tanah yang bertekstur sedang lebih peka terhadap erosi. Tanah dengan tekstur kasar menyerap air sangat tinggi, tetapi daya simpan air sangat rendah, sehingga kurang cocok untuk tanaman pangan lahan kering. Jenis tanah ini luasannya mencapai ± 77.125 Ha (24,64%) hampir terdapat di seluruh kecamatan dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Sumpur Kudus dan yang terkecil di Kecamatan Tanjung Gadang.

G. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2009 di dominasi oleh hutan dengan luas sebesar 51,15% dan ikuti oleh kebun campur dengan luas lahan sebesar 38,44% serta lahan sawah dengan luas sebesar 3,93%, sedangkan luas lahan untuk perkebunan hanya sebesar 1,64% dari dari luas Kabupaten Sijunjung keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung belum dapat dioptimalkan karena didominasi oleh kawasan hutan. Hal ini perlu adanya arah dan kebijakan pembangunan untuk mengantisipasi pesatnya dinamika perkembangan dan pertumbuhan Kabupaten yang berimplikasi pada penyesuaian terhadap kebutuhan lahan untuk pengembangannya. Komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2009 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.2
Grafik Komposisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2009 (ha)



Sumber : RTRW Kab. Sijunjung 2011-2031

Sedangkan luas penggunaan lahan berdasarkan per kecamatan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2009, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Luas Penggunaan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Sijunjung Tahun 2009

Kecamatan	Guna Lahan (ha)										Total
	Hutan	Kebun Campuran	Perkeb.	Permukm.	Perumh.	Sawah	Semak	Per. Darat	Tambang	Tanah Terbuka	
IV Nagari	1.250	9.236	84	190	-	1.337	98	268	28	38	12.529
Kamang Baru	43.160	32.818	4.672	932	-	1.898	4.597	298	155	63	88.593
Koto VII	616	9.895	28	505	-	2.056	45	403	34	26	13.608
Kupitan	331	5.417	61	133	19	825	0	184	15	-	6.966
Lubuk Tarok	6.872	10.599	128	143	-	809	339	318	13	12	19.233
Sijunjung	32.694	18.518	36	789	36	2.637	929	603	3	179	56.388
Sumpur Kudus	46.183	15.428	114	305	-	1.631	1.026	287	27	111	65.112
Tanjung Gadang	29.031	18.446	-	194	-	1.110	1.532	270	-	68	50.651
Jumlah	160.137	120.358	5.123	3.136	55	12.303	8.566	2.631	275	497	313.080

Sumber : RTRW Kab. Sijunjung 2011-2031

H. Potensi Sumber Daya Alam, Masalah Lingkungan dan Pengembangan Wilayah

a) Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Sijunjung memiliki potensi sumberdaya alam yang perlu dikembangkan, sehingga mempunyai nilai tambah bagi daerah. Potensi sumber daya alam tersebut adalah sebagai berikut :

1) Sektor Perkebunan

Perkebunan merupakan salah satu tiang utama struktur perekonomian Kabupaten Sijunjung. Beberapa komoditi perkebunan yang ditanam di antaranya adalah karet, kelapa, sawit, coklat, manggis, dan kopi, baik oleh perkebunan rakyat maupun perkebunan besar. Perkebunan karet merupakan perkebunan yang hampir merata ada diseluruh wilayah Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan analisa GIS yang dilakukan, luas lahan perkebunan yang dikelola secara intensif/perkebunan besar/plasma di Kabupaten Sijunjung adalah 5.123 ha (1.6% dari luas Kabupaten) dan

120.357 Ha (38.44%) dari total luas wilayah Kabupaten merupakan kebun campuran. Komoditas perkebunan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat adalah karet, kelapa sawit dan kakao (coklat). Sesuai data dari Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan, produksi kakao Sijunjung mencapai 581,53 ton setiap tahun, karet sebesar 62.164 ton serta kelapa sawit sebesar 51.702 ton setiap tahun atau 7% dari produksi kelapa sawit Sumatera Barat. Produksi kelapa sawit dan karet tertinggi berada di Kecamatan Kamang Baru yaitu sebesar 51.372 ton untuk kelapa sawit atau 99,36% produksi di Kabupaten Sijunjung dan 19.035,2 ton untuk karet atau 30,6% dari produksi kabupaten.

2) Sektor Pertambangan

Kabupaten Sijunjung merupakan wilayah yang kaya akan hasil pertambangan terutama, batubara dan berbagai pertambangan mineral lainnya seperti emas, sirtu dan tanah urug. Namun, potensi besar tersebut masih belum di eksploitasi secara optimal, indikasinya dapat dilihat dari jumlah produksi yang dihasilkan dari batubara dan sirtukil. Untuk batubara, pada tahun 2009 ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu 223.254 Ton di Tahun 2008 menjadi 217.910 Ton di Tahun 2009. Selanjutnya, produksi Sirtukil di Kabupaten Sijunjung produksinya meningkat pada tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 yang produksinya hanya sebesar 9.679 M³ menjadi sebesar 21.856,96 M³ di Tahun 2009. Sedangkan kegiatan penambangan emas dilakukan oleh individu dengan status kepemilikan tanah pertambangan berupa milik sendiri, sewa dan termasuk wilayah sungai. Penambangan dengan status individu ini (berizin/tidak berizin) dilakukan di beberapa tempat dengan sistem tambang terbuka sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan pada satu daerah terlihat luas. Disamping potensi yang ada menurut hasil survey geologi yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, Kabupaten Sijunjung memiliki cadangan gas dan minyak bumi yang cukup besar.

3) Sektor Pariwisata

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Barat yang memiliki potensi wisata yang sangat potensial. Potensi wisata tersebut meliputi potensi wisata alam, budaya dan wisata buatan yang tersebar di beberapa kecamatan. Sebagai daerah tujuan wisata dalam wilayah provinsi, Sijunjung termasuk dalam DPP V destinasi wisata Sumatera Barat yang meliputi wisata alam, wisata budaya/sejarah, dan wisata buatan yang sudah dapat dijangkau dari segala penjuru dan didukung prasarana jalan yang memadai.

Beberapa potensi wisata yang terdapat di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 24
Potensi Wisata Kabupaten Sijunjung Menurut Kecamatan

Kecamatan	Nama Objek	Jenis	Lokasi
Kamang Baru	Wahana Wisata Murai Tujuh Basanggik Danau Batang Karing	Alam Alam Alam	Kamang Baru Aie Arno Batang Karing
Tanjung Gadang	Panorama Bukik Sabalah Ngalau Pandam	Alam Alam	Pandam Pandam
Sijunjung	Ngalau Loguang Pemandian Aie Angek Ngalau Palukahan Arung Jeram Ngalau Cigak Bersafar Perkampungan Adat Ngalau Solok Ambah Ngalau Talago	Alam Alam Alam Minat Khusus Alam Budaya Budaya Alam Alam	Aie Angek Aie Angek Silokek Batang Kuantan Silokek Calau Ma Sijunjung Pdg Ranah Sijunjung Solok Ambah Silokek
Lubuk Tarok	Batu Ajuang Kerajaan Jambu Lipo Rumah Gadang 13 Ruang Aia Tajun Buluah Kasok	Alam Budaya Budaya Alam	Batu Ajuang Jambu Lipo Lubuk Tarok Taratak
IV Nagari	Tabek Silacan	Alam	Ranah Tiberau
Kupitan	Goa Bukik Panjang Lobang Japang Pemandian Aia Angek Rumah Gadang Piliang	Alam Alam Alam Budaya	Kampung Baru Padang Sibusuak Padang Sibusuak Padang Sibusuak
Koto VII	Tabek Gadang Makam Syekh Burhanudin	Alam Alam	Padang Lawas Aur Gading
Sumpur Kudus	Lubuk Pandakian Air Terjun Koto Salo Ngalau Sisawah Makam Rajo Ibadat Monumen Sejarah PDRI Lubuk Hijau Lubuk Pandakian	Alam Alam Alam Budaya Budaya Alam Alam	Sumpur Kudus Koto Salo Sisawah Sumpur Kudus Sumpur Kudus Sumpur Kudus Sumpur Kudus

Sumber: Dinas Parnsibudpora Kabupaten Sijunjung,2010

b) Potensi Masalah lingkungan

Disamping memiliki potensi sumberdaya alam, Kabupaten Sijunjung juga memiliki potensi bencana alam dan masalah lingkungan. Potensi bencana alam di Kabupaten Sijunjung yang sering terjadi antara lain : banjir, angin ribut, longsor, kekeringan dan kebakaran. Kejadian bencana alam yang cukup sering terjadi di Kabupaten Sijunjung disebabkan karena kondisi topografis daerah. Sedangkan potensi masalah lingkungan pada umumnya antara lain : 1) lahan kritis dan 2) pencemaran daerah aliran sungai.

c) Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Sijunjung berdasarkan RTRW tahun 2011-2031 terbagi 8 (delapan) kawasan untuk kepentingan lahan budidaya adalah sebagai berikut :

1) Kawasan peruntukan hutan produksi

Pengembangan kawasan hutan produksi hingga tahun 2031 seluas 16.438 ha dari luas yang ada sekarang seluas 30.615 ha. Pengembangan hutan produksi tersebut tersebar ke-8 kecamatan, dengan luas yang paling besar Kecamatan Sijunjung seluas 7.660 ha dan paling sedikit Kecamatan Sumpur Kudus seluas 521 ha.

2) Kawasan peruntukan pertanian lahan basah

Pengembangan kawasan pertanian lahan basah diarahkan untuk pemanfaatan secara intensif lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dan tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Untuk pengembangan pertanian lahan basah (sawah) dialokasikan seluas 12.303 Ha

terutama di Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Lubuk Tarok, Kecamatan Sijunjung, wilayah bagian bawah Kecamatan Sumpur Kudus.

- 3) Kawasan peruntukan perkebunan
Pengembangan kawasan perkebunan diarahkan untuk perkebunan karet dapat dikembangkan di seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan IV Nagari, Kecamatan Kupitan, dan di sebagian Kecamatan Sijunjung. Sedangkan untuk perkebunan sawit lahan yang sesuai di Kecamatan Kamang Baru dan Lubuk Tarok dan untuk perkebunan kakao dapat ditanam seluruh wilayah kecamatan terutama di Kecamatan Tanjung Gadang, Kecamatan Sijunjung, Kecamatan Kupitan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan IV Nagari, dan Kecamatan Lubuk Tarok. Sementara itu, pengembangan tanaman hortikultura, terutama manggis dapat ditanam di seluruh wilayah kecamatan dengan sentra di Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Lubuk Tarok.
- 4) Kawasan peruntukan perternakan
Pengembangan kawasan perternakan diarahkan antara lain : a) pengembangan budi daya ternak besar secara wilayah di arahkan di Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan Kamang Baru, Kecamatan Koto VII, Kecamatan Sijunjung dengan Kecamatan IV Nagari sebagai sentranya, b) pengembangan budi daya ternak unggas diarahkan di Kecamatan Kupitan, Kecamatan Sumpur Kudus, Kecamatan Sijunjung dengan Kecamatan Koto VII sebagai sentranya, dan c) pengembangan budidaya ternak kecil (kambing/domba) diarahkan di seluruh wilayah kecamatan dengan sentranya di Kecamatan Tanjung Gadang.
- 5) Kawasan peruntukan pertambangan
Pengembangan kawasan pertambangan diarahkan hampir semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sijunjung, hal ini disebabkan karena ke-8 kecamatan memiliki bahan pertambangan yang berpotensi untuk dieksploitasi.
- 6) Kawasan peruntukan perindustrian
Pengembangan kawasan perindustrian untuk Kabupaten Sijunjung adalah Muaro Bodi (Kecamatan IV Nagari) dan Kiliran Jao (Kecamatan Kamang Baru). Kedua lokasi tersebut terletak posisi yang strategis dan sangat mudah dijangkau oleh petani dalam menyalur hasil pertaniannya.
- 7) Kawasan peruntukan pariwisata
Pengembangan kawasan pariwisata diarahkan pada Kawasan Wisata MUSIDUGA (Muaro, Silokek Durian Gadang) di Kecamatan Sijunjung, Wahana Wisata Telabang Sakti di Nagari Kunangan Parit Rantang Kecamatan Kamang Baru, Ngalau Loguang di Nagari Aie Angek Kecamatan Sijunjung, dan objek wisata lainnya yang dapat dikembangkan adalah wisata sejarah Makam Syekh Abdul Wahab di Calau Muaro, Rajo Ibadat di Kecamatan Sumpur Kudus, wisata sejarah Rajo Jambu Lipo dan Rumah Gadang 13 Ruang di Kecamatan Lubuk Tarok.
- 8) Kawasan peruntukan permukiman
Pengembangan kawasan permukiman yang memiliki perumahan perkotaan diarahkan di Muaro Sijunjung (Kecamatan Sijunjung), Palangki (Kecamatan IV Nagari), Tanjung Ampalu (Kecamatan Koto VII), Kamang, dan Sei Tambang (Kecamatan Kamang Baru).

2.1.2. Kondisi Demografis

A. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data penduduk hasil Sensus Penduduk 2010, selama lima tahun terakhir terdapat kecenderungan peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung, hal ini dapat dilihat selisih antara jumlah penduduk tahun 2010 dan 2006 sebanyak 15.690 Jiwa atau mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 1,08%. Kecamatan yang mengalami pertumbuhan penduduk cukup besar yaitu Kecamatan IV Nagari dan Kamang Baru dengan rata-rata pertumbuhan 1,12% dan terendah yaitu, Kecamatan Kecamatan Lubuk Tarok yang mengalami pertumbuhan penduduk rata-rata 1,04%. Disamping itu, penyebaran penduduk di masing-masing kecamatan belum merata, jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2010 berada di Kecamatan Kamang Baru yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dengan jumlah 41.415 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil yaitu Kecamatan Kupitan dengan jumlah penduduk 12.530 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2010 dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2010

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Kamang Baru	37.020	38.041	39.111	40.235	41.375
2	Tanjung Gadang	21.627	21.911	22.206	22.506	22.868
4	Lubuk Tarok	13.487	13.633	13.781	13.933	41.030
5	IV Nagari	12.512	12.868	13.240	13.629	14.125
6	Kupitan	11.721	11.914	12.113	12.317	12.540
7	Koto VII	30.083	30.747	31.436	32.151	14.065
8	Sumpur Kudus	21.251	21.628	22.024	22.437	32.851
	Total	185.937	189.632	193.473	197.463	201.823

Sumber: Sijunjung dalam Angka, 2010

Berdasarkan data jumlah penduduk di Kabupaten Sijunjung, kepadatan penduduk bruto terbesar terdapat di Kecamatan Koto VII (241,70 Jiwa/Km²), kemudian Kecamatan Kupitan yaitu 179,7 Jiwa/Km². Sedangkan untuk kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Sumpur Kudus yaitu 35,10 jiwa/Km² dan Kecamatan Kamang Baru sebanyak 46,67 jiwa/Km². Sedangkan kepadatan netto/kepadatan lingkungan pemukiman terbesar terdapat di Kecamatan Tanjung Gadang (117,62 jiwa/ha) dan terkecil terdapat di Kecamatan Kamang Baru (44,4 jiwa/ha). Untuk lebih jelasnya kepadatan penduduk di Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Kepadatan Penduduk Kabupaten Sijunjung Tahun 2010

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Pemukiman (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Bruto (jiwa/km ²)	Kepadatan Netto (jiwa/ha)
1	Kamang Baru	88.593	932	41.375	466,7	44.44
2	Tanjung Gadang	50.651	194	22.868	450,7	117.62
3	Sijunjung	56.388	789	41.030	728,4	51.93
4	Lubuk Tarok	19.233	143	14.125	734,2	98.53
5	Kupitan	6.966	133	12.540	1.797,7	94.21
6	IV Nagari	12.529	190	14.065	1.122,1	73.88
7	Koto VII	13.608	505	32.851	2.417,0	65.01
8	Sumpur Kudus	65.112	305	22.969	351,0	74.98
	Jumlah	313.080	3.191	201.823		

Sumber: Sijunjung dalam Angka, 2010

B. Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang paling rumit yang dihadapi setiap negara sedang berkembang. Kemiskinan secara faktual tidak akan bisa diberantas habis sebagaimana halnya korupsi, setidaknya bisa dikurangi jumlah orang miskin. Hal ini disebabkan, karena kemiskinan berkaitan dengan berbagai variabel ekonomi dan non ekonomi, maka upaya untuk mengurangi kemiskinan pun menjadi tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Secara data dan fakta sampai saat ini, pengurangan jumlah kemiskinan telah menunjukkan hasil memuaskan, karena memperlihatkan kecenderungan penurunan angka kemiskinan secara nasional.

Kecenderungan penurunan angka kemiskinan secara nasional, berimplikasi terhadap penurunan angka kemiskinan Kabupaten Sijunjung periode 2006-2010. Hal ini terlihat, menurunnya jumlah rumah tangga miskin dari tahun 2006 hingga tahun 2009, dari 12.920 rumah tangga miskin di tahun 2006 menjadi 9.106 rumah tangga miskin di tahun 2009. Jika dilihat dari angka kemiskinan dari tahun 2006 sebesar 27,70% turun secara signifikan pada tahun 2009 sebesar 18,13%.

Untuk melihat perkembangan jumlah dan rasio rumah tangga miskin Kabupaten Sijunjung tahun 2005-2009, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Jumlah dan Persentase Rumah Tangga Miskin periode 2006 – 2009

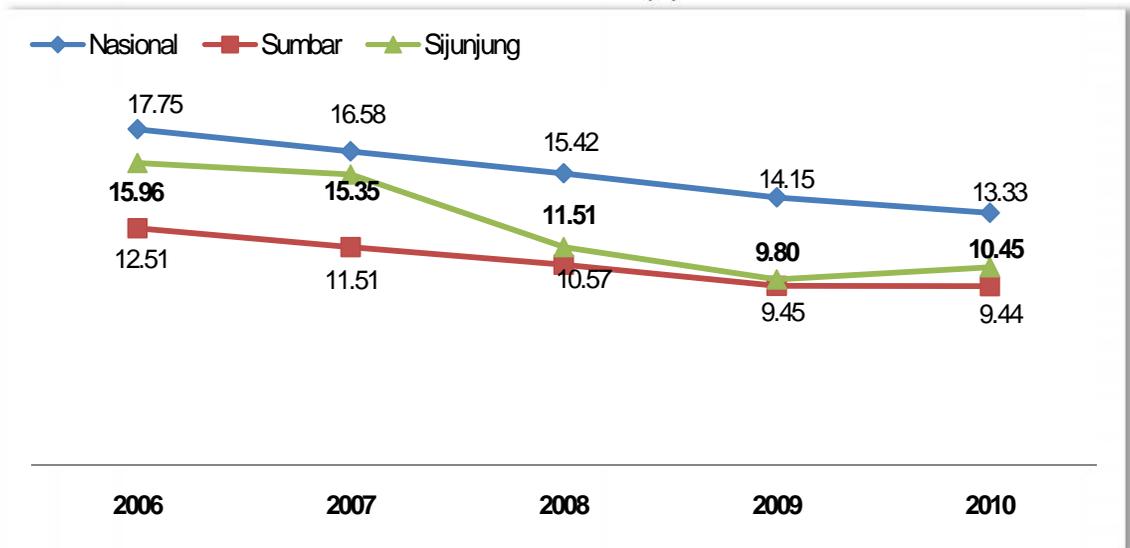
Tahun	Total Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Rasio Rumah Tangga Miskin (%)
2006	46.637	12.920	27,70
2007	46.704	11.552	24,73
2008	48.816	10.827	22,18
2009	50.228	9.106	18,13

Sumber : Sijunjung dalam Angka, 2005-2009 dan diolah sendiri

Sedangkan data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan Kabupaten Sijunjung periode 2006-2010 menunjukkan juga adanya penurunan, dimana tingkat kemiskinan pada tahun 2006 sebesar 15,96% dengan jumlah penduduk miskin 30.700 jiwa menjadi 10,45% dengan jumlah penduduk miskin 21.100 jiwa pada tahun 2010 atau tingkat kemiskinan turun 5,51% dan jumlah penduduk miskin turun 9.600 jiwa.

Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Sijunjung periode 2006-2009 dengan nasional dan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan perhitungan BPS, posisi tingkat kemiskinan Kabupaten Sijunjung secara rata-rata nasional berada dibawah, namun secara rata-rata provinsi masih berada diatas. Untuk melihat perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Sijunjung periode 2006-2010 dengan rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.3
 Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan Nasional, Prov. Sumbar dan Kabupaten Sijunjung
 Tahun 2006-2010 (%)



Sumber : BFS Prov. Sumatera Barat, 2010

Melihat perkembangan menurunnya tingkat kemiskinan Kabupaten Sijunjung periode 2006-2010, baik diukur berdasarkan rumah tangga miskin maupun penduduk miskin, menunjukkan program pembangunan yang dilaksanakan selama periode tersebut cukup berhasil. Namun untuk mencapai target nasional pada tahun 2015 sebesar 7,55% (MDG's) dan Provinsi Sumatera Barat tahun sebesar 6,95% diperlukan langkah-langkah strategis dalam menentukan intervensi program dan kegiatan pembangunan dalam upaya menanggulangi kemiskinan untuk lima tahun kedepannya. Dengan analisis tersebut, maka permasalahan kemiskinan merupakan tantangan yang utama akan dihadapi Kabupaten Sijunjung dalam mewujudkan visi pembangunan daerah jangka menengah.

C. Sosial dan Budaya

Secara adat istiadat penduduk Kabupaten Sijunjung sebagian besar merupakan suku Minangkabau yaitu 186.176 jiwa (92,33%), lainnya adalah penduduk dengan suku bangsa Jawa, Batak, Kerinci dan Melayu. Keanekaragaman suku bangsa ini telah mampu memperluas khasanah budaya di Kabupaten Sijunjung. Kembali ke sistem pemerintahan nagari salah satu tujuannya adalah untuk mempertahankan adat isitiadat yang ada di nagari, hingga saat ini dinilai berjalan cukup efektif. Sebagaimana masyarakat Minangkabau lainnya, masyarakat Kabupaten Sijunjung sangat terkenal dan teguh dalam menjalankan "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*". Ini artinya masyarakat menjalankan agama beriringan dengan mempertahankan adat istiadatnya, sehingga terciptanya kerifan lokal yang kuat dalam tatanan masyarakat.

Suatu hal menarik yang bisa menjadi modal bagi Kabupaten Sijunjung dalam menjalankan pembangunan adalah sebuah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masyarakat melalui sub-suku yang ada pada masing-masing nagari dalam Kabupaten Sijunjung ternyata mempunyai hubungan kultural/adat/tali persaudaraan antara satu nagari dengan nagari lainnya. Jika hal ini terus digali dan dikembangkan keberadaanya, maka akan menjadi modal dasar dalam membangun Kabupaten Sijunjung kedepannya. Selain itu, masyarakat Kabupaten Sijunjung dalam kesehariannya juga masih melakukan aktifitas dalam upaya mempertahankan budaya lokal seperti; kegiatan randai, tari, baillau, batobo, berkaul adat, dan lainnya.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah dan waktu tertentu.

Salah satu kegunaan angka-angka PDRB adalah untuk mengetahui tingkat pendapatan. Perhitungan PDRB terdiri dari 2 pendekatan yaitu :

1. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

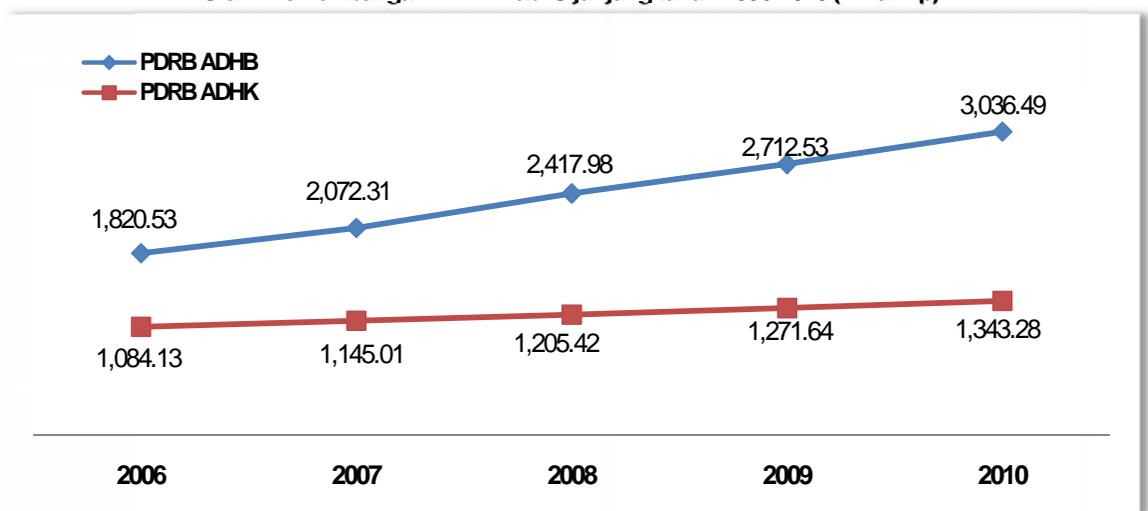
PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga setiap tahun dan perhitungan PDRB harga berlaku untuk melihat penggeseran dan struktur ekonomi.

2. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sedangkan PDRB harga konstan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Perkembangan PDRB Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010 berdasarkan atas dasar harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.4
Grafik Perkembangan PDRB Kab. Sijunjung tahun 2006-2010 (Miliar Rp)



Sumber : PDRB Kabupaten Sijunjung, 2010

Berdasarkan gambar diatas, perkembangan PDRB Kabupaten Sijunjung periode 2006-2010 menunjukkan kecenderungan positif, baik dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Kondisi ini menunjukkan kondisi struktur ekonomi Kabupaten Sijunjung cukup kuat dalam menghadapi krisis ekonomi baik secara nasional maupun global. Pada dasarnya struktur ekonomi daerah memperlihatkan sektor-sektor mana saja yang memberi pengaruh dan kontribusi terhadap PDRB daerah itu sendiri.

Secara umum sektor yang memberikan kontribusi paling besar dalam perekonomian Kabupaten Sijunjung adalah sektor pertanian, jasa-jasa dan pertambangan dan penggalian. Kontribusi sektor lapangan usaha terhadap total PDRB didominasi sektor pertanian dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun terakhir (2006-2010) adalah sebesar 26,58% dan diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 17,41% serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar 16,84%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan dalam perekonomian Kabupaten Sijunjung.

Sementara itu, kontribusi yang dominan terhadap sektor pertanian secara rata-rata selama lima tahun terakhir adalah sub sektor kehutanan sebesar 9,11%, sedangkan sub sektor tanaman pangan dan hortikultura rata-rata kontribusinya sebesar 6,72% dan diikuti sub sektor perkebunan sebesar 5,07. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya pembangunan terhadap sub sektor tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan, sehingga belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung periode 2006 – 2010. Grafik kontribusi sektor lapangan usaha dan sub sektornya terhadap total PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Terhadap Total PDRB Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1. Pertanian	27,03	26,73	26,58	26,34	26,22	26.58
a. Tanaman Pangan dan Holtikultura	6,63	6,75	6,79	6,77	6,64	6.72
b. Tanaman Perkebunan	4,87	5,00	4,99	5,15	5,32	5.07
c. Peternakan	3,41	3,51	3,48	3,40	3,32	3.42
d. Kehutanan	9,78	9,25	9,06	8,78	8,68	9.11
e. Perikanan	2,34	2,21	2,25	2,25	2,26	2.26
2. Pertambangan dan Penggalian	15,20	16,96	17,06	17,42	17,58	16.84
a. Migas dan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
b. Tanpa Migas & Gas	7,38	10,02	10,10	10,33	10,52	9.67
c. Penggalian	7,82	6,94	6,97	7,09	7,06	7.18
3. Industri Pengolahan	4,23	5,15	5,26	5,34	5,31	5.06
a. Industri migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
b. Industri tanpa migas	4,23	5,15	5,26	5,34	5,31	5.06
4. Listrik Gas dan Air Bersih	1,46	1,22	1,22	1,24	1,26	1.28
a. Listrik	1,42	1,24	1,18	1,20	1,21	1.25
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
c. Air Bersih	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0.04
5. Bangunan	12,47	10,23	10,22	10,19	10,28	10.68
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,27	11,39	11,41	11,31	11,19	11.31
a. Perdagangan besar dan eceran	10,37	10,24	10,51	10,42	10,30	10.37
b. Hotel	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0.01
c. Restoran	0,89	0,89	0,89	0,88	0,87	0.88
7. Pengangkutan dan Komunikasi	8,53	6,80	6,82	6,86	6,93	7.19
a. Angkutan	8,34	6,60	6,61	6,64	6,70	6.98
1. Angkutan Kereta Api	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2. Angkutan Jalan Raya	8,32	6,58	6,59	6,62	6,68	6.96
3. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
4. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
5. Jasa penunjang angkutan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0.02
b. Komunikasi	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0.21
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,54	3,64	3,66	3,66	3,65	3.63
a. Bank	1,19	1,44	1,45	1,44	1,44	1.39
b. Lembaga Keuangan non bank dan jasa penunjang	0,95	0,96	0,86	0,85	0,84	0.89
c. Sewa Bangunan	1,40	1,34	1,34	1,36	1,37	1.36
d. Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0.01
9. Jasa-Jasa	16,26	17,77	17,77	17,65	17,58	17.41
a. Pemerintahan umum dan pertahanan	14,06	15,40	15,40	15,28	15,21	15.07
b. Swasta	2,20	2,37	2,37	2,37	2,37	2.34
1. Sosial Kemasyarakatan	0,85	0,92	0,92	0,92	0,92	0.91
2. Hiburan & Rekreasi	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0.03
3. Perorangan & Rumah tangga	1,33	1,42	1,42	1,42	1,42	1.40
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100	100

Sumber : PDRB Kabupaten Sijunjung, 2010, dan diolah sendiri

Sedangkan laju pertumbuhan PDRB berdasarkan atas harga konstan tahun 2000 menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

Lapangan Usaha	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
1. Pertanian	3,37	1,03	4,68	4,54	5,17	3,76
a. Tanaman Pangan dan Holtikultura	5,98	3,98	5,96	5,10	3,69	4,94
b. Tanaman Perkebunan	2,67	7,68	4,99	8,91	9,23	6,70
c. Peternakan	14,32	6,13	4,60	2,90	3,10	6,21
d. Kehutanan	-0,83	-5,07	3,11	2,15	4,47	0,77
e. Perikanan	1,98	-2,28	6,83	5,40	6,15	6,62
2. Pertambangan dan Penggalian	3,83	11,72	5,93	7,68	6,60	7,15
a. Migas dan Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Tanpa Migas & Gas	-5,40	15,11	6,07	7,95	7,54	6,25
c. Penggalian	19,44	7,17	5,72	7,30	5,23	8,97
3. Industri Pengolahan	6,48	7,11	7,38	7,24	5,04	6,65
a. Industri migas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Industri tanpa migas	6,48	7,11	7,38	7,24	5,04	6,65
4. Listrik Gas dan Air Bersih	37,49	11,15	3,28	7,08	7,25	13,25
a. Listrik	39,85	11,29	3,17	7,12	7,27	13,74
b. Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Air Bersih	-7,71	6,99	6,43	5,84	6,78	3,67
5. Bangunan	9,88	3,06	5,16	5,17	6,59	5,97
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	5,86	5,14	5,50	4,56	4,47	5,11
a. Perdagangan besar dan eceran	5,83	5,16	5,48	4,56	4,47	5,10
b. Hotel	5,12	7,49	5,86	5,23	6,70	6,08
c. Restoran	6,22	4,83	5,70	4,62	4,38	5,15
7. Pengangkutan dan Komunikasi	9,21	7,11	5,53	6,12	6,74	6,38
a. Angkutan	9,00	6,96	5,36	6,99	6,61	6,98
1. Angkutan Kereta Api	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Angkutan Jalan Raya	9,02	6,96	5,36	5,99	6,62	6,79
3. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Angkutan Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Jasa penunjang angkutan	5,53	5,82	5,56	5,61	5,82	5,67
b. Komunikasi	16,71	12,43	11,27	10,96	10,57	12,39
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,46	5,40	5,97	5,30	5,56	5,14
a. Bank	8,11	9,83	6,27	4,50	5,26	6,79
b. Lembaga Keuangan Non bank & jasa penunjang	-0,87	1,21	5,87	4,46	3,90	2,91
c. Sewa Bangunan	1,91	3,63	5,71	6,70	6,94	4,98
d. Jasa Perusahaan	6,17	4,37	4,42	4,24	3,98	4,64
9. Jasa-Jasa	7,52	7,85	4,76	4,77	5,22	6,02
a. Pemerintahan umum dan pertahanan	8,12	7,94	4,51	4,69	5,14	6,08
b. Swasta	3,71	7,27	6,44	5,29	5,75	5,69
1. Sosial Masyarakat	0,61	9,79	6,67	5,29	5,86	5,64
2. Hiburan & Rekreasi	8,17	5,01	5,11	5,11	5,49	5,78
3. Perorangan dan rumah tangga	5,64	5,76	6,32	5,29	5,69	5,74
Pertumbuhan Ekonomi	5,95	5,61	5,28	5,49	5,63	

Sumber : PDRB Kabupaten Sijunjung, 2010, dan diolah sendiri

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa besarnya kontribusi sektor lapangan usaha pertanian belum didukung oleh rata-rata pertumbuhan sektor ini selama lima tahun terakhir (2006-2010). Rata-rata pertumbuhan sektor pertanian selama lima tahun terakhir tersebut mencapai 3,76% atau masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung yang sebesar 5,63% pada tahun 2010. Selanjutnya, sektor lapangan usaha listrik, gas dan air bersih yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap total PDRB ternyata juga memiliki pertumbuhan di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 13,25%. Besarnya pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih ini didukung oleh sub sektor listrik yang tumbuh rata-rata sebesar 13,74%. Sektor pertambangan dan penggalian dalam lima tahun terakhir ini juga memberikan kontribusi diatas rata-

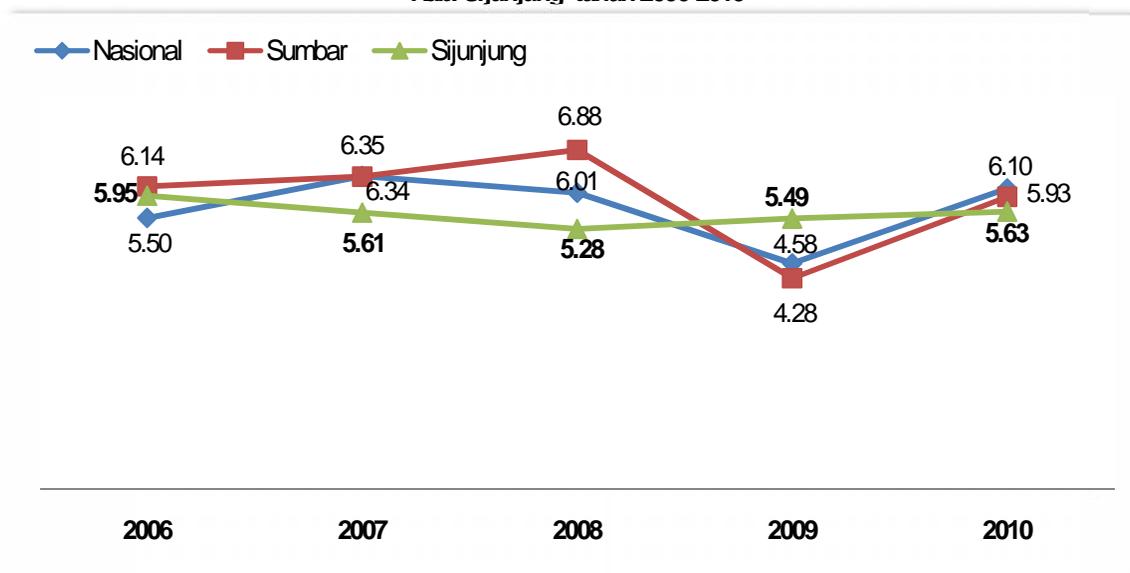
rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7,15%, hal ini didukung oleh sub sektor penggalian yang tumbuh rata-rata sebesar 8,97%.

Perhitungan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 menjadi pedoman dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemajuan ekonomi daerah dalam mewujudkan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah karena pertumbuhan ekonomi mencerminkan terjadinya ekspansi kegiatan ekonomi, baik secara keseluruhan sektor maupun secara parsial satu sektor ekonomi, sehingga memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan daerah. Salah satu dampak positif dari pertumbuhan ekonomi daerah adalah mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran dan berimplikasi menurunnya tingkat kemiskinan.

Dalam kurun waktu 2006-2010 kondisi perekonomian Kabupaten Sijunjung menunjukkan adanya stagnasi, hal ini terlihat adanya kecenderungan melambatnya pertumbuhan ekonomi periode 2006-2008, namun sejak tahun 2009 menunjukkan pertumbuhan yang meningkat hingga tahun 2010. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung pada tahun 2010, namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung masih lebih lambat karena menempati peringkat 14 dari 19 kabupaten/kota.

Jika dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat periode 2006-2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung masih dibawah. Namun pada tahun 2009 tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat, hal ini disebabkan sebagian daerah di Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun tersebut mengalami bencana alam, terutama gempa bumi, sehingga secara tidak langsung berimplikasi terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi. Gambaran perbandingan pertumbuhan ekonomi Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.5
Grafik Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Prov. Sumbar dan Kab. Sijunjung tahun 2006-2010



Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, 2010

Sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung dalam periode 2008–2010 menurut lapangan usaha penyumbang terbesar sektor pertanian dan pertambangan dan penggalian, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sijunjung Tahun 2008 – 2010

Lapangan Usaha	2008	2009	2010
1. Pertanian	1,25	1,21	1,36
2. Pertambangan dan Penggalian	1,01	1,31	1,15
3. Industri Pengolahan	0,38	0,38	0,27
4. Listrik Gas dan Air Bersih	0,04	0,09	0,09
5. Bangunan	0,53	0,53	0,67
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,63	0,52	0,51
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,38	0,42	0,46
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	0,22	0,19	0,20
9. Jasa-Jasa	0,85	0,85	0,92
Pertumbuhan Ekonomi	5,28	5,49	5,63

Sumber : PDRB Kabupaten Sijunjung,, 2010

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

PDRB perkapita merupakan salah satu informasi yang lazim dijadikan patokan untuk melihat kesejahteraan masyarakat dalam suatu daerah, karena secara tidak langsung dapat dilihat rata-rata pendapatan yang dapat dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu tahun. Walaupun tetap dalam kenyataannya tidak seluruh penduduk secara merata menerima pendapatan tersebut. Perhitungan PDRB perkapita tersebut menggunakan data PDRB atas harga berlaku dengan membagi dengan jumlah penduduk, sehingga diperoleh PDRB per kapita pada tahun tersebut.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.11
Perkembangan Pendapatan Per kapita Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2010

Tahun	PDRB Atas Harga Berlaku (juta Rp)	Jumlah penduduk (jiwa)	Pendapatan Per Kapita (juta Rp)
2006	1.820.531,61	185.937	9,34
2007	2.072.308,67	189.632	10,84
2008	2.417.981,86	193.473	12,41
2009	2.694.855,25	197.463	13,58
2010	3.036.492,34	201.823	15,05

Sumber : Sijunjung Dalam Angka, 2005-2009 dan diolah sendiri

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Sijunjung dari tahun ke tahun. Secara umum, terjadinya peningkatan pendapatan per kapita tersebut tidak lepas dari besarnya pertumbuhan sektor-sektor pembentuk PDRB Kabupaten Sijunjung.

C. Inflasi

Inflasi pada dasarnya merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi. Inflasi sendiri diartikan sebagai suatu keadaan dimana harga-harga umum meningkat secara terus menerus. Melalui kenaikan harga umum tersebut berarti semua unit ekonomi (konsumen dan produsen) akan membeli barang dengan jumlah sedikit tetapi dengan pengeluaran sama, sehingga mereka akan mengurangi konsumsi. Namun demikian inflasi yang terlalu deras harus

dihindari karena dapat mengganggu struktur perekonomian, sehingga pembangunan justru akan berhenti. Disamping itu dengan inflasi yang terlalu besar juga akan merusak struktur upah, struktur harga dan menghentikan investasi yang digantikan oleh usaha spekulasi.

Rata-rata Inflasi di Kabupaten Sijunjung dari tahun 2005 hingga tahun 2009 adalah sebesar 9,93%, adapun inflasi yg paling tinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 12,65% dan terendah pada tahun 2009 sebesar 6,48%. Tingginya tingkat inflasi pada tahun 2005 ini terjadi karena adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM oleh pemerintah Pusat yang menyebabkan kenaikan harga dari berbagai komoditi. Pada tahun 2007 Inflasi Kabupaten Sijunjung lebih rendah dari pada dua tahun sebelumnya, rendahnya tingkat inflasi pada tahun 2007 ini terjadi karena adanya penyesuaian kondisi stabilitas harga yang melambung setelah kenaikan harga BBM yang berdampak inflasi tinggi selama tahun 2005 dan 2006. Namun pada tahun 2008 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 10,55%, sedangkan tahun 2009 tingkat inflasi turun secara signifikan dan merupakan tingkat inflasi yang terendah selama periode 2005-2009.

1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

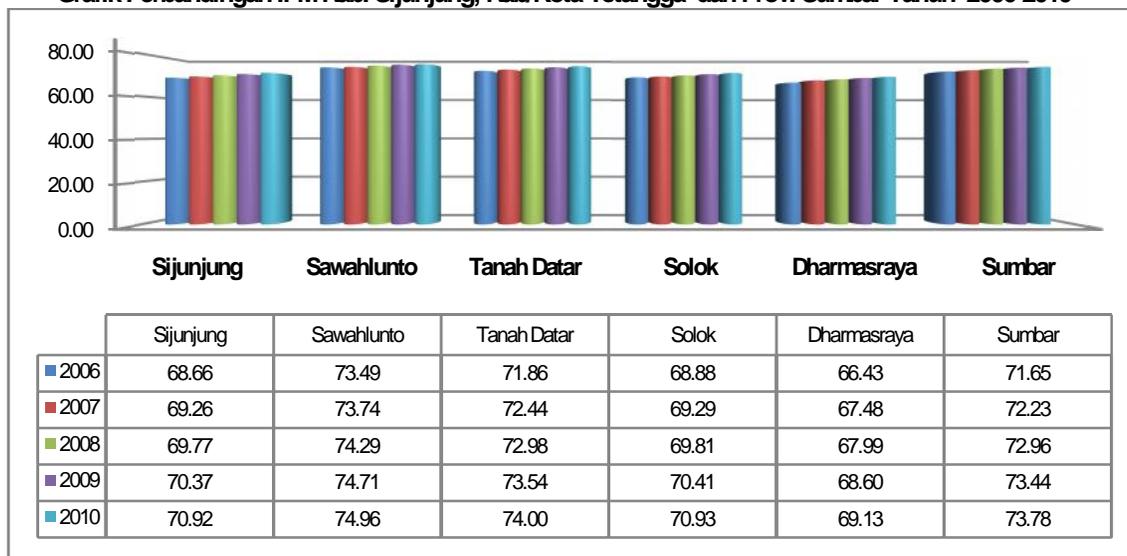
Dalam mengukur kesejahteraan sosial masyarakat baik di suatu negara dan maupun di daerah indikator yang digunakan mengacu kepada target Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDG's) yaitu; a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), b) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan c) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator untuk mengetahui tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, meliputi : angka umur harapan hidup untuk mengukur peluang hidup, rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf untuk mengukur status pendidikan serta pengeluaran riil perkapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya dalam standar hidup layak.

Perkembangan IPM Kabupaten Sijunjung dalam periode 2006-2010 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2006 IPM Kabupaten Sijunjung sebesar 68,66 meningkat pada tahun 2010 sebesar 70,97. Angka ini termasuk pada golongan IPM menengah atas yang memiliki nilai batas 65-80, namun masih dalam kategori daerah tertinggal. Terjadinya peningkatan IPM Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu 2006-2010 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sijunjung dari tahun ke tahun. Namun jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota tetangga, posisi IPM Kabupaten Sijunjung masih rendah, kecuali dengan Kabupaten Dharmasraya. Gambaran perbandingan IPM Kabupaten Sijunjung dengan kabupaten/kota tetangga dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2006-2010, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.6
Grafik Perbandingan IPM Kab. Sijunjung, Kab/Kota Tetangga dan Prov. Sumbar Tahun 2006-2010



Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, 2010

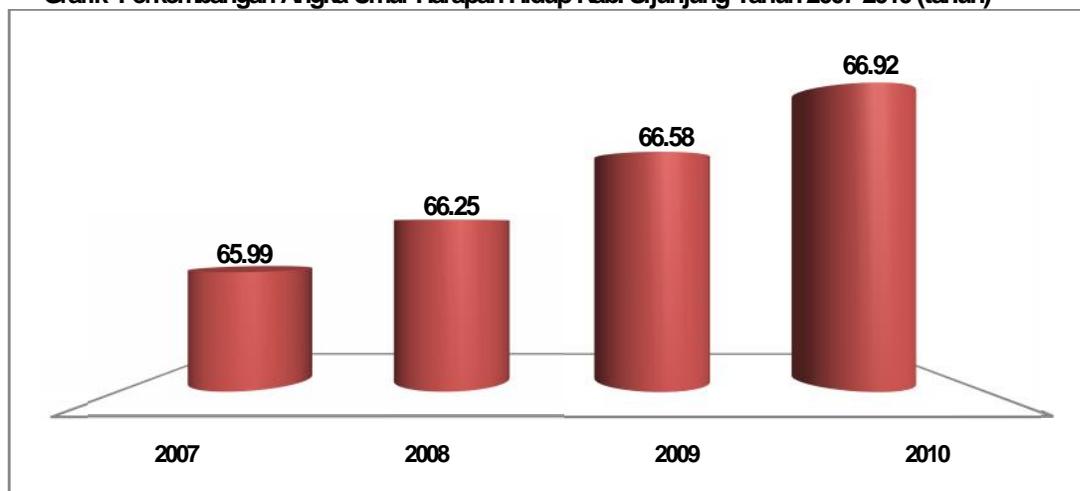
Posisi IPM Kabupaten Sijunjung pada tahun 2010 dibandingkan dengan 11 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat berada di posisi 8, sedangkan dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota berada di posisi 15. Kondisi ini menunjukkan masih tertinggalnya Kabupaten Sijunjung dalam membangun sumber daya manusia dibandingkan 14 kabupaten/kota lainnya.

Untuk mengetahui perkembangan masing-masing komposit indikator yang digunakan dalam menghitung IPM Kabupaten Sijunjung periode 2007-2010, dijelaskan sebagai berikut :

1) Angka umur Harapan Hidup

Perkembangan Angka umur Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Sijunjung dalam periode 2007-2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sebesar 65,99 tahun pada tahun 2007 menjadi 66,98 tahun pada tahun 2010, hal ini menunjukkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan mengalami peningkatan, sehingga menambah harapan penduduk untuk hidup lebih panjang. Hal ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.7
Grafik Perkembangan Angka Umur Harapan Hidup Kab. Sijunjung Tahun 2007-2010 (tahun)

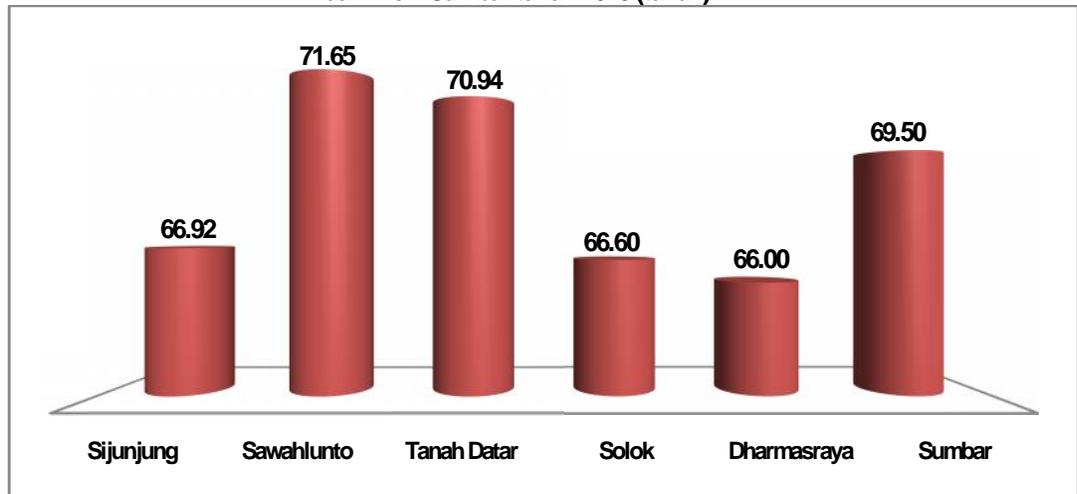


Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, 2010

Sedangkan posisi angka umur harapan hidup Kabupaten Sijunjung dibandingkan dengan kabupaten/kota tetangga dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 masih rendah, kecuali dengan Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok. Gambaran perbandingan angka

umur harapan hidup Kabupaten Sijunjung dengan kabupaten/kota tetangga dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.8
Grafik Perbandingan Angka Umur Harapan Hidup Kab. Sijunjung dengan Kabupaten/Kota Tetangga dan Prov. Sumbar tahun 2010 (tahun)

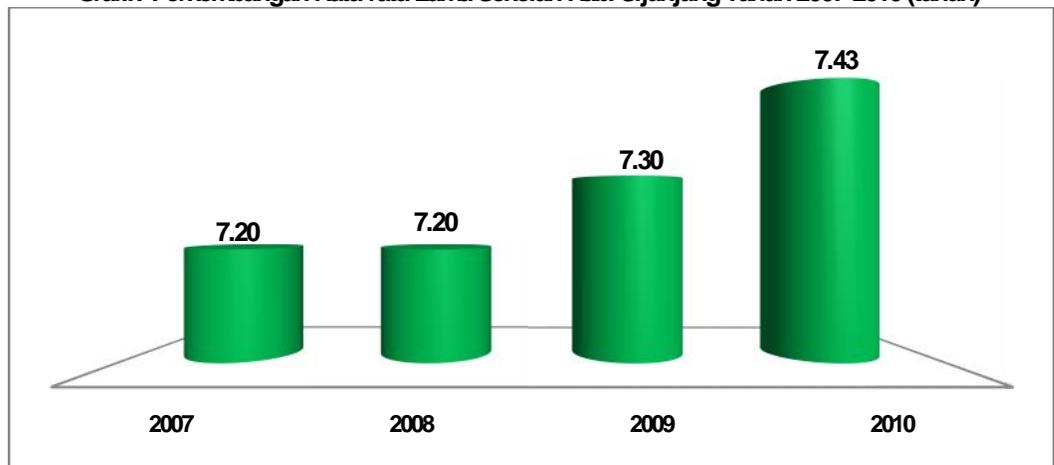


Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, 2010

2) Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2010 baru mencapai 7,40 tahun atau setara dengan kelas 1 SMP. Perkembangan Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sijunjung dalam periode 2007-2010 tidak mengalami peningkatan cukup signifikan, hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya masih rendah hanya sampai di tingkat SMP. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sijunjung dalam periode 2007-2010, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

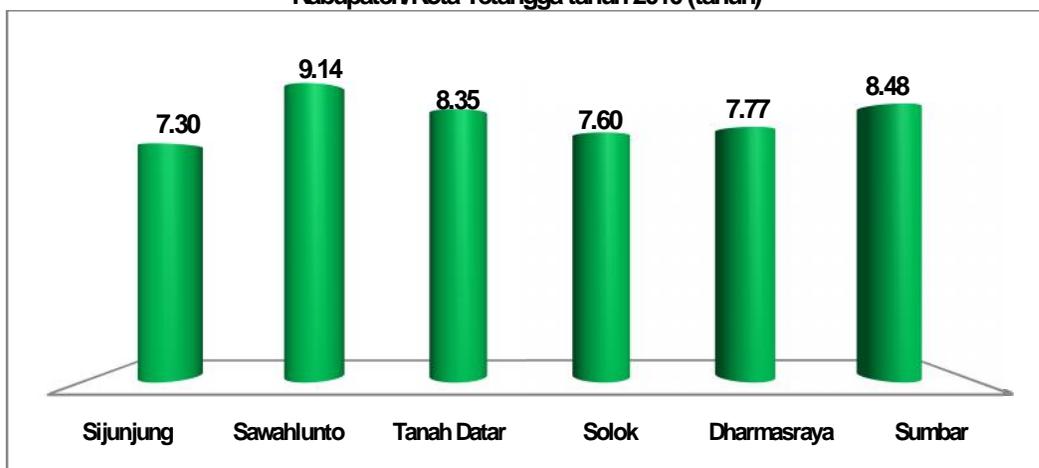
Gambar 2.9
Grafik Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kab. Sijunjung Tahun 2007-2010 (tahun)



Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, 2010

Jika dibandingkan rata-rata lama sekolah Kabupaten Sijunjung dengan kabupaten/kota tetangga dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 posisinya masih dibawah, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.10
 Grafik Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Prov. Sumbar, Kab. Sijunjung dan
 Kabupaten/Kota Tetangga tahun 2010 (tahun)

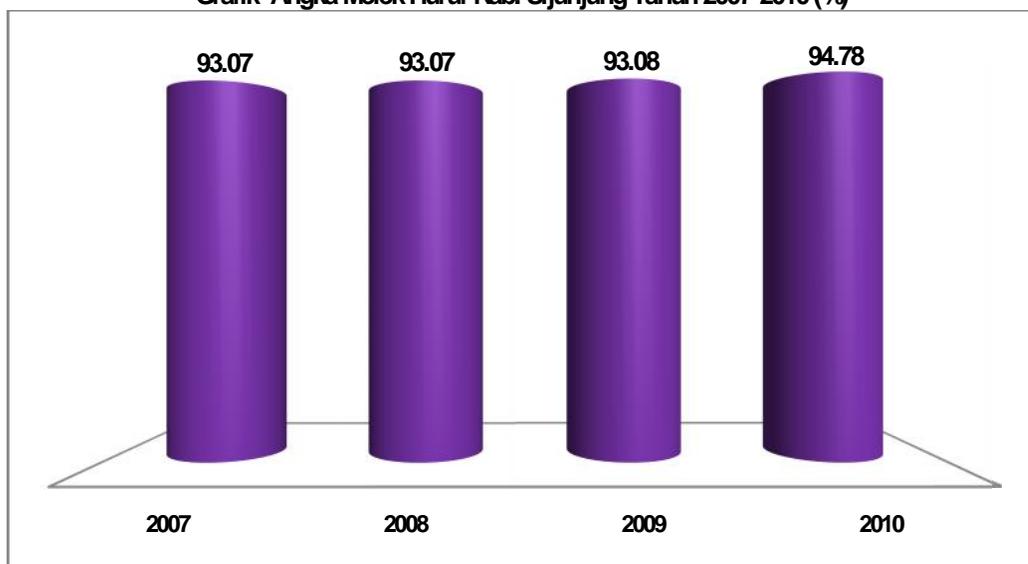


Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, 2010

3) Angka Melek Huruf

Angka melek huruf merupakan gambaran seberapa banyak masyarakat berusia lebih 15 tahun dapat membaca dan menulis. Angka melek huruf di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2010 terakhir mengalami peningkatan cukup signifikan, dimana pada tahun 2007 sebesar 93,07% meningkat menjadi 94,78% pada tahun 2010. Kondisi ini menunjukkan program penurunan angka buta aksara mengalami kemajuan cukup berarti, hal ini disebabkan adanya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk belajar pendidikan keaksaraan. Perkembangan angka melek huruf Kabupaten Sijunjung periode 2007-2010 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

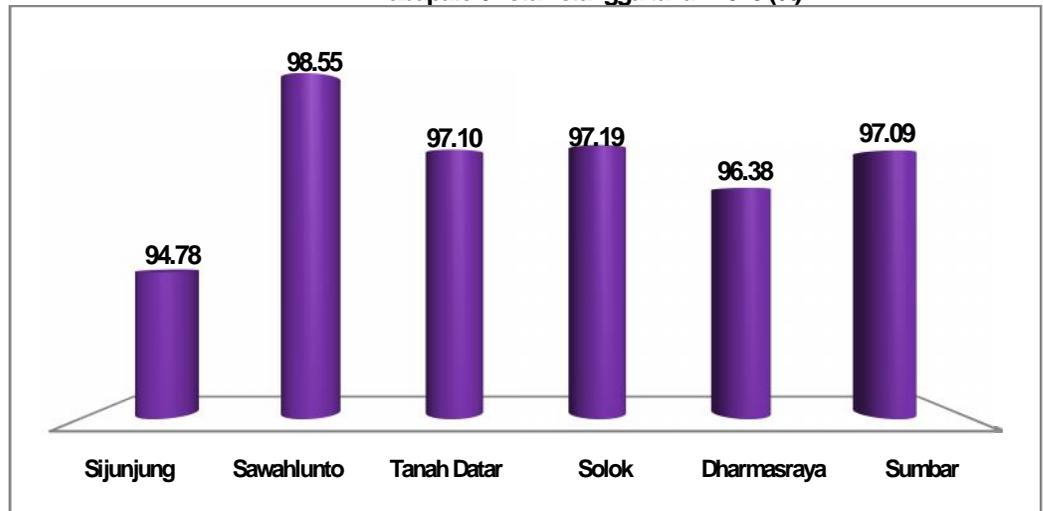
Gambar 2.11
 Grafik Angka Melek Huruf Kab. Sijunjung Tahun 2007-2010 (%)



Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, 2010

Angka melek huruf Kabupaten Sijunjung dibandingkan dengan kabupaten/kota tetangga dan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2010 masih jauh tertinggal, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.12
Grafik Perbandingan Angka Melek Huruf Prov. Sumbar, Kab. Sijunjung dan
Kabupaten/Kota Tetangga tahun 2010 (%)

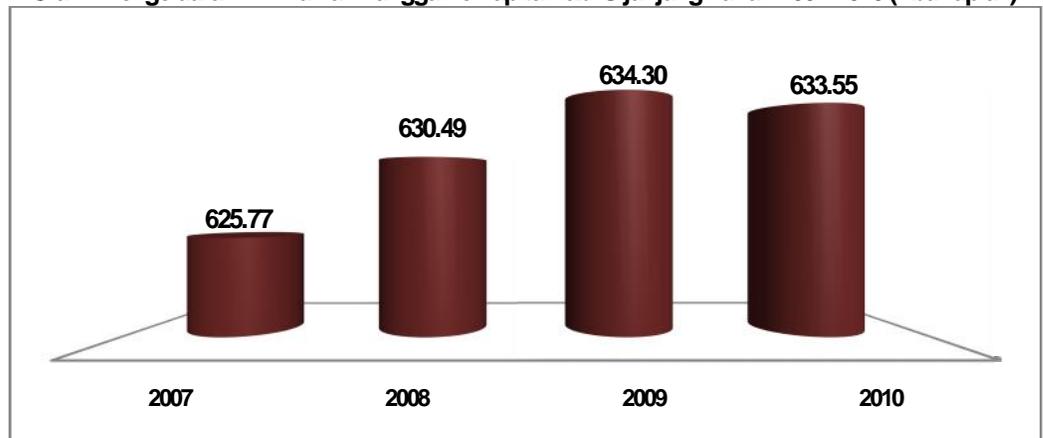


Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, 2010

4) Pengeluaran Riil Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran riil rumah tangga perkapita merupakan indikator untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat. Pengeluaran riil rumah tangga perkapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu empat tahun terakhir mengalami peningkatan yang signifikan, dimana pada tahun 2007 sebesar Rp 625,77 ribu meningkat menjadi Rp 633,55 ribu pada tahun 2010. Namun angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009. Perkembangan pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Sijunjung periode tahun 2007-2010 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

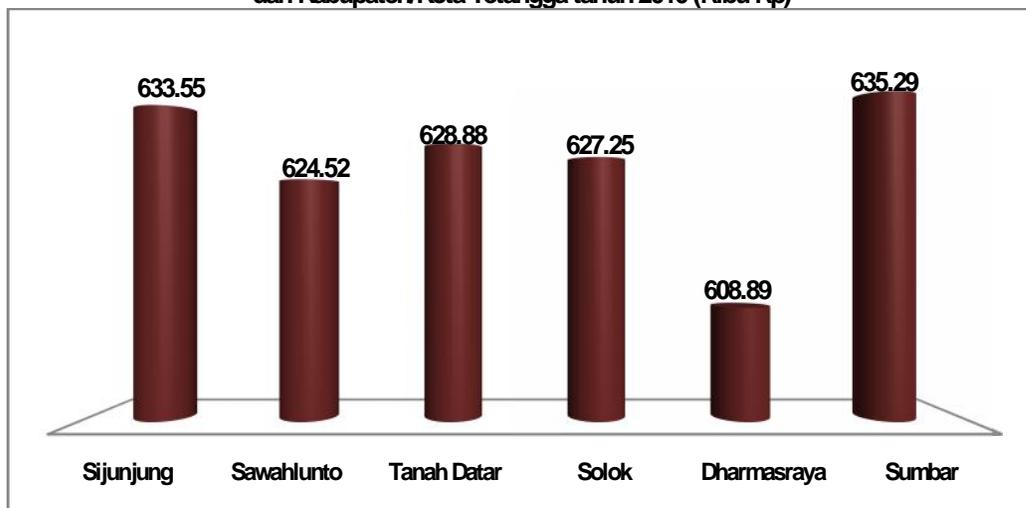
Gambar 2.13
Grafik Pengeluaran Riil Rumah Tangga Perkapita Kab. Sijunjung Tahun 2007-2010 (ribu rupiah)



Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, 2010

Pengeluaran riil perkapita masyarakat Kabupaten Sijunjung pada tahun 2010 termasuk posisi tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota tetangga, sedangkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat posisinya masih dibawah, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.14
Grafik Perbandingan Pengeluaran Riil Rumah Tangga Perkapita Prov. Sumbar, Kab. Sijunjung dan Kabupaten/Kota Tetangga tahun 2010 (Ribu Rp)



Sumber : BPS Prov. Sumatera Barat, 2010

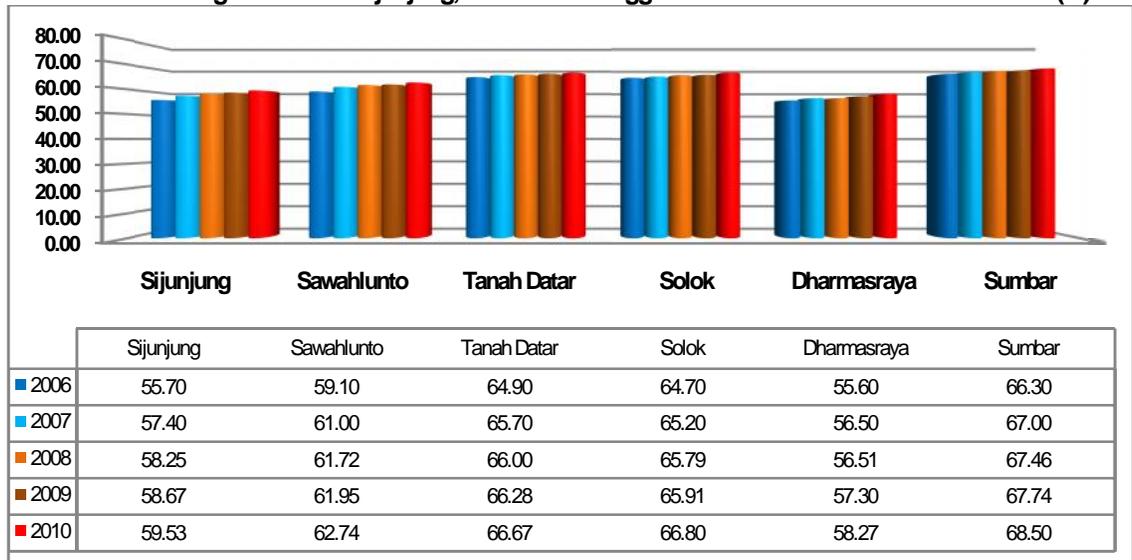
B. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang mencerminkan terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) yang ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Mengukur tercapainya kesetaraan gender dilihat dari samanya nilai IPG dengan nilai IPM. Komposit indikator yang digunakan dalam mengukur IPG adalah perbandingan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan : a) angka harapan hidup, b) angka melek huruf, c) rata-rata lama sekolah, dan d) pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Perkembangan IPG Kabupaten Sijunjung dalam periode 2006-2010 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2006 IPG Kabupaten Sijunjung sebesar 55,70% meningkat pada tahun 2010 sebesar 59,53%. Namun peningkatan IPG dalam kurun lima tahun terakhir belum menunjukkan adanya kesetaraan gender di Kabupaten Sijunjung karena masih jauh dari angka IPM sebesar 70,92 dalam periode yang sama.

Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota tetangga, posisi IPG Kabupaten Sijunjung hanya diatas Kabupaten Dharmasraya. grafikan perbandingan IPG Kabupaten Sijunjung dengan kabupaten/kota tetangga dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2006-2010, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.15
Grafik Perbandingan IPG Kab. Sijunjung, Kab/Kota Tetangga dan Prov. Sumbar Tahun 2006-2010 (%)



Sumber : *Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2005-2012*

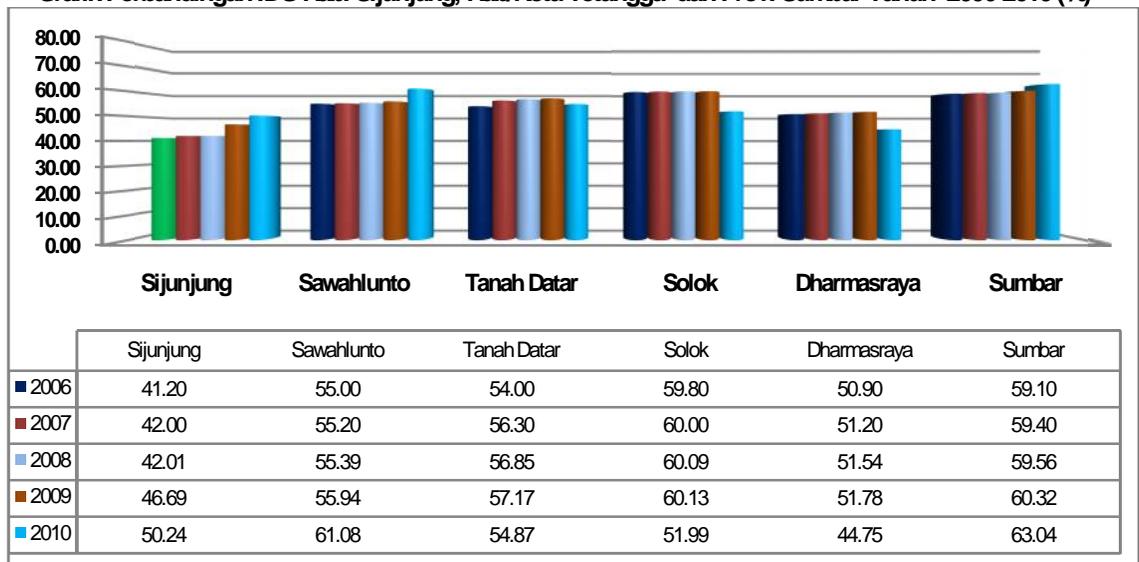
Sementara itu, posisi IPG Kabupaten Sijunjung pada tahun 2010 dibandingkan dengan 18 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat berada di posisi 17. Kondisi ini menunjukkan masih tertinggalnya Kabupaten Sijunjung dalam membangun kesetaraan gender dibandingkan dengan 16 kabupaten/kota lainnya.

C. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan di bidang politik maupun di bidang ekonomi. Kondisi ini tercapai apabila IPM dan IPG telah memiliki nilai yang sama dalam periode yang sama. Komposit indikator yang digunakan dalam mengukur IDG adalah: a) keterlibatan perempuan di parlemen, b) perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi, dan c) sumbangan perempuan dalam pembangunan

Perkembangan IDG Kabupaten Sijunjung dalam periode 2006-2010 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2006 IDG Kabupaten Sijunjung sebesar 41,20% meningkat pada tahun 2010 sebesar 50,24%. Namun peningkatan IPG dalam kurun lima tahun terakhir belum menunjukkan keberhasilan Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan pemberdayaan gender karena dibandingkan dengan IDG Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota tetangga, posisi IPG Kabupaten Sijunjung masih tertinggal. Gambar perbandingan IDG Kabupaten Sijunjung dengan kabupaten/kota tetangga dan Provinsi Sumatera Barat tahun 2006-2010, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.16
Grafik Perbandingan IDG Kab. Sijunjung, Kab/Kota Tetangga dan Prov. Sumbar Tahun 2006-2010 (%)



Sumber : *Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2005-2012*

Sedangkan posisi IDG Kabupaten Sijunjung pada tahun 2010 dibandingkan dengan 18 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat berada di posisi 15. Kondisi ini menunjukkan masih tertinggalnya Kabupaten Sijunjung dalam membangun pemberdayaan gender dibandingkan dengan 14 kabupaten/kota lainnya.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Pelayanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

Kemajuan kualitas pelayanan di bidang pendidikan dapat diukur melalui 2 (dua) aspek yaitu : a) ketersediaan pelayanan pendidikan, dan b) keterjangkauan pelayanan pendidikan. Aspek ketersediaan pelayanan pendidikan diukur melalui rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah usia anak sekolah dan rasio guru terhadap murid dengan metode penghitungan jumlah guru tingkat pendidikan per 1000 jumlah murid. Sedangkan aspek keterjangkauan pelayanan pendidikan pencapaiannya dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di setiap tingkatan pendidikan dan nilai rata-rata Ujian Nasional (UN).

A. Ketersediaan Pelayanan Pendidikan

Untuk mengukur ketersediaan pelayanan pendidikan yang lazim digunakan adalah : 1) rasio ketersediaan sekolah setiap tingkatan pendidikan, dan 2) rasio guru terhadap murid setiap tingkatan pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah dihitung berdasarkan jumlah sekolah setiap tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Sedangkan rasio guru terhadap murid dihitung berdasarkan jumlah guru setiap tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid.

1) Rasio ketersediaan Sekolah Dasar (SD)

Rasio ketersediaan SD di Kabupaten Sijunjung cenderung fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2006-2010), hal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.12
Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar/Penduduk Usia Sekolah (7-12 Tahun)
di Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

Indikator rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah SD	160	197	199	200	202
Jumlah Penduduk Usia 7-12 tahun	27.412	27.412	27.889	27.740	29.490
Rasio ketersediaan sekolah/pddk usia sekolah	58,37	71,87	71,35	72,10	67,82

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2010 dan diolah sendiri

Berdasarkan tabel diatas, terlihat jelas peningkatan jumlah unit sekolah setiap tahun tidak diimbangi dengan kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah (7-12 tahun). Untuk itu, perlu kebijakan dan program yang tepat untuk mengatasi hal ini, sehingga tidak ada murid sekolah yang tidak bisa bersekolah karena tidak alasan tidak tersedianya tempat belajar atau sekolah yang menampungnya.

Sedangkan rasio jumlah guru dan murid di Kabupaten Sijunjung dalam periode 2006-2010 juga mengalami angka fluktuatif, dimana pada tahun 2006 rasio guru dengan murid adalah 67,50 kemudian turun menjadi 59,90 pada tahun 2007 dan hingga tahun 2009 rasio guru terhadap murid cenderung meningkat. Namun pada tahun 2010 mengalami penurunan dari 75,92 pada tahun 2009 turun menjadi 70,36 pada tahun 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode 2006-2010 peningkatan jumlah guru tidak berbanding lurus dengan peningkatan dengan jumlah murid. Rasio guru terhadap murid SD di Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2010, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.13
Rasio Guru Sekolah Dasar Terhadap Murid di Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

Indikator rasio guru /murid	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah guru SD	1.444	1.642	1.809	2.106	2.075
Jumlah murid SD	21.392	27.412	27.889	27.740	29.490
Rasio guru / murid	67,50	59,90	64,86	75,92	70,36

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010 dan diolah sendiri

2) Rasio ketersediaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)

Rasio ketersediaan sekolah di tingkat SLTP dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan cenderung naik, namun belum mencapai angka yang ideal. Kondisi ini menunjukkan tidak seimbangya ketersediaan sekolah di tingkat SLTP seiring meningkatnya jumlah penduduk berusia sekolah. Untuk melihat perkembangan rasio ketersediaan SLTP terhadap penduduk usia sekolah di Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14
Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia SLTP (13-15 Tahun) di Kabupaten Sijunjung
Tahun 2006 – 2010

Indikator rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah	2006	2007	2008	2009	2010
Jmlah SLTP (SMP S,N+ MTs)	26	42	45	50	50
Jumlah Penduduk Usia Pendidikan (13 – 15 Thn)	5.971	6.921	7.536	8.281	10.323
Rasio ketersediaan sekolah/pddk usia sekolah	43,54	60,68	59,71	60,38	61,90

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010 dan diolah sendiri

Selanjutnya, rasio guru di tingkat SLTP terhadap murid dalam periode 2007-2010 cenderung meningkat, dimana pada tahun 2007 rasio guru terhadap murid sudah mencapai 71 guru untuk 1.000 orang murid meningkat pada tahun 2010 menjadi 97 orang guru untuk 1.000 orang murid. Kondisi ini secara kuantitas menunjukkan, berbanding lurusnya penambahan jumlah guru terhadap meningkatnya jumlah murid dari tahun ke tahun, namun angka tersebut belum menunjukkan angka yang ideal. Perkembangan rasio guru SLTP terhadap murid di Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.15
Rasio Guru SMP Terhadap Murid di Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

Indikator rasio guru /murid	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah guru SLTP	489	489	638	749	945
Jumlah murid SLTP	5.971	6.921	7.536	8.281	8.230
Rasio guru / murid	81,90	70,65	84,66	90,45	96,97

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010 dan diolah sendiri

3) Rasio ketersediaan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)

Rasio ketersediaan sekolah di tingkat SLTA dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2006-2009) cenderung berfluktuasi, dimana pada tahun 2006 rasio ketersediaan SLTA sebesar 33,17 meningkat menjadi 36,97 pada tahun 2007, namun pada tahun 2008 turun menjadi 31,02 dan pada tahun 2009 naik menjadi 37,11, sedangkan pada tahun 2010 turun menjadi 36,44. Kondisi ini menunjukkan belum seimbangnnya ketersediaan sekolah terhadap seiring meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah. Perkembangan rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia SLTA Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.16
Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia SLTA (16-18 Tahun) di Kabupaten Sijunjung
Tahun 2006– 2010

Indikator rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah SLTA (SMA & SMK S,N + MA)	14	13	11	20	21
Jumlah Penduduk Usia Sekolah (16-18 tahun)	4.221	3.516	3.546	5.390	5.763
Rasio ketersediaan sekolah/pddk usia sekolah	33,17	36,97	31,02	37,11	36,44

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010 dan diolah sendiri

Sedangkan rasio guru terhadap murid SLTA di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2006, dimana pada tahun 2006 rasio guru 97,16 naik menjadi 107,30 pada tahun 2010. Namun kondisi ini belum menunjukkan angka yang ideal secara kuantitas, maka diperlukan penambahan jumlah guru SLTA. Perkembangan rasio guru terhadap murid SLTA Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

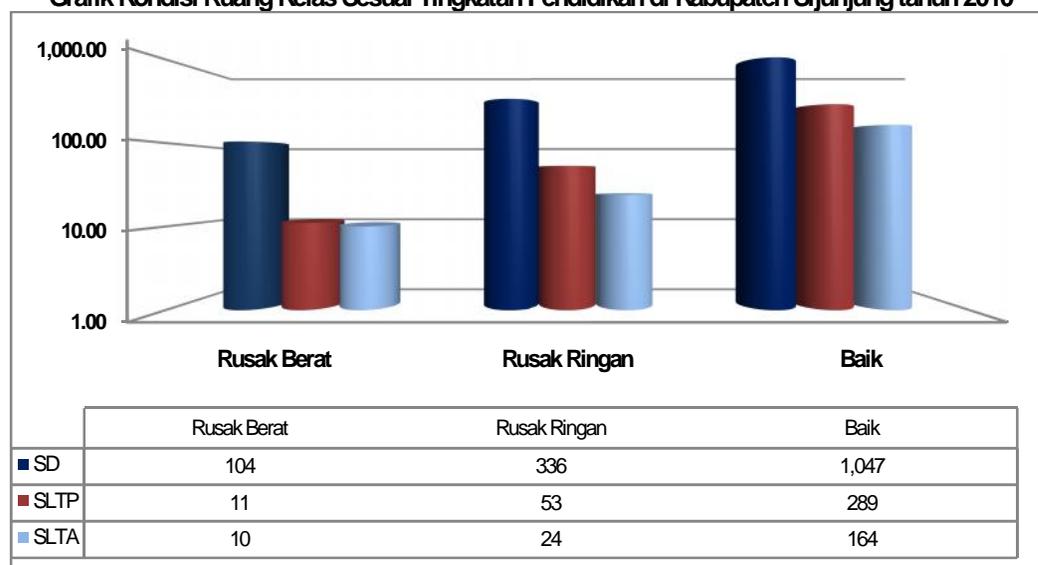
Tabel 2.17
Rasio Guru Sekolah Menengah Atas Terhadap Murid di Kabupaten Sijunjung
Tahun 2006 – 2010

Indikator rasio guru /murid	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah guru SLTA	410	296	325	334	623
Jumlah murid	4.221	3.516	3.546	5.390	5.806
Rasio guru / murid	97,13	84,19	91,65	61,97	107,30

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010 dan diolah sendiri

Ketersediaan pelayanan pendidikan tidak hanya melihat rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah dan rasio guru terhadap jumlah murid, namun kondisi ruang kelas dapat mempengaruhi terhadap pencapaian rasio tersebut. Pada tahun 2010 secara kuantitas kondisi ruang kelas yang baik di semua tingkat pendidikan sudah menunjukkan jumlah yang signifikan terhadap total ruang kelas yang ada. Namun masih terdapatnya kondisi ruang kelas yang rusak berat, terutama di tingkat SD sebanyak 104 ruang kelas, sedangkan SLTP dan SLTA relatif sedikit. Kondisi ruang kelas berdasarkan jenisnya sesuai dengan tingkatan pendidikan di Kabupaten Sijunjung pada tahun 2010 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.17
Grafik Kondisi Ruang Kelas Sesuai Tingkatan Pendidikan di Kabupaten Sijunjung tahun 2010



Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2010

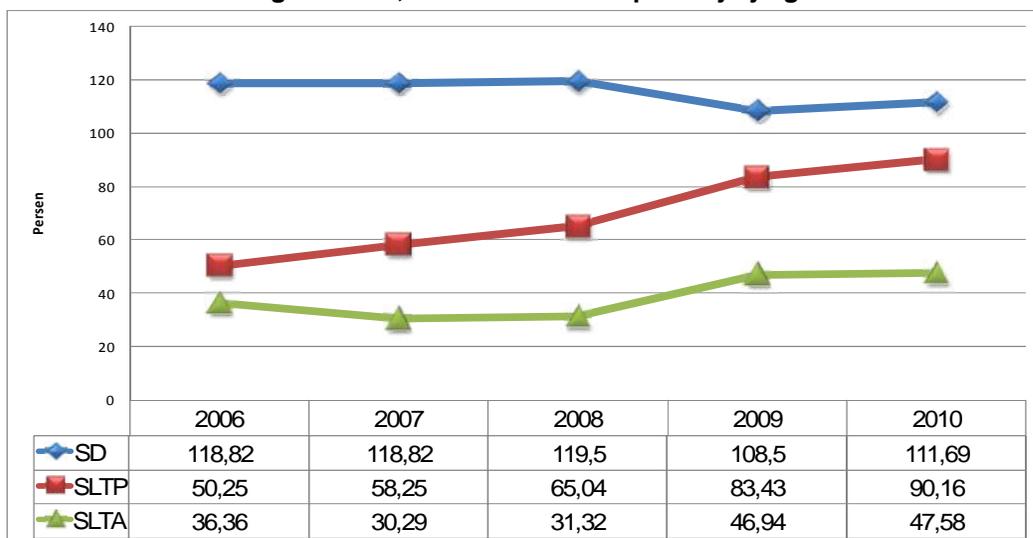
B. Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Perkembangan APK untuk tingkat SLTP dan SLTA di Kabupaten Sijunjung lima tahun terakhir ini (2006-2010) cenderung meningkat secara signifikan, sedangkan untuk tingkat SD cenderung menurun namun angka tersebut masih diatas 100%. Perkembangan APK

SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.18
Grafik Perkembangan APK SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010

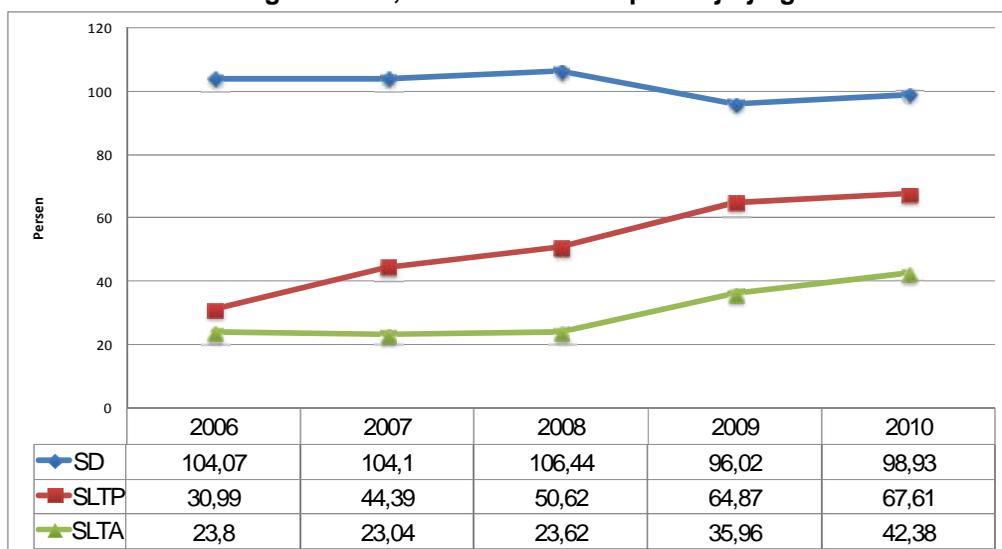


Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Perkembangan APM Kabupaten Sijunjung periode 2006-2010 tingkat SD/MI sudah melebihi standar nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 129a/U/2004 sebesar 95%, sedangkan untuk tingkat pendidikan SLTP dan SLTA masih di bawah standar nasional (SLTP sebesar 90% dan SLTA sebesar 60%), namun angkanya dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat. Perkembangan APM SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.19
Grafik Perkembangan APM SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010

3) Nilai Rata-rata Ujian Nasional (UN)

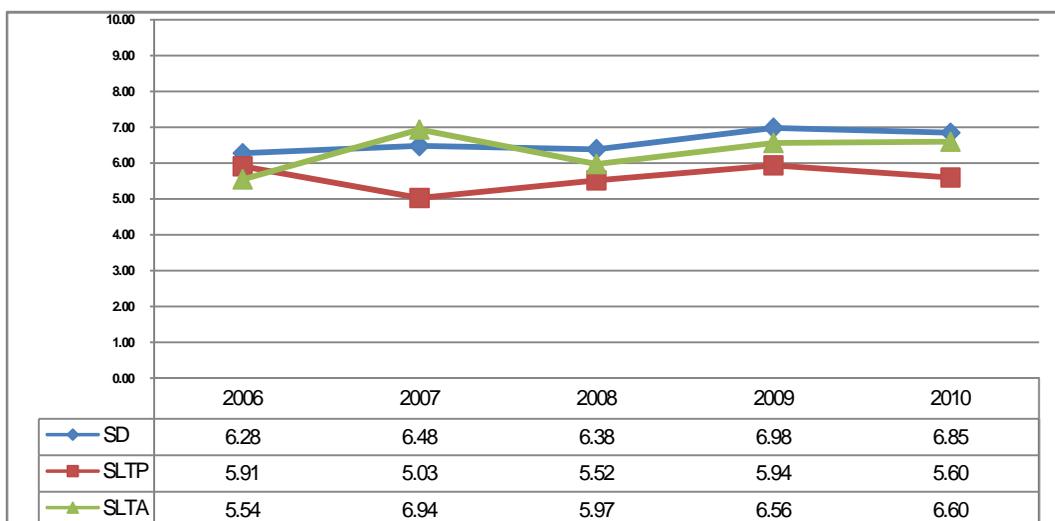
Mengukur kualitas pelayanan pendidikan salah satu parameternya adalah nilai rata-rata siswa Ujian Nasional (UN) di setiap tingkatan pendidikan, walaupun yang dilazim

digunakan persentase kelulusan. Nilai rata-rata UN merupakan indikator yang lebih terukur dalam menilai kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Periode 2006-2010 nilai rata-rata UN SD, SLTP, SLTA di Kabupaten Sijunjung cenderung fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai rata-rata UN tingkat SD periode 2006-2010 stagnan diatas angka 6, sedangkan tingkat SLTP hanya diatas angka 5. Sementara itu, nilai rata-rata UN tingkat SLTA tiga tahun terakhir (2008-2010) cenderung meningkat dengan pencapaian pada tahun 2010 sebesar 6,60. Kondisi ini menunjukkan kualitas pendidikan di tingkat pendidikan dasar (SD dan SLTP) belum sesuai diharapkan.

Untuk melihat perkembangan nilai rata-rata UN SD, SLTP dan SLTA di Kabupaten Sijunjung tahun 2005-2009, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.20
Grafik Perkembangan Nilai Rata-Rata UN SD, SLTP dan SLTA Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010

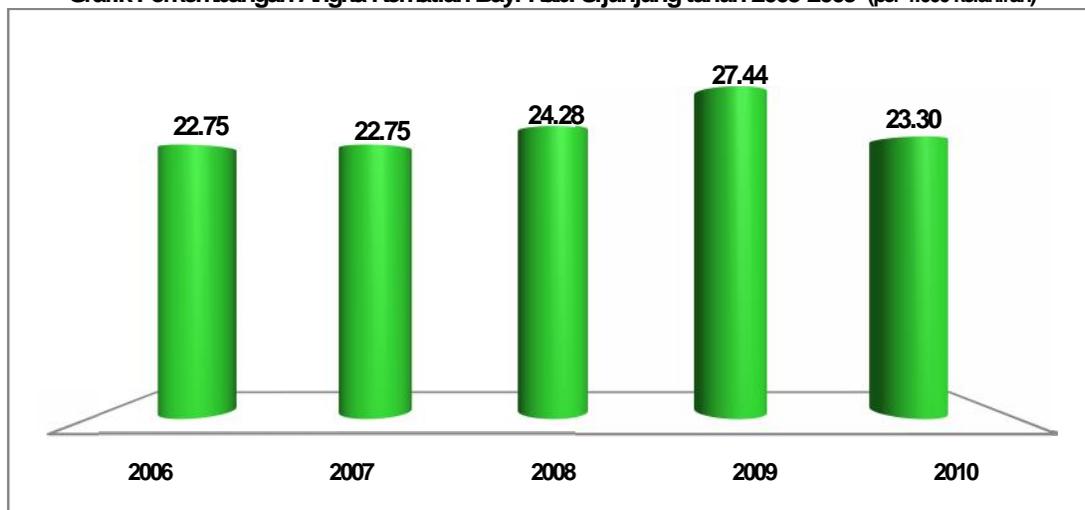
2.3.1.2. Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Derajat kesehatan dapat dilihat dari indikator berkurangnya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI) serta gizi buruk. Keempat indikator tersebut didukung keterjangkauan pelayanan kesehatan baik infrastruktur maupun suprastuktur.

A. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran di Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2006-2010) mengalami angka yang fluktuatif, dimana AKB pada tahun 2006 dan 2007 sebesar 22,75 per 1.000 kelahiran meningkat pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 24,28 dan 27,10, Sedangkan pada tahun 2010 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 23,30. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap bayi baik dalam kandungan maupun pasca melahirkan. Melihat perkembangan AKB Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2. 21
Grafik Perkembangan Angka Kematian Bayi Kab. Sijunjung tahun 2005-2009 (per 1.000 kelahiran)

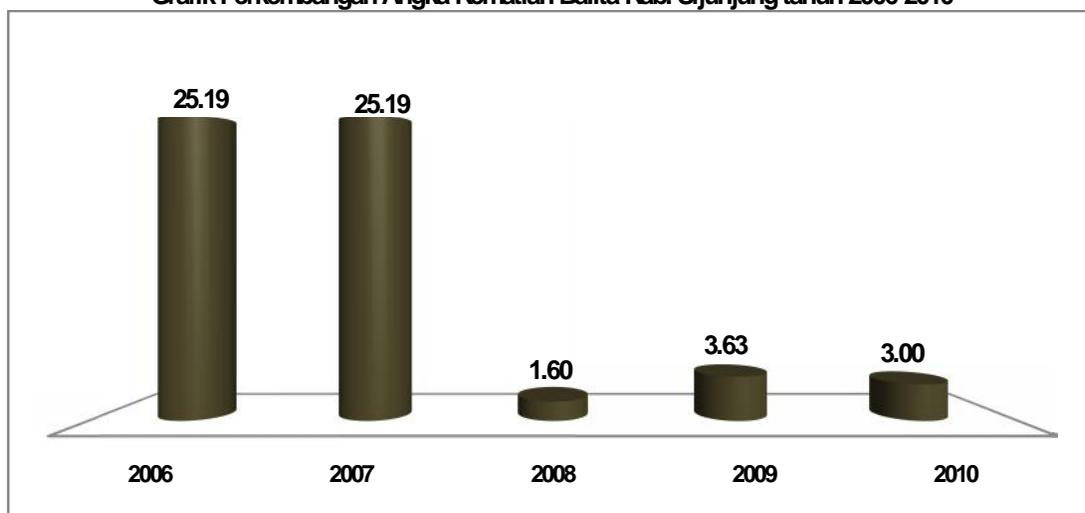


Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010

B. Angka Kematian Balita (AKBA)

Angka Kematian Balita (AKBA) di Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2006-2010) menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dari 25,19 pada tahun 2006-2007 turun menjadi 3,00 pada tahun 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pelayanan kesehatan terhadap balita memiliki kinerja yang baik. Perkembangan AKBA Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2. 22
Grafik Perkembangan Angka Kematian Balita Kab. Sijunjung tahun 2006-2010

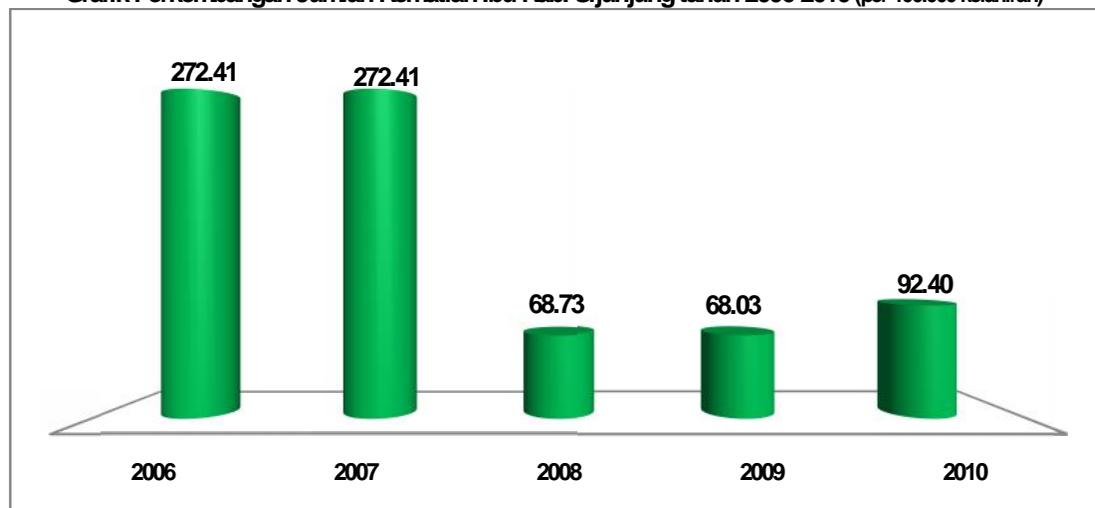


Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010

C. Jumlah Kematian Ibu Melahirkan

Jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2006-2010) masih menunjukkan angka relatif baik, dimana pada tahun 2010 mencapai 92,40 per 100.000 kelahiran. AKI yang terendah tercapai pada tahun 2009 sebesar 68,03 per 100.000 kelahiran. Relatif baiknya jumlah kematian ibu yang melahirkan karena adanya kecenderungan masyarakat untuk melahirkan secara persalinan melalui cara medis, disamping itu keterjangkauan pelayanan kesehatan relatif terbatas. Perkembangan jumlah kematian ibu melahirkan Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2. 23
 Grafik Perkembangan Jumlah Kematian Ibu Kab. Sijunjung tahun 2006-2010 (per 100.000 kelahiran)



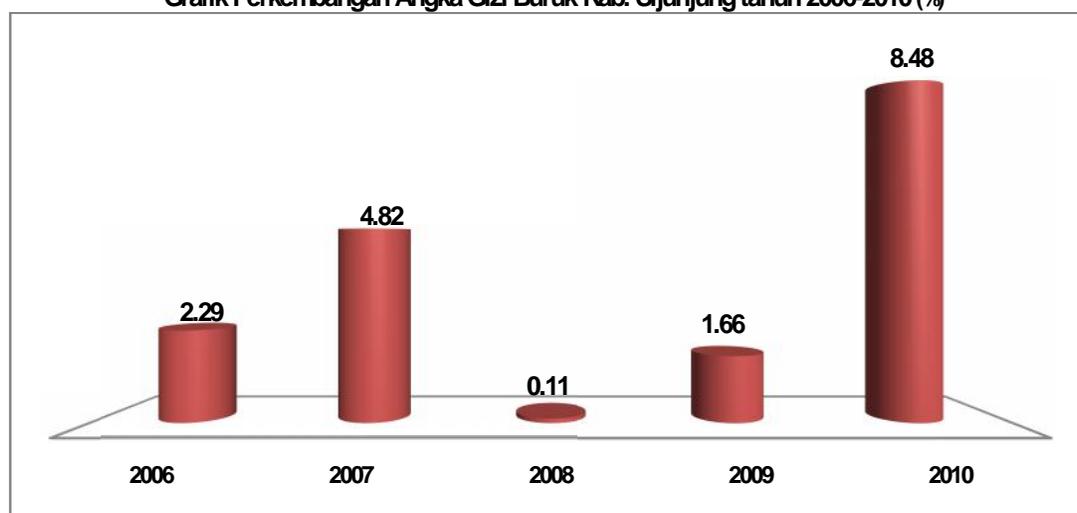
Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010

D. Angka Gizi Buruk

Angka gizi buruk di Kabupaten Sijunjung periode 2006-2010 menunjukkan angka fluktuasi dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2006 angka gizi buruk sebesar 2,29% terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2007 sebesar 4,82%. Sedangkan pada tahun 2008 mengalami penurunan yang sangat tajam menjadi 0,11% dan pada tahun 2009 naik lagi menjadi 1,66% hingga tahun 2010 sebesar 8,48%. Fluktuasinya angka gizi buruk di Kabupaten Sijunjung periode 2006-2010 menunjukkan penanganan gizi buruk dalam kurun waktu lima tahun terakhir belum optimal karena tidak konsistennya perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan terkait dengan pengurangan angka gizi buruk.

Perkembangan angka gizi buruk Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2. 24
 Grafik Perkembangan Angka Gizi Buruk Kab. Sijunjung tahun 2006-2010 (%)



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010

E. Rasio Fasilitas Kesehatan terhadap Penduduk

Rasio fasilitas kesehatan pelayanan dasar per 1.000 penduduk di Kabupaten Sijunjung tahun 2006–2010 cenderung meningkat, dimana pada tahun 2006 angka rasionya 0,41 naik tajam menjadi 0,98 pada tahun 2010. Kondisi ini menunjukkan ketersediaan unit layanan kesehatan pelayanan dasar mendekati angka yang ideal dalam mencapai ketersediaan fasilitas kesehatan. Sedangkan pelayanan kesehatan rujukan masih dilayani rumah sakit daerah tetangga, karena hingga tahun 2010 Kabupaten Sijunjung belum memiliki rumah sakit umum. Untuk melihat perkembangan rasio fasilitas kesehatan per 1.000 penduduk di Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.18
Rasio Fasilitas Kesehatan terhadap Per Satuan Penduduk di Kabupaten Sijunjung
Tahun 2006 – 2010

Fasilitas Kesehatan	2006	2007	2008	2009	2010
Puskesmas (unit)	12	12	12	12	12
Puskesmas Keliling (unit)	19	17	18	21	12
Puskesmas Pembantu (unit)	46	46	46	46	46
Poskesri (unit)	0	0	0	79	125
Fasilitas kesehatan lainnya (unit)	0	2	3	3	2
Jumlah	77	75	79	161	197
Jumlah Penduduk (jiwa)	185.937	189.632	193.473	197.463	201.823
Rasio fasilitas kesehatan per satuan penduduk	0,41	0,40	0,41	0,82	0,98

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010 dan diolah sendiri

F. Rasio Ketersediaan Dokter dan Tenaga Paramedis

Berdasarkan target Indonesia Sehat 2010, rasio ketersediaan dokter dan tenaga paramedis terhadap jumlah penduduk adalah sebagai berikut :

- 1) Rasio ketersediaan dokter sebesar 0,5-0,6 per 1.000 penduduk
- 2) Rasio bidan sebesar 100 per 100.000 penduduk.
- 3) Rasio tenaga keperawatan sebesar sebesar 118 per 100.000 penduduk.
- 4) Rasio ahli kesehatan masyarakat sebanyak 40 per 100.000 penduduk.
- 5) Rasio tenaga farmasi adalah sebesar 40 tenaga farmasi per 100.000 penduduk.

Selama periode 2006-2010 rasio ketersediaan dokter dan tenaga paramedis terhadap jumlah penduduk yang telah mencapai target Indonesia Sehat 2010 adalah rasio bidan dan rasio tenaga farmasi, dimana pada tahun 2010 rasio bidan sebesar 111,48 per 100.000 penduduk, sedangkan rasio tenaga farmasi mencapai 38,66 per 100.000 penduduk. Sementara itu, rasio dokter baru mencapai 0,29 per 100.000 penduduk, sedangkan rasio tenaga keperawatan sebesar 81,75 per 100.000 penduduk dan rasio ahli kesehatan masyarakat sebesar 8,42 per 100.000 penduduk. Belum tercapainya ketiga rasio tersebut, disebabkan karena diluar faktor kendali Pemerintah Kabupaten Sijunjung terhadap pengadaan dokter, tenaga keperawatan dan ahli kesehatan masyarakat yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Rasio dokter dan tenaga paramedis per satuan penduduk di Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.19
RasioDokter dan Tenaga Paramedis per Satuan Penduduk di Kabupaten Sijunjung
Tahun 2006 – 2010

Ratio Tenaga Dokter dan Paramedis per Satuan Penduduk	2006	2007	2008	2009	2010
Dokter Umum dan Dokter Spesialis	0,15	0,10	0,14	0,17	0,29
Bidan	70,45	73,83	71,84	73,43	111,48
Perawat	48,40	49,04	46,52	80,01	81,75
Ahli Kesehatan Masyarakat	2,15	10,55	8,79	6,58	8,42
Tenaga farmasi	24,20	39,02	12,92	23,80	38,66

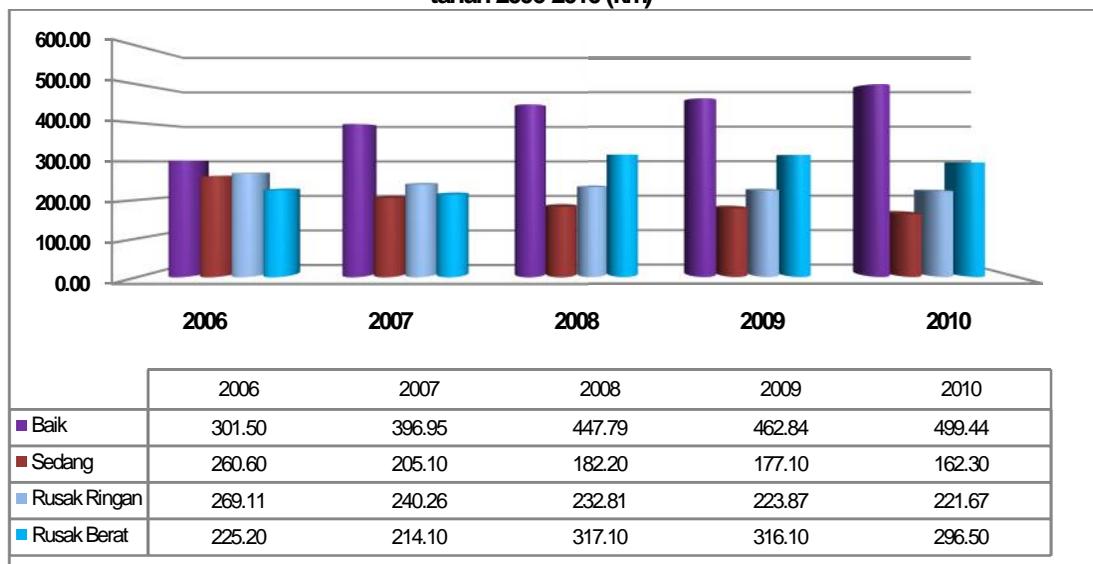
Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010 dan diolah sendiri

2.3.1.3. Pekerjaan Umum

A. Jalan dan Jembatan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2006-2010) kondisi jalan yang ada di Kabupaten Sijunjung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan yang cukup signifikan terlihat dari kondisi jalan yang baik, di mana pada tahun 2006 panjang jalan yang berkondisi baik sepanjang 301,5 km meningkat menjadi 499,44 km pada tahun 2010. Meningkatnya panjang jalan yang berkondisi baik berbanding lurus terhadap berkurangnya kondisi jalan yang sedang dan rusak ringan. Namun kondisi jalan yang mengalami rusak berat juga mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2008 dari 214,10 pada tahun 2007 naik menjadi 317,10 km dan hingga tahun 2010 turun menjadi 296,50 km, hal ini dapat dilihat dari perkembangan kondisi jalan sesuai dengan jenis kerusakan tahun 2006-2010 di Kabupaten Sijunjung dalam gambar dibawah ini:

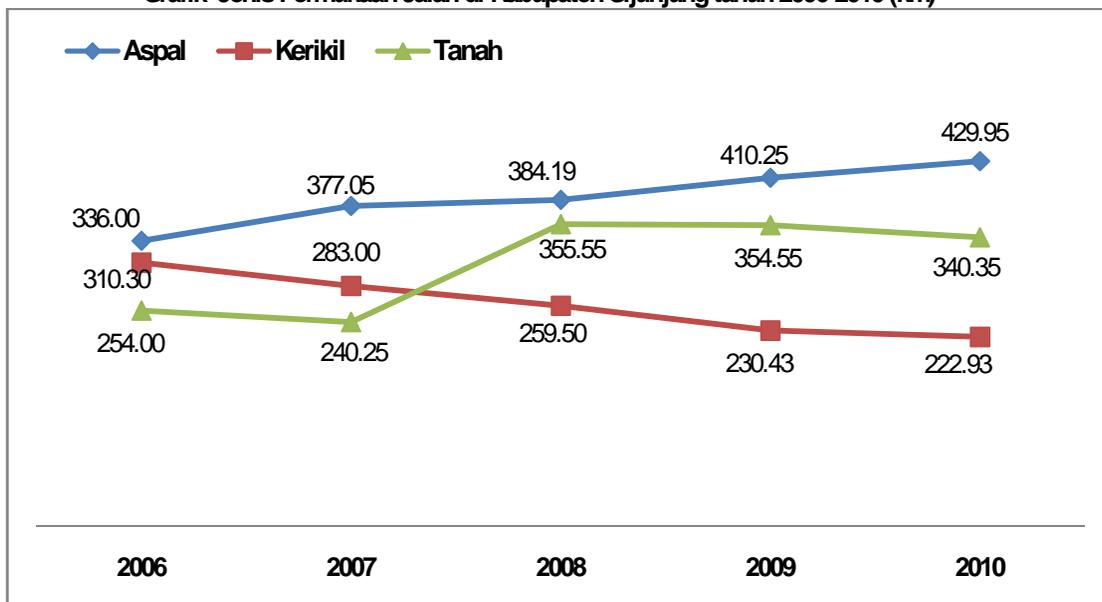
Gambar 2.25
Grafik Kondisi Jalan Kabupaten berdasarkan Jenis Kerusakan di Kabupaten Sijunjung
tahun 2006-2010 (km)



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010

Sedangkan jenis permukaan jalan kabupaten yang masih berikil mengalami penurunan yang signifikan seiring meningkatnya jenis permukaan jalan yang beraspal. Sedangkan jenis permukaan jalan yang masih tanah pada tahun 2008 mengalami peningkatan 240,25 km pada tahun 2007 naik menjadi 355,55 km pada tahun 2008 dan hingga pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 340,35 km. Perkembangan jenis permukaan jalan yang ada di Kabupaten Sijunjung periode 2006-2010, dapat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.26
Grafik Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010 (km)



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010

Sementara itu, kondisi jembatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2006-2010) dalam tabel berikut ini;

Tabel 2.20
Kondisi Jembatan berdasarkan Jenis Kerusakan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah jembatan permanen (unit)	158	163	243	243	238
	- Kondisi baik (unit)	125	108	210	210	213
	- Kondisi rusak ringan (unit)	21	49	23	23	15
	- Kondisi rusak berat (unit)	12	6	10	10	10
2	Jumlah jembatan gantung (unit)	46	46	22	22	27
	- Kondisi baik (unit)	2	1	7	7	7
	- Kondisi rusak ringan (unit)	43	44	10	10	15
	- Kondisi rusak berat (unit)	1	1	5	5	5
3	Jumlah jembatan yang belum dibangun	277	277	315	315	315

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sijunjung, tahun 2010

B. Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Irigasi di Kabupaten Sijunjung terbagi atas 3 jenis, yaitu : a) saluran irigasi primer, b) saluran irigasi sekunder, dan c) saluran irigasi tersier. Kondisi ketiga jenis saluran irigasi tersebut dalam periode 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.21
Kondisi Jaringan Irigasi berdasarkan Jenis Kerusakan Kabupaten Sijunjung
Tahun 2006 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Panjang saluran irigasi primer (m)	286.276,00	286.276,00	286.276,00	286.649,00	28.276,00
	- Kondisi baik (m)	157.451,80	171.765,60	214.707,00	243.707,60	249.060,12
	- Kondisi rusak ringan (m)	100.196,60	71.569,00	57.255,20	28.627,60	20.039,32
	- Kondisi rusak berat (m)	28.627,60	42.941,40	14.313,80	14.313,80	17.176,56
2	Panjang saluran irigasi sekunder (m)	67.616,05	67.617,00	67.617,00	67.617,00	67.617,00
	- Kondisi baik (m)	33.808,50	40.570,20	47.331,90	50.712,75	56.122,11
	- Kondisi rusak ringan (m)	10.142,55	6.761,70	3.380,85	4.057,02	3.380,85
	- Kondisi rusak berat (m)	23.665	20.285,10	16.904,25	12.847,23	8.114,04
3	Panjang saluran irigasi tersier (m)	20.848,00	20.848,00	20.848,00	20.848,00	20.848,00
	- Kondisi baik (m)	4.169,00	5.212,00	6.254,40	8.339,20	11.466,40
	- Kondisi rusak ringan (m)	-	-	-	-	-
	- Kondisi rusak berat (m)	16.678,40	15.636,00	14.593,60	12.508,80	9.381,60
4	Panjang saluran irigasi yang belum dibangun (m)	-	70,00	1.500,00	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sijunjung, tahun 2010

C. Drainase

Perkembangan kondisi drainase di Kabupaten Sijunjung dalam periode 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.22
Kondisi Jaringan Drainase berdasarkan Jenis Kerusakan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Panjang saluran drainase (meter)	-	7.253	15.325	19.245	25.560
	- Kondisi baik (meter)	-	4.352	7.663	13.472	19.170
	- Kondisi rusak ringan (meter)	-	1.306	4.598	3.849	3.834
	- Kondisi rusak berat (meter)	-	725	3.065	1.925	2.556
2	Panjang saluran drainase yang belum permanen (meter)	-	60.214	52.142	48.222	41.580

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sijunjung, tahun 2010

D. Persampahan

Penanganan persampahan di Kabupaten Sijunjung dalam periode 2006-2010 yang dilakukan di 14 lokasi secara persentase mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun cakupan penanganan masih rendah. Kondisi ini disebabkan karena belum optimalnya sistem pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akibat keterbatasan sarana dan prasarana dan pembiayaan serta belum tersedianya Tempat Pembuangan sampah Akhir yang memadai bersifat regional. Sarana dan prasarana alat angkut sampah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.23
Alat Angkut Penanganan Sampah yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010

No	Jenis Alat Angkut	Jumlah	Kapasitas Per Unit (M3)	Ritasi	Masih Beroperasi	
					Ya	Tidak
1.	Gerobak sampah	6	0.5	50	-	-
2.	Dump truck	2	6	2	-	-
3.	Arm roll truck	1	6	2	-	-
4.	Motor sampah	2	1	2	-	-

Sumber : Bagian Umum Sekdakab Sijunjung, 2011

Sedangkan perkembangan pengelolaan persampahan di Kabupaten Sijunjung dalam periode 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.24
Produksi dan Penanganan Sampah Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Total volume sampah (M3)	8.672	9.067	9.165	9.658	9.855
2	Volume sampah yang tertangani (M3)	3.504	3.854	3.942	4.204	4.380
3	Persentase sampah yang tertangani	40,40	42,51	43,01	43,53	44,44

Sumber : Bagian Umum Sekdakab Sijunjung, 2011 dan diolah sendiri

E. Sumber Daya Air

Topografi Kabupaten Sijunjung yang berbukit dengan hutan seluas 159.764,75 Ha, serta dialiri 8 buah sungai besar sangat berpotensi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air baku dan air bersih. Nama sungai dan wilayah yang dialirinya di Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.25
Wilayah Yang Dialiri 8 Sungai Besar di Kabupaten Sijunjung

No.	Nama Sungai	Lebar Sungai (m)	Wilayah Yang Dialiri (Nama Kecamatan Dan Nagari)
1.	Batang Palangki	25	<u>Kec. IV Nagari</u> Nagari Palangki, Muaro Bodi dan Koto Tuo <u>Kec. Sijunjung</u> Nagari Muaro
2.	Batang Ombilin	30	<u>Kec. Koto VII</u> Nagari Tanjung dan Padang Laweh <u>Kec. Sijunjung</u> Nagari Muaro
3.	Batang Sukam	25	<u>Kec. Sijunjung</u> Nagari Sijunjung dan Nagari Muaro
4.	Batang Sumpur	20	<u>Kec. Sumpur Kudus</u> Nagari Silantai, Sumpur Kudus, Mangganti dan Sisawah
5.	Batang Kuantan	80	<u>Kec. Sijunjung</u> Nagari Muaro, Silokek dan Durian Gadang <u>Kec. Kamang Baru</u> Nagari Padang Tarok dan Sei Betung
6.	Batang Takung	25	<u>Kec. Kamang Baru</u> Nagari Sei Langsek dan Muaro Takung <u>Kec. Tanjung Gadang</u> Nagari Tanjung Gadang
7.	Batang Sinamar	20	<u>Kec. Sumpur Kudus</u> Nagari Kumanis <u>Kec. Koto VII</u> Nagari Tanjung dan Guguak
8.	Batang Kulampi	20	<u>Kec. Sijunjung</u> Nagari Sijunjung dan Nagari Aia Angek <u>Kec. Tanjung Gadang</u> Nagari Tanjung Gadang dan Sinyamu

Sumber : Sijunjung Dalam Angka Tahun, 2010

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa potensi sumber daya air di Kabupaten Sijunjung sangat besar untuk memenuhi kebutuhan air baku dan air bersih bagi masyarakat karena teralirinya secara merata di setiap kecamatan.

2.3.1.4. Perumahan

Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat Kabupaten Sijunjung dalam periode 2006-2010 belum optimal, hal ini disebabkan karena keterbatasan pembiayaan pembangunan, sehingga alokasi dana untuk pengembangan perumahan belum menjadi prioritas. Sementara itu, pengembangan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang tingkat pertumbuhannya masih kecil dimana hingga tahun 2010 baru terdapat 5 kawasan, hal ini disebabkan karena kesulitan dalam memperoleh lahan.

2.3.1.5. Penataan Ruang

Tujuan dari pelaksanaan kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang wilayah adalah mewujudkan tata ruang wilayah yang terencana, dengan memperhatikan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan interaksi antar lingkungan dengan selalu mendasarkan pada kesatuan wilayah nasional dan provinsi yang ditujukan untuk kemakmuran masyarakat sebagaimana yang amanahkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Sasaran yang ingin dicapai dari implementasi berbagai program dan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang adalah :

- a) Tersedianya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah dilegitimasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Tersedianya rencana tata ruang kawasan prioritas, kawasan tertentu, dan kawasan perbatasan;
- c) Adanya informasi data dan peta penataan ruang;
- d) Tersedianya pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
- e) Kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan lahan peruntukannya; dan
- f) Tersedianya perencanaan penataan perumahan dan pemukiman.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini (2006-2010) pencapaian kinerja penataan ruang belum sesuai dengan tujuan penataan ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 26/2007, hal ini disebabkan karena belum tersedianya RTRW Kabupaten Sijunjung setelah terjadinya pemekaran wilayah, sehingga tidak dapat menjadi acuan.

2.3.1.6. Perencanaan Pembangunan

Penyelarasan terpadu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan nasional agar tetap berjalan secara optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan dokumen perencanaan perlu memperhatikan pegasutamaan dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu: a) tata kelola pemerintahan yang baik, b) peningkatan pencapaian standar pelayanan minimum, c) perencanaan dan penganggaran yang *pro poor* dan penganggaran reponsif gender, dan d) memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi resiko bencana. Disamping itu, pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan agar mempertimbangkan : a) pencapaian Pendidikan Untuk semua (PUS), b) percepatan pencapaian tujuan pembangunan milinium atau disebut MDG's tahun

2015, dan c) Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang pembangunan daerah tertinggal dan penanggulangan kemiskinan dan dokumen lainnya.

Gambaran kinerja urusan urusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung selama periode 2006-2010, dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah :					
	- RPJPD yang telah ditetapkan Perda	-	-	-	1	-
	- RPJMD yang telah ditetapkan Perda	-	-	-	-	-
	- RPJMD yang telah ditetapkan Peraturan KDH	-	-	1*)	-	1
	- RKPD yang telah ditetapkan Peraturan KDH	1	1	1	1	1
2	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	-	2	-	1	1
3	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya	1	-	1	1	2
4	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan fisik dan prasarana	-	-	-	-	-

*) Revisi

Sumber : LAKIP Bappeda Kab. Sijunjung, 2006,2007,2008, 2009 dan 2010

2.3.1.7. Perhubungan

Kinerja pembangunan aspek pelayanan umum dalam urusan perhubungan di Kabupaten Sijunjung selama periode 2006 - 2010 pada masing-masing indikator kinerja, dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 2.27
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah terminal bis :					
	- Kelas A (unit)	1	1	1	1	1
	- Kelas B (unit)	-	-	-	-	-
	- Kelas C (unit)	-	-	-	-	-
2	Jumlah angkutan darat :					
	- Antar Kota Dalam Provinsi (unit)	-	-	9	9	12
	- Angkutan kota (unit)	-	-	-	-	-
	- Angkutan pedesaan (unit)	25	30	30	25	25
3	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR (unit)	2.480	2.281	2.195	2.295	2.715
4	Lama pengujian kelayakan angkutan umum - KIR (menit).	25	25	25	15	15
5	Jumlah izin trayek angkutan kota/pedesaan yang dikeluarkan	25	30	30	25	25
6	Jumlah rambu-rambu jalan yang terpasang (unit)	800	870	920	990	990

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Sijunjung, tahun 2010

2.3.1.8. Lingkungan Hidup

Isu lingkungan yang terdapat dalam konteks kekinian adalah persoalan lingkungan yang terkait dengan tekanan akibat aktivitas kegiatan manusia dan kerentanan yang terkait dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh proses alami bumi. Akan tetapi, untuk Kabupaten Sijunjung persoalan lingkungan tampaknya lebih banyak diakibatkan oleh aktivitas kegiatan manusia terutama kegiatan di bidang pertambangan, terutama penambangan emas. Kegiatan penambangan tersebut lebih banyak dilakukan oleh masyarakat pada Daerah Aliran Sungai (DAS) tanpa memperhatikan efek pencemaran lingkungan terutama seperti penggunaan merkuri pada tambang emas akan mengakibatkan dampak buruk pada kesehatan manusia secara tidak langsung.

Makin maraknya kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat baik di DAS maupun pada lahan kering lainnya dalam periode 2006-2010 terjadinya perubahan estetika DAS dan lahan kering, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Untuk mengatasi persoalan tersebut agar tidak meluasnya kerusakan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Sijunjung secara kontinue melakukan pembinaan kepada masyarakat. Disamping itu, tetap melakukan pemantauan kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya.

2.3.1.9. Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu sasaran utama pembangunan. Keberadaan penduduk yang merupakan salah satu modal utama pembangunan perlu mendapat perhatian agar penerapan administrasi kependudukan sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 88 tahun 2004 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan untuk mengotimalkan system tersebut, pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil.

Sementara itu salah satu tujuan dari penerapan SIAK tersebut adalah melindungi hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP dan Akta-Akta Catatan Sipil) dengan mencantumkan NIK Nasional. Untuk menegaskan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional.

Menindaklanjuti peraturan presiden tersebut, Kabupaten Sijunjung telah telah membangun data base kependudukan sejak tahun 2007 dengan pengadaan fasilitas fisik dan pendataan ke bawah menggunakan formulir F1.01. Untuk menyempurkan data tersebut dilakukan pemutakhiran data pada tahun 2008 dan 2009. Disamping itu, pada tahun 2010 juga dilakukan sosialisasi penerapan KTP berbasis elektronik secara nasional. Grafik kinerja pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah penduduk (jiwa)	185.937	189.632	193.473	197.463	201.823
2	Jumlah penduduk wajib KTP	131.143	133.749	136.458	139.273	142.348
3	Jumlah penduduk yang memiliki KTP (jiwa)	105.360	114.275	120.438	128.591	137.437
4	Kepemilikan KTP (%)	80,34	85,44	88,26	92,33	96,55
5	Jumlah anak (usia 0-17 tahun) memiliki Akte Kelahiran	54.794	55.883	57.015	58.190	59.475
6	Jumlah rumah Tangga yang memiliki KK	33.778	34.474	35.884	36.504	36.916
7	Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk	54,82	55,93	58,10	59,20	60,48

Sumber : Sijunjung Dalam Angka, 2010 dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sijunjung, tahun 2010

2.3.1.10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pembangunan aspek pelayanan umum dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sijunjung selama periode 2006 - 2010 pada masing-masing indikator kinerja, dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 2.29
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah kasus KDRT	8	7	8	6	5
2	Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TPA) di tingkat kabupaten dan kecamatan (unit).	-	-	-	1	-
3	Jumlah perempuan di parlemen (orang)	-	-	-	2	2
4	Persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan (TPAK)	32,96	33,61	32,53	37,84	35,46
5	Jumlah forum anak di tingkat kabupaten (unit)	-	-	-	-	1

Sumber : Sijunjung Dalam Angka, 2010, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Sijunjung dan diolah sendiri

2.3.1.11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera antara lain, adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB pria tinggi, dan *unmet need* yang rendah. Berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh BKKBN Tahun 2010, untuk Kabupaten Sijunjung peserta KB terbanyak berada pada kisaran umur 35 – 45 tahun, kepesertaan KB pria masih rendah, dan *unmet need* masih relatif tinggi. Sedangkan upaya peningkatan tahapan keluarga sejahtera dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, antara lain melalui kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Kinerja pembangunan aspek pelayanan umum dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Sijunjung selama periode 2006 - 2010 pada masing-masing indikator kinerja, dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kepesertaan KB					
	- Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	34.200	35.362	36.638	37.494	33.510
	- Jumlah Peserta KB aktif	3.221	3.601	4.129	6.410	28.844
	- Prevelensi KB Aktif (%)	9,42	10,18	11,27	17,10	86,08
2	Pelayanan KB					
	- Ketersediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	3.293	3.601	4.129	4.443	6.727
3	Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga (UPPKS)					
	- Jumlah anggota UPPKS	3.368	2.835	3.434	3.724	3.716
	- Jumlah anggota UPPKS yang ber-KB	1.225	1.225	2.171	1.887	2.267
	- Prevelensi KB Aktif (%)	36,37	43,21	63,22	50,67	61,01
4	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera	13.487	14.061	15.196	16.449	17.864
5	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera 1	10.115	10.546	11.397	12.337	11.237

Sumber : Sijunjung Dalam Angka, 2010 dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Sijunjung

2.3.1.12. Sosial

Kinerja pembangunan aspek pelayanan umum dalam urusan sosial di Kabupaten Sijunjung selama periode 2006 - 2010 pada masing-masing indikator kinerja, dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 2.31
Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah sarana sosial :					
	- Panti asuhan	3	3	3	3	3
	- Panti jompo	-	-	-	-	-
	- Panti rehabilitasi	1	1	1	1	1
2	Jumlah PMKS :					
	- Anak terlantar	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362
	- Anak cacat	191	191	191	191	191
	- Penyandang cacat	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397
	- Gelandangan	-	-	-	-	-
	- Korban penyalahgunaan NAFZA	7	8	10	12	12
	- Keluarga fakir miskin	-	-	9.108	9.108	9.108
	- Keluarga berumah tak layak huni	-	-	1.321	1.321	1.321
	- Korban bencana alam	18	36	133	152	120
- Korban bencana sosial	15	12	16	10	11	
3	Jumlah kelembagaan sosial masyarakat :					
	- Pekerja sosial masyarakat	60	60	60	60	60
	- Organisasi sosial/yayasan	4	4	4	4	4
	- Karang Taruna	60	60	60	60	60
	- Jumlah sarana sosial	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sijunjung, 2011

2.3.1.13. Ketenagakerjaan

Laju pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja selama periode 2006-2010 mengalami peningkatan yang signifikan dari 74.927 orang pada tahun 2006 naik menjadi 85.057 orang pada tahun 2010. Seiring meningkatnya jumlah angkatan kerja yang bekerja secara langsung berimplikasi terhadap menurunnya persentase pengangguran terbuka dari 9,43% pada tahun 2006 menjadi 4,13% pada tahun 2010. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja dapat digunakan untuk melihat perkembangan angka pengangguran. Adanya penurunan angka TPT kondisi ini menunjukkan lapangan usaha baik formal maupun non formal dapat menyerap tenaga kerja secara optimal.

Kinerja pembangunan aspek pelayanan umum dalam urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Sijunjung selama periode 2006 - 2010 pada masing-masing indikator kinerja, dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 2.32
Perkembangan Data Ketenagakerjaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah penduduk usia kerja > 15 tahun (orang)	131.460	133.626	131.764	132.552	133.754
2	Jumlah angkatan kerja (orang)	82.726	83.791	82.990	90.206	88.725
3	Jumlah angkatan kerja yang bekerja (orang)	74.927	75.271	74.523	85.686	85.057
4	Jumlah angkatan kerja yang mencari kerja (orang)	7.799	8.520	8.467	4.520	3.668
5	Tingkat pengangguran terbuka (%)	9,43	10,17	10,20	5,01	4,13
6	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	19	3	5	-	-
7	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	20	20	20	20	25
8	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	32	42	44	49	67
9	Jumlah kasus perselisihan tenaga kerja	7	7	9	7	10
10	Jumlah Balai Latihan Kerja (BLK)					
	- Milik Pemerintah	-	-	-	-	-
	- Milik Swasta	4	4	4	4	4
11	Jumlah kasus PHK	7	7	9	7	10
12	Jumlah Bipartit	5	5	15	22	22
13	Jumlah Tripartit	-	-	-	-	1

Sumber : Sijunjung Dalam Angka, 2010, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Sijunjung dan diolah sendiri

2.3.1.14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Sijunjung merupakan barometer ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan. Perkembangan jumlah koperasi (KUD dan non KUD) dan jumlah anggotanya selama periode 2006-2010 menunjukkan adanya kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Namun peningkatan jumlah koperasi tidak diikuti dengan meningkatnya jumlah koperasi yang aktif, hal ini ditandai dengan terjadinya peningkatan jumlah koperasi yang tidak aktif dari 24 unit pada tahun 2006 menjadi 79 unit pada tahun 2008. Dua tahun terakhir (2009-2010) jumlah koperasi yang tidak aktif menunjukkan adanya kecenderungan menurun, sehingga terjadinya peningkatan jumlah koperasi yang aktif.

Sedangkan perkembangan UMKM selama periode 2006-2010 mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2008, namun hingga tahun 2010 cenderung menurun. Usaha kecil dan menengah mempunyai jumlah tenaga kerja yang terserap relatif banyak. Capaian kinerja urusan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Sijunjung periode 2006-2010, dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 2. 33
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah Koperasi	159	161	162	168	169
2	Jumlah anggota koperasi	26.461	26.703	27.351	27.420	28.171
3	Keaktifan koperasi :					
	- Koperasi aktif	135	95	83	108	113
	- Koperasi tidak aktif	24	66	79	60	31
	- Persentase koperasi aktif	84,91	59,01	51,23	64,29	27,00
4	Jumlah UMKM (unit) :					
	- Mikro	-	-	392	273	280
	- Kecil	100	78	540	503	127
	- Menengah	4	2	10	1	2
	- Persentase UKM yang memiliki izin	100	100	100	100	100
5	Jumlah tenaga kerja UMKM (orang) :					
	- Kecil	260	158	1.080	1.006	254
	- Menengah	16	9	54	6	12

Sumber : Sijunjung Dalam Angka, 2010, Dinas Kopperindag Kab. Sijunjung dan diolah sendiri

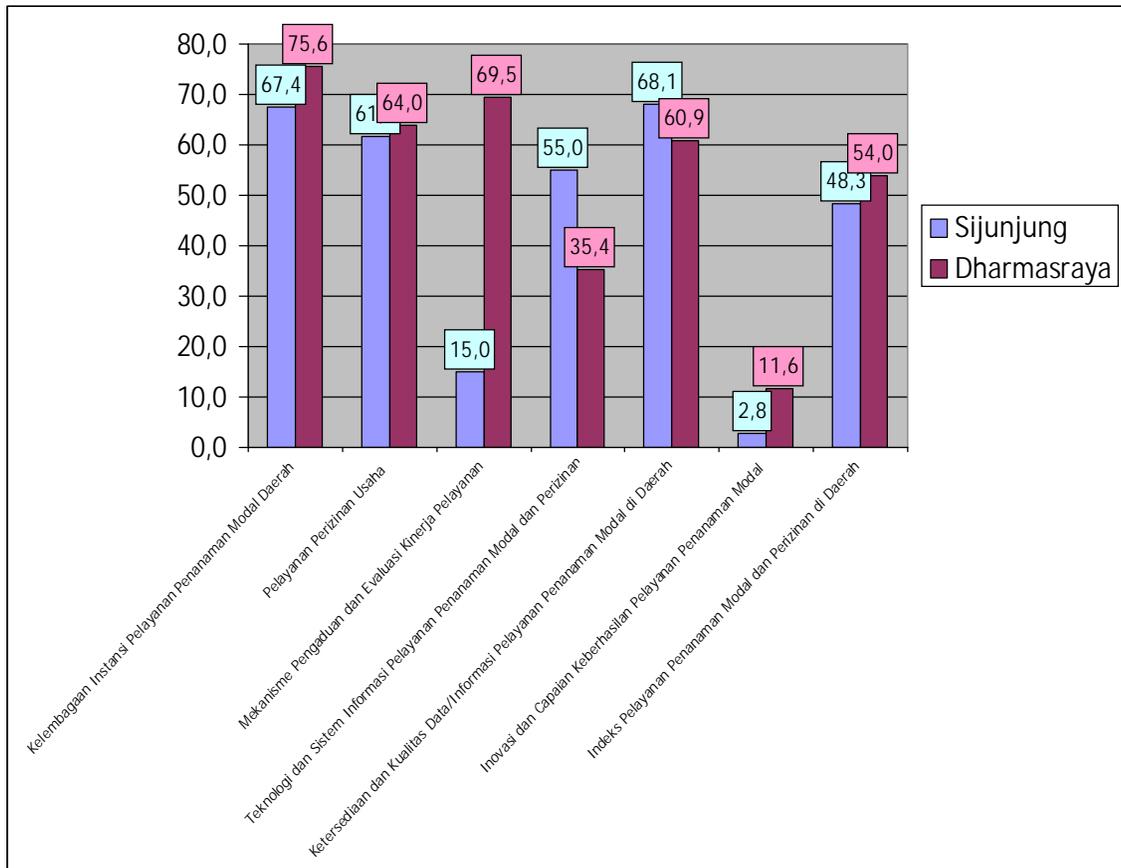
2.3.1.15. Penanaman Modal

Pelayanan untuk penanaman modal yang berkualitas di daerah akan menimbulkan daya tarik tersendiri bagi para investor. Berdasarkan hasil kajian dari KPPOD tahun 2009 ternyata daerah Kabupaten Sijunjung berada pada peringkat 48 dari 217 kabupaten yang ada di Indonesia. Sedangkan Kabupaten Dharmasraya berada pada peringkat 21 di wilayah Indonesia untuk mendatangkan investor.

Adapun indikator kualitas pelayanan penanaman modal antara lain adalah : 1) kelembagaan instansi pelayanan penanaman modal daerah (2) pelayanan perizinan usaha (3) mekanisme pengaduan dan evaluasi kinerja pelayanan (4) Ketersediaan dan kualitas data/informasi pelayanan modal di daerah dan (5) Inovasi dan capaian keberhasilan pelayanan penanaman modal.

Berdasarkan hasil survey KPPOD tahun 2009 didasari dengan kelima indikator tersebut, indeks pelayanan penanaman modal dan perizinan daerah Kabupaten Sijunjung rendah dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya tahun 2009, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2. 27
Grafik Perbandingan Indeks Pelayanan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2009

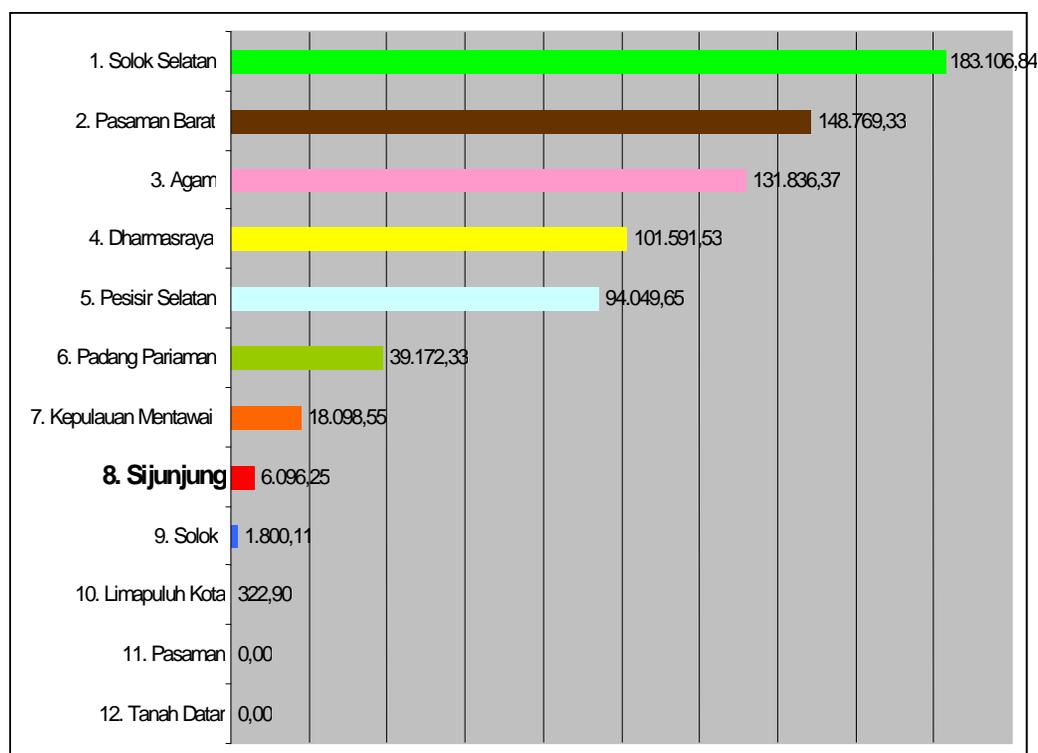
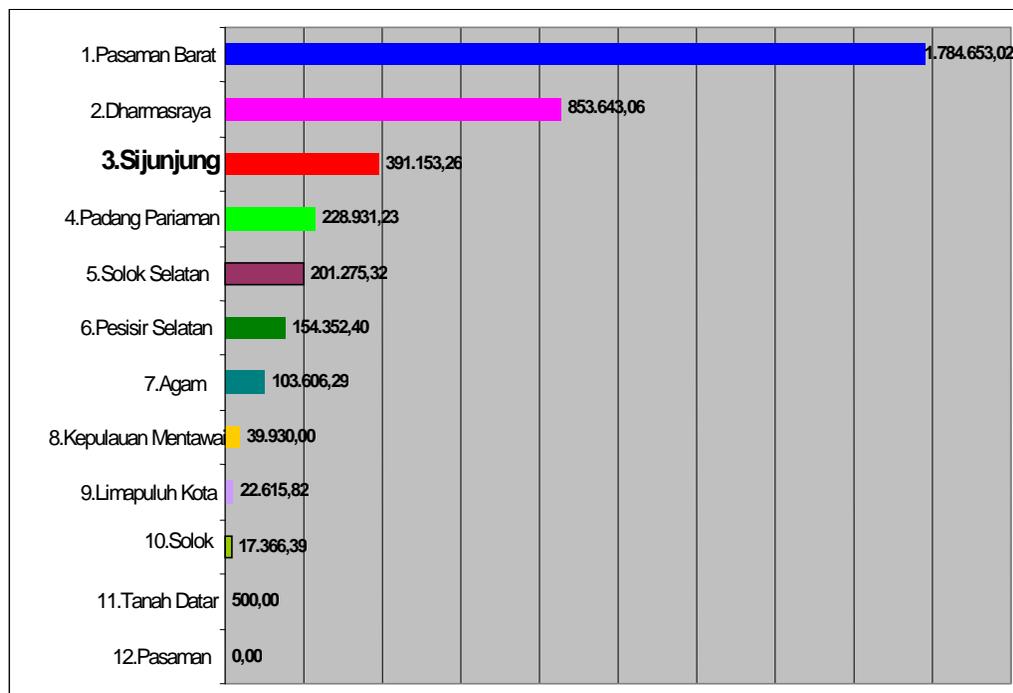


Sumber: KPPOD, Hasil Survei Indeks Pelayanan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009

Sedangkan peringkat nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kabupaten Sijunjung dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat berada peringkat tiga. Sementara itu, peringkat nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Kabupaten Sijunjung dibandingkan dengan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat berada peringkat delapan. Data tersebut dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Sumatera Barat tahun 2008.

Untuk melihat peringkat PMDN dan PMA kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2008, dapat dilihat pada grafik-gambar berikut ini :

Gambar 2. 28
 Grafik Peringkat Nilai Investasi PMDN dan PMA Kabupaten di Prov. Sumatra Barat Tahun 2008



Sumber: BKPM Sumbar 2008, Perkembangan Nilai Investasi PMDN/PMA

2.3.1.16. Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan sebuah unsur yang dapat dijadikan modal dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, budaya dan kesenian yang berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Sijunjung perlu dilestarikan dan dikembangkan, sehingga dapat dijadikan salah satu aspek daya saing daerah. Kesenian yang berkembang di dalam masyarakat Kabupaten Sijunjung mayoritas dipengaruhi unsur budaya minangkabau dan sebagian kecil dipengaruhi budaya jawa, sunda dan batak seiring adanya program transmigrasi. Perkembangan capaian kinerja urusan kebudayaan selama periode 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	5	5	5	5
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	3	3	3	3	3
3	Jumlah kelompok kesenian tradisional :					
	- Randai	40	40	45	45	66
	- Talempong	48	50	51	51	60
	- Rebana	10	10	15	62	61
	- Kuda lumping	3	3	4	4	4
	- Batak	-	-	-	1	1

Sumber : Dinas Parsebibudpora Kab. Sijunjung

2.3.1.17. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja pembangunan aspek pelayanan umum dalam urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sijunjung selama periode 2006 - 2010 pada masing-masing indikator kinerja, dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Peran pemuda dalam pembangunan :					
	- Jumlah organisasi kepemudaan	9	9	10	10	10
2	Jumlah sarana olahraga (unit)	-	312	247	220	664
3	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan jasmani :					
	- Jumlah organisasi keolahragaan (klub)	384	311	311	381	422
	- Jumlah penyelenggaraan even olahraga tingkat kabupaten	1	1	1	1	1
	- Jumlah penyelenggaraan even olahraga tingkat provinsi	1	-	-	-	-
	- Prestasi olahraga tingkat provinsi (cabor)	5 besar	-	15 besar	-	15 besar
	- Prestasi olahraga tingkat nasional (cabor)	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Parsebibudpora Kab. Sijunjung

2.3.1.18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Salah satu penunjang meningkatnya nilai investasi di suatu daerah adanya kondisi keamanan dan ketertiban kondusif. Kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2006-2010), jika dilihat dari jumlah kasus tindak kriminal menunjukkan angka fluktuatif. Kasus yang paling sedikit terjadi pada tahun 2008 sebanyak 21 kasus, namun pada tahun 2009 cenderung naik menjadi 124 kasus hingga tahun 2010 sebanyak 251. Sedangkan kasus yang paling banyak terjadi pada tahun 2007 sebanyak 174 kasus.

Sementara itu, jumlah kasus pertingkaian antar warga/nagari dan unjuk rasa dari tahun ke tahun selama periode 2006-2010 menunjukkan angka relatif kecil, hal ini dapatgrafikannya pada tabel berikut ini :

Tabel 2.36
Perkembangan Gangguan Kamtibmas Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah tindak pidana kriminal (kasus)	115	174	21	124	151
2	Jumlah kasus pertikaian antar warga dan nagari	-	-	-	1	-
3	Jumlah unjuk rasa (kali)	-	-	-	1	2

Sumber : Sijunjung Dalam Angka, 2010 dan Kantor Kesbang Pol dan Lirnas Kab. Sijunjung, tahun 2010

Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi di Kabupaten Sijunjung dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2009 relatif tinggi, hal ini terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada Pemilu Legislatif mencapai 63,05% dari jumlah pemilih sebanyak 130.210 orang, sedangkan dalam Pemilu Presiden mencapai 64,12% dari jumlah pemilih sebanyak 131.115 orang.

Sementara itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilukada Gubernur tahun 2010 mencapai 67,02% dari jumlah pemilih sebanyak 134.910 orang. Sedangkan dalam pelaksanaan Pemilukada Bupati dalam tahun yang sama tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 67,02% dari jumlah pemilih sebanyak 134.910 orang.

2.3.1.19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

A. Otonomi Daerah

Penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut diketahui Pemerintah Kabupaten Sijunjung melaksanakan sebanyak 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga melaksanakan urusan tugas pembantuan dan dekonsentrasi dari pemerintah.

Penyelenggaraan 33 urusan kewenangan tersebut, setiap tahunnya dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah serta masyarakat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan Akhir Masa Jabatan (LKPJ dan AMJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) sebagai mana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah yang lebih berdaya guna dan berhasil guna harus dilandasi dengan produk hukum yang jelas, sehingga meningkatnya pelayanan publik dan adanya kepastian hukum terhadap masyarakat. Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan

oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung selama periode 2006-2010 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2006 yang ditetapkan sebanyak 19 buah turun menjadi 11 buah pada tahun 2010. Sedangkan Peraturan Bupati mengalami peningkatan cukup signifikan, dimana dimana pada tahun 2006 yang ditetapkan sebanyak 30 buah naik menjadi 40 buah pada tahun 2010. Perkembangan jumlah produk hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung selama periode 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.37
Jumlah Produk Hukum yang Ditetapkan Pemerintah Kabupaten Sijunjung 2006-2010

No.	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
1	Peraturan Daerah	19	9	9	9	11
2	Peraturan Bupati	30	31	30	30	40

Sumber : Sijunjung Dalam Angka, 2006,2007,2008,2009 dan 2010

Selama periode 2006-2010 Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menegakkan Perda belum optimal, hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana. Adapun kekuatan pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2010 sebanyak 69 orang, terdiri dari : 1) PNS 44 orang, dan 2) non PNS sebanyak 25 orang. Sementara itu, jumlah anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) belum merata di tingkat nagari/desa.

Selain itu, dalam urusan pertanahan Pemerintah Kabupaten Sijunjung berupaya secara optimal untuk memberikan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban terhadap administrasi pertanahan dan memfasilitasinya ke Badan Pertanahan Nasional. Dalam periode 2006-2010 capaian kinerja administrasi pertanahan menunjukkan angka fluktuasi dari tahun ke tahun, hal ini terlihat dari sertifikat hak milik yang diterbitkan baik secara permohonan maupun melalui Prona. Kondisi ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memiliki hak atas tanah secara administrasi belum sesuai yang diharapkan, disamping itu terkendala dengan status tanah ulayat.

Untuk melihat capaian kinerja pertanahan di Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010, dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Pertanahan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah sertifikat hak atas tanah					
	- Hak Milik	84	77	766	100	58
	- Hak Guna Bangunan	4	-	90	33	27
	- Hak Guna Usaha	-	-	-	-	-
	- Hak Pakai	34	8	11	-	-
	- Hak Pengesahan Milik Adat	-	-	-	466	61
2	Jumlah peralihan hak atas tanah					
	- Jual Beli	121	127	258	86	91
	- Hibah	23	30	39	26	11
3	Jumlah sertifikat Prona yang diterbitkan	150	800	477	627	146
4	Jumlah Hak Milik atas Tanah yang diterbitkan	84	77	766	627	146
5	Jumlah Permohonan Pengakuan/Penegasan Hak Milik Tanah, Hak Milik Adat/Suku					
	- Yang masuk	237	77	583	59	55
	- Sertifikat selesai	237	77	583	59	55

Sumber : Sijunjung Dalam Angka, 2010

B. Pemerintah Umum

1) Organisasi Perangkat Daerah

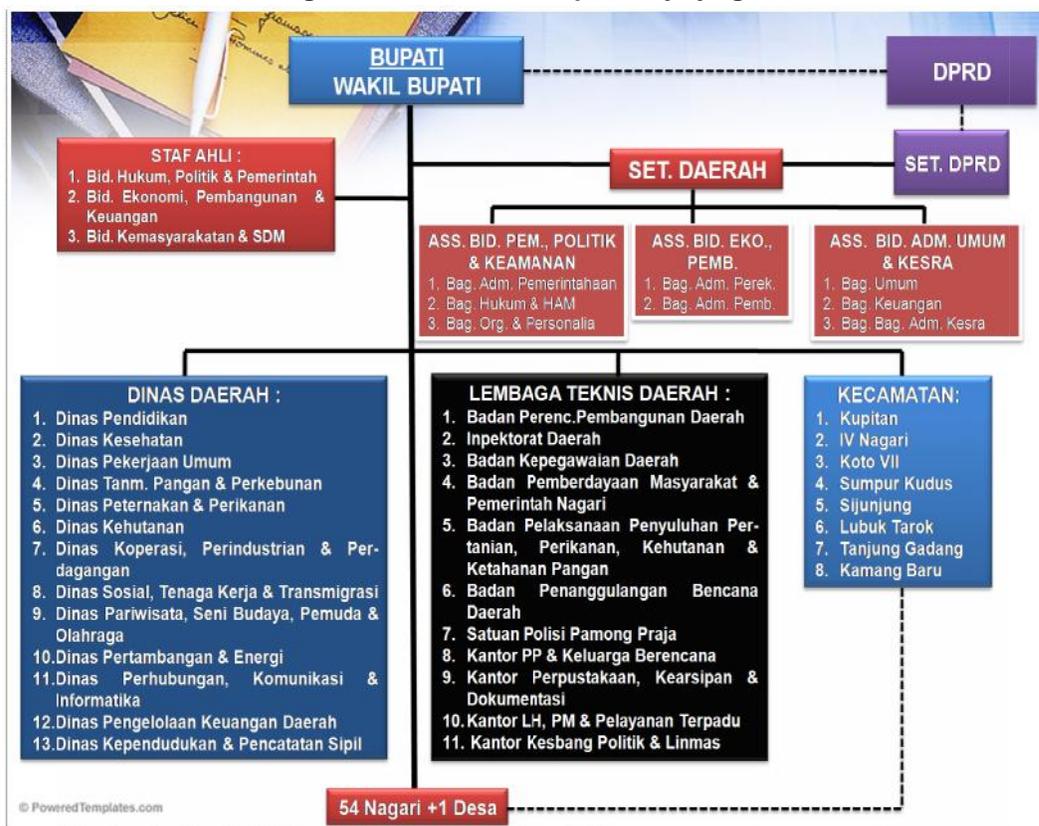
Dalam melaksanakan roda pemerintahan berdasarkan UU 32/2004 jo PP 38/2007, maka Pemerintahan Kabupaten Sijunjung mengimplementasikan dengan membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut organisasi perangkat daerah terbagi atas :

- a. Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, merupakan unsur staf;
- b. Dinas Daerah, merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- c. Lembaga Teknis Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah; dan
- d. Kecamatan, merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.

Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Kab. Sijunjung membentuk OPD yang ditetapkan dengan 4 (empat) Peraturan Daerah, yaitu : a) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, b) Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, c) Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan d) Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Seiring berjalannya waktu pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut mengalami perubahan pada tahun 2010. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan belum terakomodirnya OPD yang ada terhadap kebutuhan daerah. Perubahan OPD tersebut ditetapkan melalui 2 (dua) Peraturan Daerah, yaitu : a) Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 dan b) Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008. Untuk memperkuat struktur pemerintahan didukung oleh Pemerintahan Nagari/Desa sebanyak 54 (empat) Nagari dan 1 (satu) Desa yang merupakan penyelenggaraan pemerintah terbawah. Gambaran dari Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung tahun 2010, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2. 29
Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Sijunjung Tahun 2010



Sumber : Bag. Organisasi dan Personalia Setdakab Sijunjung, 2010

2) Inspektorat Daerah

Dalam rangka mewujudkan *clean government* di Pemerintah Kabupaten Sijunjung, diperlukan dukungan aparatur pengawasan yang kompeten. Upaya untuk membentuk aparatur pengawasan yang kompeten tersebut senantiasa dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pengawasan, sehingga akan diperoleh pengawasan yang profesional. Sampai dengan tahun 2010, Inspektorat Kabupaten Sijunjung belum memiliki aparat pengawas/auditor yang sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

3) Sekretariat DPRD

Lembaga perwakilan rakyat, sebagai salah satu simpul utama penyelenggaraan pemerintahan menjadi katup terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif. Agar lembaga perwakilan rakyat dapat berperan secara optimal harus didukung dengan fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan penyediaan tenaga ahli yang diperlukan. Sampai dengan tahun 2010, aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Sijunjung secara kuantitas dan kualitas belum sesuai dengan tuntutan beban kerja yang dilaksanakan.

C. Administrasi Keuangan Daerah

Dalam mengelola administrasi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan capaian indikator kinerjanya sebanyak 2 (dua) indikator, yaitu : 1) terlaksananya penyusunan APBD secara tepat waktu

sesuai yang amanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan 2) opini laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Perkembangan capaian kinerja administrasi keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung selama periode 2006-2010 berdasarkan ke-dua indikator tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun 2006 ke tahun 2010, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung 2006-2010

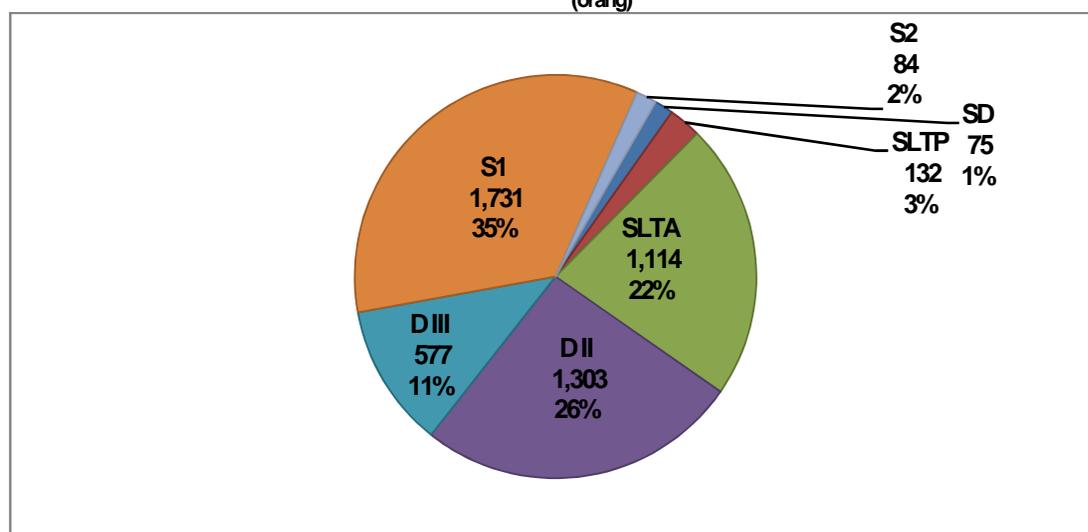
No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Ketepatan Penyusunan APBD	Belum	Belum	Belum	Sudah	Sudah
2	Opini Laporan Keuangan	WDP	Disclaimer	WDP	WDP	WDP

Sumber : DPKD Kab.Sijunjung

D. Kepegawaian

Ketersediaan sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2010 secara kuantitas relatif mencukupi, jika dilihat dari luas wilayah dan beban kerja. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2010 sebanyak 5.016 orang dan didukung oleh pegawai non PNS sebanyak 625 orang. Sedangkan dari segi kualitas juga relatif memadai, hal ini dapat dilihat dari segi tingkat pendidikan yang didominasi oleh lulusan Strata 1 sebanyak 1.731 atau 35% dari total PNS. Dengan angka-angka tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Sijunjung memiliki kualitas sumber daya aparatur yang relatif maksimal, sehingga dalam menyelenggarakan roda pemerintah tidak memiliki kendala yang cukup berarti. Komposisi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2010, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2. 30
Grafik Komposisi PNS Pemerintah Kabupaten Sijunjung Berdasarkan Jenjang Pendidikan tahun 2010 (orang)



Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010

2.3.1.20. Ketahanan Pangan

Pembangunan pangan pada dasarnya merupakan bagian dari ketahanan bangsa. Berdasarkan MDG's ketahanan pangan memiliki 8 tujuan, 18 target dan 48 indikator dalam menurunkan

kemiskinan dan kelaparan pada tahun 2015 separuh dari tahun 1990. Untuk mencapai tujuan tersebut Widyakarya Nasional Pangan dan gizi ke IX, 2008 merekomendasikan perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat setempat dengan mempertimbangan keseimbangan gizi dan didukung oleh citra rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kualitas dan kemampuan daya beli masyarakat. Berkaitan hal tersebut, ketersediaan pangan Kabupaten Sijunjung selama periode 2006-2010 dapat dilihat perkembangannya pada tabel berikut :

Tabel 2.40
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006 – 2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Ketersediaan pangan utama :					
	Ketersediaan :					
	- Beras (ton)	41.015	51.429	47.828	51.502	54.550
	- Jagung (ton)	944	592	626	1.390	1.658
	- Ubi kayu (ton)	3.740	2.546	2.546	1.328	1.187
	- Ubi jalar(ton)	120	110	110	32	69
	- Kacang kedelai (ton)	153	105	105	68	31
	- Kacang tanah (ton)	399	306	306	220	108
	- Kacang hijau (ton)	73	44	44	35	22
	- Daging Sapi, Kerbau & Kambing (kg)	548.566	665.823	524.088	400.402	425.724
	- Telur (kg)	409.106	215.514	425.790	406.628	415.756
	- Ikan (ton)	3.724	3.266	3.616	4.662	6.122
	- Susu sapi (liter)	250.140	171.347	78.908	124.478	140.233
	Kebutuhan :					
	- Beras (ton)	19.760	20.153	20.561	20.949	21.393
	- Jagung (ton)	10.654	10.866	10.985	20.985	11.535
	- Ubi kayu (ton)	12.732	12.985	11.086	11.315	13.784
	- Ubi jalar(ton)	2.036	2.076	113.248	13.521	2.204
	- Kacang kedelai (ton)	6.694	6.827	2.118	2.162	7.247
	- Kacang tanah (ton)	21.197	21.618	6.965	7.109	22.949
	- Kacang hijau (ton)	23.242	23.704	22.056	22.511	25.163
	- Daging Sapi, Kerbau & Kambing (kg)	1.122.161	1.451.421	1.037.016	1.058.401	1.078.994
	- Telur (kg)	3.490.223	3.559.582	3.631.682	3.706.578	3.778.696
	- Ikan (ton)	1.352.134	1.379.004	1.406.936	1.435.951	146.389
	- Susu sapi (liter)	48.344	49.304	50.303	51.340	52.339
	Surplus (Defisit) :					
	- Beras (ton)	21.255	31.271	(20.513)	30.517	33.157
	- Jagung (ton)	(9.710)	(10.274)	615	(9.925)	(9.877)
	- Ubi kayu (ton)	(12.728.110)	(10.439)	(93.258)	(12.193)	(12.596)
	- Ubi jalar(ton)	(2.035.704)	(1.966)	(2.072)	(2.130)	(2.135)
	- Kacang kedelai (ton)	(6.541)	(6.722)	73,04	(7.042)	(7.216)
	- Kacang tanah (ton)	(20.852)	(21.353)	(21.794)	(22.321)	70
- Kacang hijau (ton)	(23.169)	(23.660)	(24.164)	(24.648)	(3)	
- Daging Sapi, Kerbau & Kambing (kg)	(200.193)	(178.080)	(154.545)	(384.284)	(101.187)	
- Telur (kg)	(3.467.226)	(3.535.375)	(3.606.201)	(3.679.755)	(3.750.462)	
- Ikan (ton)	(1.014.005)	(1.023.079)	(1.032.278)	(1.041.574)	268.744	
- Susu sapi (liter)	24.018,45	26.867,00	28.877	33.060	36.503	
2	Jumlah Desa Mandiri Pangan (nagari)	-	-	6	8	10
3	Jumlah lumbung pangan (unit)	-	-	-	3	-
4	Jumlah cadangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (ton)	-	5	6	10	20

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2010, BP4KPP Kab Sijunjung dan diolah sendiri

2.3.1.21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Era otonomi daerah saat ini, pemberdayaan masyarakat merupakan program strategis dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat nagari/desa dalam membangun sumber daya manusia, ekonomi dan lingkungan. Ketiga aspek tersebut diharapkan terwujudnya kemandirian

masyarakat dalam menggali potensi dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Pelaksanaan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat nagari/desa berdasarkan atas tujuan : 1) meningkatkan keberdayaan masyarakat nagari/desa, 2) mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi nagari/desa, 3) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan prasarana wilayah melalui institusi kemasyarakatan, 4) meningkatkan kapasitas aparatur nagari/desa, dan 5) meningkatkan peran serta perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif dan pembangunan lainnya.

Dalam konteks program pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sijunjung sejak tahun 2002 telah melahirkan pogram dana partisipatif dan dana *block grand*. Hingga saat ini program dana partisipatif masih tetap berjalan, sedangkan dana *block grand* tidak dilanjutkan karena adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) Pedesaan dan Perkotaan. Disamping program tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan, bahwa program pemberdayaan masyarakat juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk itu, perlu adanya *cost sharing* dengan pemerintah daerah, maka program tersebut disebut PNPM-Integrasi.

Capaian pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Sijunjung selama periode 2006-2010, dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sijunjung 2006-2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah unit ekonomi simpan pinjam nagari/desa (Klpk.)					
	- Kredit Mikro Nagari (KMN)	-	8	8	20	19
	- SPP	27	53	150	58	57
2	Keaktifan PKK :					
	- Jumlah kelompok PKK	-	-	-	-	65
	- Persentase PKK aktif	-	-	-	-	100
3	Keaktifan Posyandu :					
	- Jumlah posyandu	-	-	-	-	285
	- Persentase posyandu aktif	-	-	-	-	100
4	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat :					
	- Program Partisipatif	20,00	20,00	30,00	45,42	45,42
	- PNPM MP	17,89	39,55	21,17	19,20	31,25

Sumber: BPFMN Kab. Sijunjung, 2010

2.3.1.22. Statistik

Statistik menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2007 adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik. Berdasarkan tujuan pemanfaatannya, jenis statistik dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni; a) statistik dasar, b) statistik sektoral dan statistik khusus. Sesuai penyelenggaraannya, Badan Pusat Statistik (BPS) menangani urusan statistik dasar dan statistik khusus, sedangkan statistik sektoral menjadi tanggungjawab instansi pemerintah di daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atau bersama dengan badan.

Beberapa dokumen statistik yang disusun oleh BPS Kabupaten Sijunjung yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) hingga tahun 2010 antara lain : a) Sijunjung dalam angka, dan b) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Disamping itu, pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Sijunjung juga menyusun data statistik dengan melibatkan BPS yaitu; profil daerah yang menggambarkan kondisi dan potensi daerah meliputi empat aspek adalah ; a) sumber daya manusia, b) sumber daya alam, c) ekonomi dan keuangan daerah, dan d) infrastruktur.

Beberapa persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan statistik adalah sebagai berikut:

- 1) Urusan statistik masih memiliki persoalan terkait dengan validitas data. Karena ditangani secara bersama antara BPS, SKPD di daerah dan instansi serta lembaga terkait lainnya, sering terjadi perbedaan angka atau data. Hal ini berakibat timbulnya kesulitan dalam pertanggungjawaban produk data.
- 2) Data statistik yang bersifat dinamis menyebabkan penentuan data akhir masih sulit dilakukan secara cepat, tepat dan akurat.
- 3) Munculnya berbagai versi data statistik yang diakibatkan oleh tuntutan peraturan per undang-undangan yang sering tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain, yang mengakibatkan kesulitan bagi lembaga terkait penanggungjawab data dalam penyediannya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, beberapa solusi telah dilakukan di antaranya sebagai berikut :

- 1) Mengingat banyaknya instansi yang berfungsi sebagai penyedia data di daerah, maka perlu dilaksanakan koordinasi yang intensif dan berkesinambungan antar berbagai pemangku TUPOKSI penyedia data, sehingga terjadi komunikasi yang efektif dalam rangka peningkatan ketepatan, kecepatan dan keakuratan penyediaan data statistik.
- 2) Dibutuhkan adanya ketegasan dalam pembagian proporsi tanggung jawab masing-masing instansi penyediaan data agar tidak terjadi duplikasi data, atau sebaliknya ketiadaan data yang diakibatkan oleh tidak adanya instansi pengampu penyediaan data tertentu.
- 3) Pemahaman peraturan perundang-undangan tentang data dan statistik baik peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat maupun daerah, untuk menghindari tumpang tindih dalam hal penyajian data serta untuk memudahkan pemahaman, pembangunan dan penyediaan data oleh para pemangku penyedia data dan statistik.

2.3.1.23. Kearsipan

Pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai salah satu unsur penunjang dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan keberadaan arsip dalam pemerintahan adalah penting. Arsip dapat digunakan sebagai sumber informasi, acuan dan bahan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Selain itu, keberadaan arsip dapat menjadi akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, sehingga menjadi tolak ukur bagi pemerintahan dalam menjalankan sistem pemerintah yang akuntabel.

Hingga tahun 2010 capaian kinerja aspek pelayanan umum di bidang kearsipan masih dalam tahap penataan kelembagaan dan akuisisi arsip masing-masing SKPD, hal ini disebabkan karena organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap kearsipan baru dibentuk pada bulan agustus 2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

2.3.1.24. Komunikasi dan Informatika

Kebijakan tentang pentingnya penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah telah dituangkan di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003, yaitu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*). Melalui pengembangan *e-government*, pemerintah mengharapkan dapat melakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam menindaklanjuti Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2009 telah mempunyai website resmi yaitu; www.sijunjung.go.id . Disamping itu, dilakukan juga pembangunan infrastruktur jaringan komputer (LAN dan WAN) di dimulai sejak tahun 2008 hingga saat ini terus diupayakan pengembangannya. Pembangunan jaringan komputer tersebut memungkinkan terkoneksi tiap-tiap SKPD dalam jaringan internet, sehingga transformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan semakin lancar.

Hingga tahun 2010, pembangunan infrastruktur jaringan komputer belum seluruhnya SKPD dapat terpenuhi karena keterbatasan pembiayaan pembangunan, sehingga capaian kinerja aspek pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika belum optimal. Selain itu jaringan komunikasi dan informatika di berbagai wilayah dalam menunjang akses masyarakat untuk memperoleh informasi melalui teknologi informasi masih terbatas dan jumlah Kelompok Informasi masyarakat masih kecil.

2.3.1.25. Perpustakaan

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dimana definisi perpustakaan adalah sebuah wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan untuk memberikan layanan pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ketersediaan perpustakaan di Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.42
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan Kabupaten Sijunjung 2006-2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah perpustakaan :					
	- Perpustakaan Daerah	-	1	1	1	1
	- Perpustakaan Keliling	-	1	1	2	2
	- Perpustakaan Kecamatan	-	8	8	8	12
	- Perpustakaan Sekolah	100	124	138	185	200
	- Perpustakaan Non Pemerintah	20	25	28	32	34
2	Jumlah anggota perpustakaan daerah (orang)	-	88	125	260	350
3	Jumlah pengunjung perpustakaan daerah (orang)	-	90	150	275	353
4	Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	-	89	95	124	130

Sumber: Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kab. Sijunjung

2.3.2. Pelayanan Urusan Pilihan

2.3.2.1. Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis bagi Kabupaten Sijunjung karena pertanian memegang peranan penting yaitu sebagai sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja dan pemberi input bagi sektor industri perkebunan. Bagi Kabupaten Sijunjung sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung tahun 2010 yang menempati posisi pertama. Akibat kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

Untuk melihat perkembangan luas panen dan jumlah produksi komoditi sektor pertanian Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.43
Luas Panen Produktif dan Jumlah Produksi Komoditi Pertanian Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2010

Komoditi	Luas Panen (Ha)					Jumlah Produksi (ton)				
	2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
Tanaman Pangan										
Padi	16.929	18.766	16.977	18.598	20.473	72.959	91.470	84.185	91.642	102.364
Palawija										
Kacang Tanah	184	134	134	91	44	399	306	306	220	108
Jagung	172	109	117	240	282	944	592	626	1.390	1.658
Ubi Kayu	158	105	105	54	49	3.740	2.546	2.546	1.326	1.187
Kacang Kedelai	89	61	61	39	15	153	105	105	68	31
Buah-buahan dan Hortikultura	Luas Panen (Pohon)									
Rambutan	86.250	86.190	85.439	85.143	83.592	3.353	3.341	4.766	2.381	403
Manggis	85.831	88.808	85.624	77.109	77.082	12.380	9.825	9.825	886	3.547
Durian	50.791	51.815	50.796	50.621	50.516	13.761	12.133	3.635	1.695	1.353
Duku/Langsat	39.822	40.694	39.595	39.431	39.212	6.305	5.709	5.709	588	-
Mangga	14.856	14.859	14.856	14.689	14.530	160	160	782	477	1.233
Alpukat	2.448	2.460	2.450	2.448	2.408	21	56	276	174	345
Perkebunan Rakyat	Luas Lahan Produktif (Ha)									
Karet	25.100	26.763	26.763	27.898	27.899	61.367	63.232	63.699	64.216	64.216
Coklat	325	417	417	574	688	352	520	520	1.247	1.248
Kelapa Sawit	6.677	6.856	6.856	6.688	6.931	50.862	53.060	53.052	44.835	44.835

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2010

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa perkembangan produktivitas padi selama periode 2006-2010 tiga tahun terakhir ini (2008-2010) cenderung meningkat seiring bertambahnya luas panen. Sedangkan pada kelompok tanaman palawija ada beberapa komoditi terlihat relatif dominan dibanding dengan komoditi palawija lainnya baik dari segi panen maupun jumlah produksi. Kacang tanah, jagung, ubi kayu, dan kacang kedelai merupakan komoditi palawija yang terlihat dominan namun luas panen dan jumlah produksinya cenderung menurun selama periode 2006-2010, kecuali untuk jagung yang produktivitas dan perluasan lahannya meningkat cukup signifikan. Dalam perpektif ekonomi kerakyatan beberapa komoditi palawija ini cukup strategis untuk dikembangkan di masa mendatang guna memenuhi kebutuhan daerah Kabupaten Sijunjung atau kebutuhan dalam negeri secara umum.

Pada kelompok buah-buahan dan hortikultura Kabupaten Sijunjung telah menetapkan manggis sebagai komoditi unggulannya. Sejumlah program dan kegiatan telah diarahkan untuk mengembangkan komoditi ini dan hasilnya terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah pohon yang dimiliki selama periode 2006 – 2010, namun dalam jumlah produksi belum terlihat ada peningkatan yang cukup signifikan. Namun lebih dari semua itu, data memperlihatkan bahwa masih ada komoditi lain selain manggis yang juga potensial untuk dikembangkan karena jumlah pohonnya relatif cukup banyak. Untuk itu, perlu perhatian lebih pada komoditi yang menjadi unggulan dan citranya telah melekat dengan Sijunjung atau telah memiliki posisi pasar (*market positioning*) yang kuat.

Sedangkan di bidang perkebunan, terutama karet dan didukung kelapa sawit merupakan komoditi unggulan Kabupaten Sijunjung. Luas lahan dan jumlah produksi cenderung stabil dan cenderung meningkat pada periode 2006-2010, hal ini didukung dari faktor alam dalam pengembangan komoditi tersebut. Komoditi lainnya yang berkembang pesat adalah tanaman coklat yang ditandai dengan produktivitas yang meningkat secara signifikan pada tahun 2010 sebesar 1.248 ton dibandingkan dengan produksi pada tahun 2006 sebesar 352 ton. Pengembangan komoditi ini juga terjadi pada berbagai daerah di Provinsi Sumatera Barat sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah untuk menjadi sentra produksi coklat (*cacao*) di Indonesia.

Sementara itu, kebijakan Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk mengembangkan sentra peternakan sapi selama periode 2006-2010 belum menunjukkan capaian kinerja yang optimal karena terjadi penurunan yang signifikan terhadap populasi sapi dari 36.492 ekor pada tahun 2006 menjadi 15.614 ekor pada tahun 2007. Sedangkan periode 2008-2010 mengalami peningkatan yang belum signifikan dibandingkan dengan populasi sapi pada tahun 2006. Menurunnya jumlah populasi sapi diikuti juga oleh jenis peternakan lain, yaitu kerbau dan kambing.

2.3.2.2. Kehutanan

Luas hutan lindung dan hutan konservasi di Kabupaten Sijunjung dapat terpelihara dengan lestari dengan luasan yang tetap. Luas kawasan hutan lindung dan hutan konservasi pada tahun 2010 sebesar 221.191,77 ha atau 70,65% dari total luas Kabupaten Sijunjung. Sedangkan luas lahan kritis pada tahun 2010 seluas 141.790,1 ha, angka ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2009 seluas 262.054 ha. Kondisi ini menunjukkan upaya untuk menjaga hutan melalui program rehabilitasi lahan cukup optimal. Disamping itu, dalam menjaga kelestarian hutan Pemerintah Kabupaten Sijunjung akan mengupayakan melalui program pemberdayaan

masyarakat. Perkembangan capaian kinerja urusan kehutanan Kabupaten Sijunjung dalam periode 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Sijunjung 2007-2010

No.	Indikator Kinerja	2007	2008	2009	2010
1	Luas hutan (ha)				
	- Hutan Lindung	85.667,78	85.667,78	85.667,78	85.667,78
	- Hutan konservasi/cagar alam	40.461,57	40.461,57	40.461,57	40.461,57
	- Hutan produksi terbatas	36.515,26	36.515,26	36.515,26	36.515,26
	- Hutan produksi	39.611,76	39.611,76	39.611,76	39.611,76
	- Hutan produksi yang dapat konversi	18.925,40	18.925,40	18.925,40	18.925,40
	- Hutan Rakyat	91.848,22	91.848,22	91.848,22	91.848,22
2	Luas lahan kritis dan rehabilitasi				
	- Luas lahan kritis (ha)	262.054,4	262.054,4	262.054,4	141.790,1
	- Luas lahan kritis yang telah rehabilitasi (ha)	-	-	-	120.264,3
	- Persentase lahan telah direhabilitasi	-	-	-	84,82
3	Produksi hasil hutan :				
	- Kayu olahan (MP)	-	-	-	-

Sumber, Sijunjung Dalam Angka, 2010 dan Dinas Kehutanan Kab. Sijunjung

2.3.2.3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral (ESDM), memiliki peran didalam memfasilitasi dan menyediakan pasokan energi dan sumber daya mineral antara lain melalui penyediaan listrik di tingkat nagari, pengembangan energi baru terbarukan dan pengolahan sumber daya mineral yang berbasis lingkungan .

Ketenagalistrikan berperan sebagai infrastruktur yang harus ada untuk mendukung kegiatan pembangunan masyarakat. Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan diprioritaskan baik untuk meningkatkan keandalan penyediaan tenaga listrik maupun memberikan akses penyediaan tenaga listrik. Penyediaan tenaga listrik yang memadai dan berkualitas merupakan parameter penting untuk mendukung kemajuan sektor lainnya antara lain sektor industri, perdagangan, telekomunikasi dan sektor-sektor penggerak ekonomi lainnya. Sehingga ketersediaan energi listrik yang cukup akan menentukan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya Kabupaten Sijunjung memiliki potensi energi yang cukup besar karena dilalui oleh delapan sungai besar dan puluhan sungai kecil. Potensi tersebut dapat dijadikan salah satu sumber energi baru yang terbarukan dalam memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat. Dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Kabupaten Sijunjung, PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan negara yang memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan listrik belum optimal, sehingga jorong yang telah dialiri listrik pada tahun 2010 baru mencapai 203 jorong dari total 241 atau cakupan energi listrik pedesaan 84,23%

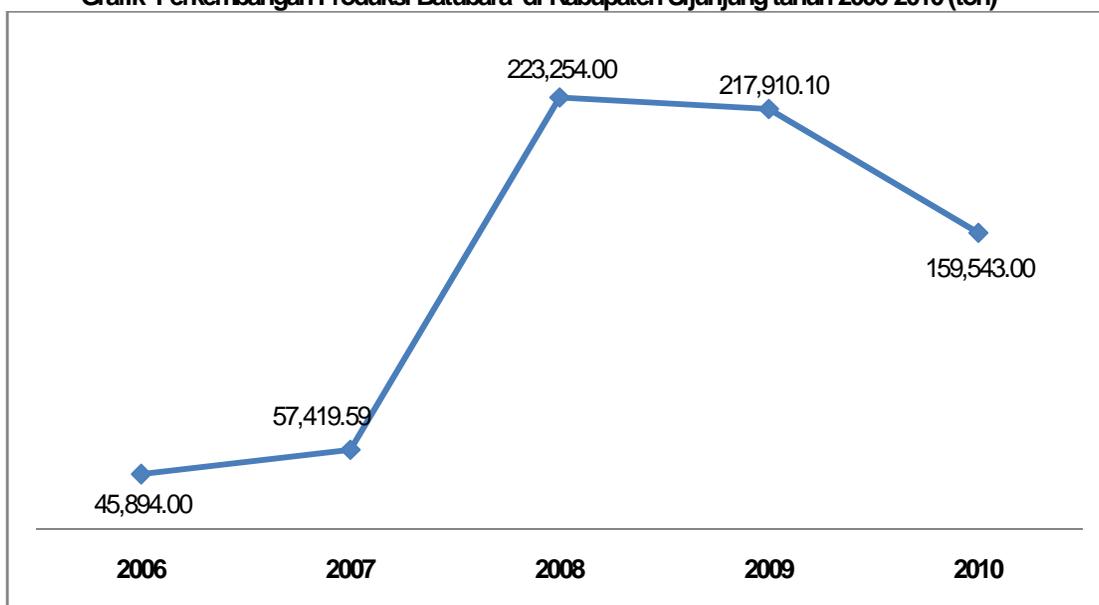
Untuk mengatasi kondisi tersebut, dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2007-2010) Pemerintah Kabupaten Sijunjung berupaya membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) memanfaatkan aliran anak-anak sungai dan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang berskala kecil. Namun kedua pembangkit listrik tersebut belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat karena sangat tergantung dengan cuaca.

Sedangkan dalam memenuhi energi bahan bakar minyak untuk masyarakat Kabupaten Sijunjung cukup optimal karena hingga tahun 2010 SPBU yang ada sebanyak 6 buah dan tiap nagari telah memiliki pangkalan minyak tanah yang cukup memadai dan pasokan dari Pertamina realtif lancar.

Sementara itu, pengolahan energi sumber daya mineral yang berbasis lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung memiliki kendala dalam mengimplementasikannya karena maraknya penambangan yang dilakukan masyarakat tanpa mempedulikan lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sijunjung melalui Dinas Pertambangan dan Energi telah dan sedang berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat baik dalam proses perizinan maupun melakukan pengawasan langsung di lokasi tambang. Pada tahun 2006 penambangan yang dilakukan oleh masyarakat masih banyak yang belum memiliki izin, namun hingga tahun 2010 sudah dapat dikurangi seiring semakin meningkatnya kesadaran masyarakat.

Sedangkan potensi sumber daya mineral yang tersedia di Kabupaten Sijunjung baru diolah hanya batubara dan potensi lainnya belum dapat diolah, hal ini disebabkan karena cadangan yang tersedia lokasinya sebagian besar berada di kawasan hutan lindung dan konservasi. Produksi batubara selama periode 2006-2010 menunjukkan angka fluktuatif, dimana pada tahun 2006 jumlah produksi sebanyak 45.894 ton meningkat sangat signifikan menjadi 223.254 ton pada tahun 2008. Namun hingga tahun 2010 terjadi penurunan menjadi 159.543 ton. Perkembangan produksi batubara Kabupaten Sijunjung periode 2006-2010, dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.34
Grafik Perkembangan Produksi Batubara di Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010 (ton)



Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2010

2.3.2.4. Pariwisata

Potensi wisata di Kabupaten Sijunjung secara umum belum dikelola secara optimal, sehingga belum mampu meningkatkan jumlah pengunjung maupun lama tinggal secara signifikan. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2010 masih di dominasi oleh wisatawan domestik yang jumlahnya masih relatif sedikit, sehingga belum maksimal kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada tahun 2008 dicanangkan “Bangkit Wisata Sijunjung” yang bertujuan untuk menyambut kembali “Indonesia Visit Years (IVY) 2009” dan membangkitkan potensi kawasan wisata yang terdapat di Kabupaten Sijunjung. Dalam mengimplementasikan program “Bangkit Wisata Sijunjung” tersebut, pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Sijunjung melakukan promosi potensi wisata Muaro, Silokek dan Durian Gadang (Musiduga) melalui televisi swasta nasional

Metro TV. Kegiatan promosi tersebut bekerjasama dengan masyarakat perantau Kabupaten Sijunjung yang ada di Jabodetabek dan Malaysia.

Berdasarkan data tahun 2010 kawasan wisata terdapat di Kabupaten Sijunjung terdiri dari; a) 26 kawasan wisata alam, b) 16 wisata budaya, c) 7 wisata khusus, dan d) 3 kawasan wisata buatan. Selain keindahan alam, Kabupaten Sijunjung juga menyimpan kisah sejarah kerja paksa Jepang (romusha) untuk membangun rel kereta api dari Muaro ke Logas (Provinsi Riau) yang ditandai dengan adanya lokomotif uap di Nagari Durian Gadang. Namun pembangunan tersebut tidak selesai karena Jepang mengalami kekalahan dalam perang dunia ke-dua tahun 1945.

Disamping itu, jasa penunjang pariwisata hingga tahun 2010 cukup memadai dengan ditandainya jumlah hotel/penginapan sebanyak 8 (delapan) buah dengan jumlah kamar sebanyak 101 buah dan didukung oleh jumlah rumah makan/restoran sebanyak 154 buah.

2.3.2.5. Kelautan dan Perikanan

Pada sektor perikanan terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada subsektor perikanan budidaya, baik luas lahan maupun jumlah produksi pada periode 2006-2010. Namun sebaliknya, pada subsektor perikanan perairan umum terjadi penurunan produksi terutama pada tahun 2007 dan 2008, jika dibandingkan dengan produksi pada 2006. Fakta ini berkaitan dengan karakter perikanan perairan umum dimana luas lahannya cenderung statis. Upaya untuk meningkatkan jumlah produksi lebih bersifat intensifikasi terhadap lahan yang ada. Keberhasilan usaha peningkatan hasil perikanan perairan umum oleh pemerintah juga ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian perairan umum tersebut.

Perkembangan populasi sub sektor peternakan dan luas lahan serta jumlah produksi sub sektor perikanan selama periode 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.45
Perkembangan Luas Produksi Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2010

Komoditi	Luas Lahan (Ha)					Jumlah Produksi (ton)				
	2006	2007	2008	2009	2010	2006	2007	2008	2009	2010
Peternakan						Populasi (ekor)				
Sapi						36.492	15.614	16.205	16.861	19.192
Kerbau						34.521	17.648	18.460	18.672	21.035
Kambing						30.718	20.319	13.028	13.847	16.235
Perikanan						Jumlah produksi (ton)				
Perairan Umum	1.236	1.237	1.237	1.237	1.226	1.030	578	611	728	1.044
Budidaya	1.720	1.093	1.183	1.413	1.383	2.694	2.688	3.005	3.934	5.078

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2010

2.3.2.6. Perdagangan

Program pengembangan sektor perdagangan di Kabupaten Sijunjung diarahkan kepada pengembangan perdagangan dalam negeri dengan memprioritaskan program pengembangan usaha perdagangan dan distribusi yang meliputi: a) memperluas pasar dalam negeri, b) meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem perdagangan, c) mengembangkan pusat kegiatan perdagangan, meningkatkan perusahaan serta pedagang menengah dan kecil, dan meningkatkan kemampuan manajerial dari usaha perdagangan serta perlindungan konsumen. Sementara itu, arah pelaksanaannya ditujukan kepada hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan dan penyaluran serta bimbingan usaha dan sarana perdagangan. Adapun usaha tersebut mencakup

sistem informasi pasar dan meningkatkan pendayagunaan sarana dan prasarana serta menciptakan iklim perdagangan yang sehat.

Kinerja perdagangan dalam negeri di Kabupaten Sijunjung tergambar dari indikator jumlah pasar dan jumlah usaha perdagangan. Sementara itu, pasar yang terdapat di Kabupaten Sijunjung masih kategori tradisional belum ada pasar modern. Jumlah pasar tradisional mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2006-2010. Pada tahun 2006 jumlah pasar tradisional sebanyak 38 unit meningkat pada tahun 2010 sebanyak 51 unit. Kondisi menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dalam negeri. Sedangkan jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan selama periode 2006-2010, khususnya usaha berskala menengah dan kecil menunjukkan jumlah yang berfluktuatif. Sementara itu, usaha berskala besar SIUP yang diterbitkan mengalami penurunan empat tahun terakhir. Perkembangan jumlah pasar dan jumlah usaha perdagangan periode 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Sijunjung 2006-2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah pasar :					
	- Pasar tradisional (unit)	51	51	51	52	52
	- Pasar komoditi (unit)	1	1	1	1	1
	- Pasar modern (unit)	-	-	-	-	-
2	Kondisi pasar tradisional :					
	- Rusak berat (unit)	-	-	-	-	-
	- Rusak sedang (unit)	27	22	16	12	2
	- Rusak ringan (unit)	19	17	15	10	6
3	Jumlah SIUP :					
	- Besar	3	5	4	1	0
	- Menengah	9	8	21	24	17
	- Kecil	235	183	344	327	457

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2010 dan Dinas Koperindag Kab. Sijunjung

Disamping itu, Kabupaten Sijunjung memiliki pasar komoditi hasil peternakan yang bersifat regional dengan jenis temaknya adalah sapi, kerbau dan kambing. Pada tahun 2008 dilakukan relokasi pasar tersebut yang lebih memadai baik segi luasnya maupun dari segi sarana prasarana.

2.3.2.7. Industri

Sektor Industri secara langsung belum memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Sijunjung hingga tahun 2010, hal ini disebabkan karena industri yang terdapat di Kabupaten Sijunjung masih didominasi oleh industri kecil dan menengah. Namun industri tersebut memiliki kontribusi yang relatif besar terhadap penyerapan tenaga kerja dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

Banyaknya jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun 2010 sebanyak 2.336 orang, angka ini mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding tahun 2006 sebanyak 1.483 orang. Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap berbanding lurus dengan adanya peningkatan jumlah usaha industri dari 233 unit pada tahun 2006 menjadi 564 unit pada tahun 2010. Perkembangan jumlah usaha industri kecil dan menengah, jumlah tenaga yang terserap dan nilai investasi dalam periode 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.47
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Sijunjung 2006-2010

No.	Indikator Kinerja	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah industri kecil dan menengah (unit)	233	199	171	362	564
2	Penyerapan tenaga kerja (orang)	1.483	1.356	1.247	1.709	2.336
3	Nilai investasi (Rp Juta)	2.445,58	2.356,27	2.024,74	7.780,07	12.962,78

Sumber: Sijunjung Dalam Angka, 2010

2.3.2.8. Ketransmigrasian

Program transmigrasi kini pelaksanaannya dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif daerah dan dilaksanakan daerah serta difasilitasi oleh pusat yang bermanfaat bagi daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (*rowing*), sedangkan pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (*steering*) maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan *demand side*, dimana pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Pemerintah Kabupaten Sijunjung sebagai daerah penerima calon transmigran telah dan sedang berupaya secara optimal dalam penyediaan lahan yang dibutuhkan. Selama periode 2006-2010 warga transmigrasi di Kabupaten Sijunjung tidak mengalami penambahan karena lahan yang tersedia sudah terbatas akibat Kabupaten Sijunjung memiliki kawasan hutan lindung dan konservasi sebesar 70% dari total luas daerah.

2.4. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional, atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek kemampuan ekonomi Kabupaten Sijunjung dapat dilihat dari indikator-indikator yang terdiri dari : a) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merefleksikan tingkat pertumbuhan ekonomi, b) pendapatan PDRB perkapita, c) pengeluaran riil rumah tangga per kapita masyarakat yang disesuaikan dan d) Nilai Tukar Petani (NTP).

Pengertian NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Secara umum NTP menghasilkan 3 (tiga) macam pengertian, yaitu : 1) NTP > 100, berarti petani mengalami surplus, 2) NTP = 100, berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar. Ini berarti petani mengalami impas/break even, dan 3) NTP < 100, berarti NTP pada suatu periode tertentu kurang baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar sehingga petani mengalami defisit.

Perkembangan keempat indikator kemampuan ekonomi Kabupaten Sijunjung selama periode 2006-2010 menunjukkan angka yang positif dan cenderung meningkat, kecuali nilai tukar petani mengalami penurunan tiga tahun terakhir, namun angkanya masih diatas 100%. Menurunnya nilai tukar petani tersebut, disebabkan karena rendahnya harga jual komoditas perkebunan, terutama karet dan sawit, sehingga secara langsung berimplikasi terhadap menurunnya pendapatan petani. Perkembangan keempat indikator kemampuan ekonomi Kabupaten Sijunjung selama periode 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.48
Aspek Kemampuan Ekonomi Kabupaten Sijunjung 2006-2010

No.	Aspek	2006	2007	2008	2009	2010
1	PDRB (miliar Rp) :					
	- ADHK	1.084,13	1.145,01	1.205,42	1.271,64	1.343,28
	- ADHB	1.820,53	2.072,31	2.417,98	2.712,53	3.036,49
2	PDRB per Kapita (juta Rp)	9,34	10,84	12,41	13,58	15,05
3	Pengeluaran riil rumah tangga per-kapita masyarakat yang disesuaikan (ribu Rp)	n/a	625,77	630,49	634,30	633,55
4	Nilai Tukar Petani (%)	98,97	99,45	97,35	98,85	100,37

Sumber; Sijunjung Dalam Angka, 2010 dan BPS Prov. Sumatera Barat, 2011

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah/Infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam ketersediaan (*availability*) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi di berbagai sektor pada suatu daerah atau antar-daerah (wilayah). Semakin lengkap ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin kuat daya saing daerah. Grafik umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur diantaranya dapat dilihat dari; a) fasilitas perhubungan, b) air bersih, c) energi listrik dan telekomunikasi, dan d) telaah rencana tata ruang wilayah.

a) Fasilitas Perhubungan

Secara wilayah Kabupaten Sijunjung memiliki posisi strategis dalam jalur arus barang dan jasa antar Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Oleh karena itu, Kabupaten Sijunjung dilalui jalan negara sepanjang 105,91 km dan jalan provinsi sepanjang 50,20 km. Kondisi ke dua jalan tersebut dalam kondisi relatif baik, sehingga dapat memperlancar arus barang dan jasa antar wilayah dan provinsi.

Sementara itu, jalan yang menghubungkan antar kecamatan dan nagari yang telah beraspal pada tahun 2010 sepanjang 586,06 km atau 49,67% dari total keseluruhannya sepanjang 1.179,91 km. Sedangkan kondisi jalan tersebut yang baik sepanjang 499,44 km atau proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 42,33% dari total keseluruhannya. Kondisi ini menunjukkan secara kualitas jalan antar kecamatan dan nagari di Kabupaten Sijunjung relatif memadai, sehingga dapat memperlancar arus barang dan jasa.

Disamping itu, Kabupaten Sijunjung memiliki terminal tipe A terletak di lokasi persimpangan jalan antar Provinsi Sumatera Barat (jalan lintas sumatera bagian tengah) dengan Provinsi Riau . (jalan lintas sumatera bagian timur). Fasilitas yang tersedia dalam terminal tersebut, antara lain; terminal bus, terminal truk, pertokoan, dan musholla serta kantor unit pelayanan terminal. Setiap tahunnya terminal tersebut terus dilakukan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana penunjang.

b) Air Bersih

Kabupaten Sijunjung memiliki potensi relatif besar dalam penyediaan air baku untuk dijadikan sumber air bersih. Pada tahun 2010 telah dilakukan persiapan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bersumber dari Batang Karimo di Kecamatan Lubuk Traok. SPAM tersebut dapat mengaliri air bersih untuk lima kecamatan yaitu; 1) Kecamatan Lubuk Tarok, 2) Kecamatan Sijunjung, 3) Kecamatan IV Nagari, 4) Kecamatan Kupitan, dan 5) Kecamatan Koto VII. Sedangkan tiga kecamatan lainnya kebutuhan air bersih dalam tahap pengembangan sesuai potensi lokal.

c) Energi Listrik dan Telekomunikasi

Energi listrik di Kabupaten Sijunjung relatif memadai, hal ini ditandai dengan cakupan layanan energi listrik setiap nagari mencapai 84,23%. Disamping itu, Kabupaten Sijunjung dekat dengan sumber pembangkit energi yaitu; Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin terletak di Kota Sawahlunto dengan kapasitas produksi sebesar 2 x 200 megawatt. PLTU tersebut merupakan bagian interkoneksi tenaga listrik pulau sumatera yang salah satu terbesar dalam memberikan pasokan energi listrik.

Selain itu, penggunaan listrik di wilayah Kabupaten Sijunjung juga menggunakan pemanfaatan pembangkit listrik lainnya seperti pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan panas matahari yang digunakan oleh beberapa penduduk/rumah tangga yang wilayahnya belum teraliri listrik oleh PT. PLN (Persero). Sedangkan sarana telekomunikasi khususnya telepon selular, pada tahun 2010 telah menjangkau 80% dari total 55 nagari/desa. Hingga tahun 2010, permohonan untuk mendirikan tower transmisi oleh operator telepon selular memiliki ekspektasi cukup tinggi, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah permohonan.

d) Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Penelaahan rencana tata ruang wilayah bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam periode RPJMD ini dalam tahap penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sijunjung dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sijunjung 2011-2031. Penyusunan RTRW tersebut mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor:15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Disamping itu, penyusunan RTRW Kabupaten Sijunjung diselaraskan dengan RTRWN, RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RTRW daerah tetangga. Sebagai tindak lanjut dari RTRW Kabupaten Sijunjung tersebut yang efektif pelaksanaannya tahun 2012, maka hingga tahun 2015 implementasi rencana struktur ruang dan pola ruang dalam tahap penyesuaian terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini. Selain itu, akan disusun dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan turunannya pada kawasan strategis, baik kawasan strategis provinsi maupun kawasan strategis kabupaten sesuai dengan peruntukannya hingga tahun 2015.

2.4.3. Fokus Iklim Investasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan

dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi.

Untuk menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2008 membentuk unit pelayanan perizinan secara terpadu yang disebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Waktu proses perizinan yang bersifat skala menengah dan kecil dilakukan oleh unit pelayanan tersebut, hingga tahun 2010 sudah mencapai 5 (lima) hari kerja. Sedangkan yang bersifat skala besar membutuhkan waktu paling lama 3 (tiga) bulan, hal ini disebabkan karena adanya keterkaitan dengan lembaga diluar Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

Selain itu, suatu investor akan tertarik berinvestasi pada suatu daerah jika didukung dengan regulasi yang baik, regulasi tersebut diantaranya adalah adanya pengenaan pajak dan retribusi daerah dengan tingkat biaya yang kompetitif serta kondisi keamanan. Terkait masalah kebijakan pengenaan pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sijunjung telah memiliki komitmen untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, sehingga produk hukum yang ditetapkan menunjang terhadap iklim investasi tersebut. Sedangkan dari segi keamanan, Kabupaten Sijunjung termasuk daerah yang kondusif, hal ini ditandai dengan relatif sedikit jumlah kasus kriminal dan pertingkaian antar nagari serta unjuk rasa masyarakat.

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis daya saing sumber daya manusia, salah satunya dilakukan dengan melihat rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan dihitung berdasarkan jumlah penduduk usia tidak produktif (dibawah usia 15 tahun dan diatas 64 tahun) dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia antara 15-64 tahun.

Rasio ketergantungan Kabupaten Sijunjung menunjukkan angka yang relatif baik dari tahun ke tahun selama periode 2006-2010. Hal ini ditandai tingginya rasio jumlah penduduk usia produktif terhadap jumlah penduduk usia tidak produktif. Jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung yang usia tidak produktif dan produktif dari tahun ke tahun selama periode 2006-2010 menunjukkan adanya kecenderungan meningkat, namun tidak mempengaruhi terhadap rasio ketergantungan.

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Sijunjung usia penduduk tidak produktif, jumlah penduduk usia penduduk produktif dan rasio ketergantungan selama periode 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.49
Rasio Ketergantungan Kabupaten Sijunjung 2006-2010

No.	Aspek	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah penduduk berusia < 15 tahun	61.207	62.252	63.817	65.406	68.069
2	Jumlah penduduk berusia > 64 tahun	9.117	9.272	9.491	9.705	9.485
3	Jumlah usia tidak produktif	70.324	71.524	73.308	75.111	77.554
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	115.613	118.354	120.165	122.352	124.269
5	Rasio ketergantungan (%)	60,82	60,43	61,01	61,39	62,41

Sumber; Sijunjung Dalam Angka, 2010 dan diolah sendiri

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya. Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang berimplikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia dan sumber daya alam, dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Daerah kabupaten/kota adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan karena daerah-daerah tersebut yang lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan *local accountability* pemerintah pusat terhadap rakyatnya.

Otonomi daerah yang diwujudkan dalam bentuk desentralisasi, diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu:

1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing – masing daerah.
2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Sebagai konsekuensi logis dari desentralisasi tersebut maka akan ada pula pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam usaha penggalian dan penggunaan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri. Konteks desentralisasi memberikan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah–daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada peraturan perundang–undangan. Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka prinsip desentralisasi fiskal adalah:

1. Desentralisasi fiskal harus memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah.
3. Perimbangan keuangan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal di atas, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya untuk mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Dalam kurun waktu tahun 2006 hingga tahun 2010 yang lalu, pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ini terkait dengan paket undang-undang keuangan negara, dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan sampai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari paket undang-undang keuangan negara tersebut terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam tataran teknis pun terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.

3.1. Kinerja Keuangan Tahun 2006 - 2010

Untuk tahun 2006 sampai dengan 2010, pengelolaan keuangan daerah masih sangat tergantung dengan kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, terutama dalam hal pendapatan daerah yang sangat besar perannya dalam perencanaan dan pendanaan pembangunan dalam kurun waktu tersebut. Dengan terbitnya Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah tentu memberikan warna baru

dalam menentukan kerangka pendanaan dalam rencana kinerja pembangunan Kabupaten Sijunjung periode tahun 2011-2015. Dengan undang-undang tersebut yang nantinya diikuti oleh peraturan perundang-undangan yang dibawahnya, diharapkan ketergantungan Kabupaten Sijunjung dari dana pusat semakin berkurang yang artinya Kabupaten Sijunjung dapat lebih mandiri dalam hal pendanaan pembangunan dengan mengoptimalkan penerimaan dari Pendapatan Asli daerah (PAD).

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dengan mengukur kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Perkembangan DOFD Kabupaten Sijunjung periode tahun 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2010

Tahun	PAD (Rp)	Jumlah Total Pendapatan	DOFD (%)
2006	15.878.957.658,40	299.816.812.077,59	5,29
2007	21.145.798.733,74	337.637.175.132,75	6,26
2008	24.423.791.385,20	377.231.716.494,09	6,47
2009	25.982.269.630,84	413.867.597.520,84	6,27
2010	21.973.847.556,00	439.095.674.257,00	5,00
Rata-rata	21.880.932.992,84	373.529.795.096,45	5,86

Sumber : DPKD Kab.Sijunjung, (diolah)

Diharapkan pada periode tahun 2011-2015, Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Sijunjung dapat meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut akan berimplikasi menurunnya ketergantungan yang tinggi Kabupaten Sijunjung terhadap dana dari pusat baik berupa DAU, DAK maupun dana bagi hasil dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Laju penambahan PAD tidak sebanding dengan laju penambahan dana transfer dari pusat berupa DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil yang digunakan untuk membiayai sisi pengeluaran pada APBD. Diharapkan pada tahun 2011-2015 peran PAD dalam membiaya sisi pengeluaran pada APBD semakin besar, sedangkan peran dana perimbangan dalam pengeluaran APBD semakin mengecil.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Dalam kurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 perkembangan APBD Kabupaten Sijunjung mengalami perubahan yang cukup berarti. Ini dapat dilihat dari perkembangan pendapatan maupun belanja pada APBD Kabupaten Sijunjung, pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Perkembangan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Sijunjung, 2006-2010 (dalam ribu Rp)

Uraian	2006		2007		2008		2009		2010	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	280.414.774	299.816.812	325.775.160	337.637.175	365.986.204	377.231.716	394.111.747	413.867.597	435.700.389	439.095.674
Belanja	291.167.070	231.624.661	400.019.054	295.047.653	482.790.951	367.988.992	515.733.707	420.620.896	549.182.806	494.231.196
Surplus (Defisit)	(10.752.296)	68.192.150	(74.243.894)	42.589.522	(116.804.747)	9.242.723	(121.621.960)	(6.753.299)	(113.482.417)	(55.135.522)
Penerimaan Pembiayaan	25.352.296	24.818.319	126.363.894	85.378.401	163.757.747	125.472.635	170.276.859	129.835.615	158.852.417	119.291.609
Pengeluaran Pembiayaan	14.600.000	8.176.500	52.120.000	5.610.000	46.953.000	6.338.500	48.654.899	17.500.000	45.370.000	4.870.000
Pembiayaan Netto	10.752.276	(68.192.150)	74.243.894	79.768.401	116.804.747	119.134.135	121.621.960	123.705.716	113.482.417	114.421.609
SILPA	0,00	84.833.970	0,00	122.357.923	0,00	128.376.859	0,00	116.952.417	0,00	59.286.087

Sumber : DPKD Kab. Sijunjung, Perhitungan APBD Kab. Sijunjung, 2006-2010, (diolah)

Sedangkan rata-rata pertumbuhan masing-masing jenis pendapatan dan belanja Kabupaten Sijunjung selama periode 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010(%)

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
I. Pendapatan :						
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	53,33	33,17	15,50	6,38	(15,43)	18,59
2. Dana Perimbangan	84,89	17,80	11,83	10,12	7,76	26,48
3. Lain-lain pendapatan sah	41,44	(79,84)	(18,09)	(9,99)	(23,42)	(17,98)
Total Pendapatan	79,54	12,61	11,73	9,71	6,10	23,94
II. Belanja :						
1. Belanja Operasi :						
- Belanja Pegawai			27,73	19,53	23,37	23,54
- Belanja Barang			26,11	7,34	(6,05)	9,13
- Belanja Bunga			(9,12)	105,57	45,19	47,21
- Belanja Subsidi			171,73	134,19	(27,94)	92,66
- Belanja Bantuan Sosial			57,25	10,27	(33,67)	11,28
Jumlah Belanja Operasi			31,84	22,03	9,68	21,18
2. Belanja Modal						
- Belanja Tanah			(45,52)	(54,14)	(39,29)	(46,32)
- Belanja Peralatan dan Mesin			(0,13)	6,43	31,46	12,59
- Belanja Gedung & Bangunan			10,37	2,71	94,20	35,76
- Belanja Jalan, Jaringan & Irigasi			45,36	(9,82)	29,53	21,69
- Belanja Aset Tetap Lainnya			(80,39)	538,62	(96,82)	120,47
Jumlah Belanja Modal			19,69	(0,32)	38,26	19,21
3. Belanja Tak Terduga			(28,91)	(22,05)	300,72	83,25
4. Belanja Transfer ke Nagari						
- Bagi Hasil Pajak			(100)	-	-	(33,33)
- Bagi Hasil Retribusi			-	7,60	(23,87)	(5,43)
- Bagi Hasil Pendapatan lainnya			(22,05)	(7,23)	11,83	(5,82)
Jumlah Belanja Transfer			(21,56)	(6,81)	10,67	(5,90)
Total Belanja			24,54	14,85	16,94	18,78

Sumber : DPKD Kab. Sijunjung, 2006-2010 (diolah)

Untuk belanja tahun 2006 dan 2007 kurang dapat diperbandingkan dikarenakan nomenklatur belanja tahun 2006 mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, sedangkan untuk tahun 2007 hingga sekarang nomenklatur belanja mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sementara nomenklatur kedua peraturan tersebut sangat berbeda satu sama lainnya.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Kabupaten Sijunjung periode tahun 2008 sampai dengan periode tahun 2010, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Sijunjung, 2008-2010

No	Uraian	2008	2009	2010	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	ASSET				
	ASSET LANCAR				
	Kas di Kas daerah	28.656.048.481,08	22.890.243.509,92	6.789.473.436,92	(37,44)
	kas di Bendahara Pengeluaran	4.469.144,00	168.485.827,00	12.171.213,00	(1.321,23)
	kas di Bendahara Penerimaan	6.282.997.883,00	89.194.247,00	15.990.400,00	(169,95)
	Investasi Jangka Pendek	93.500.000.000,0	94.000.000.000,0	52.500.000.000,00	(7,71)
	Piutang Pajak	807.755.346,00	938.937.734,00	1.013.037.643,00	(2,65)
	Piutang Retribusi	600.252.080,00	610.252.080,00	0,00	0,55
	Piutang Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Pajak Provinsi	3.482.367.359,00	2.291.044.532,00	1.039.351.452,00	(12,00)
	Piutang Lainnya	78.472.115,00	178.472.115,00	111.800.115,00	27,34
	Persediaan	3.629.830.106,00	3.456.717.801,10	3.351.794.135,00	13,56
	Jumlah Asset Lancar	137.042.192.514,08	124.623.347.846,02	64.833.618.394,92	(11,28)
	INVESTASI JANGKA PANJANG				
	Investasi Non-Permanen				
	Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investasi dalam Surat Utang Negara	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investasi dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investasi dalam Proyek Pembangunan				
	Investasi Non Permanen Lainnya	6.170.841.659,00	7.712.084.859,00	7.439.564.659,00	(3,18)
	Jumlah Investasi Non Permanen	6.170.841.659,00	7.712.084.859,00	7.439.564.659,00	(3,18)
	Investasi Permanen				
	Pemyataan Modal Pemerintah daerah	27.173.912.000,00	29.148.912.000,00	32.018.690.342,00	4,16
	Investasi dlm proyek pembangunan	1.770.000.000,00	2.824.899.000,00	2.824.899.000,00	29,40
	Jumlah Investasi Permanen	28.943.912.000,00	31.973.811.000,00	34.843.579.342,00	5,96
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	35.114.753.659,00	39.685.895.859,00	42.283.144.001,00	4,42

No	Uraian		2008	2009	2010	Rata-Rata Pertumbuhan
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	ASSET TETAP					
		Tanah	57.912.324.500,00	69.251.957.000,00	73.007.686.000,00	20,48
		Peralatan dan Mesin	116.452.092.212,00	93.784.476.429,00	103.605.451.545,00	7,75
		Gedung dan Bangunan	226.991.324.052,00	321.335.841.987,00	327.014.630.728,00	15,53
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	426.263.001.695,00	508.682.839.847,00	576.042.995.718,00	17,62
		Asset tetap Lainnya	9.239.731.655,00	14.967.307.275,00	15.146.786.550,00	34,12
		Konstruksi Dalam Pengerjaan	20.535.061.825,00	47.465.885.850,00	87.713.177.690,00	14,94
		Akumulasi Penyusutan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah Asset tetap	857.393.535.939,00	1.055.488.308.388,00	1.182.530.728.231,00	19,72
	DANA CADANGAN					
		Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jumlah Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASSET LAINNYA					
		Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tuntutan perbendaharaan	0,00	0,00	0,00	0,00
		Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
		Asset Tak Berwujud	0,00	0,00	511.725,00	4,18
		Asset lainnya	3.226.759.233,00	1.016.659.500,00	26.975.000,00	(313,68)
		Jumlah Asset lainnya	3.226.759.233,00	1.016.659.500,00	538.700.000,00	(54,88)
		JUMLAH ASSET	1.032.777.241.345,08	1.220.814.211.593,02	1.290.186.190.626,92	14,33
2	KEWAJIBAN					
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
		Utang Pertitungan Pihak Ketiga (PFK)	62.187.260,00	106.311.681,00	15.557.304,00	(54,19)
		Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bagian Utang Dalam Negeri - Pemerintah daerah lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bagian lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utang Jangka Pendek Lainnya	19.055.282,00	40.007.466,00	777.210.865,00	(8,55)
		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	81.242.542,00	146.319.147,00	792.768.169,00	(12,86)

No	Uraian	2008	2009	2010	Rata-Rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Dalam Negeri - Pemerintah daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Kontijensi (Jaminan Reklamasi)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	81.242.542,00	146.319.147,00	792.768.169,00	(12,86)
3	EKUITAS DANA				
	EKUITAS DANA LANCAR				
	Sisa Pembiayaan Anggaran (SILPA)	128.376.859.104,08	116.952.417.655,92	59.286.087.345,92	(12,49)
	Pendapatan yang ditangguhkan	4.469.144,00	89.194.247,00	15.990.400.000,00	(173,44)
	Cadangan Piutang	4.968.846.900,00	4.018.706.461,00	2.164.189.210,00	(6,19)
	cadangan Persediaan	3.629.830.106,00	3.456.717.801,10	3.351.794.135,00	13,56
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek	(19.055.282,00)	(40.007.466,00)	(777.210.865,00)	(8,55)
	Jumlah ekuitas dana Lancar	136.960.949.972,08	124.477.028.699,02	64.040.850.225,92	(11,53)
	EKUITAS DANA INVESTASI				
	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	35.114.753.659,00	39.685.895.859,00	42.283.144.001,00	4,42
	Diinvestasikan dalam asset tetap	857.393.535.939,00	1.055.488.308.388,00	1.182.530.728.231,00	17,34
	Diinvestasikan dalam asset lainnya	3.226.759.233,00	1.016.659.500,00	538.700.000,00	(54,88)
	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Ekuitas dana Investasi	859.735.048.831,00	1.096.190.863.747,00	1.225.352.572.232,00	16,83
	EKUITAS DANA CADANGAN				
	Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS DANA	1.032.695.998.803,08	1.220.667.892.446,02	1.289.393.422.457,92	14,32
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.032.777.241.345,08	1.220.814.211.593,02	1.290.186.190.626,92	14,33

Sumber : DPKD Kab. Sijunjung, 2008-2010 dan diolah sendiri

Untuk menganalisis neraca Kabupaten Sijunjung periode tahun 2008-2010, digunakanlah beberapa analisis rasio, yaitu:

1. Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas yaitu Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Ada beberapa macam rasio likuiditas, namun yang lazim dipakai, termasuk untuk melihat neraca Kabupaten Sijunjung adalah rasio lancar dengan rumusan seperti dibawah ini :

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}}$$

Dikarenakan neraca pada pemerintah daerah, sedikit ada perbedaan dengan neraca pada perusahaan, maka perlu dilakukan penyesuaian terutama pada aset lancar. Perkembangan rasio lancar Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2010, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Rasio Lancar Kabupaten Sijunjung Tahun 2008-2010

Uraian	2008	2009	2010
Aset Lancar	137.042.192.514,08	124.623.347.846,02	64.833.618.394,92
Kewajiban Lancar	81.242.542,00	146.319.147,00	792.768.169,00
Rasio Lancar	1.686,83	851,72	81,78

Sumber : DPKD Kab. Sijunjung, 2008-2010 diolah sendiri

2. Ratio Solvabilitas

Rasio ini disebut juga ratio leverage yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva entitas dibiayai oleh hutang, rasio ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Adapun Rasio yang tergabung yang lazim digunakan adalah : **Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)**

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang-hutang dan ekuitas dalam pendanaan suatu entitas dan menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Total Debt to equity Ratio} = \frac{\text{Total Hutang (Kewajiban)}}{\text{Ekuitas}}$$

Perkembangan rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Sijunjung tahun 2008-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Rasio Hutang Terhadap Ekuitas Kabupaten Sijunjung Tahun 2008-2010

Uraian	2008	2009	2010
Kewajiban	81.242.542,00	146.319.147,00	792.768.169,00
Ekuitas	1.032.695.998.803,08	1.220.667.892.446,02	1.289.393.190.626,00
Total Debt to equity Ratio	0,00	0,00	0,00

Sumber : DPKD Kab. Sijunjung, 2008-2010 dan diolah sendiri

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun 2006 - 2010

Dalam kurun waktu tahun 2006-2010, terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2007 sampai dengan Tahun Anggaran 2009, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan satuan entitas akuntansi. Hal tersebut berarti bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut bertanggung jawab terhadap anggarannya masing-masing termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dan secara administratif harus dilaporkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu Pejabat Pengguna Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dari segi pengawasan dari rangkaian pengelolaan keuangan daerah, pada periode tahun 2006-2010, Laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) sebagai entitas pelaporan, menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan inilah yang kemudian akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengelolaan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dikoordinir oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) yang mengemban fungsi sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah, laporan semester, laporan prognosis realisasi anggaran, laporan realisasi anggaran, neraca hingga catatan atas laporan

keuangan disusun secara otonomi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi yang kemudian diverifikasi dan dikompilasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) sebagai entitas pelaporan menjadi Laporan Keuangan Kabupaten Sijunjung. Sedangkan Laporan Arus Kas disusun secara sentralistik oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD). Pengelolaan keuangan Daerah tersebut tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Pengelolaan Belanja Daerah secara umum telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) walaupun masih terdapat beberapa kebijakan yang belum sepenuhnya mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam hal pelaporan dan pengawasan Laporan Keuangan Kabupaten Sijunjung dapat dikatakan selama tahun 2006-2010 belum berhasil, hal ini dapat dilihat dari hasil opini audit BPK Kabupaten Sijunjung sebagai berikut:

Tabel 3.7
Opini BPK terhadap LKD Kabupaten Sijunjung Tahun 2006-2010

Tahun	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah
2006	WDP
2007	Disclaimer
2008	WDP
2009	WDP
2010	WDP

Sumber: DPKD Kab. Sijunjung, 2008-2010

Target kedepan pada periode tahun 2011-2015, Kabupaten Sijunjung mengharapkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sijunjung akan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan fokus untuk membenahi pengelolaan aset daerah yang selama ini menjadi titik lemah dalam Laporan keuangan Daerah saat ini.

3.2.1. Analisis Pembiayaan

Pencapaian prinsip efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tercermin dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pertahunnya. SILPA per tahun diharapkan menurun baik secara nominal maupun persentasenya, dikarenakan kurang baik untuk perekonomian makro Kabupaten Sijunjung, yang menggambarkan belanja pemerintah kurang diberdayakan dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga belanja pemerintah tidak dapat secara optimal menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan prosentase SILPA yang digunakan untuk membiayai belanja Kabupaten Sijunjung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Perkembangan Persentase SILPA Kabupaten Sijunjung untuk Pendanaan APBD tahun 2006-2010
 (dalam ribu Rp.)

Tahun	SILPA (Rp)	Pengeluaran APBD (Rp)	%
2006	84.833.970	299.816.812	28,29
2007	122.357.923	337.637.175	36,23
2008	128.376.859	377.231.716	34,03
2009	116.952.417	413.867.597	28,26
2010	59.286.087	439.095.674	13,50

Sumber DPKD Kab. Sijunjung, APBD, 2005-2010 diolah sendiri

3.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2011-2015

Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun 2011-2015 ini sangatlah penting untuk dikaji. Dari dasar analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode sebelumnya (2006-2010) Kabupaten Sijunjung mempunyai DOFD yang sangat kecil, hal ini terlihat dari angka rata-rata sebesar 5,86%. Oleh karena itu, sumber pendanaan pembangunan Kabupaten Sijunjung sangat tergantung dari dana perimbangan.

3.3.1. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan merupakan jumlah potensi penerimaan yang akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sijunjung dan perhitungan belanja tidak langsung berupa gaji dan tunjangan. Perhitungan kerangka pendanaan sangat penting dilakukan pada bab-bab awal agar diketahui kapasitas riil sebelum menentukan program dan capaian target selama lima tahun.

a. Kerangka Penerimaan

Sesuai dengan analisis-analisis diatas dapat diestimasi kerangka pendanaan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2011-2015. Pendanaan tersebut terbagi kedalam jenis-jenis pendapatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Estimasi penerimaan daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Estimasi Penerimaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015

URAIAN	2011*	2012*	2013*	2014	2015
PENDAPATAN	525,536,997,559	548,415,546,261	635,707,759,978	704,500,000,000	773,010,000,000
Pendapatan Asli Daerah	30,460,564,966	33,076,293,823	33,965,995,691	39,000,000,000	41,880,000,000
Hasil Pajak Daerah	4,263,142,351	4,384,126,615	4,713,747,767	6,443,500,000	7,080,000,000
Hasil Retribusi Daerah	4,369,110,200	5,809,143,700	10,798,312,000	12,708,400,000	14,000,000,000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8,435,176,057	8,444,348,684	9,000,000,000	12,020,000,000	13,300,000,000
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13,393,136,358	14,438,674,824	9,453,895,924	7,828,100,000	7,500,000,000
Dana Perimbangan	393,480,497,593	455,014,929,438	539,502,481,287	590,270,330,000	646,130,000,000
Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	20,032,319,593	22,597,065,438	22,052,183,287	23,912,000,000	25,130,000,000
Dana Alokasi Umum	331,390,878,000	389,425,714,000	448,681,128,000	497,000,000,000	551,000,000,000
Dana Alokasi Khusus	42,057,300,000	42,992,150,000	68,769,170,000	69,358,330,000	70,000,000,000
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	101,595,935,000	60,324,323,000	62,239,323,000	75,229,670,000	85,000,000,000
JUMLAH PENDAPATAN	525,536,997,559	548,415,546,261	635,707,759,978	704,500,000,000	773,010,000,000
SILPA	59,268,087,345	67,284,896,101	46,480,559,855	46,720,000,000	32,650,000,000
JUMLAH PENDAPATAN DAN SILPA	584,805,084,904	615,700,442,362	682,188,319,833	751,220,000,000	805,660,000,000

Sumber : DPKD Kabupaten Sijunjung (diolah),

*)Data APBD/APBDP Kabupaten Sijunjung

b. Kerangka Belanja

Untuk menentukan kerangka belanja ini, yang perlu dicermati terlebih dahulu adalah realisasi belanja pegawai Kabupaten Sijunjung. Perkembangan Belanja Pegawai (untuk kebutuhan gaji dan tambahan penghasilan) Kabupaten Sijunjung pada tahun 2006-2010, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Perkembangan Realisasi Belanja Pegawai BTL Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010 (juta Rp)

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
Belanja Pegawai	101.284,68	117.178,29	148.609,43	176.135,71	225.476,20
Belanja Daerah	231.594,74	295.047,65	367.988,99	420.620,90	494.231,20
% Pertumbuhan		15,69%	26,82%	18,52%	28,01%
% Komposisi	43,73%	39,72%	40,38%	41,88%	45,62%

Sumber : DPKD Kabupaten Sijunjung (diolah)

*)Data APBD/APBDP Kabupaten Sijunjung

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi belanja pegawai secara komposisi berkisar antara 39 hingga 45% dari nilai realisasi belanja daerah dan dengan kecenderungan meningkat. Artinya hampir mendekati separoh dari belanja daerah adalah untuk kebutuhan belanja pegawai yang bersifat wajib dan terus mengalami peningkatan baik secara nominal maupun secara komposisi.

Disamping itu belanja langsung sebagai bentuk operasional pelaksanaan progam dan kegiatan dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan perlu dicermati perkembangannya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Perkembangan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Sijunjung tahun 2006-2010 (juta Rp)

Uraian	2006	2007	2008	2009	2010
Belanja Langsung	130.310,59	143.738,41	177.440,72	184.880,47	216.279,84
Belanja Daerah	231.594,74	295.047,65	367.988,99	420.620,90	494.231,20
% Pertumbuhan		10,31%	23,44%	4,19%	16,98%
% Komposisi	56,27%	48,47%	48,23%	43,81%	43,72%

Sumber : DPKD Kabupaten Sijunjung (diolah)

Dengan demikian terlihat kecenderungan bahwa realisasi belanja langsung secara komposisi semakin menurun dari 56,27% sampai ke 43,72%, yang sejalan dengan semakin meningkatnya komposisi belanja pegawai. Dari kedua perbandingan belanja dimaksud terlihat bahwa kebutuhan belanja pegawai akan terus meningkat secara komposisi bila

pendanaan yang menutupinya cenderung sama atau dengan persentase kenaikan yang lebih kecil.

Disamping itu, perkembangan belanja pegawai dipengaruhi juga oleh kebijakan Pemerintah Pusat terhadap kenaikan gaji PNS dan pertumbuhan jumlah pegawai. Untuk tahun 2013 diperkirakan rata-rata kenaikan Gaji PNS adalah 7,5% sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya kenaikan rata-rata adalah 10%. Pertumbuhan jumlah pegawai juga terpengaruh dengan dikeluarkannya moratorium tanggal 1 September 2011 atas pengangkatan CPNS bagi Daerah yang memiliki anggaran Belanja Pegawai diatas 50%.

Dari data-data diatas, dapat dilakukan prognosis perkiraan belanja pegawai sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.12
Perkiraan Belanja Pegawai Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015

Uraian	2011*	2012*	2013	2014	2015
Belanja Pegawai	261.681,92	304.887,88	326.759,38	364.075,00	402.850,00

Sumber : DPKD Kabupaten Sijunjung (diolah)

*)Data APBD/APBDP Kabupaten Sijunjung

Dari perkiraan belanja gaji tersebut dapat diketahui kapasitas riil dari keuangan daerah Kabupaten Sijunjung, dimana dana yang tersedia setelah dikurangi belanja pegawai (perwujudan dari belanja wajib) tersebut, itulah yang dapat digunakan dalam belanja lainnya. Adapun tabel berikut menunjukkan kapasitas riil ataupun dana yang tersedia setiap tahunnya pada Kabupaten Sijunjung untuk pendanaannya tahun 2011-2015, sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perkiraan Kapasitas Riil Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015 (juta Rp)

URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
Total Penerimaan (dana tersedia)	584,805	615,700	682,188	751,220	805,660
Jumlah Belanja Pegawai (belanja wajib)	220.077	253.088	291.051	334.709	384.916
Kapasitas Riil	364.728	362.612	391.137	416.511	420.744

Sumber : DPKD Kabupaten Sijunjung (diolah)

Dari dana yang tersedia tersebut, dapat diambil pendekatan penggunaan dana yang tersedia dengan pendekatan prioritas penggunaan dana, dimana ada 3 (tiga) prioritas penggunaan dana yaitu:

1. Prioritas I digunakan untuk alokasi program pembangunan daerah yang terkait secara langsung dengan visi dan misi bupati terpilih.
2. Prioritas II digunakan untuk alokasi pembangunan yang terkait dengan program urusan lainnya.
3. Prioritas III digunakan untuk alokasi belanja tidak langsung lainnya seperti bantuan sosial, hibah, tambahan penghasilan PNS dan lain sebagainya.

Tabel 3.14
Pendanaan Prioritas Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015 (Juta Rp)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Prioritas I	182.364,00	181.306,00	195.568,50	208.255,50	210.372,00
Prioritas II	127.654,80	126.914,20	136.897,95	145.778,85	147.260,40
Prioritas III	54.709,20	54.391,80	58.670,55	62.476,65	63.111,60
Jumlah	364.728,00	362.612,00	391.137,00	416.511,00	420.744,00

Sumber : DPKD Kabupaten Sijunjung (diolah)

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik, maka pemerintah daerah akan dapat mempertahankan atau meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintah daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan Kabupaten Sijunjung yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan visi dan misi Bupati/Wakil Bupati terpilih telah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Sijunjung.

Identifikasi permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan tujuan pembangunan lima tahunan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran RPJMD. Hasil perumusan permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum serta dilihat dari analisis lingkungan, maka permasalahan pembangunan Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

4.1.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan yang mendasar dari aspek kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung belum menunjukkan tingkat perkembangan yang signifikan atau cenderung lambat .
- b. Cukup tingginya tingkat kemiskinan absolut, hal ini disebabkan karena belum meratanya pendapatan per kapita masyarakat dan akses terhadap segala bidang.
- c. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sijunjung dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Barat yang ditandai masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- d. Belum optimalnya pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan gender yang ditandai masih rendahnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

4.1.2. Aspek Pelayanan Umum

A. Pelayanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Belum maksimalnya pemanfaatan layanan pendidikan di semua jenjang pendidikan,
- b. Rendahnya mutu dan daya saing lulusan yang terlihat dari nilai rata-rata Ujian Nasional dan lulusan SMA/SMK/MA yang diterima di Perguruan Tinggi maupun yang diterima di dunia industri
- c. Belum optimalnya tata kelola pendidikan dalam menciptakan iklim dan motivasi belajar.
- d. Belum meratanya pendistribusian, pemerataan dan kualitas guru pada jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA

2. Kesehatan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Masih tingginya jumlah Kematian Ibu melahirkan, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya jumlah bidan, dokter umum dan belum adanya dokter spesialis yang membantu proses persalinan yang mengalami kegawatdarutan dan masih banyak ibu hamil yang mengalami anemia, sehingga memicu kegawatdarutan serta masih kurangnya pemahaman masyarakat kesiapsiagaan persalinan.
- b. Masih tingginya kasus gizi buruk, hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat, khususnya ibu dalam pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI.
- c. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama belum sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk.
- d. Belum adanya ketersediaan rumah sakit umum, sehingga pelayanan kesehatan rujukan lanjutan terhadap masyarakat belum terlayani secara optimal.
- e. Masih rendahnya rasio dokter, tenaga keperawatan dan kesehatan masyarakat terhadap jumlah penduduk, jika dibandingkan dengan target Indonesia Sehat 2010. Hal ini disebabkan karena diluar faktor kendali Pemerintah Kabupaten Sijunjung terhadap pengadaan dokter, tenaga keperawatan dan ahli kesehatan masyarakat yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.
- f. Masih terbatasnya dana jaminan kesehatan masyarakat.

3. Pekerjaan Umum

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut :

- a. Masih banyaknya jalan dan jembatan dengan kondisi kurang baik,
- b. Masih banyaknya jalan lingkungan nagari yang berkondisi rusak/tanah
- c. Masih tingginya jumlah saluran irigasi yang mengalami kerusakan dan cukup banyaknya saluran irigasi yang belum dibangun.
- d. Belum banyaknya saluran drainase yang dibangun, sehingga terjadinya genangan air yang cukup tinggi.

4. Perumahan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan perumahan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat.
- b. Masih rendahnya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan.
- c. Masih lambatnya pertumbuhan rumah sehat dan bersih yang dibangun oleh pengembang.

5. Penataan Ruang

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan penataan ruang adalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya RTRW yang sesuai dengan amanah UU No. 26/2007 berserta dokumen turunannya.
- b. Belum optimalnya pengelolaan perizinan pemanfaatan ruang dan penganturan pemanfaatan ruang.
- c. Masih sering terjadi konflik pemanfaatan ruang

6. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya kemampuan aparatur di masing-masing SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas.
- b. Masih terbatasnya data pendukung dalam penyusunan dokumen perencanaan.
- c. Belum semua dokumen perencanaan daerah menjadi pendoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah oleh SKPD.

7. Perhubungan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
- b. Masih kurangnya pelayanan angkutan umum yang ditandai masih sedikitnya jumlah angkutan darat.

8. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan akibat maraknya Penambangan Tanpa Izin (PETI).
- b. Belum optimalnya perlindungan terhadap kawasan lindung dan sumber mata air serta penanganan wilayah longsor.
- c. Rendahnya ketersediaan data dan informasi tentang lingkungan hidup yang dapat diakses masyarakat.
- d. Masih rendahnya pengelolaan sampah dan limbah.
- e. Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

9. Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan kependudukan dan catatan sipil adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil.
- b. Belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan.
- c. Masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kebijakan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak, hal ini disebabkan karena perumusan kebijakan masih dilakukan secara parsial.
- b. Belum optimalnya lembaga pengarusutamaan gender dan anak dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
- c. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan di daerah.

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam ber KB yang ditandai masih kecilnya jumlah partisipasi PUS untuk ber KB dan masih rendahnya kesadaran menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
- b. Masih terbatasnya kapasitas tenaga dan kelembagaan program KB yang ditandai dengan masih kecilnya cakupan pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Terbatasnya ketersediaan alat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,

12. Sosial

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan sosial adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi sosial yang ditandai masih kecilnya jumlah panti.
- b. Belum optimalnya penyediaan jaminan sosial dan pembinaan terhadap anak terlantar, hal ini terlihat dari relatif tingginya jumlah anak terlantar pada tahun 2010 sebanyak 1.362 orang
- c. Belum optimalnya penanganan dan pembinaan terhadap penyandang cacat, hal ini terlihat relatif tingginya jumlah penyandang cacat pada tahun 2010 sebanyak 1.397 orang

- d. Belum optimalnya lembaga sosial masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan masyarakat.

13. Ketenagakerjaan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

- a. Masih kecilnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, hal ini disebabkan karena ketersediaan BLK belum memadai.
- b. Masih rendahnya kesempatan kerja, hal ini terlihat dari jumlah angkatan kerja yang ditempatkan pada tahun 2010 tidak ada.
- c. Kurangnya pengawasan dan perlindungan tenaga kerja di perusahaan

14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan koperasi dan usaha kecil menengah adalah sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya jumlah koperasi yang aktif.
- b. Masih lemahnya kelembagaan koperasi, terutama menyangkut aspek legalitas usaha, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- c. Masih rendahnya kapasitas SDM koperasi dalam mengelola koperasi sesuai dengan manajemen pengelolaan yang baik, hal ini ditandai sedikitnya koperasi yang aktif.
- d. Rendahnya semangat kewirausahaan yang ditandai dengan relatif kecilnya jumlah UMKM.
- e. Belum terbangunnya kemitraan antar UMKM.
- f. Daya saing produk UMKM masih rendah.
- g. Masih kurangnya ketersediaan penunjang usaha, terutama pemasaran dan informasi pasar, ketersediaan bahan baku dan sarana teknologi produksi.

15. Penanaman Modal

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya promosi terhadap peluang dan potensi investasi daerah, baik penyediaan media promosi, kerjasama promosi maupun strategi pemasaran investasi serta belum terpadunya sistem informasi penanaman modal Kabupaten Sijunjung dengan nasional dan provinsi.
- b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang investasi daerah yang ditandai dengan belum optimalnya pelayanan perizinan melalui Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP).
- c. Belum maksimalnya regulasi terkait dengan penanaman modal.

16. Kebudayaan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengembangan nilai-nilai budaya daerah, terutama budaya lokal, hal ini ditandai dengan relatif sedikitnya jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dan Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya.
- b. Masih terbatasnya kerjasama dengan swasta dan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah.

17. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut :

- a. Belum sinergis kebijakan dalam pembinaan pemuda dan prestasi olahraga.
- b. Belum tumbuhnya rasa kepedulian pemuda dalam menunjang pembangunan daerah.
- c. Masih rendahnya peran organisasi olahraga dalam pembibitan dan pembinaan atlet muda berpotensi.
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga untuk menunjang aktivitas latihan dan pertandingan olahraga.

18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan di kelompok masyarakat dan anak sekolah.
- b. Cukup rendahnya partisipasi masyarakat ikut Pemilu
- c. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan.
- d. Belum optimalnya pembinaan organisasi masyarakat sipil.

19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah dan kepegawaian adalah sebagai berikut :

- a. Belum tersusunya beberapa regulasi daerah yang menjadi kebutuhan daerah dalam merespon peraturan perundang-undangan yang baru dan masih ditemuinya beberapa peraturan yang belum sinergis.
- b. Belum sesuai organisasi perangkat daerah terhadap kebutuhan dan tuntutan beban kerja.
- c. Belum optimalnya penggunaan teknologi pelayanan informasi di SKPD dan Pemerintah Nagari untuk menunjang kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik
- d. Belum optimalnya pengawasan internal untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, disebabkan karena belum memiliki aparat pengawas/auditor yang sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.
- e. Belum optimalnya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, baik pajak maupun retribusi daerah.
- f. Belum dimanfaatkannya pinjaman sebagai sumber pembiayaan alternatif.
- g. Belum tercapainya penilaian laporan keuangan daerah beropini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- h. Kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel belum optimal, disebabkan karena terbatasnya kapasitas SDM dan peralatan kerja.
- i. Belum adanya survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.

- j. Belum efektifnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah disebabkan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai administrasi pertanahan.
- k. Masih adanya konflik-konflik sengketa pertanahan di masyarakat, disebabkan karena status tanah pada umumnya tanah ulayat.
- l. Belum optimalnya peran BUMD dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan PAD.

20. Ketahanan Pangan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan ketahanan pangan adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya tingkat kerawanan pangan
- b. Kurang meratanya konsumsi bahan pangan utama, terutama bahan-bahan pangan yang tersedianya tergantung pada lokasi geografis.
- c. Belum beragamnya konsumsi pangan oleh masyarakat.
- d. Belum terjaminnya tingkat keamanan pangan masyarakat

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut :

- a. Belum terwujudnya secara optimal pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat nagari, hal ini terlihat dari jumlah kelompok usaha ekonomi produktif relatif kecil dan pengembangan usaha ekonomi produktif masih rendah.
- b. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan belum berjalan secara optimal, hanya elit-elit nagari/desa yang banyak berperan dalam setiap tahapan pembangunan serta peran dan akses perumusan pembangunan belum sesuai harapan.
- c. Belum terintegrasinya program pemberdayaan masyarakat antar SKPD.
- d. Belum optimalnya partisipasi masyarakat perantaraan dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah.

22. Statistik

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan statistik adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pengelolaan data base untuk mendukung perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
- b. Terbatasnya ketersediaan data statistik daerah untuk memenuhi kepentingan perencanaan dan penelitian.

23. Kearsipan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan kearsipan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah,
- b. Masih terbatasnya sumberdaya dalam pengelolaan kearsipan,

24. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut :

- a. Belum selarasnya kebijakan dan regulasi di bidang komunikasi dan informatika.
- b. Terbatasnya jaringan komunikasi dan informatika di berbagai wilayah dalam menunjang akses masyarakat untuk memperoleh informasi melalui teknologi informasi.
- c. Belum meratanya ketersediaan SDM dalam bidang teknologi informasi dan terbatasnya Kelompok Informasi masyarakat (KIM)

25. Perpustakaan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan perpustakaan adalah sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya sarana dan prasarana dasar perpustakaan daerah yang memadai.
- b. Masih terbatasnya akses masyarakat dalam memperoleh informasi melalui buku, media masa dan lainnya, hal ini disebabkan karena belum optimalnya jumlah perpustakaan dan buku yang tersedia.
- c. Masih rendahnya minat baca masyarakat, hal ini terlihat dari relatif kecilnya jumlah keanggotaan perpustakaan dan jumlah pengunjung.
- d. Belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan, hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat masih kurang.

B. Pelayanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Lemahnya penguasaan teknologi pertanian dengan aspek-aspek sosial ekonominya, sehingga tingkat produktivitas pertanian dan perkebunan masih rendah.
- b. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana baik usaha pertanian dan mau-pun usaha perkebunan.
- c. Rendahnya kualitas SDM dan menurunnya minat anak muda di bidang pertanian dan perkebunan, karena penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan perkebunan belum optimal.
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana penyuluh.
- e. Tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
- f. Belum optimalnya pengembangan komoditi unggulan daerah.
- g. Belum adanya pengembangan kawasan pertanian yang terpadu dan terintegrasi.
- h. Belum adanya kepastian serapan pasar produk pertanian dengan tingkat harga menguntungkan petani.
- i. Belum optimalnya pengembangan kawasan peternakan
- j. Masih kurangnya produksi hasil peternakan untuk mendukung swasembada daging dan telur, baik meningkatkan pendapatan masyarakat dan ketahanan pangan.
- k. Adanya berbagai kasus penyakit ternak dan ancaman penyakit ternak dari daerah lain.

2. Kehutanan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan kehutanan adalah sebagai berikut :

- a. Belum terbentuknya Kesatuan Pengelola Hutan (KPH).
- b. Masih banyaknya lahan kritis dan lahan rawan longsor yang belum direhabilitasi.
- c. Pemanfaatan kawasan hutan produksi belum optimal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nagari/desa di dalam dan diluar kawasan hutan.
- d. Tingginya ancaman kerusakan hutan akibat *illegal logging* dan kebakaran hutan.

- e. Belum optimalnya pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan energi dan sumber daya mineral adalah sebagai berikut :

- a. Masih banyaknya jorong dan nagari yang belum mendapatkan akses energi listrik karena berada dilokasi yang sulit terjangkau
- b. Belum optimalnya pengembangan energi yang terbarukan.
- c. Terbatasnya sarana dan parasarana untuk mendukung energi listrik
- d. Masih terdapatnya pengelola usaha pertambangan dan penggalian bahan tambang yang kurang menyadari upaya pelestarian lingkungan.
- e. Masih tingginya penambangan tanpa izin.

4. Pariwisata

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)
- b. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata, sehingga jumlah kunjungan wisata baik domestik dan mancanegara masih kecil.
- c. Belum tergalinya pengembangan pariwisata yang berbasis potensi, keunikan dan kearifan lokal.
- d. Kurangnya promosi dan penyebarluasan informasi pariwisata secara intensif dalam upaya mengenalkan objek wisata di Kabupaten Sijunjung.
- e. Rendahnya keterlibatan masyarakat dan kemitraan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata.

5. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya produksi hasil perikanan
- b. Rendahnya daya saing produk perikanan.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan.

6. Perdagangan

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pasar tradisional.
- b. Belum optimalnya upaya melindungi konsumen terhadap kecurangan-kecurangan dalam perdagangan.
- c. Belum terbangunnya sistem informasi perdagangan untuk mendukung distribusi barang kebutuhan masyarakat secara merata.

7. Industri

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan industri adalah sebagai berikut :

- a. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam proses industri, baik kecil maupun menengah karena belum ada standarisasi mutu hasil industri, sehingga daya saing masih rendah dibandingkan daerah lain.

- b. Belum optimalnya promosi dan pemasaran produk industri.
- c. Belum optimalnya perkembangan sentra-sentra industri potensial dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas.
- d. Belum berkembangnya industri kecil menengah yang dapat menyerap tenaga kerja dalam upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
- e. Belum tersedianya sarana dan prasarana promosi barang industri.

8. Ketransmigrasian

Permasalahan yang mendasar dari aspek pelayanan urusan ketransmigrasian adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya penyediaan lahan untuk program transmigrasi, disebabkan karena wilayah Kabupaten Sijunjung didominasi kawasan hutan lindung dan konservasi.
- b. Sulitnya melakukan pembebasan lahan, karena sebagian besar status tanah banyak berstatus tanah ulayat.

4.2. Isu-isu Strategis

Rumusan isu-isu strategis pembangunan merupakan refleksi dari hasil kajian terhadap : a) evaluasi dan pencapaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, dan b) identifikasi terhadap seluruh permasalahan pembangunan yang dilihat dari aspek kesejahteraan dan pelayanan umum serta analisis lingkungan yang bersifat *existing* maupun potensi yang kemungkinan timbul pada masa yang akan datang. Analisis lingkungan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Lingkungan Internal

Berdasarkan analisis yang dilakukan berdasarkan kondisi umum daerah, kondisi keuangan daerah dan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan aspek kesejahteraan rakyat dan aspek pelayanan umum, maka analisis lingkungan dibagi dua faktor yaitu; 1) faktor kekuatan dan 2) faktor kelemahan. Kedua faktor tersebut yang berada dalam jangkauan kapasitas Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk mengubah atau mempengaruhinya. Oleh karena itu diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor kekuatan, antara lain terdiri dari :

- a. Posisi dan letak geografis yang strategis sebagai mata rantai menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau serta Sumatera bagian selatan.
- b. Tersedianya lahan yang memadai untuk pengembangan pertanian dan perkebunan.
- c. Tersedianya potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk peningkatan ekonomi daerah.
- d. Kuantitas sumberdaya aparatur daerah cukup memadai.
- e. Memiliki potensi wisata alam, wisata sejarah dan wisata khusus.
- f. Kearifan lokal masyarakat yang terjaga baik.
- g. Penduduk usia produktif cukup tinggi.

2. Faktor kelemahan, antara lain terdiri dari :

- a. Kondisi geografis daerah berbukit dan sebagian besar berada kawasan hutan.
- b. Relatif tingginya tingkat kemiskinan.
- c. Belum optimalnya lembaga UMKM dan koperasi yang mendukung ekonomi kerakyatan dan pasar komoditi unggulan sektor pertanian/ perkebunan.
- d. Rendahnya kualitas SDM masyarakat.
- e. Kondisi keuangan daerah yang terbatas.

- f. Rendahnya kesadaran pengusaha dan masyarakat dalam menjaga lingkungan
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi dan prasarana dasar di nagari
- h. Belum berkembangnya teknologi tepat guna.
- i. Masih terdapatnya nagari dan jorong tertinggal.

B. Lingkungan Eksternal

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka analisis lingkungan dibagi dua faktor yaitu; 1) faktor peluang dan 2) faktor ancaman. Karena kedua faktor tersebut berada diluar jangkauan kapasitas Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk mempengaruhinya, namun paling tidak faktor peluang dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemajuan Kabupaten Sijunjung dan faktor ancaman dapat menjadikan peluang dalam meningkatkan kemajuan daerah dimasa yang akan datang.

1. Faktor peluang, antara lain terdiri dari :

- a. Posisi geo-ekonomi Kabupaten Sijunjung yang dikelilingi oleh daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi.
- b. Semakin baik dan berkembangnya pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Tingginya minat investor dalam menanamkan modal karena terbukanya iklim dunia usaha kondusif.
- d. Semakin luasnya potensi pasar.
- e. Tumbuh dan berkembangnya pariwisata antar daerah.
- f. Semakin berkembangnya IPTEK.
- g. Tersedianya paraturan perundang-undangan.

2. Faktor ancaman, antara lain terdiri dari :

- a. Meningkatnya persaingan ekonomi antar daerah tetangga.
- b. Semakin parahnya kerusakan lingkungan.
- c. Adanya potensi bencana
- d. Pengaruh budaya negatif terhadap tataran kehidupan agama, adat dan sosial budaya.
- e. Adanya kebijakan pemerintah yang kontraproduktif satu sama lain.

Berangkat dari permasalahan pembangunan dan analisis lingkungan tersebut, maka isu-isu strategis yang perlu dijadikan prioritas penanganan untuk lima tahun kedepan dan berkaitan erat dengan isu-isu RPJPD Kabupaten Sijunjung tahun 2005-2025, adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan ekonomi yang tangguh

Isu strategis ini merupakan prioritas utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi pendapatannya. Jika dilihat dari aspek daya saing kemampuan ekonomi Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2006-2010) menunjukkan cenderung positif, hal ini terlihat dari adanya kecenderungan meningkatnya PDRB, pendapatan PDRB perkapita dan daya beli masyarakat serta nilai tukar petani. Meningkatnya keempat indikator tersebut, tidak diikuti dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung secara signifikan, hal ini terlihat dari rata-rata angka pertumbuhan ekonomi hanya diatas 5%. Selain itu, angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung masih dibawah rata-rata nasional dan rata-rata Provinsi Sumatera Barat.

Masih lambatnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung, disebabkan karena belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan sektor pertanian, pariwisata dan potensi sumberdaya alam, belum berkembangnya industri kecil, menengah dan koperasi, belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif serta belum berkembangnya jiwa kewirausahaan di tataran masyarakat, terutama yang berada di nagari/desa. Upaya mengatasi isu-isu tersebut, Kabupaten Sijunjung perlu membangun sebuah

struktur ekonomi yang kuat melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan menciptakan industri olahan baik di sektor pertanian, maupun di sektor pertambangan.

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, Kabupaten Sijunjung memiliki potensi dan peluang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan industri olahan. Pengembangan ekonomi kerakyatan dapat dilakukan dengan melalui; a) revitalisasi pertanian, b) mengembangkan diversifikasi usaha pertanian melalui tanaman pangan, c) peningkatan teknologi pertanian, d) menciptakan kawasan pertanian yang terpadu (agropolitan), e) peningkatan dan penguatan kelembagaan petani, f) menjaga stabilitas pangan daerah, g) menumbuhkembangkan industri kecil dan menengah (UMKM), sehingga meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berwirausahaan, h) mengembangkan lembaga koperasi secara optimal, dan i) revitalisasi pasar tradisional.

Sedangkan peningkatan ekonomi industri olahan sebagai upaya pengembangan sektor pertanian dan pertambangan dapat dilakukan melalui; a) menciptakan iklim investasi yang prospektif, b) meningkatkan promosi investasi daerah dan c) menjaga stabilitas keamanan daerah yang kondusif. Dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah lebih optimal didukung oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdaya saing. Oleh karena itu, peran dan fungsi BUMD perlu dioptimalkan melalui restrukturisasi organisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Berdaya saingnya BUMD akan memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah secara umum dan meningkatkan pendapatan asli daerah secara khusus.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Isu strategis ini merupakan isu yang sedang berkembang, baik nasional maupun global, sehingga terciptalah target pembangunan milenium atau disebut *Milinium Development Goal's* (MDG's) tahun 2015. Jika dilihat kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2006-2010) menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, hal ini terlihat dari perkembangan IPM Kabupaten Sijunjung yang cukup positif dalam periode 2006-2010. Terjadinya peningkatan IPM Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu 2006-2010 menunjukkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sijunjung dari tahun ke tahun. Namun jika dibandingkan dengan target MDG's dan IPM Provinsi Sumatera Barat serta kabupaten/kota tetangga, posisi IPM Kabupaten Sijunjung masih tertinggal.

Masih tertinggalnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sijunjung dibandingkan dengan target MDG's dan IPM Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota tetangga, disebabkan antara lain : a) masih rendahnya rata-rata lama sekolah, b) masih rendahnya angka melek huruf, dan c) masih rendahnya angka umur harapan hidup. Upaya mengatasi isu-isu tersebut, Kabupaten Sijunjung perlu adanya peningkatan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Disamping itu, perlu menciptakan generasi muda yang berkarakter dan meningkatkan prestasi olahraga.

Dalam upaya meningkatkan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan dapat dilakukan melalui: a) peningkatan akses di setiap jenjang pendidikan baik secara kuantitas maupun secara kualitas, sehingga penduduk usia sekolah dapat tertampung. Meningkatnya akses pendidikan dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah, APK dan APM serta rasio sekolah terhadap penduduk dan rasio guru terhadap murid, b) meningkatkan mutu pendidikan yang berdaya saing. Meningkatnya mutu pendidikan akan tercermin meningkatnya rata-rata nilai Ujian Nasional (UN) di setiap tingkatan pendidikan dan

meningkatnya jumlah siswa lulusan SLTA di terima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berkualitas, dan c) peningkatan kualitas pendidikan keaksaraan bagi masyarakat yang masih buta huruf, sehingga berimplikasi meningkatnya angka melek huruf.

Sedangkan untuk meningkatkan jangkauan pelayanan di bidang kesehatan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan dokumen Sistem Kesehatan Nasional. Derajat kesehatan dapat dilihat dari indikator, meningkatnya Angka Umur Harapan Hidup (AHH), berkurangnya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI) serta gizi buruk dapat dilakukan melalui : a) meningkatkan akses pelayanan kesehatan di setiap nagari dan jorong, sehingga meningkatnya rasio fasilitas kesehatan terhadap per 1.000 penduduk, b) meningkatkan kuantitas dan kualitas dokter dan tenaga para medis, sehingga meningkatnya rasio ketersediaan dokter dan tenaga para medis terhadap per 100.000 penduduk, c) membangun fasilitas pelayanan kesehatan rujukan lanjutan terhadap masyarakat yang representatif, d) pengembangan pola hidup sehat dan perilaku sehat serta kesehatan ibu dan anak berbasis masyarakat, dan e) peningkatan pembiayaan jaminan kesehatan.

Meningkatkan kualitas SDM tidak hanya terlepas dari keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, namun pembangunan bidang pemuda dan olahraga perlu juga menjadi prioritas. Oleh sebab itu, pembangunan pemuda diarahkan pada pembangunan karakter kebangsaan (*nation building*) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, IPTEK dan politik, serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia. Di samping itu, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

3. Mewujudkan Tata Pemerintah yang Baik dan Bersih

Isu strategis ini merupakan hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap publik (*stakeholder*). Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan tata pemerintahan yang bersih, adil, peduli, transparan, dan akuntabel. Dalam menyikapi tantangan tersebut, selama ini Pemerintah Kabupaten Sijunjung telah memiliki upaya untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik dan bersih, namun belum optimal.

Belum optimalnya pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung terhadap publik dapat dilihat capaian kinerja masing-masing urusan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, hal ini disebabkan antara lain : a) belum tersusunya beberapa regulasi yang menjadi kebutuhan daerah dalam merespon peraturan perundang-undangan yang baru dan masih ditemuinya beberapa peraturan yang belum sinergis, b) kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel belum optimal, c) masih belum sempurnanya pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, d) belum adanya sinkronisasi perencanaan dan implementasi kebijakan, e) belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, sehingga status laporan keuangan daerah belum mencapai WTP dan f) pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan proses pembangunan belum maksimal.

Untuk mengatasi isu-isu tersebut Pemerintah Kabupaten Sijunjung perlu melakukan reformasi birokrasi sesuai dengan kewenangan melalui: a) menciptakan regulasi yang responsif sesuai kebutuhan daerah, b) melakukan reorganisasi terhadap organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan beban kerja, c) meningkatkan kapasitas aparatur yang profesionalisme sesuai dengan bidangnya, d) meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM), e)

meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintah dan perencanaan pembangunan daerah yang responsif, partisipatif, transparan, akuntabel dan berkeadilan, sehingga terwujudnya sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan f) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup.

4. Infrastruktur dan Prasarana Dasar

Isu strategis ini merupakan faktor penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar tidak hanya dibutuhkan di wilayah perkotaan saja, tetapi juga sampai ke nagari dan jorong. Penyediaan infrastruktur dan sarana dasar di Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2006-2010) belum optimal, hal ini terlihat dari : a) banyaknya jumlah jalan dan jembatan yang berkondisi rusak, b) panjang jalan kabupaten yang berpermukaan tanah masih relatif tinggi, c) cukup tingginya jalan lingkungan nagari dalam kondisi rusak/tanah, d) masih tingginya jumlah saluran irigasi yang mengalami kerusakan dan cukup banyaknya saluran irigasi yang belum dibangun, e) masih rendahnya saluran drainase yang berkondisi baik, d) masih rendahnya pengelolaan sampah, f) belum terpenuhi ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat, g) masih rendahnya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan sehat perumahan h) belum seluruhnya nagari dan jorong yang dialiri energi listrik, i) belum seluruhnya nagari dan jorong terjangkau oleh sarana telekomunikasi, dan j) masih kurangnya pelayanan angkutan umum.

Untuk menyikapi isu-isu tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam memenuhi infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat melalui : a) menyediakan dokumen tata ruang yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan wilayah, b) meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan sarana pelayanan dasar di nagari yang sesuai dengan pemanfaatan dan pengendalian ruang, c) meningkatkan program pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar berbasis pemberdayaan masyarakat, d) mendorong terciptanya pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar yang adil dan merata di setiap nagari, e) memfasilitasi PT PLN (Persero) dalam menambah jaringan listrik ke nagari dan jorong yang belum dialiri, f) mendorong dan memfasilitasi pihak operator telepon seluler membangun BTS di terhadap nagari dan jorong yang belum terjangkau sarana telekomunikasi, dan g) mewujudkan ibukota kabupaten yang representatif.

5. Lingkungan Hidup

Isu lingkungan hidup yang terdapat dalam konteks kekinian adalah persoalan lingkungan yang terkait dengan tekanan akibat aktivitas kegiatan manusia dan kerentanan yang terkait dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh proses alami bumi. Akan tetapi untuk Kabupaten Sijunjung persoalan lingkungan tampaknya lebih banyak diakibatkan oleh aktivitas kegiatan manusia, terutama kegiatan di bidang pertambangan yang dilakukan oleh rakyat.

Di sisi lain, kegiatan pertambangan rakyat tanpa memperhatikan efek pencemaran lingkungan seperti penggunaan merkuri pada tambang emas akan mengakibatkan dampak buruk pada kesehatan. Makin maraknya kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat baik di DAS maupun pada lahan kering lainnya, bila tidak memperhatikan lingkungan sudah tentu akan menimbulkan dampak negatif. Hal ini terjadi karena bekas-bekas galian tambang yang dilakukan masyarakat ternyata sebahagian besar ditinggalkan begitu saja. Kondisi yang demikian menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, pencemaran lingkungan pengelolaan juga dipengaruhi belum optimalnya penanganan sampah dan limbah.

Untuk mengatasi isu lingkungan hidup yang terjadi saat ini, Pemerintah Kabupaten Sijunjung perlu memperhatikan aktivitas penggunaan lahan dan hutan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup di masa mendatang. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi dan perhatian yang lebih terhadap penggunaan lahan tersebut, sehingga lingkungan hidup tetap terjaga dan kegiatan ekonomi rakyat tetap meningkat. Namun yang penting juga untuk diperhatikan adalah perubahan fungsi lahan berkaitan dengan kontribusinya dalam penyediaan karbon.

6. Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Isu pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal merupakan isu global yang perlu ditangani secara bersama oleh seluruh *stakeholders*. Selama ini pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal masih jadi beban tanggung jawab pemerintah, sehingga pencapaiannya belum optimal karena pemerintah memiliki segala keterbatasan sumber daya.

A. Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini (2006-2010) telah berupaya untuk melakukan pengentasan kemiskinan, namun hingga tahun 2010 angka kemiskinan absolut Kabupaten Sijunjung masih diatas rata-rata Provinsi Sumatera Barat, hal ini disebabkan antara lain : a) masih kurangnya akses masyarakat miskin terhadap faktor produksi dan informasi pasar, b) kurangnya kreativitas dan kemampuan kewirausahaan masyarakat, c) kurangnya akses masyarakat miskin terhadap program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah, dan d) belum efektifnya program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah.

Untuk mengatasi isu-isu yang sedang berkembang dalam tataran masyarakat terhadap pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sijunjung perlu melakukan langkah-langkah strategis dalam pengentasan kemiskinan antara lain : a) meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, b) meningkatkan keterampilan masyarakat miskin dalam berwirausahaan, dan c) memberikan ruang yang luas kepada masyarakat dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sijunjung perlu meningkatkan kualitas terhadap program selama ini yang telah dilaksanakan, baik dari segi anggarannya maupun dari segi kuantitas program dan kegiatan serta mengoptimalkan koordinasi dalam penanggulangan kemiskinan secara terpadu.

B. Pembangunan Daerah Tertinggal

Kesenjangan antar wilayah juga ditunjukkan oleh masih tingginya disparitas kualitas sumber daya manusia antar wilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antar daerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antarwilayah. Daerah dengan pencapaian pembangunan yang rendah dikategorikan sebagai daerah tertinggal, dan diperhitungkan memiliki indeks kemajuan pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia di bawah rata-rata indeks nasional.

Kondisi rendahnya kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2010, Kabupaten Sijunjung termasuk dalam daftar 183 kabupaten tertinggal di Indonesia karena angka IPM Kabupaten Sijunjung pada tahun 2010 adalah sebesar 70,97 atau masih dibawah indeks minimum sebesar 74,00. Kondisi ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Sijunjung masih memiliki permasalahan dan tantangan dalam pembangunan daerah tertinggal, hal ini diperlihatkan di antaranya:

1. Pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh: a) rendahnya kemampuan permodalan, penguasaan teknologi, informasi pasar dan investasi dalam pengembangan produk unggulan daerah, dan b) rendahnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal.
2. Kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tertinggal masih rendah. Hal ini tercermin dari rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja, rendahnya derajat kesehatan masyarakat, dan masih relatif tingginya tingkat kemiskinan.
3. Aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah masih rendah, khususnya terhadap sentra-sentra produksi dan pemasaran karena belum didukung oleh sarana dan prasarana angkutan barang dan penumpang yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tertinggal.
4. Sarana dan prasarana pendukung ekonomi lainnya masih terbatas, yang meliputi energi listrik, telekomunikasi, irigasi dan air bersih.

Untuk menjawab isu-isu tersebut, Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk lima tahun kedepannya perlu melakukan penanganannya bersifat lintas sektoral, baik antar SKPD maupun antar instansi vertikal yang berada di Kabupaten Sijunjung dan lembaga keuangan. Untuk menciptakan pola penanganan daerah tertinggal tersebut, perlu dilahirkan program yang terpadu dan sinergisitas terhadap penanganan nagari/jorong tertinggal sesuai dengan skala prioritas.

7. Agama, Adat dan Sosial Budaya

Keberadaan agama, adat dan sosial budaya juga merupakan bidang yang sangat penting di dalam pembangunan daerah, karena keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya dapat dilihat dari peningkatan pembangunan jasmani saja tetapi juga peningkatan dari sisi pembangunan rohani. Pembangunan bidang agama, adat dan sosial budaya adalah merupakan aspek dari pembangunan rohani tersebut.

Dalam menyikapi isu agama dan adat, Pemerintah Kabupaten Sijunjung selama periode 2006-2010 telah berupaya secara maksimal, namun capaian kinerjanya belum optimal, hal ini disebabkan antara lain : a) keterbatasan tenaga da'i atau juru dakwah yang berkualitas, b) kuantitas dan kualitas sarana ibadah dan TPQ serta TPSQ belum memadai, c) masih rendahnya tingkat kesejahteraan garin dan guru TPQ serta TPSQ, d) kualitas lembaga-lembaga adat dan sosial masyarakat belum optimal, dan e) terbatasnya kualitas SDM pengurus lembaga-lembaga adat.

Sedangkan dalam mengatasi isu sosial dan budaya mengalami kendala akibat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat, antara lain : a) keterbukaan wilayah dan komunikasi bagi pendatang untuk bermukim tetap dalam wilayah Kabupaten Sijunjung, b) perbedaan tingkat kesejahteraan berbasis ekonomi, c) perbedaan tingkat pendidikan dalam masyarakat, d) perbedaan orientasi dan gaya hidup anggota masyarakat dan e) efek pembangunan fisik, infrastruktur yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Belum optimalnya kinerja Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam melaksanakan program peningkatan kualitas agama, adat dan sosial budaya dalam tataran kehidupan masyarakat, sehingga beimplikasi terhadap rendahnya moral sebagian masyarakat, terutama generasi muda dalam penerapan falsafah adat Minangkabau, "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" sebagai landasan konklusif yang telah diterapkan oleh para leluhur

Untuk menyikapi isu agama, adat dan sosial budaya yang sedang berkembang dalam tataran kehidupan masyarakat, untuk lima tahun kedepannya Pemerintah Kabupaten Sijunjung perlu membuat program yang lebih efektif dan dijadikan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015 baik dari segi kuantitas program/kegiatan maupun dari segi anggarannya.

8. Keuangan Daerah

Isu strategis ini merupakan permasalahan yang sangat mendasar dialami oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung karena dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik wilayah yang sulit dikembangkan menjadi daerah industri baik industri pertanian maupun industri olahan, sehingga berimplikasi terhadap masih rendahnya laju pertumbuhan ekonomi. Rendahnya pertumbuhan ekonomi saling berkaitan dengan kondisi keuangan daerah, hal ini terlihat dari belum maksimalnya pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan teori meningkatnya jumlah PAD sangat mempengaruhi terhadap pencapaian hasil pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang optimal.

Dalam kurun waktu lima terakhir (2006-2010) kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan masih rendah, sehingga masih mengandalkan sumber pembiayaan dari pos dana perimbangan. Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan disebabkan antara lain : a) belum optimalnya intensifikasi sumber-sumber PAD, terutama pajak dan retribusi daerah, b) penetapan pajak daerah masih berdasarkan target bukan potensi, c) kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, d) terbatasnya sarana dan prasarana pemungutan pajak dan retribusi daerah, e) belum dimanfaatkannya pinjaman sebagai sumber pembiayaan, d) belum maksimalnya pengelolaan sumber pembiayaan alternatif, dan e) belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.

Dalam menyikapi isu-isu terhadap masih rendahnya PAD, Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam lima tahun kedepannya perlu melakukan dalam terobosan dalam upaya meningkatkan PAD, antara lain : a) meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, b) melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, dan c) meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemungutan pajak dan retribusi daerah. Disamping dalam meningkatkan PAD sebagai sumber pendapatan daerah, perlu juga mengoptimalkan pengelolaan sumber pembiayaan alternatif dan memanfaatkan pinjaman sebagai sumber pembiayaan serta meningkatkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan melalui peningkatan penyertaan modal dalam BUMD.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator kinerja dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan gambaran dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

8.1. Penentuan Indikator Kinerja

Indikator kinerja daerah dibuat untuk menjadi panduan bagi kinerja SKPD dalam menjalankan program-programnya. Dengan demikian indikator kinerja daerah tidak lain merupakan akumulasi kinerja SKPD. Indikator kinerja daerah ini merupakan target Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung yang harus dicapai dengan dukungan yang optimal oleh SKPD. Indikator kinerja daerah merupakan target selama lima tahun yang dicapai secara bertahap setiap tahunnya dan ditetapkan untuk setiap tahun pencapaiannya. Pencapaian target indikator kinerja daerah selama lima tahun akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan DPRD Kabupaten Sijunjung dalam menentukan RPJMD periode berikutnya.

Indikator kinerja RPJMD pada dasarnya merupakan kompromi antara apa yang diinginkan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung dengan kemampuan dan kesanggupan SKPD. Indikator kinerja ini memperhatikan kemampuan SDM, ketersediaan anggaran, dukungan/partisipasi masyarakat serta memperhatikan tantangan dan hambatan yang ada. Salah satu rujukan ukuran kemampuan daerah adalah melihat kondisi eksisting pencapaian indikator kepemimpinan sebelumnya. Pertimbangan demikian perlu dilakukan karena bagaimanapun juga apa yang diinginkan oleh Bupati dan Wakil Bupati itu tidak akan terlaksana secara baik tanpa dukungan kemampuan SKPD, partisipasi masyarakat serta potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu, indikator kinerja daerah untuk RPJMD ini memiliki karakter yang berbeda sesuai aspek, fokus dan urusannya. Indikator kinerja daerah sebagian bersifat dampak langsung, tetapi sebagian lainnya bersifat dampak tidak langsung dari program-program yang dilaksanakan SKPD.

.Sementara itu, keseluruhan tahapan penyusunan RPJMD termasuk penentuan indikator kinerjanya telah diupayakan memenuhi aspek politik dan aspek formal yang disyaratkan. Aspek politik menyangkut proses yang melibatkan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam konsultasi publik dan Musrenbang penyusunan RPJMD. Aspek formal meliputi pemenuhan atas prosedur, tahapan, dan administratif sesuai ketentuan yang ada.

8.2. Indikator dan Target Kinerja

Untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja RPJMD sekaligus sebagai acuan penyusunan Renstra dan Renja SKPD, indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada RPJMD ini. Indikator kinerja RPJMD ditampilkan dengan menggambarkan kondisi awal dan target tahunan selama periode 2011 sampai 2015. Indikator kinerja RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2010-2015 dibagi atas tiga aspek, yaitu : 1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, 2) Aspek Pelayanan Umum, dan 3) Aspek Daya Saing Daerah, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9.1.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2010	Target Capaian Kinerja Tahunan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2011*)	2012*)	2013	2014	2015	
A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat								
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,63	5,74	6,08	6,17	6,27	6,36	6,36
1.2	PDRB ADHB Berlaku (Miliar Rp)	3.036,49	3.418,39	3.825,73	4.176,41	4.527,10	4.877,78	4.877,78
1.3	PDRB ADHK (Miliar Rp)	1.343,28	1.420,36	1.506,68	1.579,01	1.651,35	1.723,68	1.723,68
1.4	PDRB per Kapita (Juta Rp)	15,05	16,74	18,44	19,93	21,39	22,82	22,82
1.5	Pendapatan Regional per Kapita (Juta Rp)	14,03	15,69	17,37	18,86	20,35	21,84	21,84
1.6	Persentase penduduk miskin absolut	10,45	9,94	8,80	7,99	7,18	6,37	6,37
Kesejahteraan Sosial								
1.	Pendidikan							
1.1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	70,92	71,40	71,80	72,31	72,82	73,32	73,32
1.2	Angka Melek Huruf (%)	94,78	94,79	94,80	95,15	95,49	95,84	95,84
1.3	Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,43	7,50	7,51	7,59	7,67	8,04	8,04
1.4	Angka Partisipasi Kasar (APK) :							
1.4.1	APK PAUD	60,86	60,86	62,56	64,80	68,50	69,20	69,20
1.4.2	APK SD/MI/Paket A	111,69	112,54	113,20	113,50	114,40	115,40	115,40
1.4.3	APK SMP/MTS/Paket B	90,16	87,75	89,50	91,70	92,50	94,50	94,50
1.4.4	APK SMA/SMK/MA/Paket C	47,58	87,75	62,13	77,00	77,50	80,50	80,50
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) :							
1.5.1	APM PAUD	50,03	54,86	56,00	58,20	62,30	64,50	64,50
1.5.3	APM SD/MI/Paket A	98,93	99,39	99,40	99,50	99,70	99,90	99,90
1.5.4	APM SMP/MTS/Paket B	67,61	68,90	73,93	78,20	80,40	85,40	85,40
1.5.5	APM SMA/SMK/MA/Paket C	42,38	52,90	56,71	62,00	65,50	67,00	67,00
2.	Kesehatan							
2.1	Angka usia Harapan Hidup	66,92	67,25	67,58	67,90	68,22	68,53	68,53
2.2	Prevelensi balita gizi buruk	8,48	10,00	8,00	6,00	5,00	4,00	4,00
3.	Ketenagakerjaan							
3.1	Rasio penduduk yang bekerja	95,87	96,23	94,77	95,53	96,26	96,97	96,97
4.	Pemberdayaan Perempuan							
4.1	Indeks Pembangunan Gender (poin)	59,53	60,50	61,28	62,05	62,83	63,60	63,60
4.2	Indeks Pemberdayaan Gender (poin)	50,24	49,03	50,79	52,55	54,30	56,06	56,06
B. Aspek Pelayanan Umum								
Layanan Urusan Wajib								
1.	Pendidikan							
1.1	Pendidikan Dasar :							
1.1.1	Rasio SD/MI thdp pddk. Usia sekolah	67,82	69,73	75,70	78,85	79,50	82,05	82,05
1.1.2	Rasio guru SD/MI thdp murid	70,36	61,12	73,58	75,52	77,50	80,50	80,50
1.1.3	Rasio SMP/MTs thdp pddk. Usia sekolah	48,44	50,20	55,60	58,50	62,70	64,11	64,11
1.1.4	Rasio guru SMP/MTs thdp murid	70,30	68,70	68,80	68,50	67,70	66,80	66,80
1.2	Pendidikan Menengah :							
1.2.2	Rasio sekolah thdp pddk. Usia sekolah	36,44	41,71	44,61	45,50	46,50	48,00	48,00
1.2.3	Rasio guru thdp murid	107,30	104,06	93,37	92,50	91,50	89,20	89,20
1.3	Rata-rata Ujian Nasional (UN) :							
1.3.1	Rata-rata UN SD/MI	6,85	7,05	6,99	7,00	7,10	7,25	7,25
1.3.2	Rata-rata UN SMP/MTs	5,60	5,74	5,82	6,20	6,50	6,90	6,90
1.3.3	Rata-rata UN SMA/SMK/MA	7,28	6,61	6,87	6,90	6,92	6,95	6,95
1.4	Jumlah lulusan SMA/SMK/MA melanjutkan ke Perguruan Tinggi	205	250	280	350	400	450	450
1.5	Jumlah guru yang sertifikasi	191	252	336	922	1.224	1.587	1.587

*) berdasarkan realisasi/capaian

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2010	Target Capaian Kinerja Tahunan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2011*)	2012*)	2013	2014	2015	
B. Aspek Pelayanan Umum								
2.	Kesehatan							
2.1	Rasio fasilitas kesehatan pelayanan dasar per 1.000 penduduk	0,98	0,98	0,98	0,99	1,00	1,00	1,00
2.2	Rasio fasilitas kesehatan pelayanan rujukan (RSU) per 30.000 pdtk	-	-	0,13	0,14	0,15	0,15	0,15
2.3	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	4	5	1	1	1	1	1
2.4	Angka Kematian Bayi (AKB)	23,30	21,65	21,49	21,28	21,07	20,86	20,86
2.5	Angka Kematian Balita (AKBA)	3,00	5,47	23,40	10,00	5,00	2,00	2,00
2.6	Cakupan komplikasi kebidanan (%)	45,04	45,10	45,20	46,00	48,00	50,00	50,00
2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	72,32	80,00	90,00	92,00	92,00	92,00	92,00
2.8	Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.9	Cakupan nagari/ desa SIAGA (%)	49,00	49,00	50,00	67,00	75,00	80,00	80,00
2.10	Cakupan jorong UCI	79,13	79,10	79,10	85,00	90,00	90,00	90,00
3.	Pekerjaan Umum							
3.1	Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah (%)	37,09	37,95	38,18	37,29	37,51	38,82	38,82
3.2	Panjang jalan kabupaten berkondisi baik (km)	499,44	486,21	519,59	535,44	551,77	693,13	693,13
3.3	Rasio drainase terhadap panjang jalan (%)	2,35	2,34	2,56	2,67	2,82	2,91	2,91
3.4	Rasio layanan jaringan irigasi (%)	57,26	57,86	58,01	58,45	59,10	59,70	59,70
3.5	Cakupan layanan air bersih (%)	48,31	48,31	48,31	59,53	69,53	74,16	74,16
3.6	Cakupan rumah tangga bersanitasi (%)	35,39	35,39	35,39	40,49	45,39	67,70	67,70
4.	Perumahan							
3.1	Jumlah kawasan perumahan yang sehat	5	8	11	14	15	16	16
5.	Penataan Ruang							
5.1	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	-	-	1	1	1	1	1
5.2	Jumlah bangunan ber-IMB per tahun	48	75	100	250	500	750	750
6.	Perencanaan Pembangunan							
6.1	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	1	1	1	1	1	1	1
6.2	Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	1	1	1	1	1	1	1
6.3	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	1	1	1	1	1	1	1
7.	Perhubungan							
7.1	Rasio ijin trayek per 10.000 penduduk	1,24	1,22	1,20	1,19	1,89	2,34	2,34
7.2	Pemasangan rambu-rambu jalan (%)	2,27	7,50	9,59	13,41	9,86	9,91	9,91
7.3	Jumlah terminal/pelataran parkir	7	8	8	9	9	9	9
7.4	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (Menit)	15	15	10	5	5	5	5
8.	Lingkungan Hidup							
8.1	Cakupan penanganan sampah (%)	44,44	50,00	50,00	70,00	80,00	90,00	90,00
8.2	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per 100.000 penduduk	0,50	0,48	0,50	0,48	0,47	0,94	0,94
8.3	Pencemaran status mutu air sungai (%)	80,00	70,00	60,00	50,00	40,00	30,00	30,00
9.	Kependudukan dan Catatan Sipil							
9.1	Kepemilikan e-KTP (%)	0	38,90	53,40	80,00	100	100	100
9.2	Kepemilikan akte kelahiran per 1.000 pdtk	60,48	67,42	97,60	100	100	100	100
10.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
10.1	Partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%)	8,00	8,00	8,00	8,00	20,00	20,00	20,00
10.2	Rasio KDRT (%)	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
10.3	Cakupan penanganan KDRT (%)	50	60	70	80	90	100	100

*) berdasarkan realisasi/capaian

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2010	Target Capaian Kinerja Tahunan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2011*)	2012*)	2013	2014	2015	
B. Aspek Pelayanan Umum								
11.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera							
11.1	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,08	1,01	1,02	1,00	1,00	1,00	1,00
11.2	Cakupan peserta KB aktif PUS (%)	75,00	75,00	75,00	76,00	76,40	77,00	77,00
11.3	Cakupan peserta KB aktif UPPKS (%)	61,01	61,01	53,11	60,00	65,00	70,00	70,00
12.	Sosial							
12.1	Ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat miskin (unit/tahun)	102	134	156	160	171	204	204
12.2	Jumlah sarana sosial	4	-	-	-	-	1	5
12.3	Penyandang cacat dan lansia menerima jaminan sosial (%)	48,54	54,18	57,45	61,72	69,17	75,70	75,70
13.	Ketenagakerjaan							
13.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	-	66,14	64,92	65,39	66,11	66,59	66,59
13.2	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,13	4,40	4,33	3,57	2,84	2,12	2,12
13.3	Pencari kerja ditempatkan (%)	-	1,2	3,4	5,00	7,00	10,00	10,00
14.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							
14.1	Jumlah UMKM yang memiliki izin (unit)	129	150	166	172	200	214	214
14.2	Persentase koperasi aktif	27,00	30,00	32,20	39,80	45,60	51,40	51,40
15.	Penanaman Modal							
15.1	Pertumbuhan Nilai investasi PMDN/PMA (%)	1,00	1,61	0,24	2,62	1,67	2,00	2,00
16.	Kebudayaan							
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya (even/tahun)	4	4	4	6	6	6	6
16.2	Proporsi sarana dan prasarana seni budaya anak nagari (%)	40,98	50,00	60,00	70,00	80,00	85,00	85,00
17.	Kepemudaan dan Olahraga							
17.1	Jumlah organisasi pemuda	60	70	80	90	100	110	110
17.2	Jumlah pemuda pelopor (orang)	8	13	19	23	33	43	43
17.3	Rasio lapangan olahraga per 1.000 pbbk.	3,29	2,96	2,92	3,15	3,17	3,18	3,18
17.4	Jumlah Cabor dalam kompetisi olahraga tk. Kabupaten	2	2	3	3	3	4	4
18.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
18.1	Angka partisipasi Pemilu (%)	65,57	-	-	-	75,00	75,00	75,00
19.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
19.1	Jumlah Perda yang ditetapkan	11	11	14	17	18	10	70
19.2	Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD)	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sgt. Tinggi	Sgt. Tinggi	Sgt. Tinggi
19.3	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	-	D	D	C	CC	B	B
19.4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	50-55	55-70	70-80	70-80
19.5	Jumlah kasus Pekat	5	2	1	0	0	0	0
19.6	Opini Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.7	Jumlah PNS yang meningkatkan kompetensi (%)	1,24	3,26	4,77	6,28	5,94	6,92	6,92
19.8	Jumlah PNS yang melanggar disiplin berat (%)	0,12	0,20	0,12	0,06	0,00	0,00	0,00
19.9	Jumlah BUMD yang Sehat	-	-	-	-	-	1	1
19.10	Jumlah Nagari Tertinggal	29	25	18	11	7	0	0
19.11	Jumlah Nota Kesepahaman (MOU) dengan Pemerintah Daerah lainnya	2	-	5	1	-	1	7
20.	Ketahanan Pangan							
20.1	Cadangan pangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (ton)	20	25	30	40	40	40	40
20.2	Jumlah Nagari/Desa Mandiri Pangan	10	13	13	14	15	16	16
21.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
21.1	Tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)	38,34	38,34	38,34	38,34	38,34	50,00	50,00
21.2	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat (%)	75,25	82,50	90,12	95,00	100,00	100,00	100,00

*) berdasarkan realisasi/capaian

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2010	Target Capaian Kinerja Tahunan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2011*)	2012*)	2013	2014	2015	
B. Aspek Pelayanan Umum								
22.	Statistik							
22.1	Buku Kabupaten Dalam Angka	1	1	1	1	1	1	1
22.2	Buku PDRB Kabupaten	1	1	1	1	1	1	1
22.3	Buku Kecamatan Dalam Angka	-	-	-	-	-	1	1
23.	Kearsipan							
23.1	Arsip SKPD yang diselamatkan (%)	10,50	10,50	25,00	50,00	75,00	100,00	100,00
24.	Komunikasi dan Informatika							
23.1	Website pemerintah daerah	1	1	1	1	1	1	1
24.2	Cakupan SKPD menggunakan SIM (%)	-	2,94	11,76	11,43	14,29	16,67	16,67
25.	Perpustakaan							
25.1	Jumlah perpustakaan (unit)	34	36	40	45	50	60	60
25.2	Jumlah anggota perpustakaan daerah (orang)	353	375	400	450	500	750	750
Layanan Urusan Pilihan								
1.	Pertanian							
1.1	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian (%)	5,17	5,26	5,56	6,47	7,37	8,28	8,28
1.2	Jumlah Kelompok Tani	797	853	970	1.144	1.250	1.400	1.400
1.3	Rasio tenaga penyuluh per Jorong	0,50	0,49	0,45	0,44	0,44	0,53	0,53
1.4	Produktivitas padi per hektar (ton/ha)	5,00	5,06	5,10	5,20	5,26	5,40	5,40
1.5	Produktivitas karet per hektar (ton/ha)	2,79	2,79	2,89	2,89	3,00	3,00	3,00
1.6	Produksi hasil peternakan (ton/thn)	2.244	2.417	2.475	2.550	2.625	2.695	2.695
2.	Kehutanan							
2.1	Cakupan penanganan lahan kritis (%)	84,82	85,29	86,46	87,62	88,74	89,85	89,85
2.2	Berkurangnya perambahan hutan dari <i>illegal logging</i> (kasus)	5	12	3	3	3	3	3
2.3	Luas hutan nagari/desa dan HKM (ha)	-	-	-	6.500	12.000	12.000	12.000
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
3.1	Penambangan Tanpa Izin (ha)	25	22	20	17	12	5	5
3.2	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertambangan (%)	6,60	5,20	5,06	5,67	6,27	5,68	5,68
4.	Pariwisata							
4.1	Jumlah even promosi wisata	1	2	2	2	3	4	13
4.3	Nagari/Desa Wisata (%)	1,82	3,64	3,28	3,28	6,56	6,56	6,56
5.	Kelautan dan Perikanan							
5.1	Produksi ikan budidaya (ton)	5.078	6.130	7.662	9.578	11.856	12.711	12.711
6.	Perdagangan							
6.1	Rasio pasar tradisional per 10.000 penduduk	2,53	2,50	2,46	2,53	2,60	3,27	3,27
6.2	Laju pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan (%)	4,47	5,12	5,83	6,00	6,23	6,54	6,54
7.	Industri							
7.1	Pertumbuhan IKM (%)	1,56	0,24	0,60	0,85	1,00	2,00	2,00
7.2	Laju pertumbuhan PDRB sektor Industri (%)	5,04	5,91	5,22	5,50	5,83	6,11	6,11
8.	Ketransmigrasian							
8.1	Luas kawasan transmigrasi (%)	9,05	9,05	9,05	9,29	9,53	9,77	9,77
C. Aspek Daya Saing Daerah								
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Pengeluaran riil rumah tangga per kapita (ribu Rp)	633,55	636,58	639,31	642,02	644,73	647,43	647,43
2.	Pertanian							
2.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,37	100,72	101,07	101,42	101,77	102,12	102,12
Fokus Fasilitas wilayah/ infrastruktur								
1.	Pekerjaan umum							
1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	42,33	46,64	54,32	57,37	60,42	86,04	86,04
2.	Penataan ruang							
2.1	Luas wilayah produktif (%)	43,81			43,81			

*) berdasarkan realisasi/capaian

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Tahunan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2010	2011*)	2012*)	2013	2014	2015	
C. Aspek Daya Saing Daerah								
Fokus Fasilitas wilayah/ infrastruktur								
3.	Komunikasi dan informatika							
3.1	Cakupan layanan telekomunikasi (%)	80,00	88,52	88,52	95,00	95,00	100,00	100,00
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
4.1	Cakupan layanan energi listrik (%)	84,23	92,57	95,17	98,00	99,00	100,00	100,00
Fokus Iklim berinvestasi								
1.	Penanaman Modal							
1.1	Lama proses perizinan industri besar (hari)	66	50	40	30	20	14	14
2.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah dan Kepegawaian							
2.1	Jumlah unjuk rasa (kali)	2	0	0	0	0	0	0
2.2	Jumlah kriminalitas (kasus)	151	176	146	100	75	50	50
Fokus Sumber Daya Manusia								
1.	Ketenagakerjaan							
1.1	Rasio ketergantungan (%)	62,41	61,42	57,27	56,47	55,73	55,04	55,04

*) berdasarkan realisasi/capaian

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Visi Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 merupakan landasan idil-filosofis dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan beserta seluruh rakyat Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 sebagai landasan pembangunan sektoral, lintas sektoral dan kewilayahan yang bersifat dinamis dan berkesinambungan, agar mampu menjawab pesatnya tantangan perubahan lingkungan strategis dan pergeseran peradaban. Hal ini membawa implikasi perlu disusunnya RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015 yang lebih progresif dan mampu mengakselerasi ke arah pencapaian Visi 2025, yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sijunjung yang Madani”**. RPJMD 2010-2015 ini merupakan kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2005-2010, dimana tahun terakhir RPJMD 2006-2010 akan menjadi tahun awal RPJMD 2010-2015.

Visi, misi dan program calon Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung terpilih masa bakti 2010-2015 yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sijunjung sebelum mengawali pelaksanaan masa kampanye, dengan tema: “Terwujudnya Nagari yang Madani melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas SDM dan harkat martabat masyarakat serta peningkatan kualitas prasarana dasar” merupakan ide dasar dan pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015.

Filosofi yang terkandung dalam tema tersebut memiliki makna, untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Sijunjung 2025 penempatan Nagari sebagai basis pembangunan daerah merupakan suatu keharusan dalam pencapaian visi tersebut, karena nagari merupakan sebagai unit kesatuan adat dan budaya Minangkabau serta memiliki struktur masyarakat bersifat multi dimensi dan multi fungsi. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Sijunjung memerlukan pendekatan atau paradigma baru dalam membangun Nagari. Pendekatan pembangunan tersebut, mengedepankan konsep pemberdayaan yang berorientasi kepada tatanan masyarakat nagari yang sejahtera, adil, dan makmur.

Bertolak dari pemahaman di atas, serta dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2005-2025 dan perkembangan lingkungan strategis saat ini, maka perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat nagari yang maju namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya adat dan budaya Minangkabau, sehingga dirumuskan visi Pembangunan Kabupaten Sijunjung yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2010-2015), yaitu :

“Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata”

dengan makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Nagari Madani : adalah suatu nagari yang masyarakatnya memiliki peradaban sosial budaya yang tinggi, akhlak mulia, kreatif, memiliki semangat, jiwa kewirausahaan, keterampilan, berdisiplin dan bertanggung jawab serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi nagari.

- Berkualitas** : terwujudnya sumber daya manusia nagari yang berkualitas melalui program pendidikan yang berbasiskan agama, berakhlak mulia, jujur dan peduli sesama manusia serta memiliki jiwa kewirausahaan dan semangat partisipasi dalam kehidupan masyarakat dan didukung oleh taraf kesehatan yang lebih baik.
- Sejahtera** : terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari melalui penguatan sistem ekonomi yang berbasiskan kepada ekonomi kerakyatan dan potensi ekonomi nagari serta didukung peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar yang berwawasan lingkungan.
- Merata** : terwujudnya pemerataan pembangunan nagari dalam segala bidang, namun tetap mempertimbangkan azas-azas keadilan sesuai dengan kebutuhan daerah guna mengurangi disparitas antar nagari.

Visi pembangunan Kabupaten Sijunjung 2010-2015 sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional 2010-2014 dan Provinsi Sumatera Barat 2010-2015. Visi pembangunan daerah tersebut, harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesejahteraan berbasis potensi riil daerah yang ingin dicapai.

5.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui delapan misi pembangunan Kabupaten Sijunjung 2010-2015 sebagai berikut:

1. **Mewujudkan penataan dan penguatan ekonomi masyarakat** adalah tercapainya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan serta penurunan angka pengangguran dan kemiskinan
2. **Meningkatkan Kecerdasan, Keterampilan dan Kesehatan serta IMTAQ SDM Anak Nagari** adalah tercapainya pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, serta semangat kewirausahaan, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas sehat, beriman, dan berkualitas tinggi sehingga tercapai masyarakat yang maju dan sejahtera.
3. **Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur serta Prasarana Dasar Nagari** adalah tercapainya pembangunan infrastruktur serta prasarana dasar nagari yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
4. **Pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung** adalah mengelola sumber daya pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian dan ekosistem lingkungan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5. **Mengentaskan Kemiskinan dan Ketertinggalan** adalah menjadi misi yang cukup penting dan mendasar karena masih relatif tingginya angka kemiskinan, disamping itu Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah kabupaten tertinggal di daerah Provinsi Sumatra Barat.
6. **Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Adil, Peduli dan Berwibawa** merupakan persyaratan yang tidak kalah pentingnya untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah secara cepat, adil dan merata. Dengan demikian tata pemerintahan diharapkan terlaksana secara adil dan demokratis, taat hukum, tertib dan memiliki disiplin yang tinggi serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan *Nepotisme* (KKN). Oleh karena itu diharapkan akan dapat diwujudkan pola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa serta didukung oleh partisipasi aktif masyarakat secara keseluruhan.

7. **Mewujudkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan** merupakan misi yang cukup strategis karena gerakan pembangunan di tingkat nagari selama ini sangat didukung oleh partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Untuk itu, lima tahun mendatang partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat nagari makin dioptimalkan untuk menggerakkan roda pembangunan
8. **Revitalisasi Adat dan Seni Budaya Anak Nagari** adalah misi yang strategis karena adat dan seni budaya anak nagari merupakan potensi dan aset yang sangat berharga di dalam kemajuan pembangunan Kabupaten Sijunjung. Untuk itu, pada periode lima tahun mendatang revitalisasi adat dan seni budaya anak nagari perlu diperhatikan secara optimal.

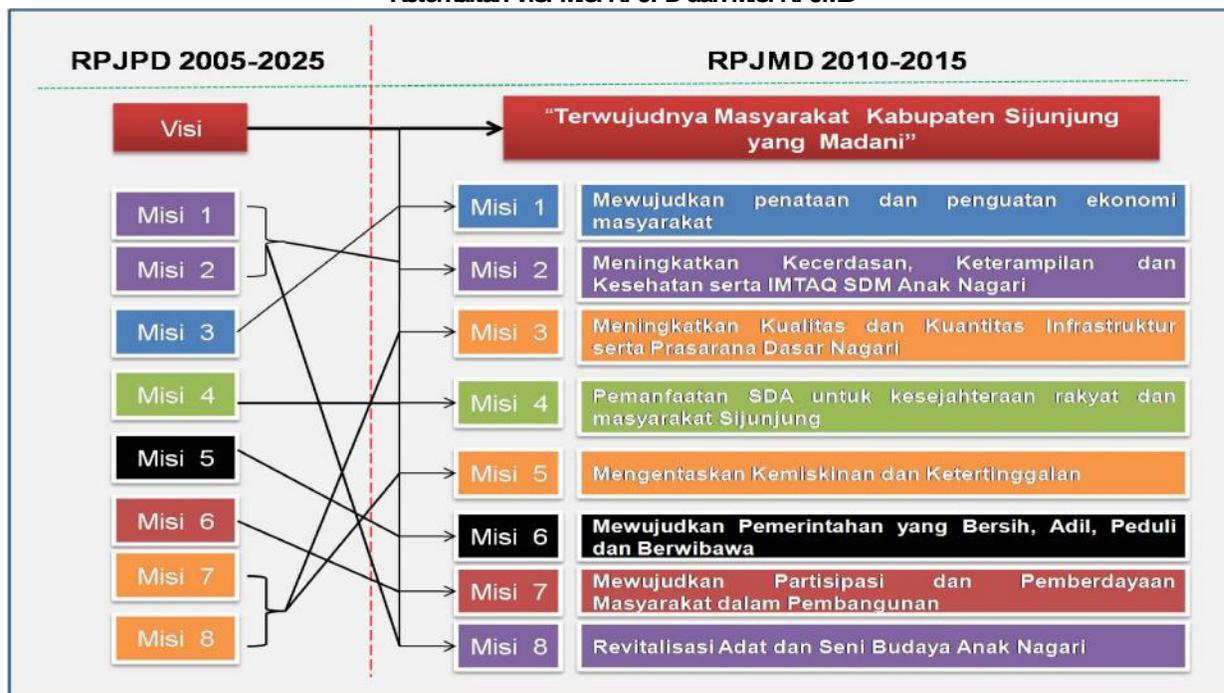
5.2.1. Hubungan Visi dan Misi RPJPD dengan Visi dan Misi RPJMD

Visi dan misi RPJMD tidak terlepas dari visi dan misi RPJPD karena visi jangka menengah adalah bentuk dari sebuah visi antara menuju visi jangka panjang. Sedangkan misi yang dibawa atau diemban dalam jangka menengah adalah misi antara yang mendukung misi jangka panjang. Misi pertama RPJPD (mewujudkan masyarakat Sijunjung yang sejahtera, berkualitas, berakhlak mulia dan religius) dan misi kedua RPJPD (mewujudkan masyarakat Sijunjung yang sehat, cerdas, kreatif, produktif dan inovatif) dalam RPJMD dipertajam dan difokuskan pada **misi kedua** dan **misi kedelapan**. Misi ketiga RPJPD (mewujudkan perekonomian Sijunjung yang lebih tangguh, merata dan berkeadilan, stabil dan berkelanjutan berbasis agribisnis dan agroindustri) dalam RPJMD difokuskan dan diprioritas pada **misi pertama**. Sedangkan misi keempat RPJPD (mewujudkan pembangunan Sijunjung yang berwawasan lingkungan dan lestari) menjadi perhatian yang cukup dipertajam dalam RPJMD pada **misi keempat**.

Sementara itu, misi kelima RPJPD (mewujudkan kehidupan masyarakat Sijunjung yang demokratis dan menjunjung tinggi hukum) difokuskan pada **misi keenam** dalam RPJMD dan misi keenam RPJPD (mewujudkan sinergi harmonis dunia usaha, masyarakat dan pemerintah menuju Sijunjung yang madani) dalam RPJMD menjadi salah satu fokus pembangunan yang tergambar dalam **misi ketujuh**. Sedangkan misi ketujuh RPJPD (mewujudkan pembangunan yang adil, merata dan antisipatif terhadap perkembangan perekonomian global) dan misi kedelapan RPJPD (mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang memadai) dalam RPJMD dipertajam dan difokuskan pada **misi ketiga** dan **misi kelima**.

Melalui pendekatan nagari sebagai basis pembangunan, maka perekonomian daerah mampu tumbuh secara merata, berkualitas, dan berkeadilan. Artinya, paradigma tersebut sangat mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat yang selaras dengan harapan misi pertama dan kedua RPJMD sekaligus sebagai penajaman dari misi ketiga hingga misi kedelapan. Oleh karena itu, korelasi antara misi RPJMD dengan visi dan misi RPJPD, dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 5.1
Keterkaitan Visi-Misi RPJPD dan Misi RPJMD



Sedangkan keterkaitan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015 dengan visi dan misi RPJMN 2010-2014 serta visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015 secara substansi memiliki kesamaan, hal ini terlihat dari makna dari visi dan implementasinya yang tergambar melalui misi. Makna dari masing-masing tersebut adalah tercapainya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan pada periode akhir rencana pembangunan jangka menengah. Keterkaitan visi dan misi RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015 dengan visi dan misi RPJMN 2010-2014 serta visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015 dengan RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2010-2015

RPJMN 2010-2014	RPJMD Prov. Sumbar 2010-2015	RPJMD Kab. Sijunjung 2010-2015
Visi : “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” Misi :	Visi : “Terwujudnya Provinsi Sumatera Barat Madani, Adil, Sejahtera dan Bermartabat” Misi :	Visi : “Terwujudnya Nagari Madani Yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata” Misi :
1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera;	1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, agamis dan beradab dan berbudaya berlandaskan filosofi ABS-SBK;	1. Mewujudkan penataan dan penguatan ekonomi masyarakat;
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan	2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;	2. Meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan kesehatan serta IMTAQ SDM anak nagari;
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.	3. Mewujudkan SDM yang Cerdas, beriman dan berkualitas tinggi;	3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur serta prasarana dasar nagari;
	4. Mewujudkan ekonomi masyarakat yang sejahtera, sehat, produktif, berbasis kerakyatan, berdaya saing regional dan global; dan	4. Memanfaatkan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung;
	5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.	5. Mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan;
		6. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, peduli dan berwibawa;
		7. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan; dan
		8. Revitalisasi adat dan seni budaya anak nagari.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun kedepan berdasarkan masing-masing misi sebagai berikut :

5.3.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi 1 : Mewujudkan Penataan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat

Tujuan pembangunan pada misi 1 yaitu; tercapainya penataan dan penguatan ekonomi masyarakat yang tangguh, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, maka dirumuskan sasaran pembangunan, antara lain : 1) meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu komoditi sektor unggulan pertanian meliputi; tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, 2) meningkatnya swasembada pangan daerah, 3) meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan usaha

pertanian, 4) terciptanya kawasan pertanian yang terpadu (agropolitan), 5) terciptanya tata niaga pemasaran hasil pertanian yang berdaya saing guna terlindunginya produsen dan konsumen terhadap harga dan barang, 6) meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah, 7) meningkatnya hasil produksi industri kecil dan menengah yang berdaya saing, 8) berkembangnya sektor pariwisata daerah, 9) meningkatnya industri pengolahan sektor pertanian dan pertambangan, 10) berkembangnya kawasan transmigrasi dalam mendorong perekonomian daerah, 11) meningkatnya kontribusi BUMD dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah, dan 12) meningkatnya nilai investasi dunia usaha.

Sedangkan keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 1

Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata		
Misi 1 : Mewujudkan penataan dan penguatan ekonomi masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Makro
1. Tercapainya penataan dan penguatan ekonomi masyarakat yang tangguh, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita masyarakat	1. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu komoditi sektor unggulan pertanian meliputi; tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. 2. Meningkatnya swasembada pangan daerah 3. Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan usaha pertanian 4. Terciptanya kawasan pertanian yang terpadu 5. Terciptanya tata niaga pemasaran hasil pertanian yang berdaya saing guna terlindunginya produsen dan konsumen terhadap harga dan barang. 6. Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah 7. Meningkatnya hasil produksi industri kecil dan menengah yang berdaya saing. 8. Berkembangnya sektor pariwisata daerah 9. Meningkatnya industri pengolahan sektor pertanian dan pertambangan. 10. Berkembangnya kawasan transmigrasi dalam mendorong perekonomian daerah. 11. Meningkatnya kontribusi BUMD dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah. 12. Meningkatnya nilai investasi dunia usaha	1. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 2. PDRB ADHK 3. Pendapatan Regional per Kapita 4. PDRB Perkapita 5. Nilai Tukar Petani (NTP) 6. Pengeluaran riil rumah tangga perkapita 7. Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian 8. Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertambangan 9. Laju pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan 10. Laju pertumbuhan PDRB sektor Industri 11. Persentase Nagari/Desa Wisata 12. Jumlah BUMD yang Sehat 13. Pertumbuhan nilai investasi PMDN/PMA

5.3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi 2 : Meningkatkan Kecerdasan, Keterampilan dan Kesehatan serta IMTAQ SDM Anak Nagari

Tujuan pembangunan pada misi 2 yaitu; tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan dan taraf kesehatan serta martabat masyarakat. Terwujudnya tujuan pembangunan pada misi 2 dapat dilihat ketercapaian indikator antara lain ; meningkatnya angka melek huruf, meningkatnya angka rata-rata lama sekolah dan meningkatnya angka umur harapan hidup, sehingga pencapaian IPM meningkat.

Untuk tercapainya indikator tersebut, maka dirumuskan sasaran, antara lain : 1) meningkatnya pemerataan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan pendidikan, 2) meningkatnya mutu pendidikan yang berbasis Iman dan Taqwa, 3) meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat,

4), meningkatnya kemandirian pemuda dan prestasi olah raga daerah, 5) meningkatnya keterjangkauan pelayanan kesehatan, 6) menurunnya jumlah Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA), 7) meningkatnya lingkungan sehat dan pola hidup sehat masyarakat, 8) menurunnya angka gizi buruk, dan 9) mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

Sedangkan keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.3
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi 2

Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata		
Misi 2 : Meningkatkan Kecerdasan, Keterampilan dan Kesehatan serta IMTAQ SDM Anak Nagari		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Makro
1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan dan taraf kesehatan serta martabat masyarakat	1. Meningkatnya pemerataan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan pendidikan. 2. Meningkatnya mutu pendidikan yang berbasis Iman dan Taqwa 3. Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat 4. Meningkatnya kemandirian pemuda dan prestasi olah raga daerah 5. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan kesehatan. 6. Menurunnya jumlah Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA). 7. Meningkatnya lingkungan sehat dan pola hidup sehat masyarakat. 8. Menurunnya angka gizi buruk 9. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Angka melek huruf 3. Angka rata-rata lama sekolah 4. Angka umur harapan hidup 5. Jumlah Kematian Ibu melahirkan 6. Angka Kematian Bayi 7. Angka Kematian Balita 8. Prevelensi Balita Gizi Buruk 9. Laju Pertumbuhan Penduduk

5.3.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur serta Prasarana Dasar Nagari

Tujuan pembangunan pada misi 3 yaitu; meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dasar serta pengembangan ibukota yang representatif sesuai rencana tata ruang. Terwujudnya tujuan pembangunan pada misi 2 dapat dilihat ketercapaian indikator adalah meningkatnya cakupan pelayanan sarana dan prasarana dasar masyarakat meliputi; sarana perhubungan, sarana irigasi, sarana air bersih, sarana sanitasi dan rasio keterjangkauan layanan listrik dan telekomunikasi.

Untuk tercapainya indikator tersebut, maka dirumuskan sasaran pembangunan, antara lain :

- 1) Terwujudnya penataan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya,
- 2) meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi di setiap nagari,
- 3) meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik setiap nagari dan jorong, dan
- 4) meningkatnya fungsi Kota Muaro Sijunjung sebagai ibukota kabupaten yang representatif.

Sedangkan keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.4.
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi 3

Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata		
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur serta Prasarana Dasar Nagari		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Makro
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dasar serta pengembangan ibukota yang representatif sesuai rencana tata ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya penataan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi di setiap nagari. 3. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik setiap nagari dan jorong 4. Meningkatnya fungsi Kota Muaro Sijunjung sebagai ibukota kabupaten yang representatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah 2. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 3. Rasio layanan jaringan irigasi 4. Cakupan layanan air bersih 5. Cakupan rumah tangga bersanitasi 6. Cakupan layanan telekomunikasi 7. pedesaan Cakupan energi listrik pedesaan

5.3.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi 4 : Pemanfaatan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Sijunjung

Tujuan pembangunan pada misi 4 yaitu; terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, maka dirumuskan sasaran pembangunan antara lain: 1) meningkatnya pemanfaatan hasil tambang berwawasan lingkungan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, 2) terjaganya kualitas air sungai dan air tanah, 3) terjaganya kebersihan lingkungan yang bersih, asri dan nyaman, dan 4) meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan kritis yang berwawasan lingkungan.

Sedangkan Keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.5
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi 4

Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata		
Misi 4 : Pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Makro
1. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil tambang berwawasan lingkungan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat 2. Terjaganya kualitas air sungai dan air tanah 3. Terjaganya kebersihan lingkungan yang bersih, asri dan nyaman. 4. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan kritis yang berwawasan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat produksi galian tambang 2. Tingkat pencemaran air sungai 3. Cakupan penanganan sampah 4. Cakupan penanganan lahan kritis

5.3.5. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi 5 : Mengentaskan Kemiskinan dan Keteringgalan

Tujuan pembangunan pada misi 5 yaitu; menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta keteringgalan kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, maka dirumuskan sasaran pembangunan antara lain: 1) meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar

masyarakat miskin, 2) meningkatnya keterampilan masyarakat miskin dalam kewirausahaan, dan 3) keluarnya Kabupaten Sijunjung dari kategori daerah tertinggal.

Sedangkan keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.6
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi 5

Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata		
Misi 5 : Mengentaskan Kemiskinan dan Ketertinggalan		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Makro
1. Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta keteringgalan kehidupan masyarakat	1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin 2. Meningkatnya keterampilan masyarakat miskin dalam kewirausahaan 3. Keluarnya Kabupaten Sijunjung dari kategori daerah tertinggal	1. Tingkat Kemiskinan absolut dan relatif 2. Tingkat pengangguran terbuka 3. Penurunan jumlah Nagari tertinggal

5.3.6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi 6 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Adil, Peduli dan Berwibawa

Tujuan pembangunan pada misi 6 yaitu, mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan kehidupan yang demokratis, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, adil, peduli dan berwibawa. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, maka dirumuskan sasaran pembangunan antara lain: 1) meningkatnya jumlah dan kualitas produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif, 2) meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM bagi masyarakat, 3) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, 4) meningkatnya kinerja dan kompetensi aparatur daerah, 5) meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran serta peralatan kerja, 6) meningkatnya kualitas pelayanan publik, 7) tercapainya opini WTP terhadap laporan keuangan daerah, 8) meningkatnya kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan 9) meningkatnya kerjasama antar daerah.

Sedangkan Keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.7
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi 6

Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata		
Misi 6 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Adil, Peduli dan Berwibawa		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Makro
1. Mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan kehidupan yang demokratis, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, adil, peduli dan berwibawa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah dan kualitas produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif serta berkualitas. 2. Meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM bagi masyarakat. 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi 4. Meningkatnya kinerja dan kompetensi aparatur daerah 5. Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran serta peralatan kerja. 6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 7. Tercapainya opini WTP terhadap laporan keuangan daerah 8. Meningkatnya kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). 9. Meningkatnya kerjasama antar daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Perda yang ditetapkan 2. Angka partisipasi masyarakat ikut Pemilu 3. Persentase PNS yang meningkatkan kompetensi 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Opini laporan keuangan 6. Penilaian laporan kinerja pemerintah daerah 7. Jumlah Nota Kesepahaman (MOU) dengan Pemerintah Daerah lainnya

5.3.7. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi 7 : Mewujudkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Tujuan pembangunan pada misi 7 yaitu; meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan ekonomi dan sosial budaya. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, maka dirumuskan sasaran pembangunan antara lain: 1) meningkatnya kemandirian masyarakat dalam menunjang proses pembangunan di nagari/desa, 2) meningkatnya kelembagaan nagari/desa yang mandiri, 3) meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah, 4) meningkatnya pemberdayaan lembaga ekonomi nagari/desa, dan 5) meningkatnya kerjasama dengan masyarakat perantau dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah.

Sedangkan keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.8
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi 7

Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata		
Misi 7 : Mewujudkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Makro
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan ekonomi dan sosial budaya.	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam menunjang proses pembangunan di nagari/desa. Meningkatnya kelembagaan nagari/desa yang mandiri. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah. Meningkatnya pemberdayaan lembaga ekonomi nagari/desa Meningkatnya kerjasama dengan masyarakat perantau dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Tingkat swadaya masyarakat Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

5.3.8. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi 8 : Revitalisasi Adat dan Seni Budaya Anak Nagari

Tujuan pembangunan pada misi 8 yaitu; mewujudkan tumbuh dan berkembangnya kehidupan sosial, seni dan budaya masyarakat yang berlandaskan kepada falsasah adat Minangkabau “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, maka dirumuskan sasaran pembangunan antara lain: 1) meningkatnya peran tokoh agama dan adat dalam peningkatan pemahaman falsasah adat Minangkabau “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”, 2) terpeliharanya seni dan nilai budaya masyarakat anak nagari, dan 3) meningkatnya jumlah dan kualitas even penyelenggaraan seni budaya anak nagari.

Sedangkan Keterkaitan tujuan dan sasaran pembangunan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.9
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Misi 8

Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata		
Misi 8 : Revitalisasi Adat dan Seni Budaya Anak Nagari		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Makro
1. Mewujudkan tumbuh dan berkembangnya kehidupan sosial, seni dan budaya masyarakat yang berlandaskan kepada falsasah adat Minangkabau “ <i>adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah</i> ”	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya peran tokoh agama dan adat dalam peningkatan pemahaman falsasah adat Minangkabau “<i>adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah</i>” Terpeliharanya seni dan nilai budaya masyarakat anak nagari Meningkatnya jumlah dan kualitas even penyelenggaraan seni budaya anak nagari. 	<ol style="list-style-type: none"> Penurunan kasus Pekat Proporsi sarana dan prasarana seni budaya anak nagari Meningkatnya jumlah festival seni budaya

Sementara itu, keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.10
Keterkaitan antara Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Misi	Tujuan	Sasaran Pembangunan
1. Mewujudkan penataan dan penguatan ekonomi masyarakat	Tercapainya penataan dan penguatan ekonomi masyarakat yang tangguh, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu komoditi sektor unggulan pertanian meliputi; tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan. 2. Meningkatnya swasembada pangan daerah 3. Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan usaha pertanian. 4. Terciptanya kawasan pertanian yang terpadu (agropolitan). 5. Terciptanya tata niaga pemasaran hasil pertanian yang berdaya saing guna terlindunginya produsen dan konsumen terhadap harga dan barang. 6. Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah 7. Meningkatnya hasil produksi industri kecil dan menengah yang berdaya saing. 8. Berkembangnya sektor pariwisata daerah 9. Meningkatnya industri pengolahan sektor pertanian dan pertambangan. 10. Berkembangnya kawasan transmigrasi dalam mendorong perekonomian daerah. 11. Meningkatnya kontribusi BUMD dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah. 12. Meningkatnya nilai investasi dunia usaha
2. Meningkatkan Kecerdasan, Keterampilan dan Kesehatan serta IMTAQ SDMA Anak Nagari	Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan dan taraf kesehatan serta martabat masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemerataan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan pendidikan. 2. Meningkatnya mutu pendidikan yang berbasis Iman dan Taqwa 3. Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat 4. Meningkatnya kemandirian pemuda dan prestasi olah raga daerah 5. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan kesehatan 6. Menurunnya jumlah Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA). 7. Meningkatnya lingkungan sehat dan pola hidup sehat masyarakat 8. Menurunnya angka gizi buruk 9. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infra-struktur serta Prasarana Dasar Nagari	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dasar serta terwujudnya ibukota yang representatif sesuai rencana tata ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya penataan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya 2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi di setiap nagari. 3. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik setiap nagari dan jorong 4. Meningkatnya fungsi Kota Muaro Sijunjung sebagai ibukota kabupaten yang representatif
4. Pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung	Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemanfaatan hasil tambang berwawasan lingkungan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat 2. Terjaganya kualitas air sungai dan air tanah 3. Terjaganya kebersihan lingkungan yang bersih, asri dan nyaman. 4. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan kritis yang berwawasan lingkungan
5. Mengentaskan Kemiskinan dan Ketertinggalan	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta keteringgalan kehidupan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin 2. Meningkatnya keterampilan masyarakat miskin dalam kewirausahaan 3. Keluarnya Kabupaten Sijunjung dari kategori daerah tertinggal
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Adil, Peduli dan Berwibawa	Mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan kehidupan yang demokratis, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, adil, peduli dan berwibawa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah dan kualitas produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif serta berkualitas 2. Meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM bagi masyarakat 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi 4. Meningkatnya kinerja dan kompetensi aparatur daerah 5. Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran serta peralatan kerja 6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 7. Tercapainya opini WTP terhadap laporan keuangan daerah 8. Meningkatnya kualitas Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 9. Meningkatnya kerjasama antar daerah

Tabel 5.10 lanjutan...

	Misi	Tujuan	Sasaran Pembangunan
7.	Mewujudkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan ekonomi dan sosial budaya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam menunjang proses pembangunan di nagari/ desa. 2. Meningkatnya kelembagaan nagari/desa yang mandiri. 3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah 4. Meningkatnya pemberdayaan lembaga ekonomi nagari/desa 5. Meningkatnya kerjasama dengan masyarakat perantau dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah
8.	Revitalisasi Adat dan Seni Budaya Anak Nagari	Mewujudkan tumbuh dan berkembangnya kehidupan sosial, seni dan budaya masyarakat yang berlandaskan kepada falsasah adat Minangkabau " <i>adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah</i> "	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran tokoh agama dan adat peningkatan pemahaman falsasah adat Minangkabau "<i>adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah</i>" 2. Terpeliharanya seni dan nilai budaya masyarakat anak nagari 3. Meningkatnya jumlah dan kualitas even penyelenggaraan seni budaya anak nagari.

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 dirumuskan secara komprehensif. Selain untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat agar dapat diselenggarakan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2010-2015 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan RPJPD Kabupaten Sijunjung tahun 2005-2025 . Strategi dan arah kebijakan RPJMD tahun 2010-2015 juga bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD tahun 2005-2010. Memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD Kabupaten Sijunjung tahun 2005-2025, maka RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2010-2015 difokuskan kepada pemantapan akselerasi penataan pembangunan daerah dengan kemajuan kesejahteraan masyarakat dan penguatan basis perekonomian daerah, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 6.1
Tahapan Utama Pembangunan RPJPD Kab. Sijunjung 2005-2025



6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan

parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategy objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pembangunan daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Proses dan teknis perumusan strategi pembangunan Kabupaten Sijunjung untuk periode 2011-2015 dilakukan dengan menggunakan analisa *SWOT* karena dapat melihat kondisi umum dan potensi sumber daya daerah serta isu-isu strategis. Dengan menggunakan alat ini diharapkan strategi pembangunan daerah dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh daerah Kabupaten Sijunjung baik masalah bidang ekonomi, sumber daya manusia maupun kehidupan sosial, adat dan budaya masyarakat. Secara umum, analisa *SWOT* ini diklasifikasikan atas 4 kuadran yang berisikan kelompok strategi pembangunan daerah yang disusun dengan menghubungkan dua unsur faktor strategis yang terkait. Keempat kelompok strategi tersebut adalah: Strategi S-O (Kuadran I), Strategi S-T (Kuadran II), Strategi W-O (Kuadran III) dan Strategi W-T (Kuadran IV).

Strategi S-O dirumuskan dengan jalan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki daerah untuk merebut peluang pembangunan yang tersedia. *Strategi S-T* dihasilkan dengan menggunakan kekuatan (*Strength*) yang dimiliki daerah untuk menghilangkan ancaman (*Threat*) pembangunan yang diperkirakan dapat terjadi. *Strategi W-O* dirumuskan dengan jalan mengurangi kelemahan (*Weakness*) yang terdapat di daerah untuk merebut peluang pembangunan yang tersedia.

Sedangkan *Strategi W-T* dihasilkan dengan jalan mengatasi kelemahan yang terdapat di daerah untuk menghilangkan ancaman pembangunan yang mungkin terjadi. Berdasarkan pada prosedur yang ditetapkan di dalam analisa *SWOT* tersebut, maka dapat dirumuskan strategi yang dapat ditetapkan untuk meningkatkan dan mendorong proses pembangunan daerah Kabupaten Sijunjung secara keseluruhan. Strategi pembangunan daerah dapat diuraikan melalui analisa *SWOT*, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Analisa SWOT

		FAKTOR EKSTERNAL	
		Peluang (<i>opportunities</i>)	Ancaman (<i>threat</i>)
F A K T O R I N T E R N A L		<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi geo-ekonomi Kabupaten Sijunjung yang dikelilingi oleh daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. 2. Semakin baik dan berkembangnya pelaksanaan otonomi daerah. 3. Tingginya minat investor dalam menanamkan modal karena terbukanya iklim dunia usaha kondusif. 4. Semakin luasnya potensi pasar. 5. Tumbuh dan berkembangnya pariwisata antar daerah. 6. Semakin berkembangnya IPTEK 7. Tersedianya peraturan perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya persaingan ekonomi antar daerah tetangga. 2. Semakin parahnya kerusakan lingkungan 3. Adanya potensi bencana. 4. Pengaruh budaya negatif terhadap tataran kehidupan agama, adat dan sosial budaya 5. Adanya kebijakan pemerintah yang kontraproduktif satu sama lainnya
	Kekuatan (<i>strength</i>):	S-O Strategy	S-T Strategy
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi dan letak geografis yang strategis sebagai mata rantai menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau serta Sumatera bagian selatan. 2. Tersedianya lahan yang memadai untuk pengembangan pertanian dan perkebunan 3. Tersedianya potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk peningkatan ekonomi daerah 4. Kuantitas sumberdaya aparatur daerah cukup memadai 5. Memiliki potensi wisata alam, wisata sejarah dan wisata khusus. 6. Kearifan lokal masyarakat yang terjaga baik 7. Penduduk usia produktif cukup tinggi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kawasan pertanian yang terpadu 2. Mengembangkan pasar sebagai penunjang pemasaran komoditas unggulan pertanian 3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif , sehingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi. 4. Mengembangkan sektor pariwisata yang berdaya saing dan berbasis masyarakat 5. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik 6. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara optimal. 7. Meningkatkan penggunaan Iptek untuk pengelolaan potensi SDA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan potensi wilayah untuk meningkatkan daya saing daerah 2. Memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya aparatur untuk mencegah kerusakan lingkungan dan penanggulangan bencana. 3. Meningkatkan penerapan ajaran agama, adat dan sosial budaya untuk perbaikan moral dan ahlak masyarakat yang berlandaskan filosofi adat minangkabau "<i>adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah</i>" 4. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam memahami kebijakan pemerintah secara dinamis. 5. Meningkatkan keterampilan penduduk usia produktif untuk mencegah pengaruh budaya negatif.
Kelemahan (<i>weakness</i>):	W-O Strategy	W-T Strategy	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis daerah berbukit dan sebagian besar berada kawasan hutan 2. Relatif tingginya tingkat kemiskinan 3. Belum optimalnya lembaga UMKM dan koperasi yang mendukung ekonomi kerakyatan dan pasar komoditi unggulan sektor pertanian/ perkebunan 4. Rendahnya kualitas SDM masyarakat 5. Kondisi keuangan daerah yang terbatas, 6. Rendahnya kesadaran pengusaha dan masyarakat dalam menjaga lingkungan 7. Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi dan prasarana dasar di nagari 8. Belum berkembangnya teknologi tepat guna. 9. Masih terdapatnya nagari dan jporong tertinggal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai fungsi wilayah 2. Mengembangkan UMKM dan koperasi melalui peningkatan kualitas SDM dan kelenbagaan untuk memanfaatkan potensi pasar. 3. Meningkatkan investasi dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan. 4. Meningkatkan pengelolaan sumber-sumber PAD dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdaya saing. 5. Menerapkan regulasi yang berwawasan lingkungan 6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar di setiap nagari untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal. 7. Meningkatkan penguasaan IPTEK dalam mengembangkan teknologi tepat guna. 8. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan penggunaan lahan melalui revitalisasi pertanian dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk peningkatan ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan. 2. Mengoptimalkan keuangan daerah dan sumber daya masyarakat untuk mengurangi serta meminimalisir kerusakan lingkungan. 3. Memantapkan dan mengamalkan nilai-nilai budaya adat minangkabau 4. Menyusun dan menerapkan produk hukum daerah yang adil dan bijaksana kepada seluruh elemen masyarakat. 5. Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna untuk peningkatan daya saing produk. 6. Meningkatkan kesadaran pengusaha dan masyarakat dalam menjaga lingkungan untuk pencegahan dan penanggulangan bencana 7. Meningkatkan potensi sumber daya hutan untuk mengantisipasi bencana dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan daya saing ekonomi 	

6.2. Arah Kebijakan

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran pembangunan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan masing-masing misi. Strategi dan arah kebijakan yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran dari setiap misi, dapat diuraikan sebagai berikut :

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 1 : Mewujudkan Penataan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pada misi ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.2
Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 1

Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata			
Misi 1 : Mewujudkan penataan dan penguatan ekonomi masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Tercapainya penataan dan penguatan ekonomi masyarakat yang tangguh, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita masyarakat	1. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu komoditi sektor unggulan pertanian meliputi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.	1. Mengoptimalkan penggunaan lahan melalui revitalisasi pertanian dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk peningkatan ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan.	1. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian 2. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian 3. Peningkatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat
	2. Meningkatnya swasembada pangan daerah	1. Mengoptimalkan penggunaan lahan melalui revitalisasi pertanian dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk peningkatan ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan.	1. Peningkatan ketahanan pangan terutama beras, daging dan ikan 2. Peningkatan kemampuan lembaga petani secara kuantitas dan kualitas 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyuluh pertanian
	3. Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan usaha pertanian	1. Mengoptimalkan penggunaan lahan melalui revitalisasi pertanian dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk peningkatan ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan.	1. Peningkatan manajemen pengelolaan usaha tani baik dari aspek budidaya, pengolahan hasil pasca panen dan pemasaran 2. Peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian, perikanan dan kehutanan. 3. Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dan pemasaran pertanian perikanan dan kehutanan.
	4. Terciptanya kawasan pertanian yang terpadu	1. Mengembangkan kawasan pertanian yang terpadu	1. Pengembangan kawasan agropolitan
	5. Terciptanya tata niaga pemasaran hasil pertanian yang berdaya saing guna terlindunginya produsen dan konsumen terhadap harga dan barang	1. Mengembangkan pasar sebagai penunjang pemasaran komoditas unggulan pertanian	1. Revitalisasi dan pengembangan pasar tradisional 2. Peningkatan perlindungan harga dan barang terhadap produsen dan konsumen
	6. Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah	1. Mengembangkan UMKM dan koperasi melalui peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan untuk memanfaatkan potensi pasar.	1. Peningkatan kualitas manajemen UMKM dan penguatan kelembagaan koperasi. 2. Peningkatan kemitraan bisnis bagi UMKM dan Koperasi

Tabel 6.2 lanjutan...

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Tercapainya pefiataan dan penguatan ekonomi masyarakat yang tangguh, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita masyarakat	7. Meningkatnya hasil produksi industri kecil dan menengah yang berdaya saing.	1. Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna untuk peningkatan daya saing produk	1. Peningkatan pembinaan manajemen usaha bagi Industri kecil dan menengah
	8. Berkembangnya sektor pariwisata daerah	1. Mengembangkan sektor pariwisata yang berdaya saing dan berbasis masyarakat	1. Penyusunan kajian objek wisata unggulan daerah 2. Pengembangan nagari/desa wisata 3. Peningkatan kualitas layanan dan promosi pariwisata daerah
	9. Meningkatnya industri pengolahan sektor pertanian dan pertambangan.	1. Meningkatkan penguasaan iptek untuk pengelolaan potensi SDA	1. Peningkatan penerapan iptek untuk industri pengolahan sektor pertanian dan pertambangan.
	10. Berkembangnya kawasan transmigrasi dalam mendorong perekonomian daerah	1. Pengembangan potensi wilayah untuk meningkatkan daya saing daerah	1. Pengembangan kawasan transmigrasi secara terpadu
	11. Meningkatnya kontribusi BUMD dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah.	1. Meningkatkan pengelolaan sumber-sumber PAD melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdaya saing.	1. Peningkatan manajemen BUMD yang berdaya saing
	12. Meningkatnya nilai investasi dunia usaha	1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi.	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas promosi investasi 2. Peningkatan kualitas proses perizinan yang tepat dan terpadu serta transparan berbasis teknologi 3. Peningkatan produktivitas dan perlindungan tenaga kerja dan informasi pasar dan bursa kerja 4. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan

6.2. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 2 : Meningkatkan Kecerdasan, Keterampilan dan Kesehatan serta IMTAQ SDM Anak Nagari

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pada misi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.3

Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 2

Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata			
Misi 2 : Meningkatkan Kecerdasan, Keterampilan dan Kesehatan serta IMTAQ SDM Anak Nagari			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan dan taraf kesehatan serta martabat masyarakat	1. Meningkatnya pemerataan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan pendidikan serta penguatan tata kelola pendidikan yang baik.	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini 2. Peningkatan perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar dalam upaya menuntaskan program wajib belajar 9 tahun 3. Peningkatan perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah 4. Peningkatan kualitas pemberian bea siswa untuk siswa miskin 5. Pengembangan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan 6. Peningkatan pembinaan sekolah swasta
	2. Meningkatnya mutu pendidikan yang berbasis Iman dan Taqwa serta penguatan tata kelola pendidikan yang baik	Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 2. Penerapan standar kompetensi kelulusan setiap jenjang pendidikan 3. Peningkatan kualitas manajemen sekolah sesuai dengan standar mutu nasional. 4. Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis Imtaq 5. Peningkatan efektifitas peran masyarakat dan komite sekolah.
	3. Meningkatnya budaya dan minat baca masyarakat	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan aksesibilitas perpustakaan berbasis masyarakat 2. Peningkatan gerakan budaya dan minat baca bagi masyarakat
	4. Meningkatnya kemandirian pemuda dan prestasi olahraga.	1. Meningkatkan keterampilan penduduk usia produktif untuk mencegah pengaruh budaya negatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan aksesibilitas pemuda dalam berorganisasi 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam meningkatkan prestasi olahraga

Tabel 6.3 lanjutan. . . .

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Tercapainya peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan dan taraf kesehatan	5. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan kesehatan.	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan 2. Peningkatan manajemen dan pelayanan kesehatan 3. Peningkatan SDM pelayanan
	6. Menurunnya jumlah kematian ibu, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA)	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu, bayi dan balita. 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam menangani masalah kesehatan ibu dan anak
	7. Meningkatnya lingkungan sehat dan pola hidup sehat	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan promosi kesehatan 2. Pengembangan Nagari/Desa aktif 3. Peningkatan dan pengembangan lingkungan sekolah dan masyarakat yang sehat 4. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular 5. Peningkatan kualitas kesehatan anak usia sekolah
	8. Menurunnya angka gizi buruk	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	1. Peningkatan kualitas pemantauan status gizi Balita dan penanganan kasus gizi buruk.
	9. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peserta KB aktif dari pasangan usia subur dan UPPKS 2. Peningkatan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR)

6.3. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur serta Prasarana Dasar Nagari

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pada misi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.4
Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 3

Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata				
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur serta Prasarana Dasar Nagari				
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan dasar - serta terwujudnya ibukota yang representatif sesuai rencana tata ruang	1. Terwujudnya penataan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya	1 Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai fungsi wilayah	1. Penyusunan dokumen tata ruang 2. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap pemanfaatan ruang
		2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi di setiap nagari dan jorong	1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar di setiap nagari untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.	1. Peningkatan pembangunan dan pemilihan sarana jalan dan jembatan serta fasilitas pengamanan lalu lintas 2. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perkotaan sampai ke nagari 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan jaringan irigasi. 4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan dan pengelolaan air bersih, sanitasi, drainase dan jalan lingkungan nagari 5. Penataan pembangunan perumahan dan pemukiman yang sehat 6. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan dunia usaha dalam upaya pemerataan jangkauan layanan komunikasi.
		3. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik setiap nagari dan jorong	1 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar di setiap nagari untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.	1. Peningkatan dan pengembangan sumber energi terbarukan sesuai potensi daerah. 2. Peningkatan koordinasi dengan pihak ketiga untuk membangun jaringan energi listrik .
		4. Meningkatnya fungsi Kota Muaro Sijunjung sebagai ibukota kabupaten yang representatif.	1 Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai fungsi wilayah	1. Penataan ruang kawasan perkotaan Muaro Sijunjung terutama sistem jaringan prasarana dan sarana fasilitas perkotaan

6.4. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4 : Pemanfaatan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Sijunjung

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pada misi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.5

Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 4

Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata			
Misi 4 : Pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatnya pemanfaatan hasil tambang berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Menerapkan regulasi yang berwawasan lingkungan	1. Peningkatan hasil produksi tambang bernilai ekonomis 2. Peningkatan kualitas penertiban kegiatan tambang rakyat dalam mengolah tambang secara terpadu
	2. Terjaganya kualitas air sungai dan air tanah	1. Memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya aparatur untuk mencegah kerusakan	1. Peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan swasta dalam menjaga pencemaran lingkungan 2. Peningkatan cadangan sumber air tanah berbasis masyarakat
	3. Terjaganya kebersihan lingkungan yang bersih, asri dan nyaman	1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.	1. Peningkatan prasarana persampahan dan peran serta masyarakat 2. Pengembangan ruang terbuka hijau yang asri dan nyaman
	4. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan kritis yang berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan potensi sumber daya hutan untuk mengantisipasi bencana dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan daya saing ekonomi	1. Peningkatan kualitas penanganan lahan kritis 2. Peningkatan kualitas perlindungan dan pengamanan hutan secara terpadu 3. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana 4. Pengembangan dan pengelolaan hutan pada kesatuan pengelola hutan

6.5. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 5 : Mengentaskan Kemiskinan dan Ketertinggalan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pada misi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.6
Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 5

Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata				
Misi 5 : Mengentaskan Kemiskinan dan Ketertinggalan				
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran serta ketertinggalan kehidupan masyarakat	1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar di setiap nagari untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.	1. Peningkatan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin secara merata 2. Peningkatan bantuan sandang dan pangan serta jaminan sosial bagi masyarakat miskin
		2. Meningkatnya keterampilan masyarakat miskin dalam kewirausahaan	1. Meningkatkan investasi dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan	1. Peningkatan keterampilan masyarakat miskin dalam berwirausaha 2. Peningkatan akses masyarakat miskin dalam memperoleh mitra usaha
		3. Keluarnya Kabupaten Sijunjung dari kategori daerah tertinggal	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar di setiap nagari untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.	1. Pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal secara terpadu dan lintas sektoral

6.6. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 6 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Adil, Peduli dan Berwibawa

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pada misi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.7

Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 6

Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata			
Misi 6 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Adil, Peduli dan Berwibawa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan kehidupan yang demokratis, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, adil, peduli dan berwibawa	1. Meningkatnya jumlah dan kualitas produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif.	1. Menyusun dan menerapkan produk hukum daerah yang adil dan bijaksana kepada seluruh elemen masyarakat.	1. Peningkatan ketersediaan produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan daerah
	2. Meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM bagi masyarakat	1. Menyusun dan menerapkan produk hukum daerah yang adil dan bijaksana kepada seluruh elemen masyarakat.	1. Peningkatan budaya sadar hukum dan taat hukum pada masyarakat 2. Peningkatan kualitas penyuluhan hukum dan HAM terhadap masyarakat
	3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	2. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu
	4. Meningkatnya kinerja dan kompetensi aparatur daerah	1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam memahami kebijakan pemerintah secara dinamis.	1. Peningkatan kompetensi aparatur 1. Peningkatan manajemen kepegawaian dan pengembangan pola isentif yang efektif 2. Peningkatan kuantitas dan kualitas organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan daerah
	5. Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran serta peralatan kerja.	1. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana perkantoran dan peralatan kerja
	6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik berbagai bidang sesuai SPM
	7. Tercapainya opini WTP terhadap laporan keuangan daerah	1. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas penerapan anggaran berbasis kinerja dan SIPKD serta pengelolaan aset 2. Peningkatan kualitas intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi 3. Peningkatan kualitas sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan APBD
	8. Meningkatnya kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan. 2. Peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah

Tabel 6.7 lanjutan.....

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan kehidupan yang demokratis, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, adil, peduli dan berwibawa	9. Meningkatnya kerjasama antar daerah	1. Pengembangan potensi wilayah untuk meningkatkan daya saing daerah	1. Peningkatan kerja sama antar daerah dalam upaya menyinkronkan rencana pembangunan

6.7. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 7 : Mewujudkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pada misi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.8

Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 7

Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata				
Misi 7 : Mewujudkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan				
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan ekonomi, sosial budaya, pembangunan politik dan lingkungan hidup	1. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam menunjang proses pembangunan di nagari/desa	1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas swadaya masyarakat terhadap program pembangunan nagari
		2. Meningkatnya kelembagaan nagari/desa yang mandiri.	1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.	1. Penguatan pemerintahan dan kelembagaan nagari/desa
		3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah	1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.	1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan 2. Peningkatan kualitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan penanganan KDRT
		4. Meningkatnya pemberdayaan lembaga ekonomi nagari/desa	1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.	1. Peningkatan kualitas unit ekonomi simpan pinjam dalam pengelolaannya 2. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan BUM-Nagari
		5. Meningkatnya kerjasama dengan masyarakat perantau dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah	1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.	1. Peningkatan peran serta perantau dalam aktifitas pembangunan daerah

6.8. Strategi dan Arah Kebijakan Misi 8 : Revitalisasi Adat dan Seni Budaya Anak Nagari

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pada misi ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6.9
Keterkaitan antara Strategi dan Arah Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi 8

Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Berkualitas, Sejahtera dan Merata			
Misi 8 : Revitalisasi Adat dan Seni Budaya Anak Nagari			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan tumbuh dan berkembangnya kehidupan sosial, seni dan budaya masyarakat yang berlandaskan kepada falsafah adat Minangkabau " <i>adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah</i> "	1. Meningkatnya peran tokoh agama dan adat dalam peningkatan pemahaman falsafah adat Minangkabau " <i>adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah</i> "	1. Meningkatkan penerapan ajaran agama, adat dan sosial budaya untuk perbaikan moral dan ahklak masyarakat yang berlandaskan filosofi adat minangkabau " <i>adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah</i> "	1. Peningkatan kualitas tokoh agama dan guru TPQ/TPSQ serta garin masjid 2. Peningkatan kualitas tokoh adat dan penguatan kelembagaan 3. Peningkatan penanganan kasus Pekat yang optimal
	2. Terpeliharanya seni dan nilai budaya masyarakat anak nagari	1. Memantapkan dan mengamalkan nilai-nilai budaya adat minangkabau	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana seni budaya masyarakat anak nagari 2. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok seni budaya masyarakat anak nagari
	3. Meningkatnya jumlah dan kualitas even penyelenggaraan seni budaya anak nagari	1. Memantapkan dan mengamalkan nilai-nilai budaya adat minangkabau	1. Peningkatan even penyelenggaraan seni budaya anak nagari yang berkesinambungan dan berkualitas

Tahapan indikasi pembangunan tahunan Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 dengan memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan RPJPD Kabupaten Sijunjung tahun 2005-2025, dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 6.2
Tahapan Indikasi Tahunan RPJMD Kabupaten Sijunjung 2011-2015



Berdasarkan tahapan indikasi tahunan RPJMD Kabupaten Sijunjung 2010-2015, sekaligus menjadi tema-tema pembangunan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya, maka arah kebijakan pembangunan masing-masing tahunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2011.

Pembangunan Kabupaten Sijunjung di tahun 2011 diarahkan kepada pemberdayaan dan peningkatan sumberdaya lokal yang berwawasan lingkungan yang lebih ditekankan kepada sektor ekonomi kerakyatan meliputi; peningkatan produktivitas hasil pertanian dan kelembagaan petani serta pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM. Disamping itu, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat diarahkan untuk tetap menjaga lingkungan hidup dan lahan produktif.

Sedangkan pembangunan di bidang sumber daya manusia lebih menekankan kepada upaya-upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan serta kualitas tenaga pendidik. Sejalan dengan pembangunan di bidang pendidikan, dilakukan juga pembangunan di bidang kesehatan dengan fokus pelayanan kesehatan berkualitas ke seluruh wilayah dan melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sementara itu, pembangunan sarana dan prasarana diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dasar nagari dan infrastruktur pendukung lainnya. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur diprioritas untuk mendukung dan mendorong terlaksananya berbagai aktivitas pembangunan di wilayah Kabupaten Sijunjung, terutama di nagari dan jorong tertinggal.

Sementara itu, pembenahan manajemen pemerintah pada tahun 2011 lebih menekankan kepada pembenahan tata kelola pemerintahan dengan melakukan penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah dan pengembangan kapasitas aparatur daerah serta peningkatan sarana dan prasarana, terutama gedung perkantoran. Disamping itu juga dilakukan pengembangan dan penerapan sistem pemerintahan yang berbasis teknologi informasi.

2) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2012.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kabupaten Sijunjung tahun 2012 ditujukan kepada upaya pembangunan ekonomi yang tangguh dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan ekonomi yang tangguh diarahkan meningkatkan produksi komoditi pertanian baik secara kuantitas maupun secara kualitas dan terjaganya stabilitas pangan serta tumbuh dan berkembangnya UMKM dan koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang didukung oleh sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.

Sementara itu, dalam meningkatkan pembangunan ekonomi daerah lebih ditekan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas proses perizinan dan peningkatan kuantitas dan kualitas promosi investasi daerah. Sektor pariwisata yang sejak tahun 2012 menjadi fokus pembangunan dan pada tahun 2012 lebih ditingkatkan.

Sedangkan peningkatan SDM berkualitas lebih diarahkan kepada pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan yang mengacu kepada sasaran MDG's 2015, sehingga pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sijunjung dapat tercapai sesuai target. Selain itu, pembangunan pada tahun 2012 ini tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung unggulan daerah dalam menunjang terbangunnya ekonomi yang tangguh. Sementara itu, pembangunan lingkungan hidup masih melanjutkan agenda tahun lalu, namun tahun 2012 diprioritaskan kepada pengurangan dampak kerusakan dan resiko bencana.

Pada tahun 2012 ini, diprioritaskan pembangunan bidang pemerintahan untuk menciptakan *good governance* untuk menuju *clean government*. Sasaran pembangunan yang menjadi fokus utama adalah upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta perwujudan Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah. Pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih secara terukur dan akuntabel diharapkan mampu mendukung upaya pembangunan di bidang lainnya.

3) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2013.

Pembangunan Kabupaten Sijunjung di tahun 2013 diarahkan kepada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengembangan ekonomi kerakyatan. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masih merupakan upaya melanjutkan agenda tahun 2012, namun pada tahun 2013 ditargetkan sasaran pembangunan untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik sudah dapat tercapai dan cakupan pelayanan kesehatan rujukan dapat optimal seiring telah beroperasinya RSUD pada tahun 2012 dan diikuti peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar.

Sedangkan dalam pengembangan ekonomi kerakyatan lebih mengarahkan kepada peningkatan kualitas hasil pertanian dan menjaga stabilitas pangan serta terpenuhinya jumlah pasar yang memadai dalam memasarkan hasil pertanian. Disamping itu, dilakukan rencana pengembangan kawasan pertanian yang terpadu dan peningkatan kualitas UMKM dan koperasi serta meningkatkan kuantitas promosi investasi daerah dan proses perizinan yang cepat dan efisien.

Selain itu, pembangunan pada tahun 2013 ini tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar nagari dan infrastruktur pendukung unggulan daerah. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan pariwisata yang mulai menjadi fokus sejak tahun ini. Pembangunan sektor pariwisata mulai digalakkan dengan langkah awal pembenahan dan penyiapan destinasi wisata unggulan daerah dan aspek pendukung lainnya seperti kebudayaan dan sumber daya manusia yang terkait industri pariwisata.

Pada tahun 2013 ini pembangunan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap melanjutkan agenda pembangunan tahun 2012, namun kualitasnya lebih ditingkatkan kepada pemanfaatannya yang berwawasan lingkungan. Sementara itu, dalam pembangunan tata kelola pemerintahan tetap melanjutkan agenda tahun 2013 dan pada tahun 2012 lebih menekankan kepada menciptakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

4) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014.

Pembangunan tahun 2014 diarahkan kepada upaya melanjutkan sasaran pembangunan bidang ekonomi. Pembangunan perekonomian wilayah tahun 2014 ini tetap menjadi prioritas dengan fokus kepada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dalam mengembangkan industri olahan pertanian/pertambangan, restrukturisasi BUMD strategis, membangun klaster pusat-pusat ekonomi unggulan, pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat miskin serta peningkatan produksi dan pengendalian distribusi hasil pertanian dan pangan daerah. Disamping itu, berkembangnya UMKM dan koperasi baik secara struktur permodalan dan aset maupun meningkatnya daya saing produk. Tercapainya sasaran-sasaran pembangunan tersebut diharapkan terwujudnya ekonomi daerah yang tangguh.

Pencapaian misi meningkatkan kecerdasan, keterampilan dan kesehatan serta IMTAQ SDM anak nagari tetap dilanjutkan pada tahun 2014. Fokus pada tahun ini diarahkan pada pemantapan kehidupan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berbudaya. Pada tahun 2014, pembangunan tetap diarahkan untuk melanjutkan beberapa keberhasilan pembangunan tahun sebelumnya, yaitu pembangunan infrastruktur dan prasarana dasar serta infrastruktur pendukung unggulan daerah. Pembangunan infrastruktur dan prasarana dasar ini ditargetkan tercapai pada tahun 2014 ini, sehingga Kabupaten Sijunjung keluar dari kategori daerah tertinggal pada tahun 2015.

Pada tahun 2014 ini, tetap diprioritas pembangunan bidang pemerintahan sebagai lanjutan pembangunan tahun lalu. Sasaran pembangunan yang menjadi fokus adalah upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, terwujudnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) daerah dan terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintah nagari/desa yang maju dan mandiri. Selain bidang pemerintahan, tahun ini juga mulai diprioritaskan kepada peningkatan kualitas keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan.

5) Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015.

Pembangunan Kabupaten Sijunjung pada tahun 2015 diarahkan kepada kebijakan untuk memantapkan target-target pembangunan yang belum dicapai pada tahun sebelumnya. Fokus pembangunan pada periode akhir lima tahunan ini peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan serta berbudaya yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB perkapita, daya beli masyarakat dan Nilai Tukar Petani (NTP) serta Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Pada tahun terakhir ini, pembangunan perekonomian wilayah tetap menjadi prioritas dengan fokus kepada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dalam mengembangkan industri olahan pertanian/pertambangan, restrukturisasi BUMD strategis dan membangun pusat-pusat ekonomi unggulan dan peningkatan produksi dan pengendalian distribusi hasil pertanian dan pangan daerah. Guna mendukung seluruh aktivitas pembangunan, maka pada tahun 2015 ini ditargetkan pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur dan prasarana dasar pendukung unggulan daerah serta sasaran pembangunan penciptaan keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan secara optimal, sehingga dapat mengurangi disparitas antar nagari.

Sedangkan pencapaian misi mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, peduli dan berwibawa dicapai melalui sasaran pembangunan terwujudnya tata tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, pencapaian SPM daerah yang optimal dan penyelenggaraan pelayanan pemerintah nagari/desa yang maju dan mandiri serta terciptanya aparaturnya daerah yang memiliki kredibilitas dan integritas.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1. Kebijakan Umum

Secara umum kebijakan umum pembangunan Kabupaten Sijunjung periode 2010-2015 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan visi dan misi daerah sesuai dengan komitmen pelaksanaan pembangunan yang *pro poor, pro job, pro growth* dan *pro gender* serta target-target MDG's, *education for all*, dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga.

Selain itu, perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara strategi yang telah disusun dengan arah kebijakan yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah. Prinsip dasar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sijunjung adalah dengan menggunakan pendekatan secara holistik yang melandasi kebijakan umum pembangunan daerah. Kebijakan umum Kabupaten Sijunjung dalam menterjemahkan strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahunan dapat dibagi kedalam empat perspektif yaitu: 1) perspektif masyarakat, 2) perspektif proses, 3) perspektif kelembagaan, dan 4) perspektif pengelolaan keuangan.

Dalam menterjemahkan kebijakan umum pembangunan berdasarkan ke empat perspektif tersebut, dapat dilihat dari keterkaitan dengan masing-masing misi adalah sebagai berikut :

A. Misi 1 : Mewujudkan Penataan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat

Kebijakan umum yang tempuh dalam mewujudkan misi 1 adalah :

- 1. Perspektif masyarakat;** peningkatan produksi dan produktivitas serta mutu hasil pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan, peningkatan swasembada pangan, pengembangan tanaman pangan sesuai potensi lokal, revitalisasi dan pengembangan pasar tradisional, peningkatan perlindungan harga dan barang terhadap produsen dan konsumen, peningkatan kemudahan permodalan bagi UMKM dan Koperasi, peningkatan kemampuan pelaku IKM terhadap akses permodalan, peningkatan kemitraan bisnis bagi UMKM dan Koperasi dan peningkatan pembinaan manajemen usaha bagi Industri kecil dan menengah serta penyediaan sarana dan prasarana dalam memasarkan produk industri rumah tangga dan IKM. Selain menata dan menguatkan ekonomi masyarakat, perlu juga didukung penguatan ekonomi daerah antara lain; pengembangan destinasi pariwisata daerah, pengembangan kawasan strategis sebagai daya tarik investor, peningkatan produktivitas dan profitabilitas BUMD, peningkatan iklim investasi yang menarik dan kondusif serta terjaganya stabilitas keamanan.
- 2. Perspektif proses;** peningkatan kinerja sektor pertanian, perdagangan, perkoperasian, perindustrian, BUMD dan pariwisata didorong melalui pengembangan kelembagaan kelompok tani secara optimal, penguatan permodalan dan manajemen bagi UMKM dan Koperasi, pengembangan produktivitas industri industri kecil dan menengah, penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) yang berbasis pada potensi lokal, pengembangan nagari/desa wisata, menciptakan kawasan ekonomi baru dan iklim investasi yang kondusif serta penguatan permodalan dan perbaikan manajemen BUMD dan peningkatan kerjasama dengan Kepolisian RI dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
- 3. Perspektif kelembagaan;** optimalisasi kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan antar SKPD di sektor pertanian, perdagangan, perkoperasian dan perindustrian serta pariwisata dan peningkatan

kualitas perizinan satu pintu dan peningkatan kualitas pelayanan Balai Latihan Kerja (BLK) serta restrukturisasi BUMD.

4. **Perspektif pengelolaan keuangan;** peningkatan kualitas penerapan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan rencana kerja, peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja pembangunan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah berupa retribusi dari perizinan dan pasar komoditi unggulan pertanian secara transparan dan akuntabel.

B. Misi 2 : Meningkatkan Kecerdasan, Keterampilan dan Kesehatan serta IMTAQ SDM Anak Nagari

Kebijakan umum yang tempuh dalam mewujudkan misi 2 adalah :

1. **Perspektif masyarakat;** peningkatan kualitas ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan pendidikan dan akses pembiayaan bagi penduduk miskin, peningkatan kuantitas dan kualitas kurikulum muatan lokal yang berbasis iman dan taqwa, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan, peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak dan peningkatan pelayanan KB serta peningkatan aksesibilitas pemuda dalam berorganisasi serta berolahraga.
2. **Perspektif proses;** optimalisasi dukungan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam penyediaan bantuan operasional satuan pendidikan, penyediaan bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin, pemerataan dalam penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas dan kualitas sarana satuan pendidikan, peningkatan kualitas nilai-nilai religius di lingkungan sekolah, peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan. Selain itu peningkatan promosi kesehatan kondisi lingkungan sehat dan perilaku hidup sehat yang melibatkan tenaga dan kader kesehatan dan revitalisasi posyandu dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak serta pemantauan status gizi balita dan optimalisasi kader posyandu dalam komunikasi, informasi dan edukasi program keluarga berencana.
3. **Perspektif kelembagaan;** pemerataan dalam penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui perluasan kesempatan studi lanjutan, peningkatan kualitas manajemen sekolah sesuai dengan standar mutu nasional, peningkatan pembinaan terhadap sekolah swasta dan pendidikan non formasi dan peningkatan kuantitas dan kualitas lembaga perpustakaan berbasis masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sesuai dengan standar pelayanan prima, peningkatan pemerataan distribusi tenaga kesehatan dan non kesehatan dan peningkatan peserta KB aktif dengan mengoptimalkan Posyandu serta peningkatan pembinaan organisasi pemuda dan olahraga.
4. **Perspektif pengelolaan keuangan;** peningkatan kualitas penerapan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan rencana kerja SKPD pelaksana bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga serta perpustakaan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja pembangunan daerah terhadap SKPD penyelenggara. Selain itu, peningkatan pengelolaan retribusi dari bidang kesehatan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan PAD.

C. Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur serta Prasarana Dasar Nagari

Kebijakan umum yang tempuh dalam mewujudkan misi 3 adalah :

1. **Perspektif masyarakat;** peningkatan dan pengelolaan tata ruang secara parsial serta peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan serta fasilitas pengamanan lalu lintas dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perkotaan sampai ke nagari. Selain itu, peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan jaringan irigasi serta pengelolaan air bersih, sanitasi dan jalan lingkungan nagari serta drainase dan penataan pembangunan perumahan dan

pemukiman yang sehat serta peningkatan jaringan listrik dan telekomunikasi yang merata serta penataan ruang kawasan perkotaan Muaro Sijunjung, terutama sistim jaringan prasarana dan sarana fasilitas perkotaan.

- 2. Perspektif proses;** penegakan hukum tata ruang sesuai perundang-undangan yang berlaku bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan peningkatan tertib administrasi pertanahan bekerjasama dengan Badan Pertanahan Negara. Selain itu, perbaikan manajemen transportasi serta peningkatan ketertiban lalulintas bekerjasama dengan aparat kepolisian.
- 3. Perspektif kelembagaan;** peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap penanganan jaringan transportasi serta peningkatan pengelolaan data base kebutuhan prasarana dasar masyarakat nagari/desa berbasis teknologi.
- 4. Perspektif pengelolaan keuangan;** peningkatan pengelolaan retribusi perizinan pembangunan infrastruktur secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan PAD dan peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja pembangunan daerah terhadap peningkatan kuantitas infrastruktur serta prasarana dasar nagari.

D. Misi 4 : Pemanfaatan SDA untuk Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat Sijunjung

Kebijakan umum yang tempuh dalam mewujudkan misi 4 adalah :

- 1. Perspektif masyarakat;** peningkatan dan pengelolaan potensi sumber daya alam pertambangan terutama tambang galian kategori strategis dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup serta peningkatan akses informasi lingkungan dan peningkatan pengendalian perusakan lingkungan pada sungai, lahan kering dan hutan serta mitigasi bencana alam.
- 2. Perspektif proses;** pemetaan lokasi tambang sesuai dengan pemanfaatan ruang dan peningkatan kerjasama dengan swasta terhadap sektor pertambangan serta peningkatan pemahaman masyarakat dan swasta untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan berbasis masyarakat .
- 3. Perspektif kelembagaan;** peningkatan kualitas data base pertambangan yang potensial dengan merujuk kepada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang dan peningkatan kualitas manajemen pertambangan, lingkungan hidup dan mitigasi bencana.
- 4. Perspektif pengelolaan keuangan;** peningkatan pengelolaan retribusi sektor pertambangan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan PAD dan peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja pembangunan daerah terhadap peningkatan kualitas manajemen pertambangan, lingkungan hidup dan mitigasi bencana

E. Misi 5 : Mengentaskan Kemiskinan dan Ketertinggalan

Kebijakan umum yang tempuh dalam mewujudkan misi 5 adalah :

- 1. Perspektif masyarakat;** peningkatan ketersediaan rumah layak huni yang adil dan merata, peningkatan bantuan sandang dan pangan serta jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan peningkatan keterampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan ekonomi kreatif.
- 2. Perspektif proses;** penciptaan pola penanganan kemiskinan dan ketertinggalan berdasarkan skala prioritas secara terpadu dan lintas sektoral melalui program bedah jorong tertinggal dan peningkatan koordinasi program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal yang lebih terukur dan sinergisitas.
- 3. Perspektif kelembagaan;** peningkatan kesesuaian program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal terhadap dokumen perencanaan oleh SKPD dan peningkatan kerjasama dengan lembaga/instansi vertikal.

4. **Perspektif pengelolaan keuangan;** peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja pembangunan daerah terhadap peningkatan kualitas penanganan kemiskinan dan ketertinggalan berdasarkan skala prioritas.

F. Misi 6 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Adil, Peduli dan Berwibawa

Kebijakan umum yang tempuh dalam mewujudkan misi 6 adalah :

1. **Perspektif masyarakat;** peningkatan kualitas dalam proses penyusunan produk hukum sesuai dengan aspirasi masyarakat, peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan berbasis data statistik yang akurat, peningkatan kualitas pelayanan publik dalam berbagai jenis pelayanan secara adil, bersih dan peduli dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.
2. **Perspektif proses;** peningkatan hubungan yang harmonis antar Pemerintah Daerah dan DPRD dalam proses penyusunan produk hukum daerah, peningkatan kualitas kerjasama dengan BPS dalam penyediaan data statistik yang akurat untuk keperluan perencanaan pembangunan dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis SPM.
3. **Perspektif kelembagaan;** perbaikan manajemen tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kinerja kompetensi aparatur pemerintah, peningkatan manajemen kepegawaian dan pengembangan pola isentif yang efektif serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran serta peralatan kerja.
4. **Perspektif pengelolaan keuangan;** peningkatan kualitas sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan belanja pembangunan daerah yang mengarah terciptanya tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel, peningkatan kualitas dalam mengelola asset daerah secara efektif dan efisien serta peningkatan opini laporan keuangan daerah dan diikuti peningkatan jumlah PAD.

G. Misi 7 : Mewujudkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Kebijakan umum yang tempuh dalam mewujudkan misi 7 adalah :

1. **Perspektif masyarakat;** peningkatan kuantitas dan kualitas swadaya masyarakat terhadap program pembangunan nagari dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat nagari serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan dan peningkatan peran serta perantau dalam aktifitas pembangunan di nagari/desa.
2. **Perspektif proses;** peningkatan peran serta masyarakat dalam membangun infrastruktur dan suprastruktur nagari/desa, peningkatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif yang optimal dan pengembangan serta pemberdayaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nagari) yang berdaya saing. Selain itu, menggalang berbagai gagasan pembangunan dari masyarakat perantau melalui terciptanya *networking* antara pemerintah daerah dengan perantau..
3. **Perspektif kelembagaan;** peningkatan dan penguatan pemerintahan dan kelembagaan nagari/desa, peningkatan kualitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan penanganan KDRT dan peningkatan keberdayaan BUM-Nagari melalui penguatan kelembagaan.
4. **Perspektif pengelolaan keuangan;** peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja pembangunan daerah terhadap peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

G. Misi 8 : Revitalisasi Adat dan Seni Budaya Anak Nagari

Kebijakan umum yang tempuh dalam mewujudkan misi 8 adalah :

1. **Perspektif masyarakat;** peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama yang optimal dan terpadu serta peningkatan even penyelenggaraan seni budaya anak nagari yang berkesinambungan dan berkualitas.

2. **Perspektif proses;** peningkatan kualitas pemungka agama dan adat dalam rangka me-ngembalikan fungsi “*tigo tungku sajarangan, tali tigo sapilir*” dan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana seni budaya masyarakat anak nagari.
3. **Perspektif kelembagaan;** peningkatan dan pengembangan lembaga agama dan adat yang berkualitas serta pengembangan dan pemberdayaan kelompok seni budaya masyarakat anak nagari.
4. **Perspektif pengelolaan keuangan;** peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja pembangunan daerah terhadap revitalisasi adat dan seni budaya anak nagari.

7.1.1. Agenda dan Prioritas Pembangunan Daerah

A. Agenda Pembangunan Daerah

Dalam upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang dijabarkan melalui strategi dan arah kebijakan serta difokuskan dalam kebijakan umum pembangunan daerah, maka dirumuskan 8 (delapan) agenda pembangunan daerah yang merupakan kebijakan umum pembangunan yang akan dilakukan untuk mendorong proses pembangunan secara menyeluruh berdasarkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sijunjung tahun 2010-2015. Disamping itu, agenda pembangunan daerah merupakan kerangka rencana kerja yang akan dilaksanakan untuk setiap misi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tersebut.

Selain itu, agenda pembangunan jangka menengah Kabupaten Sijunjung tahun 2010-2015 juga mempedomani agenda pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014 dan Provinsi Sumatera Barat periode 2010-2015 adalah sebagai berikut :

Agenda 1: Pembangunan Ekonomi yang Tangguh

Pembangunan ekonomi yang tangguh merupakan landasan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB per-kapita, Nilai Tukar Petani (NTP) dan daya beli masyarakat serta menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka. Melalui agenda pembangunan daerah ini diharapkan berkembangnya ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan dan terjaganya ketahanan pangan daerah serta diikuti pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah dan industri olahan di sektor pertanian dan pertambangan, sehingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah di semua sektor. Fokus pembangunan daerah dalam agenda ini adalah peningkatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi lokal dan pemantapan perekonomian daerah yang berdaya saing.

Agenda 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas

Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas merupakan suatu keharusan dan landasan utama untuk terwujudnya proses pembangunan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Fokus pembangunan daerah dalam agenda ini adalah peningkatan kualitas ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pembangunan pemuda difokuskan peningkatan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, Iptek dan politik, serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia melalui penguatan kelembagaan organisasi. Di samping itu, pembangunan olahraga difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

Agenda 3: Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Dasar

Peningkatan infrastruktur dan sarana dasar merupakan unsur penunjang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai. Fokus pembangunan daerah dalam agenda ini adalah menyediakan dokumen tata ruang yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan wilayah, meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan sarana pelayanan dasar di nagari yang sesuai dengan pemanfaatan dan pengendalian ruang, meningkatkan program pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar berbasis pemberdayaan masyarakat dan mendorong terciptanya pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar yang adil dan merata di setiap nagari serta meningkatkan fungsi kota Muaro Sijunjung sebagai ibukota kabupaten yang representatif.

Agenda 4: Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pengelolaan sumber daya alam yang berbasis lingkungan hidup merupakan landasan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi dan perhatian yang lebih terhadap pemanfaatan dan penggunaan lahan yang akan diolah sumber daya alamnya, sehingga lingkungan hidup tetap terjaga dan kegiatan ekonomi tetap meningkat. Fokus pembangunan daerah dalam agenda ini adalah peningkatan dan pengelolaan potensi sumber daya alam, terutama tambang galian kategori strategis, meningkatkan pemahaman masyarakat dan dunia usaha terhadap pengelolaan tambang berbasis lingkungan dan penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lahan kritis yang berbasis masyarakat dalam menjaga daerah rawan bencana.

Agenda 5: Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal pada dasarnya tidak terlepas dari tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan terhadap agenda pembangunan pertama sampai keempat. Namun dalam agenda ini fokus pembangunan lebih diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan peningkatan keterampilan masyarakat miskin dalam kewirausahaan serta peningkatan koordinasi program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal yang lebih terukur dan sinergi.

Agenda 6: Menciptakan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Menciptakan tata pemerintah yang baik dan bersih merupakan landasan utama dalam mendorong proses pembangunan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola pemerintah daerah merupakan hal mutlak untuk dilaksanakan sesuai dengan isu-isu strategis. Fokus utama dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kinerja dan kompetensi aparatur daerah.

Agenda 7: Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan agenda penting dalam menyikapi perubahan paradigma pembangunan dewasa ini. Fokus utama dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan kemandirian masyarakat dalam menunjang proses pembangunan di nagari/desa, peningkatan kelembagaan nagari/desa yang mandiri, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan dan peningkatan dan pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif yang optimal serta peningkatan kerjasama dengan masyarakat perantau dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah.

Agenda 8: Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat dan Sosial Budaya

Peningkatan kualitas kehidupan beragama, adat dan sosial budaya merupakan landasan utama dalam mewujudkan proses pembangunan daerah sesuai dengan keinginan masyarakat. Melalui agenda pembangunan daerah ini akan dapat diwujudkan keselarasan antara ajaran agama dan budaya daerah dengan tingkah laku dan kebiasaan hidup masyarakat yang berlandaskan kepada filosofi adat Minangkabau “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*”, sehingga tercipta kehidupan agamais menuju masyarakat madani. Fokus utama dalam agenda pembangunan ini adalah peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama yang optimal dan terpadu, peningkatan dan pengembangan lembaga agama, adat dan organisasi sosial masyarakat yang berkualitas dan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana seni budaya masyarakat anak nagari.

B. Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam memfokuskan terlaksananya agenda pembangunan daerah yang terarah, maka dirumuskan prioritas pembangunan daerah sebagai penjabaran dan operasional dari masing-masing agenda pembangunan daerah tersebut. Dalam menentukan prioritas pembangunan daerah tersebut perlu mempedomani ketersediaan sumber daya daerah, sehingga ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat terwujud. Prioritas pembangunan Kabupaten Sijunjung tahun 2010-2015 sebanyak 11 (sebelas) prioritas, adalah sebagai berikut:

1. Prioritas pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat diprioritaskan kepada; a) peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian unggulan daerah meliputi; tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan berbasis agribisnis dan peningkatan stabilitas pangan daerah, b) pengembangan UMKM dan penguatan kelembagaan koperasi serta peningkatan kualitas produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang berdaya saing, c) revitalisasi pasar tradisional, d) pengembangan pasar komoditi hasil pertanian, e) pengembangan destinasi pariwisata unggulan daerah, f) restrukturisasi BUMD, dan g) peningkatan industri pengolahan sektor pertanian dan pertambangan.

2. Prioritas peningkatan iklim investasi dan usaha.

Peningkatan iklim investasi dan usaha dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, hal ini akan diprioritaskan kepada; a) peningkatan kualitas proses perizinan yang tepat dan terpadu serta transparan berbasis teknologi, b) peningkatan kuantitas dan kualitas promosi investasi, c) peningkatan produktivitas dan perlindungan tenaga kerja serta informasi kerja, dan d) peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.

3. Prioritas peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga;

Peningkatan pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter rakyat daerah yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diprioritaskan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan keselarasan antara; a) ketersediaan prasarana dan pemerataan distribusi tenaga pendidik, sehingga program wajib belajar 9 tahun dapat tercapai, b) peningkatan standar dan mutu pendidikan dalam rangka menghasilkan kualitas lulusan yang dapat bersaing dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, c) peningkatan gerakan budaya dan minat baca bagi masyarakat, d) peningkatan dan penguatan organisasi kepemudaan yang berkualitas, dan e) peningkatan aksesibilitas dan budaya serta prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

4. Prioritas peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat diprioritaskan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkecukupan gizi, sehingga tercapainya sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2015. Untuk mencapai sasaran MDGs tersebut, difokuskan kepada; a) peningkatan perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan, b) peningkatan peran aktif masyarakat dalam menciptakan pola hidup sehat bagi ibu dan anak, c) peningkatan promosi kesehatan dan perilaku hidup sehat dalam mencegah penyakit dan kejadian luar biasa, d) peningkatan kuantitas dan kualitas pemantauan status gizi buruk dan penanganan gizi buruk dan gizi kurang, dan e) peningkatan peserta KB aktif dari pasangan usia subur dan UPPKS.

5. Prioritas Peningkatan Infrastruktur dan Prasarana Dasar

Pembangunan infrastruktur dan prasarana dasar yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kehidupan sosial budaya masyarakat yang berkeadilan di Kabupaten Sijunjung dengan mendorong partisipasi masyarakat. Peningkatan infrastruktur dan prasarana dasar diprioritaskan kepada; a) peningkatan implementasi rencana pembangunan tata ruang daerah yang sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan wilayah pertumbuhan, b) peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan serta fasilitas pengamanan lalu lintas, c) peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan jaringan irigasi, d) peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan dan pengelolaan air bersih, sanitasi, jalan lingkungan nagari dan drainase serta telekomunikasi, e) penataan pembangunan perumahan dan pemukiman yang sehat, dan f) penataan ruang kawasan perkotaan Muaro Sijunjung, terutama sistem jaringan prasarana dan sarana fasilitas perkotaan

6. Prioritas Pembangunan Energi

Pemenuhan kebutuhan energi listrik di daerah untuk mendukung kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan hasil tambang perlu menjadi prioritas pembangunan. Untuk itu, pembangunan energi diprioritaskan kepada; a) peningkatan dan pengembangan sumber energi terbarukan sesuai potensi daerah dan b) peningkatan koordinasi dalam memfasilitasi pembangunan jaringan energi listrik dengan dunia usaha.

7. Prioritas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Konservasi dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berbasis lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup diprioritaskan kepada; a) peningkatan hasil produksi tambang bernilai ekonomis, b) peningkatan kualitas penertiban kegiatan rakyat dalam mengolah tambang secara terpadu c) peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan swasta dalam menjaga pencemaran air sungai, d) peningkatan sarana dan prasarana persampahan dan peran serta masyarakat, d) peningkatan kualitas penanganan lahan kritis dan pengembangan dan pengelolaan hutan pada kesatuan pengelola hutan, dan e) peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

8. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal

Dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan berkurangnya nagari dan jorong tertinggal pada tahun 2015, maka prioritas penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal difokuskan kepada; peningkatan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin secara merata, peningkatan bantuan sandang dan pangan serta jaminan sosial bagi

masyarakat miskin dan peningkatan keterampilan masyarakat miskin dalam mengembangkan ekonomi kreatif serta pengembangan pola penanggulangan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal yang efektif melalui program bedah jorong sangat tertinggal dan peningkatan pemerataan pembangunan nagari tertinggal

9. Prioritas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, disiplin, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dan tata kelola diprioritaskan kepada; a) peningkatan kualitas dalam proses penyusunan produk hukum sesuai dengan aspirasi masyarakat, b) peningkatan kompetensi dan pembinaan karir aparatur yang terarah, c) peningkatan manajemen kepegawaian dan pengembangan pola isentif yang efektif, d) peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik berbagai bidang sesuai SPM, e) peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana perkantoran dan peralatan kerja, f) peningkatan kualitas penerapan anggaran berbasis kinerja dan SIPKD serta pengelolaan aset, g) peningkatan kualitas sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan APBD, h) peningkatan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah, i) peningkatan budaya sadar hukum dan taat hukum pada masyarakat, j) peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, dan k) pengembangan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang sinergisitas.

10. Prioritas Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pembangunan Daerah

Dalam upaya percepatan pembangunan daerah, peran serta masyarakat menjadi salah satu penting dalam lima tahun mendatang, hal ini tidak terlepas dari perubahan paradigma pembangunan dewasa ini. Prioritas peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah difokuskan kepada; a) peningkatan kuantitas dan kualitas swadaya masyarakat terhadap program pembangunan nagari, b) peningkatan dan penguatan pemerintahan dan kelembagaan nagari/desa, c) peningkatan pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan, d) peningkatan kualitas unit ekonomi simpan pinjam dalam pengelolaannya, dan d) peningkatan peran serta perantau dalam aktifitas pembangunan daerah

11. Prioritas Peningkatan Kehidupan Beragama, Sosial, Adat dan Budaya

Peningkatan kehidupan Agama, sosial, adat dan budaya masyarakat yang memiliki nilai, jiwa kreativitas dan kewirausahaan serta dapat mengantisipasi kemajuan teknologi perlu ditumbuhkembangkan pada lima tahun mendatang. Oleh karena itu, diprioritaskan kepada; a) peningkatan kualitas tokoh agama dan adat serta kelembagaan b) pengembangan dan pemberdayaan kelompok seni budaya masyarakat anak nagari, dan c) peningkatan even penyelenggaraan seni budaya anak nagari yang berkesinambungan dan berkualitas.

Hubungan antara misi, agenda dan prioritas pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.1
Hubungan antara Misi, Agenda dan Prioritas Pembangunan Daerah

	Misi	Agenda	Prioritas Pembangunan Daerah
1.	Mewujudkan penataan dan penguatan ekonomi masyarakat.	Pembangunan ekonomi yang tangguh.	1. Pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat. 2. Peningkatan iklim investasi dan usaha.
2.	Meningkatkan Kecerdasan, Keterampilan dan Kesehatan serta IMTAQ SDM Anak Nagari.	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas.	3. Peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga. 4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
3.	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur serta Prasarana Dasar Nagari	Peningkatan infrastruktur dan sarana dasar.	5. Peningkatan infrastruktur dan prasarana dasar. 6. Pembangunan energi.
4.	Pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung.	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.	7. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
5.	Mengentaskan Kemiskinan dan Ketertinggalan.	Pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal.	8. Penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal.
6.	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Adil, Peduli dan Berwibawa.	Menciptakan tata pemerintahan yang baik dan bersih.	9. Reformasi birokrasi dan tata kelola.
7.	Mewujudkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan.	Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.	10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah
8.	Revitalisasi Adat dan Seni Budaya Anak Nagari.	Peningkatan kualitas kehidupan beragama, adat, dan sosial budaya	11. Peningkatan kehidupan beragama, sosial, adat dan budaya

Sedangkan sinkronisasi antara prioritas pembangunan Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 dengan prioritas nasional tahun 2010-2014 dan prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.2
Sinkronisasi antara Prioritas Nasional, Prov. Sumatera Barat dengan Prioritas Kabupaten Sijunjung

Prioritas Nasional	Prioritas Prov. Sumbar	Prioritas Kab. Sijunjung
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.	1. Pengamalan Agama dan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat	1. Pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat. (Nas; 5 dan Prov.; 5,6,7)
2. Pendidikan	2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dlm Pemerintahan	2. Peningkatan iklim investasi dan usaha. (Nas; 7 dan Prov.; 6)
3. Kesehatan	3. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	3. Peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga. (Nas; 2,11 dan Prov.; 3)
4. Penanggulangan Kemiskinan	4. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. (Nas; 3 dan Prov.; 4)
5. Ketahanan Pangan	5. Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan	5. Peningkatan infrastruktur dan prasarana dasar. (Nas; 6 dan Prov.; 9)
6. Infrastruktur	6. Pengembangan Industri Olahan dan Perdagangan	6. Pembangunan energi. (Nas; 8 dan Prov.; 9)
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha	7. Pengembangan Kawasan Wisata Alam dan Budaya	7. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. (Nas; 9 dan Prov.; 10)
8. Energi	8. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran, Kemiskinan dan Daerah Tertinggal.	8. Penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal. (Nas; 10 dan Prov.; 8)
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	9. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat	9. Reformasi birokrasi dan tata kelola. (Nas; 1 dan Prov.; 2)
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik	10. Mitigasi, Penanggulangan Bencana Alam & Pelestarian Lingkungan Hidup	10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi		11. Peningkatan kehidupan beragama, sosial, adat dan budaya (Nas; 11 dan Prov.; 1)

7.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat. Pelaksanaan program-program pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, sesuai dengan visi dan misi RPJMD. Guna mencapai misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan arah kebijakan serta agenda dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan Kabupaten Sijunjung untuk kurun waktu lima tahun kedepan berdasarkan prioritas pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 7.3
Kebijakan Umum, Prioritas dan Program Pembangunan Untuk Misi 1 : Mewujudkan Penataan dan Penguatan Ekonomi Masyarakat

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 1 : Pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat									
1. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu komoditi sektor unggulan pertanian meliputi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan	1. Mengoptimalkan penggunaan lahan melalui revitalisasi pertanian dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk peningkatan ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan.	1. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian	-Meningkatnya produksi tanaman pangan unggulan ; • Padi • Jagung • Ubi kayu -Meningkatnya produksi tanaman hortikultura unggulan; • Manggis • Durian -Meningkatnya produksi perkebunan unggulan; • Karet • Klp.Sawit • Coklat -Meningkatnya produktivitas pangan unggulan; • Padi • Jagung • Ubi kayu	ton/th ton/th ton/th ton/th ton/th ton/ha ton/ha ton/ha ton/ha ton/ha ton/ha	102.364 1.658 1.187 3.547 1.353 64. 216 44.835 1.248 5,00 5,88 24,22	135.199 3.780 2.278 4.675 4.180 87.537 5.722 1.699 5,40 6,30 25,00	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Pertanian	Distambun

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 1 : Pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat									
1. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu komoditi sektor unggulan pertanian meliputi: tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan	1. Mengoptimalkan penggunaan lahan melalui revitalisasi pertanian dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk peningkatan ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan.	1. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian	-Meningkatnya produktivitas tanaman hortikultura unggulan;	ton/ha	25,6	27,5	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Pertanian	Distambun
			• Manggis	ton/ha	36,00	38,00			
			-Meningkatnya produktivitas perkebunan unggulan;	ton/ha	2,79	3,00			
			• Karet	ton/ha	3,00	7,00	Program Peningkatan Produksi Hasil peternakan	Pertanian	Disnakkan
			• Klp.Sawit	ton/ha	0,80	1,3			
			• Coklat	ton/ha					
			- Meningkatnya produksi hasil peternakan;	ton	404	600	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Pertanian	Disnakkan
			• Daging sapi/kerbau	ton	47	75			
			• Daging kambing/domba	ton	1.364	1.550			
			• Daging unggas	ton	429	470			
			• Telur unggas	ton					
			- Menurunnya tingkat kematian ternak	%	10	5			

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 1 : Pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat									
1. Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu komoditi sektor unggulan pertanian meliputi: tanaman pangan, Hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan	1. Mengoptimalkan penggunaan lahan melalui revitalisasi pertanian dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk peningkatan ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan.	2. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian	- Meningkatnya panjang JUT	km	50	110	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan	Pertanian	Distambun
			- Meningkatnya jalan produksi	km	25	53			
			- Meningkatnya cakupan JIDES	ha	1.500	5.057			
		3. Peningkatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat	- Meningkatnya jml embung	unit	8	24	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kehutanan	Dishut
			- Berkembangnya luas hutan nagari/desa	Ha	-	12.000			
			- Pembangunan HTR	ha	-	2.550			
2. Meningkatnya swasembada pangan daerah	1. Mengoptimalkan penggunaan lahan melalui revitalisasi pertanian dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk peningkatan ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan.	1. Peningkatan ketahanan pangan terutama beras, daging dan ikan	- Meningkatnya ketersediaan pangan utama;				Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan/ Peternakan/Perikanan	Ketahanan Pangan	BP4KKP
			• Beras	Ton/th	54.550	55.750			
			• Daging	Ton/th	1.815	2.225			
			• Telur	Ton/th	415	513			
			- Meningkatnya jumlah DMP	Nagari /Desa	10	16			
			- Meningkatnya jumlah cadangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	ton	20	40			
		2. Peningkatan kemampuan lembaga petani secara kuantitas dan kualitas	Meningkatnya jumlah kelompok tani yang berkualitas	Keltan	797	1.400	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertanian	BP4KKP

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 1 : Pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat									
2. Meningkatnya swasembada pangan daerah	1. Mengoptimalkan penggunaan lahan melalui revitalisasi pertanian dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk peningkatan ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan.	3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyuluh pertanian	- Meningkatnya sarana penyuluh di kec. (BPP Model) - Meningkatnya jumlah tenaga penyuluh	unit orang	3 131	8 150	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan/Peternakan/Perikanan/Kehutanan	Pertanian	BP4KKP
3. Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan usaha pertanian	1. Mengoptimalkan penggunaan lahan melalui revitalisasi pertanian dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk peningkatan ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan.	1. Peningkatan manajemen pengelolaan usaha tani baik dari aspek budidaya, pengolahan hasil pasca panen dan pemasaran 2. Peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian, perikanan dan kehutanan.	- Meningkatnya kemampuan UP3HP - Meningkatnya produksi perikanan budidaya - Meningkatnya jumlah ternak yang terjual - Terbentuknya kerjasama antara Gapoktan dengan pengusaha agribisnis - Meningkatnya jumlah kelompok pengolah perikanan	klpk ton ekor/ thn Nota kerja sama klpk	10 5.078 15.000 - -	50 12.711 25.000 2 13	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi Peternakan Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Pertanian Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan	Distambun Disnakkan Disnakkan Distambun Disnakkan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 1 : Pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat									
3. Meningkatnya kesejahteraan petani melalui pengembangan usaha pertanian	1. Mengoptimalkan penggunaan lahan melalui revitalisasi pertanian dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk peningkatan ekonomi serta mengurangi tingkat kemiskinan.	2. Peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian, perikanan dan kehutanan. 3. Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dan pemasaran pertanian, perikanan dan kehutanan.	- Meningkatnya produksi pemanfaatan hasil hutan	Komoditi	-	4	Program Peningkatan pelayanan dan pemanfaatan hutan dan industri hasil hutan	Kehutanan	Dishut
			- Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan hasil kayu dan non kayu	izin	1	4			
			- Tersedianya gudang komoditi	unit	-	2			
			-Meningkatnya jumlah pasar ikan higienis	Unit	-	7	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Kelautan dan Perikanan	Disnakkam
4. Terciptanya kawasan pertanian yang terpadu	1. Mengembangkan kawasan pertanian yang terpadu sebagai sentra perekonomian rakyat.	1. Pengembangan kawasan agropolitan	- Tersedianya Masterplan agropolitan	dok	-	1	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
			- Terciptanya akses perhubungan • Jalan • Jembatan	Km unit	- -	2 1	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 1 : Pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat									
5. Terciptanya tata niaga pemasaran hasil pertanian yang berdaya saing guna terlindungi produsen dan konsumen hadap harga dan barang	1. Mengembangkan pasar sebagai penunjang pemasaran komoditas unggulan pertanian	1. Revitalisasi dan pengembangan pasar tradisional 2. Peningkatan perlindungan harga dan barang terhadap produsen dan konsumen	Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4,47	6,54	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perdagangan	Diskopperindag
			Menurunnya tingkat pelanggaran atas barang yang diedarkan sesuai peraturan perundang-undangan	%	75,00	50,00		Perdagangan	Diskopperindag
6. Meningkatnya pemberdayaan Koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah	1. Mengembangkan UMKM dan koperasi melalui peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan untuk memanfaatkan potensi pasar.	1. Peningkatan kualitas manajemen UMKM dan penguatan kelembagaan koperasi 2. Peningkatan kemitraan bisnis bagi UMKM dan Koperasi	- Meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki izin	unit	129	214	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Koperasi & Usaha Kecil Menengah	Diskopperindag
			- Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif	%	27,00	51,40			
7. Meningkatnya hasil produksi industri kecil dan menengah yang berdaya saing	1. Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna untuk peningkatan daya saing produk	1. Peningkatan pembinaan manajemen usaha bagi Industri kecil dan menengah	Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor Industri	%	5,04	6,11	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Industri	Diskopperindag

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 1 : Pengembangan dan penguatan ekonomi masyarakat									
8. Berkembangnya sektor pariwisata daerah	1. Mengembangkan sektor pariwisata yang berdaya saing dan berbasis masyarakat	1. Penyusunan kajian objek wisata unggulan daerah	Tersedianya RIPPDA yang telah ditetapkan	Perda	-	1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Parawi-sata	Disparsenibudpora
		2. Pengembangan nagari/desa wisata	Meningkatnya jumlah nagari/desa wisata	Nag/desa	1	3	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Disparsenibudpora
		3. Peningkatan kualitas layanan dan promosi pariwisata daerah	Meningkatnya jumlah even promosi wisata	Even/thn	1	4	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Parawisata	Disparsenibudpora
9. Meningkatnya Industri pengolahan sektor pertanian dan pertambangan.	1. Meningkatkan penggunaan lptek untuk pengelolaan potensi SDA	1. Peningkatan penerapan lptek untuk industri pengolahan sektor pertanian dan pertambangan.	Terwujudnya industri pengolahan sektor pertanian	unit	-	1	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Industri	Diskopperindag
10. Berkembangnya kawasan transmigrasi dalam mendorong perekonomian daerah	1. Pengembangan potensi wilayah untuk meningkatkan daya saing daerah	1. Pengembangan kawasan transmigrasi secara terpadu	Meningkatnya luas kawasan transmigrasi	ha	28.324	30.573	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Ketransmigrasian	Disosnakertrans
11. Meningkatnya kontribusi BUMD dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah.	1. Meningkatkan pengelolaan sumber-sumber PAD melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berdaya saing.	1. Peningkatan manajemen BUMD yang berdaya saing	Terwujudnya BUMD yang sehat	Persh.	-	1	Program Fasilitasi dan penguatan modal BUMD	Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu, Kepegawaian & Persandian	Setdakab (Bag Adm. Perekonomian)

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 2 : Peningkatan iklim investasi dan usaha									
12 Meningkatnya nilai investasi dunia usaha	1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi.	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas promosi investasi	- Meningkatnya even promosi investasi	even	1	4	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penana-man Modal	Badan LH, PM dan PT
			- Meningkatnya jumlah investor	Persh.	3.534	4.000	Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi	Penanaman Modal	Badan LH, PM dan PT
			- Berkurangnya lama proses perizinan;	Hr kj	5	1			
		2. Peningkatan kualitas proses perizinan yang tepat dan terpadu serta transparan berbasis teknologi	• IKM	Hr kj	66	14	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Disosnakertrans
			• Industri Besar	Hr kj	30.128	125.000			
			- Meningkatnya nilai investasi PMDN/PMA	MRp					
		3. Peningkatan produktivitas dan perlindungan tenaga kerja dan informasi pasar dan bursa kerja	- Meningkatnya jumlah tenaga kerja siap pakai	orang	160	226	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Ketenagakerjaan	Disosnakertrans
			- Rasio tng. kerja ditempatkan	%	-	15,00			
			- Tersedianya data dan informasi bursa kerja	dok.	1	1	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Disosnakertrans
- Berkurangnya sengketa tng. kerja dgn perusahaan	Sengketa		10	2					
- Berkurangnya kasus kecelakaan kerja	kasus		5	0					

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 2 : Peningkatan iklim investasi dan usaha									
12 Meningkatnya nilai investasi dunia usaha	1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, sehingga meningkatnya pertumbuhan ekonomi.	4. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan	- Berkurangnya kasus-kasus : • Pertikaian antar warga • Unjuk rasa	kali kali	1 2	0 0	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Kesbang & Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol Linmas & Satpol PP

Tabel 7.4

Kebijakan Umum, Prioritas dan Program Pembangunan Untuk Misi 2 : Meningkatkan Kecerdasan, Keterampilan dan Kesehatan serta IMTAQ SDM Anak Nagari

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 3: Peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga									
1. Meningkatnya pemerataan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan pendidikan.	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	1. Peningkatan perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini	Meningkatnya kualitas ketersediaan & pelayanan pendidikan :	slkh	286	302	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah layanan PAUD • APK • APM 				-		
		2. Peningkatan perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar dalam upaya menuntaskan program wajib belajar 9 tahun	Meningkatnya kualitas ketersediaan & pelayanan pendidikan yang di ukur melalui :				Program Wajib Belajar 9 Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			SDM :						
			• Rasio sekolah thdp pddk. Usia sekolah		67,82	82,05			
			• Rasio guru thdp murid		70,36	66,80			
			• APK		111,69	115,40			
			• APM		98,93	99,90			

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 3: Peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga									
1. Meningkatnya pemerataan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan pendidikan.	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	2. Peningkatan perluasan dan pemerataan akses pendidikan dasar dalam upaya menuntaskan program wajib belajar 9 tahun	SMP/MTSN : <ul style="list-style-type: none"> • Rasio sekolah thdp pddk. Usia sekolah • Rasio guru thdp murid • APK • APM 		48,44	64,11	Program Wajib Belajar 9 Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					70,36	66,80			
		3. Peningkatan perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah	Meningkatnya kualitas ketersediaan & pelayanan pendidikan diukur melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Rasio sekolah thdp pddk. Usia sekolah • Rasio guru thdp murid • APK • APM 		90,16	94,50	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
					67,61	85,40			
4. Peningkatan kualitas pemberian bea siswa untuk siswa miskin	Meningkatnya jumlah penerima bea siswa	siswa		2.100	2.700	Program dana bansos		Dinas Pendidikan	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 3: Peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga									
1. Meningkatnya pemerataan ketersediaan, keterjangkauan dan kesetaraan pendidikan.	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	5. Pengembangan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan	- Meningkatnya lulusan pendidikan kesetaraan : • Paket A • Paket B • Paket C - Meningkatnya kelp pendidikan keaksaraan	siswa siswa siswa Kelp.	25 50 60 210	140 200 340 255	Program Pendidikan Formal dan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		6. Peningkatan pembinaan sekolah swasta	Berkembangnya sekolah swasta	sklh.	115	120			
2. Meningkatnya mutu pendidikan yang berbasis Iman dan Taqwa serta penguatan tata kelola pendidikan yang baik	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	1. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya jumlah guru memperoleh sertifikasi setiap tingkatan pendidikan : • PAUD • SD/MI • SMP/MTSN • SMA/SMK/MA	orang orang orang	2 102 49 38	30 850 407 300	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2. Penerapan standar kompetensi kelulusan setiap jenjang pendidikan	- Meningkatnya nilai rata-rata UN setiap jenjang pendidikan : • SD/MI • SMP/MTsN • SMA/SMK/MA	% % %	6,85 5,60 6,60	7,25 6,90 6,95	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab		
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir					
Prioritas 3: Peningkatan kualitas pendidikan, pemuda dan olahraga											
4. Meningkatnya kemandirian pemuda, dan prestasi olahraga daerah	1. Meningkatkan keterampilan penduduk usia produktif untuk mencegah pengaruh budaya negatif	1 Peningkatan aksesibilitas pemuda dalam berorganisasi	- Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan	Karang Taruna	60	110	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas budpora	Parseni-	
			- Meningkatnya jumlah pemuda pelopor	orang	8	43					
			2 Peningkatan aksesibilitas dan pembinaan budaya olahraga serta prestasi	- Meningkatnya jml sarana & prasarana olahraga	unit	644	675	Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas budpora	Parseni-
				- Meningkatnya jumlah Cabor dlm kompetisi olahraga tk. kabupaten	cabor	5	10				
- Meningkatnya prestasi olahraga Kab. Sji di Porprov	peringk.	15 besar	10 besar								
- Meningkatnya prestasi Ca-bor unggulan daerah :	prestasi prestasi prestasi	Div. II - -	Div. Utm. 1 Nas. 1 Prov.								
			• Sepak Bola • Catur • Bola Basket								

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 4: Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan									
5. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan kesehatan.	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pemerataan pelayanan kesehatan	-Meningkatnya rasio fasilitas kesehatan dasar per 1.000 penduduk		0,98	1,00	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			-Meningkatnya jumlah Puskesmas terakreditasi	unit	0	2			
			-Meningkatnya Pustu plus	unit	0	3			
			-Rasio fasilitas kesehatan pelayanan rujukan (RSU) per 30.000 pddk		0	0,15			
		2. Peningkatan manajemen dan pelayanan kesehatan	Tersedianya kebutuhan obat di tingkat pelayanan dasar	%	100	100	Program obat dan perbekalan kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			- Meningkatnya cakupan pelayanan pdd miskin :				Program Kemitraan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			• Dasar	%	4,76	85,00			
• Rujukan	%	0,35	7,00						
- Meningkatnya cakupan pelayanan Lansia	%	36,24	50,00	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Kesehatan	Dinas Kesehatan			

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 4: Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan									
5. Meningkatnya keterjangkauan pelayanan kesehatan.	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	3. Peningkatan SDM pelayanan	Meningkatnya rasio dokter umum per 100.000 penduduk		0,29	0,50	Program peningkatan SDM pelayanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
6. Menurunnya jumlah kematian ibu, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA).	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu, bayi dan balita.	- Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan	%	72,32	98,00	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			- Meningkatnya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	45,04	50,00			
			- Meningkatnya cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	83,88	90,00			
			- Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	%	73,62	90,00			
		2. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam menangani ibu melahirkan	- Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	%	76,01	90,00	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 4: Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan									
6. Menurunnya jumlah kematian ibu, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKBA).	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	1. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam menangani ibu melahirkan	- Meningkatnya cakupan kunjungan bayi	%	96,60	98,00	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
7. Meningkatnya lingkungan sehat dan pola hidup sehat	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	1. Peningkatan promosi kesehatan	Meningkatnya PHBS di RT	%	48,00	80,00	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD
		2. Pengembangan Nagari/Desa SIAGA	Meningkatnya cakupan nagari/ desa SIAGA aktif	%	49,00	80,00	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD
		3. Peningkatan dan pengembangan lingkungan sekolah dan masyarakat yang sehat	- Meningkatnya Cakupan sekolah sehat - Berkembangnya pddk. yg menggunakan jamban sehat	%	25,28	70,00	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan RSUD
			- Meningkatnya nagari yg telah melaksanakan kawasan sehat	%	-	80,00	Program pengembangan lingkungan sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 4: Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan									
7. Meningkatnya lingkungan sehat dan pola hidup sehat	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	4. Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	• Meningkatnya penanganan penderita diare	%	76,60	100,00	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			• Meningkatnya penanganan penyakit DBD	%	100,00	100,00			
			• Meningkatnya cakupan penanganan KLB di nagari	%	100,00	100,00			
			• Meningkatnya cakupan jorong UCI	%	79,13	90,00			
		5. Peningkatan kualitas kesehatan anak usia sekolah	Meningkatnya penerima makanan tambahan anak sekolah	Siswa/thn	7.455	8.000	Program Pengembangan dan pembinaan kesehatan masyarakat	Otda, Pemerintah	Setdakab BPMPN
8. Menurunnya angka gizi buruk	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	1. Peningkatan kualitas pemantauan status gizi Balita dan penanganan kasus gizi buruk.	- Menurunnya Prevalensi balita gizi buruk	%	8,48	4,00	Program perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 4: Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan									
8. Menurunnya angka gizi buruk	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	1. Peningkatan kualitas pemantauan status gizi Balita dan penanganan kasus gizi buruk.	- Meningkatnya cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	%	100,00	100,00	Program perbaikan gizi masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
9. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat melalui perluasan akses, mutu dan penguatan tata kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan	1. Peningkatan peserta KB aktif dari pasangan usia subur dan UPPKS	- Terkendalinya laju pertmb. Penduduk - Prevelensi peserta KB aktif : • PUS • UPPKS	%	1,08	1,00	Program Keluarga Berencana	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Kantor PP & KB
		2. Peningkatan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR)	Meningkatnya pengetahuan Remaja tentang KKR	%	75,00	77,00	Program Pelayanan Kontrasepsi		
				%	61,01	70,00	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR		
				%	50	100			

Tabel 7.5
Kebijakan Umum, Prioritas dan Program Pembangunan Untuk Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur serta Prasarana Dasar Nagari

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 5: Peningkatan Infrastruktur dan Prasarana Dasar									
1. Terwujudnya penataan dan pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya	1.. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai fungsi wilayah	1. Penyusunan dokumen tata ruang	Tersedianya Perda tata ruang • RTRW • RDTR	Perda Perda	- -	1 2	Program Perencanaan Tata Ruang	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
		2. Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap pemanfaatan ruang	Meningkatnya jumlah bangunan memiliki IMB	IMB	48	750	Program Pengendalian dan pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum	Dinas PU
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi di setiap nagari.	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar di setiap nagari untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.	1. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan serta fasilitas pengamanan lalu lintas	- Rasio panjang jalan telah dibangun terhadap luas wilayah - Meningkatnya panjang jalan yg dibangun - Meningkatnya jumlah jembatan permanen yang dibangun - Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik - Meningkatnya jml rambu lalin	% km unit %	37,09 666,25 132 42,33 50	38,82 732,10 149 86,04 1.106	Pogram Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Perhubungan	Dinas PU Dinas PU Dishubkominfo

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
Prioritas 5: Peningkatan Infrastruktur dan Prasarana Dasar										
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi di setiap nagari.	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar di setiap nagari untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.	1. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan serta fasilitas pengamanan lalu lintas	- Mengoptimalkan pemeliharaan sarpras kebinamargaan	%	75	85	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Pekerjaan Umum	Dinas PU	
			2. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perkotaan sampai ke nagari	- Meningkatnya jumlah angkutan kota/ pedesaan	Izin trayek	25	50	Program Pelayanan Angkutan Umum	Perhubungan	Dishubkominfo
				- Berkembangnya terminal angkutan kelas A	%	50	100	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Perhubungan	Dishubkominfo
				- Berkurangnya lama pengujian kelayakan	menit	15	5	Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Perhubungan	Dishubkominfo
				- Berkurangnya kasus kecelakaan Lalin	kasus	96	25	Program pengendalian / peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Perhubungan	Dishubkominfo

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
Prioritas 5: Peningkatan Infrastruktur dan Prasarana Dasar										
2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi di setiap nagari	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar di setiap nagari untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.	3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengelolaan jaringan irigasi.	- Meningkatnya rasio layanan jaringan irigasi	%	57,26	59,70	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Program Penyediaan dan pengolahan air baku	Pekerjaan Umum	Dinas PU	
			- Meningkatnya jaringan irigasi stgh teknis yang dibangun	unit	12	38				
		4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembangunan dan pengelolaan air bersih, sanitasi, drainase dan jalan lingkungan nagari	- Meningkatnya panjang jalan lingkungan nagari yang baik	- Meningkatnya panjang jalan lingkungan nagari yang baik	meter	-	36.252	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
				- Meningkatnya cakupan layanan air bersih	%	48,31	74,16	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah	Pekerjaan Umum	Dinas PU
				- Meningkatnya cakupan RT bersanitasi	%	35,39	67,70			
5. Penataan pembangunan perumahan dan pemukiman yang sehat	- Meningkatnya panjang drainase	- Meningkatnya panjang drainase	meter	10.000	18.887	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pekerjaan Umum	Dinas PU		
		Meningkatnya jumlah kawasan perumahan yang sehat	kwsan	5	16	Program Lingkungan sehat perumahan	Pekerjaan Umum	Dinas PU		

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 5: Peningkatan Infrastruktur dan Prasarana Dasar									
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi di setiap nagari.	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar di setiap nagari untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.	6. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan dunia usaha dalam upaya pemerataan jangkauan layanan komunikasi.	Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi pedesaan	%	80,00	100,00	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	Komunikasi dan Informatika	Dishubkominfo
3. Meningkatnya fungsi Kota Muaro Sijunjung sebagai ibukota kabupaten yang representatif.	1. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai fungsi wilayah	1. Penataan ruang kawasan perkotaan Muaro Sijunjung dan ibukota kec. terutama sistem jaringan prasarana dan sarana fasilitas perkotaan	- Tersedianya Perda RDTR - Mengoptimalkan koordinasi perencanaan bid.fisik	Perda %	- 40	1 100	Program Perencanaan Tata Ruang Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
Prioritas 6: Pembangunan Energi									
3. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik setiap nagari dan jorong	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar di setiap nagari untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal	1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan energi listrik setiap nagari dan jorong 2. Peningkatan koordinasi dalam memfasilitasi pembangunan jaringan energi listrik dengan pihak ketiga	Meningkatnya jumlah PLTMH Meningkatnya cakupan energi listrik pedesaan	unit %	1 84,23	4 100,00	Program Pengembangan dan Pembinaan Bidang Ketenagalistrikan	Energi dan Sumber Daya Alam	Distamben

Tabel 7.6
Kebijakan Umum, Prioritas dan Program Pembangunan Untuk Misi 4 : Pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan rakyat dan masyarakat Sijunjung

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 7: Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup									
1. Meningkatnya pemanfaatan hasil tambang berwasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Menerapkan regulasi yang berwawasan lingkungan	1. Peningkatan hasil produksi tambang bernilai ekonomis 2. Peningkatan kualitas penertiban kegiatan rakyat dalam mengolah tambang secara terpadu	- Meningkatnya produksi hasil tambang - Meningkatnya luas lahan studi geologi sumber daya mineral Berkurangnya aktivitas Penambangan Tanpa Izin	Ton/thn ha Ha	159,543 - 25	300.000 300,00 5	Program Pembinaan dan Pengawasan tambang Program Studi Geologi dan Sumberdaya Mineral Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak Lingkungan	Energi dan Sumber daya mineral	Dinas Tamben
2. Terjaganya kualitas air sungai dan air tanah	2. Memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya aparatur untuk mencegah kerusakan	1. Peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan swasta dalam menjaga pencemaran lingkungan 2. Peningkatan cadangan sumber air tanah berbasis masyarakat	Berkurangnya pencemaran air sungai Meningkatnya jumlah sumur resapan	% unit	80,00 10	30,00 20	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup	Badan LH,PM & PT Badan LH,PM & PT
3. Terjaganya kebersihan lingkungan yang bersih, asri dan nyaman	1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.	1. Peningkatan prasarana persampahan dan peran serta masyarakat 2. Pengembangan ruang terbuka hijau yang asri dan nyaman	Meningkatnya cakupan penanganan sampah Berkembangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	% lokasi	44,44 -	90,00 3	Program Pengembangan kinerja Pengelolaan sampah Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup	Badan LH,PM & PT Badan LH,PM & PT

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 7: Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup									
4. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan kritis yang berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan potensi sumber daya hutan untuk mengantisipasi bencana dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan daya saing ekonomi	1. Peningkatan kualitas penanganan lahan kritis	Meningkatnya jumlah hutan dan lahan yg di-rehabilitasi	ha	1.272	7.136	Program Rehabilitasi Hutan dan lahan	Kehutanan	Dishut
			- Berkurangnya perambahan hutan dari <i>illegal logging</i>	kasus	5	3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Dishut
			- Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaran	Titik api	4	58			
			- Meningkatnya pengamanan hutan berbasis masyarakat	nagari	1	8	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Kehutanan	Dishut
			- Berkurangnya kasus bencana alam (longsor)	kasus	14	0	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban bencana	Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian	BPBD
- Berkurangnya kasus kebakaran	kasus	19	0						
- Optimalisasi penanganan bencana	%	75,00	90,00	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian	BPBD			

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 7: Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup									
4. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan dan lahan kritis yang berwawasan lingkungan	1. Meningkatkan potensi sumber daya hutan untuk mengantisipasi bencana dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan daya saing ekonomi	4. Pengembangan dan pengelolaan hutan pada kesatuan pengelola hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya KPHL model - Meningkatnya pemertapan kwsn. hutan : <ul style="list-style-type: none"> • Tata batas • Perubahan fungsi kawasan hutan - Meningkatnya pengelolaan kws. hutan oleh KPHL 	 unit Km ha ha	-	1	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Kehutanan	Dishut
					221.191,78	141 172.226,65			
					-	150.492			

Tabel 7.7
Kebijakan Umum, Prioritas dan Program Pembangunan Untuk Misi 5 : Mengentaskan Kemiskinan dan Ketertinggalan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab	
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
Prioritas 8: Penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal										
1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar di setiap nagari untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal.	1. Peningkatan ketersediaan rumah layak huni dan menerima program sosial bagi masyarakat miskin secara merata	-Meningkatnya ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat miskin	unit/thn	102	204	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas	Sosnake-trans
			-Meningkatnya penyandang cacat dan Lansia menerima jaminan sosial	%	48,54	75,70				
		2. Peningkatan bantuan sandang dan pangan serta jaminan sosial bagi masyarakat miskin	-Meningkatnya jumlah penerima beras miskin	RTSM	9.106	13.198	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Sosial	Dinas	Sosnake-trans
			-Meningkatnya jmlh kelompok menerima program sosial	KUBE	125	140				
	-Meningkatnya jumlah sarana sosial	unit	4	5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Sosial	Dinas	Sosnake-trans		
	-Meningkatnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	RTSM	-	4.500	Program Perlindungan Sosial bagi Keluarga Miskin	Sosial	Dinas	Sosnake-trans		

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 8: Penanggulangan kemiskinan dan daerah tertinggal									
2. Meningkatnya keterampilan masyarakat miskin dalam kewirausahaan	1. Meningkatkan investasi dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan	1. Peningkatan keterampilan masyarakat miskin dalam berwirausaha	- Meningkatnya jumlah peserta pelatihan; • Mekanik • Menjahit - Persentase peserta pelatihan berwirausaha	orang orang %	160 160 5	262 246 40	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Sosnakertrans
		2. Peningkatan akses masyarakat miskin dalam memperoleh mitra usaha	Meningkatnya peserta pelatihan ke-mitraan bagi keluarga miskin	KK /thn	-	100	Program Pengembangan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat	Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian	Setdakab (Bag. Adm. Kesra)
3. Keluarnya Kabupaten Sijunjung dari kategori daerah tertinggal	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar di setiap nagari untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal	1. Pengembangan program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal secara terpadu dan lintas sektoral	Terwujudnya program bedah jorong sangat tertinggal Menurunnya jumlah nagari tertinggal	Jorong Nagari	- 29	3 0	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan	Bappeda Bappeda

Tabel 7.8
Kebijakan Umum, Prioritas dan Program Pembangunan Untuk Misi 6 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Adil, Peduli dan Berwibawa

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 9: Reformasi birokrasi dan tata kelola									
1. Meningkatnya jumlah dan kualitas produk hukum daerah yang aspiratif dan akomodatif.	1. Menyusun dan menerapkan produk hukum daerah yang adil dan bijaksana kepada seluruh elemen masyarakat.	1. Peningkatan ketersediaan produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan daerah	Meningkatnya jumlah produk hukum yang ditetapkan : • Perda • Perbup	Dokm. Dokm.	11 40	70 165	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian	Setdakab (Bag Hukum & HAM) Setwan
2. Meningkatnya kualitas perlindungan hukum dan HAM bagi masyarakat	1. Menyusun dan menerapkan produk hukum daerah yang adil dan bijaksana kepada seluruh elemen masyarakat.	1. Peningkatan budaya sadar hukum dan taat hukum pada masyarakat 2. Peningkatan kualitas penyuluhan hukum dan HAM terhadap masyarakat	Meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum Meningkatnya peserta penyuluhan hukum	orang/ tahun orang/ tahun	75 1.000	100 1.500	Program Mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian	Setdakab (Bag Hukum & HAM)
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi	1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.	1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu	- Meningkatnya partisipasi masyarakat dlm Pemilu : • Pilleg & Pilpres • Pilkada - Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesatuan	% % Org/ thn	64,12 67,02 60	75,00 75,00 250	Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kesbang & Politik Dalam Negeri Kesbang & Politik Dalam Negeri	Kantor Kesbangpol & Linmas Kantor Kesbangpol & Linmas

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 9: Reformasi birokrasi dan tata kelola									
4. Meningkatnya kinerja dan kompetensi aparatur daerah	1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam memahami kebijakan pemerintah secara dinamis	1. Peningkatan kompetensi aparatur	Meningkatnya jumlah aparatur dalam meningkatkan kompetensi melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Diklat jabatan • Diklat fungsional • Bintek • Lainnya Terwujudnya Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	orang	40	61	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian	Seluruh SKPD
				orang	37	120			
				orang	42	105			
				orang	20	35			
				SKPD	-	4			
		2. Peningkatan manajemen kepegawaian dan pengembangan pola isentif yang efektif	- Optimalisasinya penerapan SIM-PEG - Meningkatnya jumlah PNS yang dapat penghargaan : <ul style="list-style-type: none"> • Satyalencana karya satya • Berprestasi - Meningkatnya jumlah PNS tugas belajar & ujian dinas - Berkurangnya jumlah PNS yang melanggar disiplin	%	30	100	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian	BKD
				orang	103	120			
				orang	-	35			
				orang	285	400			
				orang	6	0			

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 9: Reformasi birokrasi dan tata kelola									
4. Meningkatnya kinerja dan kompetensi aparatur daerah	1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam memahami kebijakan pemerintah secara dinamis	2. Peningkatan kuantitas dan kualitas organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan daerah	- Berkembangnya jumlah OPD sesuai kebutuhan : • Bagian Setdakab & Sekwan • Badan • Dinas • Kantor/RSUD • Kecamatan - Tersedianya Analisa Jabatan untuk mengisi formasi OPD	unit unit unit unit Dok.	11 6 13 5 8 -	12 8 13 4 8 1	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian	Setdakab (Bag Organisasi & Pers.)
5. Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran serta peralatan kerja.	1. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana perkantoran dan peralatan kerja	- Bertambahnya jumlah gedung perkantoran yang memadai - Meningkatnya proporsi jmlh peralatan kerja thdp jumlah aparatur - Mengoptimalkan pemeliharaan sarana perkantoran	unit % %	- 50 90	8 90 100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian	Seluruh SKPD

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 9: Reformasi birokrasi dan tata kelola									
6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik berbagai bidang sesuai SPM	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Meningkatnya jumlah sertifikat Prona yang diterbitkan - Berkurangnya kasus konflik tanah - Meningkatnya persentase penduduk memiliki administrasi kependudukan; <ul style="list-style-type: none"> • e- KTP • Akte Kelahiran - Meningkatnya Arsip yang diselamatkan - Meningkatnya cakupan layanan informasi pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Serti- fikat kasus % % % % 	<ul style="list-style-type: none"> 0 146 4 0 60,48 10,50 40 	<ul style="list-style-type: none"> 70-80 500 0 100 100 80,00 100 	<ul style="list-style-type: none"> Program pengendalian dan evaluasi penerapan SPM (<i>usulan program baru diluar Permendagri 13/2006</i>) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Program penataan administrasi kependudukan Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian Kependudukan & Capil Kearsipan Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian 	<ul style="list-style-type: none"> Setdakab (Bag Organisasi & Pers.) Setdakab (Bag Adm. Pemerintahan) Setdakab (Bag Adm. Pemerintahan) Dinas Duk & Capil Kantor Perpustakaan, Kearsipan & Dok. Setdakab (Bag. Humas & Protokol)

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 9: Reformasi birokrasi dan tata kelola									
6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik berbagai bidang sesuai SPM	- Mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa berbasis ICT	%	80	100	Program Menyediakan Website dan Penggunaan ICT dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian	Setdakab (Bag. Adm. Pembangunan)
			- Mengoptimalkan kegiatan KDH/WKDH	%	80	100	Program peningkatan pelayanan kedinasan KDHWKDH		Setdakab (Bag. Keuangan)
			- Mengoptimalkan kegiatan penunjang pelayanan publik	%	80	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Seluruh SKPD
			- Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	50	100	Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintah		Seluruh Kecamatan
7. Tercapainya opini WTP terhadap laporan keuangan daerah	1. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas penerapan anggaran berbasis kinerja dan SIPKD serta pengelolaan aset	- Meningkatnya status laporan keuangan	opini	WDP	WTP	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian	Dinas PKD
			- Meningkatnya serapan anggaran belanja langsung	%	83,24	95,00			Dinas PKD
			- Tersedianya dokumen aset daerah yang akurat	Dok.	-	1			

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 9: Reformasi birokrasi dan tata kelola									
7. Tercapainya opini WTP terhadap laporan keuangan daerah	1. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	2. Peningkatan kualitas intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi. 3. Peningkatan kualitas sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan APBD	Meningkatnya PAD - Berkurangnya temuan audit Inspektorat - Meningkatnya jumlah tenaga pengawas & auditor terlatih - Tersedianya Laporan Inpres No 5 tahun 2004	MRp Temuan orang buku	21,97 500 - 90	41,88 50 50 90	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian	Dinas PKD Dinas PKD Inspektorat Setdakab (Bag Organisasi & Pers.) Inspektorat
8. Meningkatnya kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan.	- Berkembangnya data statistik daerah - Berkembangnya laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	dok./thn dok.	2 2	4 4	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah Program Pengembangan Data/Informasi	Statistik Perencanaan Pembangunan	Bappeda Bappeda

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 9: Reformasi birokrasi dan tata kelola									
8. Meningkatnya kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1. Meningkatkan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan.	- Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan • RPJMD • Renstra- SKPD • RKPD • Renstra AMPL • Strada PDT • SPKD - Berkembangnya SKPD menggunakan SIM	dok dok dok/ thn dok dok dok SKPD	1 - 1 - - - -	2 35 1 1 1 1 6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Perencanaan Pembangunan Komunikasi dan Informa-tika Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian	Bappeda Dishubko-minfo Seluruh SKPD
9. Meningkatnya kerjasama antar daerah	1. Pengembangan potensi wilayah untuk meningkatkan daya saing daerah	1. Peningkatan kerja sama antar daerah dalam upaya menyinkronkan rencana pembangunan.	Meningkatnya kerjasama antar Pemerintah daerah	MoU	2	7	Program Penataan Otonomi Daerah	Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian	Setdakab (Bag Adm. Pemerintahan)

Tabel 7.9
Kebijakan Umum, Prioritas dan Program Pembangunan Untuk Misi 7 : Mewujudkan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 10: Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah									
1. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam menunjang proses pembangunan di nagari/desa	1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas swadaya masyarakat terhadap program pembangunan nagari	Meningkatnya proporsi swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan : <ul style="list-style-type: none"> • Partisipatif • PNPM 	% %	45,42 31,25	55,00 40,00	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	BPMPN
2. Meningkatnya kelembagaan nagari/desa yang mandiri.	1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.	1. Penguatan pemerintahan dan kelembagaan nagari/desa	- Meningkatnya jml nagari/ desa	Nag/ Desa	55	62	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah/Nagari	Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian	BPMPN
			- Meningkatnya kualitas SDM : <ul style="list-style-type: none"> • Aparatur Nagari/Desa • BPN & LPM Mengoptimalkan terbinanya pengelolaan keu. nagari/ desa	% % %	50 50	100 100			
3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah	1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara optimal	1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan	- Meningkatnya pembangunan & pemberdayaan perempuan diukur melalui :	% %	59,53 50,24	63,60 56,06	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pember dayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Kantor PP & KB

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 10: Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah									
3. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam proses pembangunan daerah	1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara optimal	1. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan	- Meningkatnya kualitas anak dan perempuan	%	50	90	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Kantor PP & KB
		2. Peningkatan kualitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan penanganan KDRT	- Meningkatnya jumlah tenaga pelatih dalam penanganan KDRT - Meningkatnya cakupan penanganan KDRT	Orang /tahun	20	150	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Kantor PP & KB
				%	50	100	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan		
4. Meningkatnya pemberdayaan lembaga ekonomi nagari/desa	1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara optimal	1. Peningkatan kualitas unit ekonomi simpan pinjam dalam pengelolaannya	Meningkatnya pengembalian pinjaman oleh anggota (IRR)	%	85	100	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	BPMPN
		2. Fasilitasi pembentukan dan pengembangan BUM-Nagari	Terbentuk dan berkembangnya BUM-Nagari	unit	-	10			
5. Meningkatnya kerjasama dengan masyarakat perantau dalam mendorong kemajuan pembangunan daerah	1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara optimal	1. Peningkatan peran serta perantau dalam aktifitas pembangunan daerah	Terwujudnya kerjasama antara Pemda dengan perantau	Nota kerjasama	-	1	Program Kerjasama Pembangunan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda

Tabel 7.10
Kebijakan Umum, Prioritas dan Program Pembangunan Untuk Misi 8 : Revitalisasi Adat dan Seni Budaya Anak Nagari

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 11: Peningkatan kehidupan beragama, sosial, adat dan budaya									
1. Meningkatnya peran tokoh agama dan adat dalam peningkatan pemahaman falsasah adat Minangkabau "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"	1. Meningkatkan penerapan ajaran agama, adat dan sosial budaya untuk perbaikan moral dan ahklak masyarakat yang berlandaskan filosofi adat minangkabau "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"	1. Peningkatan kualitas tokoh agama dan guru TPQ/TPSQ serta garin masjid	Meningkatnya jumlah tokoh agama dan guru TPQ/TPSQ serta garin masjid yang dilatih : <ul style="list-style-type: none"> • Mubalig • Guru TPQ/TPSQ • Garin masjid 	org/th org/th org/th	50 490 50	75 540 100	Program Pelayanan kehidupan beragama	Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian	Setdakab (Bag Adm. Kesra)
		2. Peningkatan kualitas tokoh adat dan penguatan kelembagaan	- Meningkatnya jumlah tokoh adat yang dilatih - Mengoptimalkan terbinanya lembaga adat	org/th %	200 80	230 100	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	BPMPN
		3. Peningkatan penanganan kasus Pekat yang optimal	Berkurangnya kasus Pekat	kasus	5	0	Program Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat	Otda, Pemerintah, Adm. Pengelolaan Keu., Kepegawaian & Persandian	Kantor Satpol PP
2. Terpeliharanya seni dan nilai budaya masyarakat anak nagari	1. Memantapkan dan mengamalkan nilai-nilai budaya adat minangkabau	1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana seni budaya masyarakat anak nagari	Proporsi sarana dan prasarana seni budaya anak nagari	%	40,98	85,00	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinas Parsersenibudpora

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Sat	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggungjawab
					Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
Prioritas 11: Peningkatan kehidupan beragama, sosial, adat dan budaya									
2. Terpeliharanya seni dan nilai budaya masyarakat anak nagari	1. Memantapkan dan mengamalkan nilai-nilai budaya adat minangkabau	2. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok seni budaya masyarakat anak nagari	Berkembangnya kelompok seni budaya unggulan daerah; • Randai • Rebana • Talempong	Klpk Klpk Klpk	66 61 60	94 81 72	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Dinas Pansenibudpora
3. Meningkatnya jumlah dan kualitas even penyelenggaraan seni budaya anak nagari	1. Memantapkan dan mengamalkan nilai-nilai budaya adat minangkabau	1. Peningkatan even penyelenggaraan seni budaya anak nagari yang berkesinambungan dan berkualitas	Meningkatnya even penyelenggaraan seni budaya	Kali/thn	4	6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Pansenibudpora

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai visi dan misi RPJMD. Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Sijunjung berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, jika ada program pembangunan tidak termasuk dalam program prioritas namun mempunyai kontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi, hal ini dapat dilakukan penambahan sesuai dengan indikator sasaran misi.

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap SKPD dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi SKPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.

8.1. Indikasi Rencana Program Prioritas

Indikasi rencana program-program prioritas Kabupaten Sijunjung untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah diklasifikasikan sesuai dengan pembagian urusan dan bidang urusan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dapat dilihat dengan jelas pembagian tugas SKPD dalam melaksanakan rencana pembangunan yang telah disusun dan langsung menjadi tanggung jawab SKPD.

Pembagian tugas SKPD tersebut, dikelompokkan kedalam urusan wajib sebanyak 23 urusan dan urusan pilihan sebanyak 8 urusan. Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah terkait dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikasi program prioritas masing-masing urusan pemerintahan nomenklatur programnya merujuk kepada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah sebagai berikut :

Pembagian tugas SKPD tersebut, dikelompokkan kedalam urusan wajib sebanyak 23 urusan dan urusan pilihan sebanyak 8 urusan. Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah terkait dengan pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan memiliki potensi untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan masing-masing urusan pemerintahan nomenklatur programnya merujuk kepada Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

A. Urusan Wajib :

1. Pendidikan

Program pembangunan bidang urusan pendidikan terdiri dari :

- 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
- 3) Program Pendidikan Menengah;
- 4) Program Pendidikan Formal dan Non Formal; dan
- 5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. Kesehatan

Program pembangunan bidang urusan kesehatan terdiri dari :

- 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
- 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- 3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat;
- 4) Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
- 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
- 6) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
- 7) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
- 8) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
- 9) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
- 10) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
- 11) Program Peningkatan SDM Pelayanan; dan
- 12) Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

3. Pekerjaan Umum

Program pembangunan bidang urusan pekerjaan umum terdiri dari :

- 1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 2) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- 3) Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
- 4) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong;
- 5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
- 6) Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
- 7) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
- 8) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
- 9) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan;

4. Perumahan

Program pembangunan bidang urusan perumahan adalah :

- 1) Program Lingkungan Sehat Perumahan.

5. Penataan Ruang

Program pembangunan bidang urusan penataan ruang terdiri dari :

- 1) Program Perencanaan Tata Ruang; dan
- 2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

6. Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan bidang urusan perencanaan pembangunan terdiri dari :

- 1) Program Pengembangan data/informasi;
- 2) Program Kerjasama Pembangunan;
- 3) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar
- 4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 5) Program Perencanaan Pembangunan ekonomi;
- 6) Program Perencanaan Sosial Budaya;
- 7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan
- 8) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

7. Perhubungan

Program pembangunan bidang urusan perhubungan terdiri dari :

- 1) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
- 2) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
- 3) Program Pengendalian / Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas;
- 4) Program Pelayanan Angkutan Umum; dan
- 5) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

8. Lingkungan Hidup

Program pembangunan bidang urusan lingkungan hidup terdiri dari :

- 1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
- 4) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

9. Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan bidang urusan kependudukan dan catatan sipil adalah :

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan.

10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdiri dari :

- 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- 2) Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
- 3) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; dan
- 4) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.

11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan bidang urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera terdiri dari :

- 1) Program Keluarga Berencana;
- 2) Program Pelayanan Kontrasepsi; dan

- 3) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR.

12. Sosial

Program pembangunan bidang urusan sosial terdiri dari :

- 1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan
- 4) Program Perlindungan Sosial bagi Keluarga Miskin.

13. Ketenagakerjaan

Program pembangunan bidang urusan ketenagakerjaan terdiri dari :

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
- 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program pembangunan bidang urusan koperasi dan usaha kecil menengah terdiri dari :

- 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
- 2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah; dan
- 3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

15. Penanaman Modal

Program pembangunan bidang urusan penanaman modal terdiri dari :

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan
- 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

16. Kebudayaan

Indikasi rencana program prioritas bidang urusan kebudayaan terdiri dari :

- 1) Program Pengembangan Nilai Budaya; dan
- 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.

17. Kepemudaan dan Olahraga

Program pembangunan bidang urusan kepemudaan dan olahraga terdiri dari :

- 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
- 2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; dan
- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.

18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program pembangunan bidang urusan kesatuan bangsa politik dalam negeri terdiri dari :

- 1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
- 2) Program Pendidikan Politik Masyarakat.

19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program pembangunan bidang urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah dan kepegawaian terdiri dari :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
- 5) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
- 6) Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
- 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- 9) Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- 10) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
- 11) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 12) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- 13) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- 14) Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
- 15) Program Pelayanan Kehidupan Beragama;
- 16) Program Pengembangan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
- 17) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah;
- 18) Program Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan;
- 19) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari;
- 20) Program Menyediakan Website dan Penggunaan ICT dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat;
- 21) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
- 22) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
- 23) Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana;
- 24) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
- 25) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- 26) Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahaan Tindak Kriminal;
- 27) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat;
- 28) Program Penataan Otonomi Daerah;
- 29) Program Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Modal BUMD; dan
- 30) Program Pengendalian dan Evaluasi Penerapan SPM (*usulan program baru diluar Permendagri 13/2006*).

20. Ketahanan Pangan

Program pembangunan bidang ketahanan pangan adalah :

- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan.

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa terdiri dari :

- 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan; dan
- 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;

22. Statistik

Program pembangunan bidang statistik adalah :

- 1) Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

23. Kearsipan

Program pembangunan bidang kearsipan adalah :

- 1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

24. Komunikasi dan Informatika

Program pembangunan bidang komunikasi dan informatika adalah :

- 1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

25. Perpustakaan

Program pembangunan bidang perpustakaan adalah :

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

B. Urusan Pilihan :

1. Pertanian

Program pembangunan bidang pertanian terdiri dari :

- 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- 2) Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan
- 3) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan;
- 4) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- 5) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan;
- 6) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, dan
- 8) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan.

2. Kehutanan

Program pembangunan bidang kehutanan terdiri dari :

- 1) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
- 2) Program Peningkatan Pelayanan Dan Pemanfaatan Hutan dan Industri Hasil Hutan
- 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;
- 4) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
- 5) Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

Program pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral terdiri dari :

- 1) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
- 2) Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan;
- 3) Program Studi Geologi dan Sumber Daya Mineral; dan
- 4) Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

4. Pariwisata

Program pembangunan bidang pariwisata terdiri dari :

- 1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
- 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

5. Peternakan dan Perikanan

Program pembangunan bidang peternakan dan perikanan terdiri dari :

- 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
- 2) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;

6. Perdagangan

Program pembangunan bidang perdagangan terdiri dari :

- 1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan; dan
- 2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.

7. Industri

Program pembangunan bidang industri adalah :

- 1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; dan
- 2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

8. Ketransmigrasian

Program pembangunan bidang ketransmigrasian adalah :

- 1) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.

8.2. Indikasi Kebutuhan Pendanaan

Pencapaian target indikator kinerja program pembangunan atau *outcome* di masing-masing urusan pemerintahan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sijunjung, namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Provinsi Sumatera Barat dan sumber-sumber pendanaan lainnya). Oleh karena itu, indikasi kebutuhan pendanaan dalam membiayai pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 dihitung pagu indikatifnya sesuai dengan kerangka pedanaan yang telah diuraikan pada Bab III. Indikasi kebutuhan pendanaan untuk pembiayaan program pembangunan Kabupaten Sijunjung tahun 2011-2015 yang dilengkapi indikator kinerja (*outcome*), dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8.1

Indikasi Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2015

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD penanggung jawab			
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)		Targ.	Rp (jt)	
1		URUSAN WAJIB																
1	01	Pendidikan																
1	01	01	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Meningkatnya kualitas ketersediaan & pelayanan pendidikan • Meningkatnya jumlah layanan PAUD • APK • APM	sklh	286	288	290	295	298	302	302	302	302	302	302	22.295,64	Dinas Pendidikan
						-	60,86	62,56	64,80	68,50	69,20	69,20	69,20	69,20	69,20	69,20		
						50,03	54,86	56,00	58,20	62,30	64,50	64,50	64,50	64,50	64,50	64,50		
1	01	02	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun	Meningkatnya kualitas ketersediaan & pelayanan pendidikan SD/MI : • Rasio sekolah thdp pdtk. Usia sekolah • Rasio guru thdp murid • APK • APM SMP/MTSN : • Rasio sekolah thdp pdtk. Usia sekolah • Rasio guru thdp murid • APK • APM		67,82	69,73	75,70	78,85	79,50	82,05	82,05	82,05	82,05	82,05	82,05	160.574,10	Dinas Pendidikan
						70,36	61,12	73,58	75,52	77,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50	80,50		
						111,69	112,54	113,20	113,50	114,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40	115,40		
						98,93	99,39	99,40	99,50	99,70	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90	99,90		
						48,44	50,20	55,60	58,50	62,70	64,11	64,11	64,11	64,11	64,11	64,11		
						70,30	68,70	68,80	68,50	67,70	66,80	66,80	66,80	66,80	66,80	66,80		
						90,16	87,75	89,50	91,70	92,50	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50		
						67,61	68,90	73,93	78,20	80,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40		

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD penanggung jawab	
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.		Rp (jt)
1		URUSAN WAJIB															
1	01	Pendidikan															
1	01	03	Program Pendidikan Menengah	- Meningkatnya kualitas ketersediaan & pelayanan pendidikan • Rasio sekolah thdp pdck. Usia sekolah • Rasio guru thdp murid • APK • APM		5.296,29		5.715,85		10.258,95		11.983,68		13.000,00		46.254,77	Dinas Pendidikan
					36,44	41,71	44,61	45,50	46,50	48,00	48,00						
					107,30	104,06	93,37	92,50	91,50	89,20	89,20						
					47,58	87,75	62,13	77,00	77,50	80,50	80,50						
					42,38	52,90	56,71	62,00	65,50	67,00	67,00						
			Meningkatnya jumlah penerima bea siswa	sis-wa	2.100	2.200	2.250	2.500	2.600	2.700	2.700						
1	01	04	Program Pendidikan Formal dan Non Formal	- Meningkatnya lulusan pendidikan kesetaraan • Paket A • Paket B • Paket C - Meningkatnya kelompok pendidikan keaksaraan - Berkembangnya sekolah swasta		571,15		573,00		406,15		555,00		700,00		2.805,30	Dinas Pendidikan
					25	30	30	30	30	30	140						
					50	45	45	50	60	60	200						
					60	60	70	70	70	70	340						
					210	210	220	235	240	255	255						
					115	115	117	118	119	120	120						
1	01	05	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya jumlah guru memperoleh sertifikasi : • PAUD • SDMI • SMP/MTSN • SMA/SMK/MA		1.357,00		1.734,45		1.217,00		4.780,00		6.000,00		15.088,45	Dinas Pendidikan
					org	2	2	20	22	24	30				30		
					org	102	177	150	450	650	850				850		
					org	49	42	123	250	300	407				407		
					org	38	31	43	200	250	300				300		

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD penanggung jawab			
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.		Rp (jt)		
1		URUSAN WAJIB																	
1	01	Pendidikan																	
1	01	05	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya nilai rata-rata UN setiap jenjang pendidikan :		1.357,00		1.734,45		1.217,00		4.780,00		6.000,00		15.088,45	Dinas Pendidikan		
			• SDMI	%	6,85	7,05	6,99	7,00	7,10	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25			
			• SMP/MTsN	%	5,60	5,74	5,82	6,20	6,50	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90			
			• SMA/SMK/MA	%	6,60	6,61	6,87	6,90	6,92	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95	6,95			
			Meningkatnya jml lulusan SMA diterima PTN	Siswa	205	250	280	350	400	450	450	450	450	450	450	450			
			Meningkatnya jumlah sekolah terakreditasi																
			• SDMI	Unit	78	100	110	125	150	202	202	202	202	202	202	202			
			• SMP/MTsN	Unit	8	38	45	48	50	66	66	66	66	66	66	66			
			• SMA/SMK/MA	Unit	13	16	18	19	20	23	23	23	23	23	23	23			
			Meningkatnya jumlah sekolah berbasis Imitag		5	7	10	12	13	15	15	15	15	15	15	15			
			Meningkatnya komite sekolah yang memiliki AD/ART		15	40	50	75	125	150	150	150	150	150	150	150			
1	02	Kesehatan																	
1	02	01	Program obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya kebutuhan obat di tingkat pelayanan dasar	%	100	100	611,66	100	1.404,71	100	1.422,62	100	1.630,00	100	2.000,00	100	2.000,00	Dinas Kesehatan
1	02	02	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- Cakupan nagari/desa SIAGA	%	49,00	49,00	3.184,74	50,00	4.902,08	67,00	4.719,36	75,00	3.662,75	80,00	4.000,00	80,00	4.000,00	Dinas Kesehatan
			- Cakupan sekolah sehat	%	25,28	34,41		40,60		54,60		60,00		70		70			
			- Pddk yg menggunakan jamban sehat	%	67,2	75		75		75		80		80		80			

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab		
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)			
1		URUSAN WAJIB																	
1	02	Kesehatan																	
1	02	03	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya PHBS di RT	%	48,00	49,00	128,81	50,00	69,00	68,00	219,43	75,00	373,43	80,00	450,00	80,00	1.240,67	
1	02	04	Program perbaikan gizi masyarakat	- Prevelensi balita gizi buruk - Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	%	8,48	10,00	235,34	8,00	107,59	6,00	167,54	5,00	247,50	4,00	300,00	4,00	1.057,97	Dinas Kesehatan
					%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
1	02	05	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Cakupan penemuan, pencegahan dan pemberantasan penyakit • Meningkatnya penanganan penderita diare • Meningkatnya penanganan penyakit DBD • Meningkatnya penanganan KLB di nagari • Meningkatnya cakupan jorong UCI	%		179,21		441,13		669,04		506,25		550,00		2.345,63	Dinas Kesehatan	
					%	76,60	73,00		75,00		80,00		90,00		90,00		90,00		
					%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
					%	79,0	79,10		79,10		85,00		90,00		90,00		90,00		

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab		
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)			
1		URUSAN WAJIB																	
1	02	Kesehatan																	
1	02	06	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya	- Meningkatnya rasio fasilitas kesehatan pelayanan dasar per 1.000 penduduk - Meningkatnya jumlah Puskesmas terakreditasi - Meningkatnya Pustu plus	% unit unit	0,98 - -	0,98 - -	3.356,53 3.356,53 -	0,98 - -	3.664,07 3.664,07 -	0,99 - -	4.296,47 4.296,47 -	1,00 1 2	4.987,71 4.987,71 -	1,00 2 3	5.500,00 -	1,00 2 3	22.304,78 -	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
1	02	07	Program pengadaan, peningkatan sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru	Terciptanya rasio fasilitas kesehatan pelayanan rujukan (RSU) per 30.000 pdck	unit	0	0,00	48.088,69	0,13	310,24	0,14	6.526,57	0,15	6.357,97	0,15	7.500,00	0,15	68.783,47	RSUD
1	02	08	Program kemitraan peningkatan Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan pdck miskin : • Dasar • Rujukan	% %	4,76 0,35	48,90 4,90	182,80 -	34,71 2,23	95,61 -	35,00 4,50	795,50 -	60,00 5,50	825,00 -	85,00 7,00	1.000,00 -	85,00 7,00	2.898,91 -	Dinas Kesehatan RSUD
1	02	09	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan Lansia	%	36,24	40,00	72,42	45,00	55,77	50,00	120,25	55,00	131,50	60,00	200,00	60,00	579,94	Dinas Kesehatan
1	02	10	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	- Meningkatnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi Kebidanan	%	72,32	80,00	48,44	90,00	119,33	92,00	229,157	92,00	225,00	92,00	300,00	92,00	921,93	Dinas Kesehatan

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab		
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)			
1		URUSAN WAJIB																	
1	02	Kesehatan																	
1	02	10	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	- Meningkatnya cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani - Meningkatnya cakupan neonatus dgn komplikasi yang ditangani - Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil (K4) - Meningkatnya cakupan ibu nifas - Meningkatnya cakupan kunjungan bayi		45,04	45,10	48,44	45,20	119,33	46,00	229,157	48,00	225,00	50,00	300,00	50,00	921,93	Dinas Kesehatan
1	02	11	Program peningkatan SDM pelayanan	Meningkatnya rasio dokter umum per 100.000 penduduk		0,29	0,29	150,00	0,29	175,00	0,30	200,00	0,40	300,00	0,50	400,00	0,50	1.225,00	Dinas Kesehatan
1	02	12	Program pengembangan lingkungan sehat	Meningkatnya nagari yg telah melaksanakan kawasan sehat	%	-	60,00	50,00	65,00	192,6	75,00	225,00	80,00	250,00	80,00	300,00	80,00	1.017,60	Dinas Kesehatan
1	03	Pekerjaan Umum																	
1	03	01	Pogram Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Rasio panjang jalan terhadap jumlah luas wilayah - Meningkatnya panjang jalan yg dibangun	% Km	37,09	37,95	18.155,74	38,18	14.920,11	37,29	20.958,06	37,51	21.170,00	38,82	45.625,00	38,82	120.835,71	Dinas PU

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab		
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)			
1		URUSAN WAJIB																	
1	03	Pekerjaan Umum																	
1	03	01	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	- Meningkatnya jumlah jembatan yang dibangun	Unit	132	3	18.155,74	4	14.920,11	5	20.958,06	4	21.170,00	3	45.625,00	149	120.835,71	Dinas PU
1	03	02	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan	Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	42,33	46,64	10.069,18	54,32	10.953,52	57,37	17.658,78	60,42	11.927,87	86,04	28.100,00	86,04	28.100,00	Dinas PU
1	03	03	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Mengoptimalkan pemeliharaan sarpras kebinamargaan	%	25	45	521,99	65	884,88	85	1.108,00	85	1.600,00	85	1.700,00	85	1.700,00	Dinas PU
1	03	04	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Meningkatnya panjang drainase	mtr	10.000	12.525	961,80	14.122	46,33	16.002	1.463,14	17.502	1.556,32	18.887	2.000,00	18.887	2.000,00	Dinas PU
1	03	05	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan	Meningkatnya rasio layanan jaringan irigasi	%	57,26	57,86	4.528,10	58,01	5.268,49	58,45	9.191,31	59,10	6.924,75	59,70	19.800,00	59,70	19.800,00	Dinas PU
1	03	06	Program Penyediaan dan pengolahan air baku	Meningkatnya jmg. irigasi stgh teknis yang dibangun	unit	12	1	116,81	6	954,48	8	2.517,74	10	3.925,25	1	300,00	38	7.814,28	Dinas PU
1	03	07	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah	- Meningkatnya cakupan layanan air bersih - Meningkatnya cakupan RT bersanitasi	% %	48,31 35,39	48,31 35,39	5.107,52 -	48,31 35,39	7.851,28 -	59,53 40,49	12.992,47 -	69,53 45,39	10.217,21 -	74,16 67,70	13.000,00 -	74,16 67,70	13.000,00 -	Dinas PU
1	03	08	Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terbangunnya akses transportasi kwsn agropolitan: • Jalan • Jembatan	km	- - -	- - -	- - -	0,4 - -	- - -	0,6 - -	- - -	- - -	- - -	4.000,00 1 1	- - -	4.624,73 2 1	- -	Dinas PU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab		
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)			
1		URUSAN WAJIB																	
1	03	Pekerjaan Umum																	
1	03	09	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Meningkatnya panjang jalan lingkungan nagari yang baik	mtr	-	5.250	2.403,52	6.355	2.064,69	7.500	1.662,49	8.147	3.125,13	9.000	4.000,00	36.252	13.255,83	Dinas PU
1	04	Perumahan																	
1	04	01	Program Lingkungan sehat perumahan	Meningkatnya jumlah kawasan perumahan yang sehat	kwsn	5	8	1.804,91	11	1.186,55	14	2.460,18	15	4.109,58	16	1.500,00	16	11.061,22	Dinas PU
1	05	Penataan Ruang																	
1	05	01	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya Perdata tata ruang : • RTRW • RDTR			286,55		599,11		690,00		2.230,00		2.500,00		6.305,66	Bappeda	
1	05	02	Program Pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya jumlah bangunan memiliki IMB	IMB/thn	48	75	8,51	100	-	250	150,00	500	-	750	250,00	750	250,00	Dinas PU
1	06	Perencanaan Pembangunan																	
1	06	01	Program Pengembangan Data/Informasi	Berkembangnya laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan ; • Eva. Kinerja Prog. Pembangunan • Eva. RKPD • Eva. RPJMD 2 thn • Eva. RPJMD 4 thn	dok/thn	1	1	143,54	1	133,34	1	443,10	1	190,72	1	200,00	1	200,00	Bappeda
1	06	02	Program Kerjasama Pembangunan	Terwujudnya kerjasama antara Pemda dengan perantau	Nota Kj. Sama	-	-	-	-	48,14	-	-	-	100,00	1	200,00	1	200,00	Bappeda

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab		
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)			
1																			
1	06																		
1	06	03	URUSAN WAJIB																
1	06	03	Perencanaan Pembangunan																
1	06	03	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Tersedianya Masterplan Agropolitan	dok	-	-	2,06	1	139,52	-	-	-	-	-	-	1	139,52	Bappeda
1	06	04	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan :			869,63		642,09		434,74		1.515,00		700,00		700,00	Bappeda	
				• RPJMD	dok	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-		
				• Renstra- SKPD	dok	-	34	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-		
				• RKPD	Dok/thn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				• Renstra AMPL	dok	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
				• Strada PDT	dok	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
				• SPKD	dok	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	06	05	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terwujudnya program bedah jorong sangat tertinggal	jrg	-	1	230,66	-	184,99	-	252,00	1	850,00	1	850,00	3	2.367,65	Bappeda
1	06	06	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Menurunnya jumlah nagari tertinggal	Nag	29	25	54,00	18	278,03	11	325,00	7	940,00	0	1.000,00	0	2.597,03	Bappeda
1	06	07	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Mengoptimalkannya koordinasi perencanaan prasarana wilayah & SDA	%	40	40	-	50	31,95	75	56,00	90	100,00	100	150,00	100	150,00	Bappeda
1	06	08	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	%	50	60	445,88	-	-	75	61,01	85	240,00	100	110,00	100	110,00	Bappeda

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab		
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)			
1		URUSAN WAJIB																	
1	07	Perhubungan																	
1	07	01	Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Meningkatnya jumlah rambu-rambu Lalin	unit	50	165	448,29	211	258,22	295	419,14	217	304,33	218	349,98	1.106	1.779,96	Dishubkominfo
1	07	02	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Berkembangnya terminal angkutan kelas A	%	50	60	1.218,34	70	698,64	80	1.047,66	90	805,00	100	925,75	100	925,75	Dishubkominfo
1	07	03	Program pengendalian / peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Berkurangnya kasus kecelakaan Lalin	Kasus	96	96	122,75	97	219,07	50	88,00	40	128,55	25	171,37	25	171,37	Dishubkominfo
1	07	04	Program Pelayanan Angkutan Umum	Meningkatnya jumlah angkutan kota/ pedesaan	Izin trayek	25	25	122,01	25	95,25	25	95,00	40	125,00	50	135,00	50	135,00	Dishubkominfo
1	07	05	Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Berkurangnya lama pengujian kelayakan kendaraan angkutan	Menit	15	15	99,85	10	169,26	5	88,06	5	133,10	5	146,41	5	146,41	Dishubkominfo
1	08	Lingkungan Hidup																	
1	08	01	Program Pengembangan kinerja Pengelolaan sampah	Meningkatnya cakupan penanganan sampah	%	44,44	50,00	573,56	50,00	440,53	70,00	725,06	80,00	2.895,00	90,00	3.500,00	90,00	3.500,00	Badan LH, PM & PT
1	08	02	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Berkurangnya pencemaran air sungai	%	80,00	70,00	39,95	60,00	109,93	50,00	249,00	40,00	465,00	30,00	600,00	30,00	600,00	Badan LH, PM & PT
1	08	03	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya jumlah sumur resapan	unit	10	12	66,11	14	541,85	-	30,23	15	450,00	20	600,00	20	600,00	Badan LH, PM & PT

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab		
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)			
1		URUSAN WAJIB																	
1	08	Lingkungan Hidup																	
1	08	04	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Berkembangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lokasi	-	-	9,45	1	108,81	1	221,24	-	-	1	250,00	3	589,50	Badan LH, PM & PT
1	09	Kependudukan dan Catatan Sipil																	
1	09	01	Program penataan administrasi kependudukan	Meningkatnya persentase penduduk memiliki administrasi kependudukan;			572,435	1.508,81		823,88		913,52		1.000,00		1.000,00		1.000,00	Disduk & Capil
			• e-KTP	%	0	38,90	53,40	80,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
			• Akte Kelahiran	%	60,48	67,42	97,60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1	10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																	
1	10	01	Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Meningkatnya cakupan penanganan KD-RT	%	50	60	21,54	70	14,14	80	13,21	90	16,91	100	50,00	100	50,00	Kantor PP & KB
1	10	02	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya pembangunan & pemberdayaan perempuan			763,79	78,37		240,86		260,00		350,00		350,00		350,00	Kantor PP & KB
			• IPG	%	59,53	60,50	61,28	62,05	62,83	63,60	63,60	63,60	63,60	63,60	63,60	63,60	63,60	63,60	
			• IDG	%	50,24	49,03	50,79	52,55	54,30	56,06	56,06	56,06	56,06	56,06	56,06	56,06	56,06	56,06	
1	10	03	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya kualitas anak dan perempuan	%	50	60	77,16	70	26,94	80	20,15	90	30,00	90	40,00	90	40,00	Kantor PP & KB

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab			
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD					
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)				
1		URUSAN WAJIB																		
1	10																			
1	10	04	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya jumlah tenaga pelatih dalam penanganan KDRT	Org/ thn	20	30	57,30	60	35,56	90	49,33	120	55,73	150	65,00	150	65,00	Kantor PP & KB	
1	11		Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera																	
1	11	01	Program Keluarga Berencana	Terkendalinya laju pertmb. Penduduk	%	1,08	1,01	127,27	1,02	982,54	1,00	1.001,03	1,00	1.066,49	1,00	1.250,00	1,00	1.250,00	Kantor PP & KB	
1	11	02	Program Pelayanan Kontrasepsi	Prevelensi peserta KB aktif	%	75,00	75,00	75,00	75,00	76,00	76,40	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	Kantor PP & KB
				• PUS	%	61,01	61,01	61,01	61,01	60,00	65,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	Kantor PP & KB
				• UPPKS	%	61,01	61,01	53,11	53,11	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	Kantor PP & KB
1	11	03	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Meningkatnya pengetahuan Remaja tentang KKR	%	50	60	33,69	70	33,84	80	39,21	90	31,00	100	40,00	100	40,00	Kantor PP & KB	
1	12		Sosial																	
1	12	01	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	- Meningkatnya jumlah penerima beras miskin - Meningkatnya jmlh kelp menerima program sosial	RTSM KUBE	9.106 125	9.106 125	53,90 125	12.396 100	59,17 100	11.999 130	72,50 135	13.198 135	190,40 140	13.198 140	200,00 140	13.198 140	200,00 140	Disosnaker-trans	

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab		
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)			
1		URUSAN WAJIB																	
1	12	Sosial																	
1	12	02	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	- Meningkatnya ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat miskin - Meningkatnya penyandang cacat dan Lansia menerima jaminan sosial	Unit/thn %	102 48,54	134 54,18	51,23 57,45	156 57,45	498,33	160 61,72	356,67	171 69,17	980,00	204 75,70	1.200,00	204 75,70	1.200,00	Disosnakertrans
1	12	03	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya jumlah sarana sosial	unit	4	4	22,56	4	207,60	5	247,60	5	41,44	5	50,00	5	50,00	Disosnakertrans
1	12	04	Program Perlindungan Sosial bagi Keluarga Miskin	Meningkatnya penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	RTSM	-	-	-	-	-	-	-	4.461	203,00	4.500	300,00	4.500	300,00	Disosnakertrans
1	13	Ketenagakerjaan																	
1	13	01	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Meningkatnya jumlah tenaga kerja siap pakai - Rasio tng. kerja ditempatkan - Meningkatnya jumlah peserta pelatihan; • Mekanik • Menjahit - Persentase peserta pelatihan berwirausaha	org % org org %	160 - - 160 160 5	- 1,2 - 192 192 5	259,16 - - 208 208 10	176 - - 208 208 10	179,12	- 5,00 - 224 224 20	121,55	192 10,00 - 240 240 20	317,84	226 15,00 - 262 246 40	425,00	226 15,00 - 262 246 40	425,00	Disosnakertrans

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab		
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)			
1		URUSAN WAJIB																	
1	13	Ketenagakerjaan																	
1	13	02	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tersedianya data dan informasi bursa kerja	dok /thn	1	1	44,51	1	33,50	1	40,00	1	49,81	1	57,28	1	57,28	Disosnakertrans
1	13	03	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	- Berkurangnya senketa antara tenaga kerja - Berkurangnya kasus kecelakaan kerja	Kasus	10	-	-	8	96,98	5	100,05	3	100,00	2	115,00	2	115,00	Disosnakertrans
					Kasus	5	2		1		0		0		0		0		
1	14		Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																
1	14	01	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	Meningkatnya jumlah UMKM yang memiliki izin	unit	129	150	22,54	166	23,61	172	25,00	200	44,00	214	55,00	214	55,00	Diskopperindag
1	14	02	Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi	Meningkatnya jumlah UMKM dan Koperasi yang mengakses permodalan	%	5	6	211,70	7	284,31	8	266,42	9	504,50	10	600,00	10	600,00	Diskopperindag
1	14	03	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya jumlah koperasi yang aktif	%	27,00	30,00	48,63	32,20	61,92	39,80	65,00	45,60	100,00	51,40	175,00	51,40	175,00	Diskopperindag

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab		
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)			
1		URUSAN WAJIB																	
1	15	Penanaman Modal																	
1	15	01	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	- Meningkatnya even promosi investasi	even	1	2	64,21	2	110,71	2	272,191	4	315,00	4	975,00	4	975,00	Badan LH, PM dan PT
				- Meningkatnya jumlah investor	Pers	3.534	3.534		3.232		3.500		3.750		4.000		4.000		
1	15	01	Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi	- Berkurangnya lama proses perizinan; • IKM	Hr.k	5	3		2		1		1		1		1		Badan LH, PM dan PT
				• Industri Besar	Hr.k	66	50		40		30		20		14		14		
				- Meningkatnya nilai investasi PMDN/PMA	MRp	30.128	48.651		11.453		30.000		50.000		100.000		100.000		
1	16	Kebudayaan																	
1	16	01	Program Pengembangan Nilai Budaya	- Proporsi sarana dan prasarana seni budaya anak nagari	%	40,98	50,00	154,58	60,00	129,29	70,00	215,95	80,00	590,00	85,00	600,00	85,00	600,00	DisparseniBudpora
				- Berkembangnya kelompok seni budaya unggulan daerah;															DisparseniBudpora
				• Randai	Klpk	66	69		68		94		94		94		94		
				• Rebana	Klpk	61	63		71		81		81		81		81		
				• Talempong	Klpk	60	62		59		72		72		72		72		
1	16	02	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya even penyelenggaraan seni budaya	kali/thn	4	4	49,29	4	30,26	4	296,64	6	240,00	6	250,00	6	250,00	DisparseniBudpora

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD penanggung jawab				
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD			
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)		Targ.	Rp (jt)		
1		URUSAN WAJIB																	
1	17		Kepemudaan dan Olahraga																
1	17	01	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	- Meningkatnya jumlah organisasi kepemudaan	Krg. Taruna	60	70	34,80	80	33,50	90	51,34	100	41,34	110	45,00	110	45,00	Disparsenibudpora
				- Meningkatnya jumlah pemuda pelopor	org	8	13		19		23		33		43		43		
1	17	02	Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatnya jumlah sarana & prasarana olahraga	unit	664	660	44,61	658	25,26	660	135,60	670	700,00	680	900,00	680	900,00	Disparsenibudpora
1	17	03	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	- Meningkatnya jumlah Cabor dlm kompetisi olahraga tk. Kabupaten	Cabor	2	2	131,83	3	118,44	3	153,21	3	500,00	4	250,00	4	250,00	Disparsenibudpora
				- Meningkatnya prestasi olahraga Kab. Sji di Porprov	prkt	15 besar	-		19		-		10 besar		-		10 besar		
				- Meningkatnya prestasi Cabor unggulan daerah :	Ca-bor													250,00	Disparsenibudpora
				• Sepak Bola	Pres	Div II	Div I		Div I		Div I		Div Utama		Div Utama		Div Utama		
				• Catur	Pres	-	-		1 Nas		1 Nas		1 Nas		1 Nas		1 Nas		
				• Bola Basket	Pres	-	-		1 Prov		1 Prov		1 Prov		1 Prov		1 Prov		

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab		
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)			
1		URUSAN WAJIB																	
1	18		Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri																
1	18	03	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesatuan	Org/ thn	60	60	412,71	60	431,74	100	463,56	150	606,35	250	750,00	250	750,00	Kantor Kesbangpol & Limas
1	18	05	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat : • Pilleg& Pilpres • Pilkada	% %	64,12 67,02	- -	- -	- -	- -	147,11	- -	75,00 -	420,06	- 75,00	500,00	75,00 75,00	500,00	Kantor Kesbangpol & Limas
1	19		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah. Kepegawaian dan Persandian																
1	19	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Mengoptimalkan kegiatan penunjang pelayanan public	%	80	80	26.500,27	80	32.670,50	100	38.299,83	100	40.994,26	100	45.093,68	100	45.093,68	Seluruh SKPD
1	19	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Bertambahnya jml gedung perkantoran yang memadai - Meningkatnya proporsi jmlh peralatan kerja thdp jumlah aparatur - Mengoptimalkan pemeliharaan sarana perkantoran	unit % %	20 50 90	2 60 100	9.661,2 9.661,27	2 70 100	41.404,98 41.404,98	3 80 100	63.738,29 63.738,29	4 90 100	40.569,27 40.569,27	3 90 100	75.000,00 75.000,00	34 90 100	250.614,01 250.614,01	Dinas PU Seluruh SKPD Seluruh SKPD

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab		
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)			
1		URUSAN WAJIB																	
1	19		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah. Kepegawaian dan Persandian																
1	19	03	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	- Optimalisasinya penerapan SIMPEG	%	30	40	1.657,88	50	1.475,66	65	1.343,10	85	1.197,87	100	1.500,00	100	1.500,00	BKD
				- Meningkatnya jumlah PNS yang dapat penghargaan :															
				• Satyalencana karya satya	Org	103	98		109		91		100		120		120		
				• Berprestasi	org	0	37		35		35		35		35		35		
				- Meningkatnya jumlah PNS tugas belajar & ujian dinas	org	285	702		198		315		350		400		400		
				- Berkurangnya jml PNS yang melanggar disiplin berat	org	6	10		6		9		3		0		0		
1	19	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya jumlah aparatur dalam meningkatkan kompetensi melalui:			2.052,31		1.592,32		2.605,22		3.598,33		3.750,00		3.750,00	Seluruh SKPD	
				• Diklat jabatan	Org	-	50		39		88		61		61		61		
				• Diklat fungsional	Org	-	50		126		100		100		120		120		
				• Bintek	Org	42	45		45		90		90		105		105		
				• Lainnya	Org	20	20		25		25		30		35		35		
				Terwujudnya Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	SKPD	-	-		1		1		1		3		4		

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD penanggung jawab			
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.		Rp (jt)		
1		URUSAN WAJIB																	
1	19	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah. Kepegawaian dan Persandian																	
1	19	05	Program Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja	Meningkatnya nilai laporan kinerja : • LAKIP • LPPD	Nilai nilai	- -	D Tinggi	D Tinggi	C Tinggi	75,00	105,36	CC Sgt. Tinggi	B Sgt. Tinggi	150,00	B Sgt. Tinggi	150,00	Seluruh SKPD		
1	19	06	Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH	Mengoptimalkan pelayanan kegiatan KDH/WKDH	%	80	100	1.535,77	100	1.657,27	100	1.465,33	100	1.542,76	100	1.750,00	100	1.750,00	Setdakab (Bag. Keuangan)
1	19	07	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	- Meningkatnya status laporan keuangan - Meningkatnya serapan anggaran belanja langsung - Terciptanya dokumen aset daerah yang akurat - Meningkatnya PAD	opini % dok M Rp	WDP 83,39 - 21,97	WDP 81,60 - 30,46	2.922,76 - 2.922,76	WDP 83,24 - 33,08	2.640,95 - 2.640,95	WTP 90 1	2.848,74 - 2.848,74	WTP 95 -	4.105,00 95 -	WTP 95 -	4.500,00 95 4.500,00	WTP 95 1	4.500,00 95 4.500,00	Setdakab DPKD
1	19	08	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Berkurangnya temuan audit Inspektorat	Temuan	500	350	904,06	200	967,39	150	1.232,78	100	1.392,50	50	1.500,00	50	1.500,00	Setdakab Inspektorat Daerah
1	19	09	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tersedianya Laporan Inpres No 5 tahun 2004	dok	90	90	24,51	90	24,90	90	30,54	90	15,00	90	20,00	90	20,00	Setdakab Inspektorat Daerah

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab		
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)			
1		URUSAN WAJIB																	
1	19	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah. Kepegawaian dan Persandian																	
1	19	10	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	Meningkatnya jumlah tenaga pengawas & auditor terlatih	org	-	5	56,65	10	58,28	15	152,50	10	207,00	10	275,00	50	474,43	Inspektorat Daerah
1	19	11	Program Mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat	- Meningkatnya jumlah masyarakat yang membutuhkan konsultasi hukum	Org /thn	75	75	36,87	75	31,46	75	77,88	75	63,50	100	100,00	100	100,00	Setdakab (Bag. Hukum & Ham)
				- Meningkatnya peserta penyuluhan	Org /thn	1.000	1.000		1.000		1.000		1.500		1.500		1.500		
1	19	12	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya jumlah produk hukum yang ditetapkan :	Dok Dok		289,32		470,06		506,51		519,76		600,00		2.385,65	Setdakab (Bag. Hukum & Ham)	
				• Perda • Perbup		11 40	11 32		14 43		17 30		18 30		10 30		70 165		
1	19	13	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah	Meningkatnya jumlah Perda yang ditetapkan	Dok	11	11	5.605,64	14	7.085,86	20	11.629,64	15	8.237,30	10	8.500,00	70	41.058,44	Setwan
1	19	14	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	- Berkembangnya jumlah OPD sesuai kebutuhan :	Unit Unit Unit Unit Unit		128,013		63,78		102,95		164,00		300,00		300,0	Setdakab (Bag Organisasi & Pers.)	
				• Bagian Setdakab & Sekwan		11	11		12		12		12		12		12		
				• Badan		6	6		6		7		7		8		8		
				• Dinas		13	13		13		13		13		13		13		
				• Kantor/RSUD		5	6		6		6		6		6		6		
• Kecamatan	8	8		8		8		8		8		8							

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD penanggung jawab			
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.		Rp (jt)		
1		URUSAN WAJIB																	
1	19	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah. Kepegawaian dan Persandian																	
1	19	14	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	-Terciptanya Analisa Jabatan untuk mengsi formasi OPD	dok	-	-	-	-	-	-	-	-	1		1		Setdakab (Bag Organisasi & Pers)	
1	19	15	Program Pelayanan kehidupan beragama	Meningkatnya jumlah tokoh agama dan guru TPQ/TPSQ serta garin masjid yang dilatih : • Mubalig • Guru TPQ/TPSQ • Garin masjid	Org/ thn	50	50	50	50	50	50	75	75	75	75	75	75	Setdakab (Bag Adm Kesra)	
					Org/ thn	490	490	490	490	490	490	520	540	540	540	540	540		
					Org/ thn	50	50	50	50	50	50	75	75	75	75	75	75		
1	19	16	Program Pengembangan dan pembinaan kesehatan masyarakat	Meningkatnya penerima makanan tambahan	Sis- wa/ thn	7.455	7.455	1.047,01	7.455	647,15	7.455	875,44	7.750	893,46	8.000	1.000,00	8.000	1.000,00	Setdakab BPMPN
1	19	17	Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah	Meningkatnya jumlah sertifikat Prona yang diterbitkan	Sertifi- kat	146	698	49,18	16.191	26,48	-	-	-	-	500	150,00	500	150,00	Setdakab (Bag. Adm Pemerintahan)
1	19	18	Program Penyelesaian Konflik- konflik Pertanahan	Berkurangnya kasus konflik tanah	Kasus	4	1	788,83	1	97,62	1	1.677,75	1	1.302,00	0	2.000,00	0	2.000,00	Setdakab (Bag. Adm Pemerintahan)
1	20	19	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah/ Nagari	- Meningkatnya jml nagari/ desa - Meningkatnya kualitas SDM: • Aparatur Nagari/ Desa • BPN & LPM	Nag/ Desa	55	61	444,287	-	357,88	-	956,27	1	833,65	-	1.000,00	62	1.000,00	Setdakab BPMPN
					%	50	60		70	80		90	90	100		100	100		
					%	50	60		70	80		90	90	100		100	100		

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab		
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)			
1		URUSAN WAJIB																	
1	19	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah. Kepegawaian dan Persandian																	
1	19	20	Program Menyediakan Website dan Penggunaan ICT dalam Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa berbasis ICT	%	80	80	86,73	80	226,09	90	171,88	95	125,00	100	200,00	100	200,00	Setdakab (Bag Adm. Pembangunan)
1	19	21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatnya cakupan layanan informasi pembangunan	%	40	40	681,97	40	1.198,26	40	1.315,20	75	1.450,00	100	1.500,00	100	1.500,00	Setdakab (Bag. Humas & Protokol)
1	19	22	Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintah	Program Peningkatan penyelenggaraan pemerintah	%	50	-	-	75	971,55	85	1.189,12	100	1.631,58	100	1.750,00	100	1.750,00	Seluruh Kecamatan
1	19	23	Program Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban bencana	- Berkurangnya kasus bencana alam (longsor)	Kasus	14	14	-	8	547,81	4	104,47	0	368,72	0	500,00	0	500,00	BPBD
				- Berkurangnya kasus kebakaran	Kasus	19	21	-	13	-	-	8	-	4	-	0	-	0	-
1	19	24	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Optimalisasi penanganan bencana kebakaran	%	75	75	-	80	279,70	85	376,70	90	1.450,00	100	250,00	100	250,00	BPBD
1	19	25	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Berkurangnya kasus-kasus : • Pertikaian antar warga • Unjuk rasa	Kali	1	0	80,73	0	34,54	0	64,70	0	63,08	0	75,00	0	75,00	Kantor Kes-bangpol & Limas
						2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	19	26	Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahaan Tindak Kriminal	Berkurangnya kasus kriminal	Kasus	151	176	174,84	146	177,04	100	213,74	75	213,10	50	225,00	50	225,00	Kantor Satpol PP & Kesbangpol & Linmas

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD penanggung jawab				
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD			
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)		Targ.	Rp (jt)		
1		URUSAN WAJIB																	
1	19	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah. Kepegawaian dan Persandian																	
1	19	27	Program Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat	Berkurangnya kasus Pekat	Kasus	5	2	66,84	1	146,58	1	122,21	0	56,10	0	100,00	0	100,00	Kantor Satpol PP
1	19	28	Program Penataan Otonomi Daerah	Meningkatnya kerjasama antar Pemerintah daerah	MOU	2	-	-	5	129,33	1	78,21	-	-	1	150,00	7	357,54	Setdakab (Bag Adm. Pemerintah)
1	19	29	Program Fasilitasi pembentukan & penguatan modal BUMD	Terciptanya BUMD yang sehat	Persh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	1	200	Setdakab (Bag Adm. Perek.)
1	19	30	Program pengendalian dan evaluasi penerapan SPM (usulan program baru diluar Permendagri 13/2006)	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	skor	-	-	-	-	-	50-55	32,63	55-70	39,00	70-80	100,00	70-80	100,00	Setdakab (Bag Organisasi & Pers.)
1	20	Ketahanan Pangan																	
1	20	01	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan /Peternakan/Perika-	- Meningkatnya ketersediaan pangan utama : • Beras • Daging • Telur - Meningkatnya jml DMP - Meningkatnya jumlah cadangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Ton /thn	54.550	56.000	48.000	50.500	287,19	1.123,29	53.025	55.700	1.250,00	55.700	1.250,00	1.250,00	1.250,00	Badan P4KKP
					Ton /thn	1.815	1.987	2.035	2.100			2.165	2.225		2.225		2.225		
					Ton /thn	415	436	472	481			492	513		513		513		
					Nag/ Ds	10	13	13	14			15	16		16		16		
					ton	20	25	30	40			40	40		40		40		

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD penanggung jawab					
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)		Targ.	Rp (jt)			
1		URUSAN WAJIB																		
1	21	Pemberdayaan Masyarakat Desa																		
1	21	01	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	- Meningkatnya pengembalian pinjaman oleh anggota (IRR)	%	85	85	800,39	85	884,04	85	210,97	90	2.467,71	100	2.600	100	2.600	BPMPN	
				- Terbentuk dan berkembangnya BUM-Nagari	unit	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	10	-	-		
				- Meningkatnya jml tokoh adat yang dilatih	org	200	230	-	230	-	230	-	230	-	230	-	230	-	-	
				- Mengoptimalkan terbinanya lembaga adat	%	80	85	-	90	-	95	-	100	-	100	-	100	-	-	
1	21	02	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya proporsi swadaya :			668,87		697,63		863,88		861,75		850,00		850,00		BPMPN	
				• Partisipatif	%	45,42	45,42		45,42		45,42		45,42		55,00		55,00			
				• PNPM	%	31,25	31,25		31,25		31,25		31,25		45,00		45,00			
1	22	Statistik																		
1	22	01	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	Berkembangnya data statistik daerah :			114,71		222,15		160,20		190,00		300,00		300,00		Bappeda	
				• KDA	Dok/thn	1	1		1		1		1		1		1			
				• PDRB	Dok/thn	1	1		1		1		1		1		1			
				• Profil Daerah	Dok	-	-		1		-		-		-		1			
				• Kec. Dlm Angka	Dok	-	-		-		-		-		1		1			
1	23	Kearsipan																		
1	23	01	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip	Meningkatnya Arsip yang diselamatkan	%	10,50	10,50	41,70	25,00	81,33	50,00	454,87	75,00	289,61	100	325,00	100	325,00	Kantor Kearsipan, Dok. & Perps	

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD penanggung jawab				
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD			
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)		Targ.	Rp (jt)		
1		URUSAN WAJIB																	
1	24		Komunikasi dan Informatika																
1	24	01	Program Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa	- Meningkatnya cakupan layanan telekomunikasi pedesaan	%	80,00	88,52	48,54	88,52	29,97	95,00	92,79	95,00	225,20	100,00	300,00	100,00	300,00	Dishub Kominfo
				- Berkembangnya SKPD menggunakan SIM	SKPD	-	1		3		-		1		1		6		
1	26		Perpustakaan																
1	26	01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	- Meningkatnya jumlah pustaka dikelola masyarakat	unit	34	36	70,03	40	90,05	45	136,16	50	450,00	60	500,00	60	500,00	Kantor Kearsipan, Dok. & Perpustakaan
				- Meningkatnya jumlah anggota perpustakaan daerah	org	353	375		400		450		500		750		750		
2			URUSAN PILIHAN																
2	01		Pertanian																
2	01	01	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	- Meningkatnya jumlah kelompok tani yang berkualitas	Keltan	797	853	85,96	970	98,27	1.144	125,13	1.250	185,11	1.400	200	1.400	694,47	BP4KKP
2	01	02	Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan	- Meningkatnya kemampuan UP3HP	klpk	10	10	169,71	10	116,39	10	429,571	10	550,00	10	550,00	50	1.815,67	Distambun
				- Terbentuknya kerja-sama antara Gapoktan dengan pengusaha agribisnis	Nt. Kerjasama	-	-		1		-		1		-		2		
				- Tersedianya gudang komoditi	unit	-	-		2		-		-		-		2		

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD penanggung jawab			
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.		Rp (jt)		
2		URUSAN PILIHAN																	
2 01		Pertanian																	
2	01	03	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan/ Peternakan/Perikanan /Kehutanan	-Meningkatnya sarana penyuluh di Kec. (BPP Model) -Meningkatnya jumlah tenaga penyuluh	unit org	3 131	4 131	1.851,53	7 127	1.839,69	7 124	1.882,72	8 124	2.191,41	8 150	2.500,00	8 150	10.265,35	BP4KKP
2	01	04	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	-Meningkatnya produksi tanaman pangan unggulan; • Padi • Jagung • Ubi Kayu -Meningkatnya produksi tanaman hortikultura unggulan; • Manggis • Durian -Meningkatnya produksi perkebunan unggulan; • Karet • Kelapa Sawit • Coklat	Ton/thn Ton/thn Ton/thn Ton/thn Ton/thn Ton/thn Ton/thn Ton/thn	102.364 1.658 1.187 3.547 3.353 64.216 44.835 1.248	107.091 2.000 1.708 3.687 3.700 78.257 14.331 1.191	5.764,40 5.782,02 5.754,46	113.516 2.000 1.708 3.770 4.070 81.365 19.852 1.534	120.327 2.500 2.214 3.975 4.180 82.304 25.480 2.021	127.546 3.000 2.470 4.320 4.180 86.487 31.476 2.021	4.975,00 4.975,00 4.975,00 4.675 4.180 87.537 5.722 1.699	11.200,00 11.200,00 11.200,00 4.675 4.180 87.537 5.722 1.699	135.199 3.780 2.278 4.675 4.180 87.537 5.722 1.699	33.475,88 33.475,88 33.475,88 4.675 4.180 87.537 5.722 1.699	Distambun			

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											SKPD penanggung jawab	
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.		Rp (jt)
2		URUSAN PILIHAN															
2	01	Pertanian															
2	01	04	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	- Meningkatnya produktivitas tanaman unggulan; • Padi • Jagung • Ubi Kayu - Meningkatnya produktivitas tanaman hortikultura unggulan; • Manggis • Durian - Meningkatnya produktivitas perkebunan unggulan; • Karet • Kelapa Sawit • Coklat	Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha	5,00 5,88 24,22 25,60 36,00 2,79 3,00 0,80	5,06 5,90 24,40 25,60 36,00 2,79 3,00 0,80	5,10 6,00 24,50 26,60 36,00 2,89 4,00 1,00	5,20 6,10 24,70 26,50 37,00 2,89 5,00 1,20	5,754,46 4,975,00 11.200,00 5,40 6,30 25,00 27,00 37,50 3,00 6,00 1,30	4,975,00 11.200,00 5,40 6,30 25,00 27,5 38,00 3,00 7,00 1,30	11.200,00 5,40 6,30 25,00 27,5 38,00 3,00 7,00 1,30	33,475,88 5,40 6,30 25,00 27,5 38,00 3,00 7,00 1,30			Distambun	
2	01	05	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/ Perkebunan	- Meningkatnya panjang JUT - Meningkatnya jalan produksi - Meningkatnya cakupan JIDES - Meningkatnya jml embung	Km Km Ha unit	50 25 1.500 8	21 6 757 1	1.625,62 8 2.212,37 5	11 16 700 8	2.083,52 10 9.131,00 5	10 10 700 5	10 10 700 5	10.000,00 110 5.057 24	25.052,51 110 5.057 24		Distambun	

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab		
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)			
2		URUSAN PILIHAN																	
2 01		Pertanian																	
2	01	06	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan			1.693,04		1.249,71		2.688,00		4.766,00		5.500,00		15.896,75	Disnakkan	
			• Daging sapi/kerbau	Ton/thn	404	567		575		585		595		600		600			
			• Daging kambing/domba	Ton/thn	47	50		60		65		70		75		75			
			• Daging unggas	Ton/thn	1.364	1.370		1.400		1.450		1.500		1.550		1.550			
			• Telur unggas	Ton/thn	429	430		440		450		460		470		470			
2	01	07	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunnya tingkat kematian ternak	%	10	9	141,22	8	194,03	7	299,00	6	325,00	5	355,00	5	1.314,25	Disnakkan
2	01	08	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatnya jumlah ternak yang terjual	Ekor/thn	15.000	17.000	50,00	19.000	102,87	21.000	256,00	23.000	500,00	25.000	700,00	25.000	2.108,87	Disnakkan
2 02		Kehutanan																	
2	02	01	Program Pemanfaatan potensi sumber daya hutan	- Berkembangnya luas hutan nagari/desa dan HKM	ha	-	-	-	-	34,26	6.500	59,05	12.000	120,00	12.000	140,00	12.000	353,31	Dishut
			- Pembangunan HTR		ha	-		2.550		-	-			-		-	2.550		
2	02	02	Program Peningkatan pelayanan dan pemanfaatan hutan dan industri hasil hutan	- Meningkatkan produksi pemanfaatan hasil hutan - Meningkatkan pelayanan dan pemanfaatan hasil kayu & non kayu	Komoditi jenis	- 1	1 2	100,00	2 3	159,45	1 4	53,66	2 4	135,53	4 4	350,00	4 17	798,64	Dishut

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD penanggung jawab				
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015			Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD			
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)		Targ.	Rp (jt)		
2		URUSAN PILIHAN																	
2	02	Kehutanan																	
2	02	03	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	- Berkurangnya perambahan hutan dari <i>illegal logging</i>	Kasus	5	12	144,95	3	489,07	3	496,20	3	672,28	3	370,00	3	2.172,50	Dishut
				- Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kebakaran	Titik api	4	10		9		19		10		10		58		
				- Meningkatnya pengamanan hutan berbasis masyarakat	Nagari	1	2		1		1		1		1		6		
2	02	04	Program Rehabilitasi Hutan dan lahan	Meningkatnya jumlah hutan dan lahan yg direhabilitasi	ha	1.272	671	1.996,23	1.656	4.926,60	1.650	2.542,00	1.579	4.737,00	1.580	4.740,00	7.136	18.941,83	Dishut
2	02	05	Program Perencanaan dan Pengembangan	- Terbentuknya KPHL model;	unit	-	-	140,06	1	524,78	-	1.080,22	-	2.660,00	-	1.150,00	1	5.555,60	Dishut
				- Meningkatnya pemantapan kwsn. hutan :															
				• Tata batas	Km	-	-		-		141		-		-		141		
				• Perubahan fungsi kawasan hutan	ha	221.192	186.519		185.908		186.227		186.227		172.227		172.227		
				- Meningkatnya pengelolaan kws. hutan oleh KPHL	ha	-	-		150.492	524,78	-	1.080,22	-	2.660,00	-	1.150,00	150.492	5.555,60	Dishut

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab	
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD			
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)		
2		URUSAN PILIHAN																
2 03		Energi dan Sumber Daya Mineral																
2 03 01	Program Pembinaan dan Pengawasan tambang	Meningkatnya produksi hasil tambang	Ton/thn	159.543	339.961	129,04	271.692	184,12	250,00	224,32	275.000	309,46	300.000	350,00	300.000	350,00		Distanben
2 03 02	Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi merusak Lingkungan	Berkurangnya aktivitas Penambangan Tanpa Izin	ha	25	22	80,28	20	65,03	17	66,38	12	165,96	5	200,00	5	200,00		Distanben
2 03 03	Program Studi Geologi dan Sumberdaya Mineral	Meningkatnya luas lahan studi geologi sumber daya mineral	ha	-	-	-	-	-	50	98,00	150	227,00	300	400,00	300	725,00		
2 03 04	Program Pengembangan dan Pembinaan Bidang Ketenagalistrikan	- Meningkatkan jumlah PLTMH - Meningkatkan cakupan energi listrik pedesaan	unit %	1 84,23	1 92,57	1.014,52	1 95,17	418,43	2 98,00	1.085,78	3 99,00	1.416,51	4 100,00	1.600,00	4 100,00	1.600,00		Distanben
2 04		Pariwisata																
2 04 01	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jumlah even promosi wisata	even	1	2	58,75	2	511,28	2	612,30	3	477,52	4	600,00	4	600,00		Disparsenibudpora
2 04 02	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	- Tersedianya RIPPDA - Meningkatkan jumlah nagari/ desa wisata	Perda Nag /Desa	- 1	-	159,56	-	130,96	-	59,74	-	-	1 2	1 3	1 3			Disparsenibudpora
2 05		Kelautan dan Perikanan																
2 05 01	Program Pengembangan Budaya Perikanan	Meningkatnya produksi budi daya perikanan	ton	5.078	6.130	2.113,44	7.662	2.659,65	9.578	3.613,00	11.856	3.690,00	12.711	3.825,00	12.711	15.901,09		Disnakan

*) Berdasarkan realisasi/capaian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome/output)	Sat.	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2010)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD penanggung jawab		
					2011*)		2012*)		2013		2014		2015		Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD				
					Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)	Targ.	Rp (jt)			
2		URUSAN PILIHAN																	
2	05	Kelautan dan Perikanan																	
2	05	02	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	- Meningkatnya jml pasar ikan higienis	unit	-	1	474,32	1	515,01	2	624,00	1	399,00	1	439,00	7	2.451,33	Dsnakkan
				- Meningkatnya jml pengolahan perikanan	kpk	-	5		2		5		1		1		13		
2	06	Perdagangan																	
2	06	01	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Menurunnya tingkat pelanggaran atas barang yang diedarkan sesuai peraturan perundang-undangan	%	75,00	70,00	71,81	65,00	97,24	60,00	124,00	55,00	150,00	50,00	250,00	50,00	250,00	Diskopperindag
2	06	02	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	%	4,47	5,12	3.353,93	5,83	2.527,48	6,00	3.273,68	6,23	3.636,60	6,54	4.600,00	6,54	4.600,00	Diskopperindag
2	07	Industri																	
2	07	01	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya laju pertumbuhan PDRB sektor Industri	%	5,04	5,91	224,91	5,22	250,74	5,50	226,67	5,83	257,40	6,11	400,00	6,11	400,00	Diskopperindag
2	07	02	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Terwujudnya industri pengolahan sektor pertanian	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.000	1	5.000	Diskopperindag	
2	08	Ketransmigrasian																	
2	08	01	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya luas kawasan transmigrasi	ha	28.324	-	94,97	-	77,61	29.074	314,10	29.823	382,39	30.573	500,00	30.573	500,00	Dissosnakertrans

*) Berdasarkan realisasi/capaian

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung tahun 2010-2015 ini dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sijunjung tahun 2005-2025 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah pada tahun 2015. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan dan mengisi kekosongan RKPD setelah berakhirnya dokumen RPJMD ini berakhir.

Pedoman masa transisi dimaksud bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD Kabupaten Sijunjung ini berakhir dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilukada pada tahun 2015. Masa transisi tersebut dimaksudkan agar tidak terdapat ruang kosong dan diskontinuitas bagi proses pembangunan di Kabupaten Sijunjung. Program transisi ini tetap mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini dalam upaya menuntaskan permasalahan dan isu strategis pembangunan di Kabupaten Sijunjung.

Melalui adanya pedoman transisi ini dapat berfungsi sebagai dokumen perencanaan pembangunan guna mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah. RPJMD transisi akan berfungsi sebagai menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sijunjung pada tahun transisi, juga sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah untuk mewujudkan tujuan bersama. RPJMD transisi semacam ini juga bisa berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Sijunjung dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam tahun transisi (2016).

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah, maka perlu adanya prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

1. Dokumen RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 ini, selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2015 dan masa transisi tahun 2016;

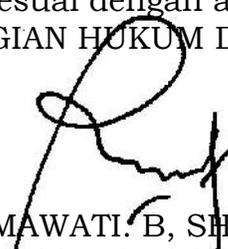
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung hendaknya melakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategi (Renstra) yang telah disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2015 dan pogram transisi tahun 2016;
3. Seluruh SKPD berkewajiban untuk menyusun kegiatan prioritas berdasarkan program pembangunan yang terdapat dalam Dokumen RPJMD ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi untuk mendukung pencapaian arah kebijakan pembangunan;
4. Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;
5. Dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 setiap SKPD, perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015 dan melakukan sosialisasi baik kepada aparatur Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Perguruan Tinggi dan masyarakat sipil;
6. Pencapaian target indikator kinerja daerah dapat diwujudkan tergantung dari kondisi tersedianya sumber daya yang memadai serta situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif; dan
7. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2010-2015, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut :
 - a. Kepada Bappeda Kabupaten Sijunjung menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan pada masing-masing SKPD sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.
 - b. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya.
 - c. Kepala Bappeda Kabupaten Sijunjung menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada huruf (b).
 - d. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (c) menjadi bahan pertimbangan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Muaro Sijunjung, 15 Januari 2014
BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


ERMAWATI. B, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19660603 199803 2 001